

**INVENTARIS ARSIP
KABINET PRESIDEN RI
1950-1959**

Disusun Oleh:

Eni Yuliasuti
Isye Jumelar
Iyos Rosidah
Sujono

ARSIP NASIONAL RI
JAKARTA
1995

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG SEJARAH

Dengan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka disusunlah suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar Negara. Pemerintah Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidential, yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Pada saat Presiden Republik Indonesia membentuk kabinet pemerintah pertama, bersamaan itu pula dibentuk sebuah kabinet Presiden yang berfungsi membantu Presiden dalam menjalankan ketatausahaan negara dan pemerintahan.

Koleksi arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia diserahkan oleh Sekretariat Negara RI kepada Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 1973.

A. Lembaga

Selama berdirinya kabinet Presiden dapat dicari asal usulnya sejak pembentukan kabinet pertama Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, ketika terbentuk kabinet presidentiil. Masa Kabinet Presidentiil pertama jabatan Sekretaris Negara lahir dan menjalankan fungsi utama pelaksana kebijakan Presiden dalam menyelenggarakan segala sesuatu yang menyangkut urusan Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menteri, baik dalam lapangan perundang-undangan maupun ketatausahaan pemerintah. Fungsi tersebut berjalan hingga dibentuknya Kabinet Sjahrir pertama, yang menjalankan pemerintahan dengan sistem ministerial. Sehubungan dengan perubahan sistem ini sebetulnya tugas sekretaris Negara sebagai penyelenggara ketatausahaan negara dan pemerintahan tetap beralih kepada Pemerintah, namun berhubung beberapa hal tugas itu tetap diselenggarakan oleh Sekretaris Negara. Tugas tersebut berlangsung terus hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat, ketika tugas kesekretaritan negara beralih kepada Menteri Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Negara mengalami penciptaan fungsi dan menjadi Kabinet Presiden yang berfungsi sebatagai pembantu Presiden yang bersifat administratif. 1)

Kabinet Presiden ini menjalankan fungsi administratif hingga berakhirnya pemerintahan sistem pemerintahan Parlementer yaitu pada tahun 1959. Kabinet ini dihapuskan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 221/1960 dan peranannya digantikan oleh Sekretariat Negara.

Kabinet Presiden Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sekretaris Presiden dan pegawai lain. Kabinet Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menyelesaikan pengesahan atau penetapan perundang-undangan Pemerintah;
2. menyelenggarakan segala surat menyurat dan kontak Presiden sebagai Kepala Negara dengan Perdana Menteri dan instansi lain;
3. mengumpulkan segala bahan-bahan dari Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, kementerian-kementerian dan instansi lain mengenai semua rlapangan pemerintahan;
4. menyediakan segala sumber untuk Presiden dan Wakil Presiden mengenai hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mengetahui, menyelami, menyaring dan mempelajari aliran-aliran/pikiran-pikiran dalam masyarakat;
5. membuat sari laporan dari bahan-bahan yang terkumpul;
6. an membantu kegiatan rutin Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan negara maupun urusan pribadi. 2)

B. ARSIP

1. Kondisi Fisik

Arsip Kabinet Presiden diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dalam keadaan tidak teratur yaitu sistem penataan pada masa dinamisnya sudah tidak dikenali lagi, bahkan diserahkan dalam keadaan karungan. Tercampur dengan arsip koleksi lain, seperti: koleksi arsip Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia, koleksi arsip Uni Nederland-Indonesia dan lain-lain. Jumlah arsip kurang lebih 90 m lari atau 900 boks kecil yang meliputi kurun waktu 1950 sampai 1959.

2. Riwayat Penataan

Pengaturan arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia dikerjakan oleh beberapa kelompok, bermula dari kelompok kerja pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang menghasilkan Daftar Arsip. Namun penataan pada tahap ini hanya dapat dikerjakan sebagian dari koleksi tersebut, dan penataannya berdasarkan jenis, misalnya: Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Perintah, dan sebagainya.

Pekerjaan selanjutnya dikerjakan oleh kelompok kerja peserta Program Diploma II Ilmu Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dalam rangka pembuatan laporan

praktek kerja nyata. Mereka melanjutkan pekerjaan penataan arsip yang telah dikerjakan oleh kelompok pegawai Arsip Nasional, dan pekerjaan lebih lanjut selain melakukan pemilahan arsip berdasarkan pada Prinsip Asal-Usul (Principle of Provenance) yaitu memilah arsip lain dengan arsip milik Kabinet Presiden. Karena adanya keterbatasan waktu Praktek Kerja Nyata, maka penanganan arsip pada tahap inipun masih terdapat sisa yang belum dikerjakan. Penataan ini menghasilkan suatu Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia, yang disusun berdasarkan masalah.

Kelompok kerja terakhir dilakukan oleh pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: Sujono, Nunung Sumiyati, Isye Jumenar, Iyos Rosidah dan Eni Yuliasuti hingga selesainya Inventaris Arsip ini, meskipun dalam hal ini Nunung Sumiyati hanya berperan sampai pada tahap deskripsi kartu. Penataan dilakukan mula-mula dengan menangani arsip-arsip yang belum dikerjakan pada tahap sebelumnya. Volume arsip tersebut kurang lebih 45 m lari atau 450 boks kecil. Selanjutnya dilakukan penyusunan Inventaris arsip dengan penyusunan ulang terhadap arsip yang ada dalam Inventaris Arsip Lama, untuk selanjutnya disatukan dengan hasil deskripsi kartu yang dikerjakan, sehingga kemudian tersusun Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia Periode 1950-1959 yang sekarang. Inventaris Arsip ini disusun berdasarkan masalah yang pemilahannya didasarkan pada fungsi organisasi Kabinet Presiden Republik Indonesia tersebut.

II. PENGATURAN

Untuk penyelesaian Inventaris Arsip Kabinet Presiden 1950-1959 ini proses kerja dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

1. memilah arsip dengan non arsip;
2. memilah arsip sesuai dengan Prinsip Asal-Usul (Principle of Provenance);
3. memberkaskan arsip dan mendeskripsikan pada kartu-kartu lepas;
4. menyusun skema arsip sesuai dengan kelompok informasinya, termasuk penggabungan berkas yang berisi informasi sama;
5. melakukan fiches manuvre berdasarkan skema, termasuk hasil deskripsi pada Inventaris Arsip yang dikerjakan oleh peserta program Diploma II Ilmu Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, untuk kemudian diberikan nomor definitif sesuai penempatannya pada skema;

6. memindahkan deskripsi kartu secara keseluruhan pada halaman Inventaris Arsip sesuai dengan nomor urutnya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan nasehatnya, khususnya kepada Bapak Drs. Sauki Hadiwardoyo sebagai pembimbing, hingga terselesaikannya Inventaris Arsip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1). Berkas No. 2352 tentang Struktur Organisasi Kabinet Presiden Republik Indonesia.
- 2). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 221 tahun 1960

Jakarta, Maret 1995

INVENTARIS ARSIP KABINET PRESIDEN RI 1950 1959

| I. BAGIAN KETATANEGARAAN DAN UMUM | No. Inv | Deskripsi | Tingkat perkembangan | Jumlah |
|---|---------|---|-------------------------|----------|
| A. PERATURAN PERUNDANGAN | | | | |
| | 1. | Undang-Undang, tanggal 29 Agustus 1951 - 4 Juni 1959 | salinan | 7 sampul |
| | a. | 29 Agustus - 6 Desember 1951 | | 1 sampul |
| | b. | 5 Februari - 30 Desember 1952 | | 1 sampul |
| | c. | 7 Januari - 29 Desember 1953 | | 1 sampul |
| | d. | 12 Maret 1954 - 8 Agustus 1955 | | 1 sampul |
| | e. | 7 Februari - 31 Desember 1956 | | 1 sampul |
| | f. | 6 Februari - 13 Desember 1957 | | 1 sampul |
| | g. | 1 Agustus 1958 - 4 Juni 1959 | | 1 sampul |
| | 2. | Undang-Undang, tanpa tanggal 1950 - Januari 1959 | rancangan | 5 sampul |
| | a. | tanpa tanggal 1950 - 8 Agustus 1952 | | 1 sampul |
| | b. | 14 Januari - 3 Maret 1953 | | 1 sampul |
| | c. | 6 Maret 1953 - 14 Juli 1954 | | 1 sampul |
| | d. | 20 Oktober 1954 - 5 Nopember 1957 | | 1 sampul |
| | e. | 17 September 1958 - Januari 1959 | | 1 sampul |
| | 3. | Undang Undang Darurat, tanggal 23 Juli 1950 - 17 September 1958 | salinan | 5 sampul |
| | a. | 23 Juli 1950 - 18 Oktober 1951 | | 1 sampul |
| | b. | 2 Februari - 31 Desember 1952 | | 1 sampul |
| | c. | 7 Januari - 16 Oktober 1953 | | 1 sampul |
| | d. | 27 Desember 1954 - 14 Nopember 1956 | | 1 sampul |
| | e. | 16 Januari 1957 - 17 September 1958 | | 1 sampul |
| | 4. | Undang Undang Darurat, tanggal 28 Nopember 1950 - 24 April 1954 | rancangan | 1 sampul |
| | 5. | Peraturan Pemerintah, tanggal 22 Juli 1950 - 28 September 1959 | salinan | 6 sampul |
| | a. | 22 Juli 1950 - 23 Nopember 1951 | | 1 sampul |

| | | | | |
|------|--------------|---|-----------|-----------|
| | b. | 5 Januari - 8 Desember 1952 | | 1 sampul |
| | c. | 7 Januari - 21 Desember 1953 | | 1 sampul |
| | d. | 27 Januari 1954 - 24 Desember 1955 | | 1 sampul |
| | e. | 21 Januari - 31 Desember 1956 | | 1 sampul |
| | f. | 16 Januari 1957 - 28 September 1959 | | 1 sampul |
| | 6. | Peraturan Pemerintah, tanggal 24 Oktober 1950 - 17 September 1958 | rancangan | 1 sampul |
| | 7. | Surat Keputusan Presiden RI, tanpa tanggal Juli 1950 - 21 Desember 1957 | salinan | 9 sampul |
| | a. | Juli - 28 Desember 1950 | | 1 sampul |
| | b. | Januari - 27 Desember 1951 | | 1 sampul |
| | c. | 2 Januari - 28 Juni 1952 | | 1 sampul |
| | d. | Juli - 8 Desember 1952 | | 1 sampul |
| | e. | 16 Januari - 31 Desember 1953 | | 1 sampul |
| | f. | 9 Januari - 17 Desember 1954 | | 1 sampul |
| | g. | 20 Januari - 31 Desember 1955 | | 1 sampul |
| | h. | 3 Maret - 24 Nopember 1956 | | 1 sampul |
| | i. | 7 Januari - 21 Desember 1957 | | 1 sampul |
| | 8. | Surat Keputusan Presiden RI, tanggal 29 Desember 1951 - Januari 1954 | rancangan | 1 sampul |
| | | | | |
| B. | ADMINISTRASI | | | |
| | 9. | Surat Keputusan Presiden RI, tanggal 29 Desember 1951 - Januari 1954 | salinan | 19 sampul |
| | a. | Kem. PP & K, 14 Agustus 1950 - 21 Juni 1959. | | 1 sampul |
| | b. | Kem. Keuangan, 29 Agustus 1950 - 3 Agustus 1957. | | 1 sampul |
| | c. | Kem. Dalam Negeri, 7 September 1950 - 1 Desember 1957. | | 1 sampul |
| | d. | Kem. Perburuhan, 16 September 1950 - 23 April 1957. | | 1 sampul |
| | e. | Kem. Agama, 29 September 1950 - 21 Nopember 1957. | | 1 sampul |
| | f. | Kem. Pertanian, 8 Desember 1950 - 21 Nopember 1957. | | 1 sampul |
| | g. | Kem. Perdag & Perind, 27 Desember 1950 - 30 Nopember 1957. | | 1 sampul |
| | h. | Kem. Hankam, 28 Desember 1950 - 11 Oktober 1957. | | 1 sampul |
| | i. | Kem. Perhubungan, 6 Januari 1951 - 6 Desember 1957. | | 1 sampul |
| | j. | Kem. PU & T, 14 Pebruari 1951 - 9 Nopember 1957. | | 1 sampul |
| | k. | Kem. Penerangan, 21 Pebruari 1951 - 17 Desember 1957. | | 1 sampul |
| | l. | Kem. Kesehatan, 8 Agustus 1951 - 11 Nopember 1957. | | 1 sampul |
| | m. | Kem. Perekonomian, 2 Nopember 1951 - 9 April 1957. | | 1 sampul |

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| n. | Kementerian Urusan Pegawai, 13 Nopember 1951 - 11 Pebruari 1958. | | 1 sampul |
| o. | Kementerian Sosial, 8 Desember 1951 - 8 Oktober 1957. | | 1 sampul |
| p. | Kementerian Kehakiman, 17 Januari 1952 - 22 Oktober 1957. | | 1 sampul |
| q. | Kementerian Agraria, 20 Desember 1953 - 14 Juni 1957. | | 1 sampul |
| r. | Kementerian lain, 1 Januari 1954 - 26 Desember 1957. | | 1 sampul |
| s. | Kementerian Luar Negeri, 27 Maret 1956 - 3 Desember 1957. | | 1 sampul |
| 10. | Surat Keputusan Menteri, tanggal 4 September 1950 - 15 Oktober 1958 tentang penunjukan dan pengiriman delegasi Republik Indonesia ke luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional dan sebagai duta RI di luar negeri. | salinan | 4 sampul |
| a. | Menlu, 4 September 1951 - 29 Oktober 1957. | | 3 sampul |
| b. | Menteri-menteri lain (al. Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan), 14 Oktober 1950 - 15 Oktober 1958 | | 1 sampul |
| 11. | Surat-surat tanggal 5 September 1950 - tanpa tanggal tahun 1955 tentang timbang terima jabatan tinggi dari beberapa Kementerian. | tembusan | 1 sampul |
| 12. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 September 1950 - 10 Desember 1959 tentang tuntutan peninjauan kenaikan gaji. | tembusan | 1 sampul |
| 13. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 September 1950 - 13 Nopember 1959 tentang permohonan peninjauan pemberhentian pegawai dan hak pensiun. | tembusan | 1 sampul |
| 14. | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan tanggal 9 Oktober 1950 - 12 Pebruari 1959 tentang penangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Kementerian-kementerian. | salinan | 1 sampul |
| 15. | Perorangan: surat-surat tanggal 11 Oktober 1950 - 25 Nopember 1957 tentang permohonan lamaran pekerjaan pada beberapa instansi pemerintah. | salinan | 1 sampul |
| 16. | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 20 September 1950 - 27 Juli 1959 tentang masalah pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan mutasi pegawai. | tembusan | 1 sampul |
| 17. | Kabinet Presiden RI: proses verbal tanggal 21 Nopember 1950 tentang timbang terima kepala bagian keuangan dan urusan pegawai sekretariat delegasi RI Kementerian Luar Negeri, dari Mas Suhardjadiredja kepada Mardjohan dan Sukirman, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 18. | Perdana Menteri RI kepada Menteri Perhubungan: surat tanggal 14 Desember 1950 tentang usul pengangkatan Komisaris Indonesia pada GIA. | tembusan | 1 lembar |
| 19. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tt tahun 1950 - 1957 tentang pengangkatan dan kenaikan pangkat pegawai tinggi Pemerintah RI. | asli | 1 sampul |
| 20. | Guru-guru Sekolah Lanjutan Kota Surakarta: resolusi tanggal 17 Januari 1951 tentang protes terhadap PP No. 22778/C, tanggal 30 Nopember 1950 mengenai jumlah jam bekerja untuk guru-guru. | stensilan | 1 lembar |
| 21. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 28 Januari 1951 - 1 Nopember 1955 tentang penghargaan pegawai | tembusan | 1 sampul |
| 22. | Kepala Kantor Urusan Pegawai: Surat Edaran tanggal 1 April 1951 - 6 Desember 1955 tentang masa kerja sebagai pegawai pemerintah. | salinan | 1 sampul |
| 23. | Kementerian Luar Negeri: daftar tanggal 1 April 1951 - 22 Agustus 1956 tentang nama-nama pegawai perwakilan RI di luar negeri. | tembusan | 1 sampul |
| 24. | Kepala Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar Rayon XV, Banyumas kepada Kepala KUDP Pusat: surat tanggal 3 Mei 1951 tentang syarat-syarat mengikuti screening, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 25. | Perorangan: surat-surat tanggal 15 Mei 1951 - 20 April 1953 tentang permohonan pensiun, dengan lampiran. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 26. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 17 Mei 1951 - 15 Nopember 1957 tentang permohonan peninjauan status sebagai pegawai negeri. | tembusan | 2 sampul |
| 27. | R. Hoetapea cs kepada R.P. Saroso, Menteri Urusan Pegawai: surat tanggal 21 Mei 1951 tentang pemandangannya terhadap persoalan pegawai honorarium, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 28. | Menteri Urusan Pegawai: Surat Edaran tanggal 23 Mei 1951 tentang susunan pegawai dari tiap-tiap kementerian dan instansi lain. | stensilan | 1 lembar |
| 29. | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 15 Juni 1951 tentang tuntutan diadakan ujian (eksamen) bagi pejabat pada jabatan yang dipangkunya. | asli | 1 lembar |
| 30. | Kepala Urusan Pegawai: Surat Keputusan-surat keputusan tanggal 18 Juni 1951 - 14 Juli 1957 tentang peraturan kerja lembur. | salinan | 5 lembar |
| 31. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Juni, 23 Oktober 1951 tentang sumpah pegawai negeri, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |

| | | | |
|-----|--|------------|----------|
| 32. | Kementerian Perekonomian kepada PM: surat tanggal 10 Juli 1951 tentang distribusi bagi pegawai negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 33. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 20 Juli 1951 - 18 Januari 1955 tentang permohonan rehabilitasi atas pemecatan pegawai. | tembusan | 1 sampul |
| 34. | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 23 Juli 1951 - asli 3 April 1956 tentang penolakan terhadap pemutasian pegawai | | 1 sampul |
| 35. | Menteri Luar Negeri: kepada Kabinet Presiden RI: daftar tanggal 1 Agustus 1951, 16 Januari 1958 tentang pegawai diplomatik/konsuler dan kanselarai pada perwakilan RI di luar negeri. | stensilan | 2 sampul |
| 36. | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 9 Oktober 1951 - 28 September 1959 tentang tuntutan pemberian tunjangan bagi pegawai negeri. | asli | 1 sampul |
| 37. | Pakoe Boewono XII kepada Presiden RI: surat tanggal 12 Oktober 1951 tentang civiele lijs, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 38. | Ketua Lembaga Missie Reklasering Seluruh Indonesia: Surat Penetapan No. 1/MM tanggal 17 Januari 1952 tentang penetapan Imam Sudjai sebagai Kepala Badan Executif Lembaga Missie Reklasering Seluruh Indonesia. | tembusan | 1 lembar |
| 39. | Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan tanggal 22 Pebruari 1952 - 9 Nopember 1957 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Dewan Kurator pada Akademi Dinas Luar Negeri di Jakarta. | salinan | 1 sampul |
| 40. | Kabinet Presiden RI: Surat keterangan tanggal 3 Maret 1952 tentang S. Josodiningrat pernah menjabat Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet Syahrir I, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 41. | Kabinet Presiden RI: kepada Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 29 Maret 1952 tentang pemberian surat keterangan H. Rasjidi sewaktu menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 42. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Ketua DPR : surat tanggal 9 April 1952 tentang tugas Mr. Soejono Hadinoto dan Dr. Abu Hanifah, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 43. | Kabinet Presiden RI kepada Kadarman: surat tanggal 16 April 1952 tentang Surat Keputusan uang tunggu, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 44. | Kementerian Keuangan: Kawat tanggal 29 April 1952 tentang PP bagi pegawai negeri WNI keturunan Asing. | tembusan | 1 lembar |
| 45. | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Urusan Pegawai Kantor Dana Pensiun: surat tanggal 3 Mei 1952 tentang surat keterangan tanda taat pada Pemerintah, pegawai Sekretariat Negara, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 46. | Kepala Kantor Pusat Statistik: surat tanggal 10 Mei 1952 tentang pegawai pemerintah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 47. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Dalam Negeri: surat-surat tanggal 26 Mei, 13 Agustus 1952 tentang pemberhentian Mr. Datuk Djamin, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 48. | Menteri Agama kepada Direktur Kabinet Presiden RI: Kartu legitimasi tanggal 5 April 1952 bagi Menteri Agama, disertai surat. | asli | 1 lembar |
| 49. | Organisasi massa kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 14 Mei 1952 - 5 Oktober 1957 tentang tuntutan terhadap masalah pemberhentian pegawai. | asli | 1 sampul |
| 50. | Kepala Kantor Urusan Pegawai: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 6 Juni 1952 - 4 Desember 1957 tentang pemberian pensiun. | salinan | 1 sampul |
| 51. | Kementerian Keuangan: Surat-surat pemberitahuan tanggal 25 Juni, 28 Agustus 1952 tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. | stensilan | 2 lembar |
| 52. | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 16 Juli 1952 - 29 Desember 1957 tentang tuntutan terhadap undang-undang pemerintah pemberian pensiun dan ganti kerugian. | asli, tindasan | 1 sampul |
| 53. | Kabinet Presiden RI: Daftar tanggal 26 September 1952 tentang nama para bekas menteri yang telah mendapat tunjangan menurut KEPPRES. | stensilan | 2 lembar |
| 54. | Walikota Jakarta Raya kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 8 Oktober 1952 tentang pembebasan R. Budiarto Tjokrodiningrat, sebagai pemegang protokol dan public relations Kota Praja Jakarta Raya. | asli | 1 lembar |
| 55. | Kabinet Presiden RI: telegram-telegram tanggal 17 Nopember 1952 - 20 Oktober 1956 tentang penugasan pejabat militer. | asli | 3 lembar |
| 56. | Kabinet Presiden RI: Daftar nama pegawai negeri golongan VI/d ke atas dalam tahun 1953, tt 1953. | stensilan | 5 lembar |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 57. | Kantor Urusan Pegawai kepada semua menteri dan lain-lain pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri: Daftar tanpa tanggal 1953 tentang penempatan kembali pegawai yang diberi uang tunggu, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 58. | Kabinet Perdana Menteri RI: surat tanggal 13 Januari 1953 tentang perubahan pimpinan LAAPLN, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 59. | Kabinet Perdana Menteri RI: surat tanggal 7 Februari 1953 tentang usul-usul untuk Dewan Urusan Pegawai, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 60. | Soeroso, Menteri Urusan Pegawai: surat tanggal 19 Pebruari 1953 tentang beberapa hal mengenai pemberian hukuman jahatan, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 61. | Sekretaris Dewan Menteri: Daftar tanggal 4 Maret 1953 tentang nama pegawai Kementerian Luar Negeri mulai coursellor ke atas, disertai pengantar. | stensilan | 3 lembar |
| 62. | Ketua Panitia Negara Urusan Statistik: Surat Keputusan No. 4224/53/1.2.2 tanggal 26 Maret 1953 tentang penunjukan beberapa orang sebagai pembantu pada Sekretariat Panitia Negara Urusan Statistik | stensilan | 1 lembar |
| 63. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1 April - 4 Mei 1953 tentang daftar formasi pegawai negeri warga negara. | tembusan | 4 lembar |
| 64. | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden RI: surat tanggal 6 Mei 1953 tentang usul peninjauan kembali PP No. 19/53 mengenai istilah pegawai negeri, berhubung dengan UU No. 20/52, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 65. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Mei 1953 - 7 Nopember 1957 tentang permintaan perlindungan terhadap status pegawai. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 66. | E. Karundeng, Kepala Urusan Risalah DPR RI: surat tanggal 24 Juni 1953 tentang keterangan Surodikromo benar-benar bekerja di Kantor Road van Nederlandsch-Indie. | asli | 1 lembar |
| 67. | Kepala Kantor Urusan Pegawai: Surat Edaran, tanggal 13 Juli 1953 tentang perjalanan-perjalanan ke luar negeri, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 68. | Kepala Kantor Urusan Pegawai, perorangan: surat-surat tanggal 14 September 1953 - 18 Oktober 1955 tentang istirahat luar negeri dan istirahat karena hamil. | stensilan | 1 sampul |

| | | | |
|-----|--|------------------|----------|
| 69. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Sekretaris Dewan Menteri: surat tanggal 15 September 1953 tentang usul untuk mengangkat Mr. Sumardi Mangunkusumo sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 70. | Direksi BNI kepada Menteri Keuangan: nota tanggal 1 Oktober 1953 tentang tenaga pimpinan Bankwezen, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 71. | Pengurus Besar Persatuan Pegawai Bank Negara Indonesia Jakarta kepada DP BNI: surat pernyataan tanggal 6 Oktober 1953 tentang desakan penghargaan terhadap fikiran dan tenaga pegawai. | tembusan | 1 lembar |
| 72. | Organisasi massa dan politik: surat pernyataan tanggal 12 - 20 Oktober 1953 tentang mutasi pejabat daerah. | asli | 6 lembar |
| 73. | Panitera Pengadilan Tinggi di Jakarta : surat tanggal 12 Oktober 1953 tentang penyempahan atas nama Sudana Tjakraganda Subrata sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi di Jakarta, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 74. | Persatuan Pegawai Bank Negara Indonesia : resolusi tanggal 3 Nopember 1953 tentang lowongan direktur Bank Negara Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 75. | Sekretaris Negara : Surat Keputusan tanggal 25 Nopember 1953 tentang pembebasan Mr. Tamzil sebaga Wakil Sekretaris Negara, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 76. | Kepala KUP: surat-surat tanggal 23 Desember 1953 tentang penyampaian salinan SK mengenai penyerahan masa kerja beberapa pegawai bawahan, | asli | 1 sampul |
| 77. | Kementerian Agraria RI kepada Kabinet Presiden RI: pemberitahuan tanpa tanggal 1954 tentang timbang terima pimpinan Kementerian Agraria. | asli | 1 lembar |
| 78. | Doerasoel Mohamad Azis kepada ketua seksi perburuhan DPR: surat, tanggal 1 Februari 1954 tentang sikap terhadap para pegawai pemerintah yang melanggar peraturan-peraturan kerja yang berlaku (birokrasi kepegawaian). | tindasan | 1 lembar |
| 79. | Kabinet Presiden RI kepada Menteri PP & K: surat tanggal 8 Pebruari 1954 tentang penempatan Tjermo Suwendo, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 80. | Sekretaris Dewan Menteri: surat-surat tanggal 15-25 Maret 1954 tentang peraturan pemberian gaji dan pensiun menteri, dengan lampiran. | asli, pertinggal | 1 sampul |

| | | | |
|-----|--|------------|----------|
| 81. | Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Dewan Menteri: surat-surat tanggal 13 Mei 1954 - 19 Juli 1955, tentang persediaan buku dinas dan kartu pekerjaan. | stensilan | 5 lembar |
| 82. | I. Simandjuntak kepada Ketua DPRDS Kab. Tapanuli Utara: surat tanggal 12 Desember 1954 tentang permohonan petunjuk/nasehat dalam mengatasi masalah pekerjaannya. | pertinggal | 2 lembar |
| 83. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 28 Juli 1954 tentang pengaduan terhadap beleid menteri dalam negeri dalam soal-soal kepegawaian. | pertinggal | 2 lembar |
| 84. | Organisasi-organisasi massa kepada presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 17 Agustus 1954 - 7 Agustus 1957 tentang tuntutan terhadap masalah pengangkatan pegawai. | asli | 1 sampul |
| 85. | Perdana Menteri: Surat Edaran No. 14/RI/54 tanggal 3 September 1954 tentang perjalanan dinas dalam negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 86. | Menteri Kehakiman kepada Kuasa Usaha RI: surat tanggal 4 Oktober 1954 tentang pejabat yang berhak mengesahkan tanda tangan pada dokumen, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 87. | Direktur kabinet Presiden kepada PM: surat pemberitahuan tanggal 20 Nopember 1954 tentang pemberhentian dan pengangkatan para menteri, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 88. | L. Simandjuntak kepada Ketua DPRDS Kab. Tapanuli Utara: surat tanggal 12 Desember 1954 tentang permohonan petunjuk/nasehat dalam mengatasi masalah pekerjaannya. | tembusan | 1 lembar |
| 89. | Kabinet Presiden RI: Daftar tahun 1955 tentang riwayat hidup beberapa pejabat pemerintah, antara lain : Jedral Mayor T.B. Simatupang, Ir. Gunung Iskandar, Samadikoen, Mr. Sukanto Tjokrodiatmodjo, Moh. Hatta, dll. | stensilan | 1 sampul |
| 90. | A. Ponto kepada Menteri PP & K: surat tanggal 15 Januari 1955 tentang penyetopan gajinya oleh Inspektur Pendidikan Guru D VIII di Makassar sejak Juli 1954, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 91. | Menteri Agama RI: surat tanggal 17 Januari 1955 tentang tugas pegawai Kementeri Agama mengurangi ketegangan sosial, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 92. | Organisasi-organisasi buruh Bogor dan Jawa Barat kepada Preside RI, Menteri Dalam Negeri: surat-surat pernyataan tanggal 27 Januari, 9, 14 Februari 1955 tentang pembatalan pengangkatan pegawai Kota Besar Bogor oleh DPD Jawa Barat yang tidak beralasan. | asli, tindasan | 3 lembar |
| 93. | Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Utara: surat tanggal 15Pebruari 1955 tentang permintaan Sukari, Wedana dalam menerima uang tunggu agar diaktifkan kembali, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 94. | Kepala KUP kepada Kepala Jawatan Pegadaian: surat tanggal 16 Februari 1956 tentang dasar pensiun pegawai yang pada tanggal 1 Juli 1950 atau sesudahnya tidak menerima penghasilan yang memberatkan anggaran negara. | tembusan | 1 lembar |
| 95. | Organisasi-organisasi massa kepada presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 4 Maret 1955 - 13 Nopember 1957 tentang tuntutan terhadap masalah kenaikan pangkat pegawai. | asli | 1 sampul |
| 96. | Dewan Moneter: surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 7 Maret - 29 Oktober 1955 tentang penunjukkan Ketua/Wakil Ketua Panitia Kredit Luar Negeri. | stensilan | 4 lembar |
| 97. | SB Perkebunan RI Ayerdingin Probolinggo Jatim: surat pernyataan tanggal 14 Maret 1955 tentang sikap terhadap pencopotan HRK Sosrodanukusumo, resersi Pusat Kejaksaan Agung dari jabatannya oleh Presiden RI. | asli | 1 lembar |
| 98. | Kabinet Presiden RI: Daftar tanggal 5 April 1955 tentang bezetting dan formasi pegawai negeri warga negara. | pertinggal | 3 lembar |
| 99. | SPBU Jakarta kepada Menteri PUT: surat tanggal 28 April 1955 tentang pencalonan Ir. H. Santojudo sebagai pimpinan Direktorat Perumahan. | tembusan | 1 lembar |
| 100. | Atas nama rakyat Indonesia Timur: surat pernyataan 13 Juli 1955 tentang pengangkatan Abdullah, Mapudji dan Iskandar, sebagai Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar. | asli | 1 lembar |
| 101. | SOBSI Cabang Surabaya: resolusi tanggal 22 Juli 1955 tentang protes keras terhadap tindakan Kepala Daerah III Jawatan Bea dan Cukai, Tuan K. Sarpan yang mempekerjakan semua pegawai bea cukai dengan tiada syarat. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 102. | Kementerian Perburuhan: proses verbal tanggal 15 Agustus 1955 tentang timbang terima Menteri Perburuhan, Prof. S. M. Abidin kepada I. Tedja Soekmana. | salinan | 1 lembar |
| 103. | Menteri Keuangan: Surat Edaran tanggal 16 September 1955 tentang penunjukkan bendaharawan-bendaharawan khusus/juru penerimaan uang pendapatan tertentu, dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 104. | Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 11 Oktober 1955 tentang permohonan diri Sjech Al Amzar Abdurrahman Tag, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 105. | A. Wahid kepada Kementerian Pertanian: surat-surat tanggal 17 Oktober 1955 - 20 September 1957 tentang permohonan ampunan dan dapat bekerja kembali pada Jawatan Pertanian. | tembusan | 1 sampul |
| 106. | Panitia Pembentuk Mosi dari Perhimpunan-perhimpunan Bangsa Indonesia di Suriname kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 29 Oktober 1955 tentang mosi pemindahan Rd. Soedarto Hadinoto (Kepala Perwakilan RI di Suriname) ditunda. | asli | 1 lembar |
| 107. | Menteri Kesehatan, Kementerian Perburuhan kepada Kepala Kantor Dana Pensiun: surat-surat tanggal 15 Nopember, 28 Desember 1955 tentang pengiriman daftar riwayat pekerjaan beberapa pegawai tinggi yang diperbantukan, dengan lampiran (ada yang hilang). | tembusan | 3 lembar |
| 108. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Pertanian: surat tanggal 28 Nopember 1955 tentang perubahan tanggal kelahiran Prof. Sutisno Djuned Puspongoro dalam Surat keputusan Presiden tanggal 16 Maret 1955, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 109. | PB Ikatan Hakim kepada para anggota di seluruh Indonesia: Putusan tanggal 8 Pebruari 1956 tentang pengunduran diri sebagai hakim seperti yang dimaksudkan dalam resolusi kongres ke-II Ikatan Hakim. | tindakan | 1 lembar |
| 110. | Kementerian Agraria kepada Dewan Menteri: surat tanggal 15 Pebruari 1956 tentang kedudukan Sekretaris Jenderal dalam PGPN 1955. | tembusan | 2 lembar |
| 111. | DPP Gabungan Serikat-serikat Buruh Indonesia (GSBI) : statement tanggal 1 Maret 1956 tentang dukungan tuntutan PB SSKDN mengenai mempekerjakan kembali pegawai negeri yang merangkap anggota DPR RI yang selama ini di non aktifkan , dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 112. | Rapat bersama jawatan dan serikat sekerja kemakmuran Jawa Barat: surat pernyataan tanggal 14 Maret 1956 tentang sikap terhadap adanya penghargaan jabatan dan pangkat dalam PGPN di lingkungan instansi kemakmuran. | asli | 1 lembar |
| 113. | Serikat Buruh Kementerian Penerangan cabang Bekasi, surat pernyataan tanggal 28 Maret 1956 tentang sikap terhadap timbang terima Moh. Kosim dan A. Wihatna, penggantian jawatan Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. | asli | 1 lembar |
| 114. | SBPU Wilayah Tanah Luas/Gajo Luas: surat pernyataan tanggal 29 Mei 1956 tentang tuntutan agar Nja' Obor dikembalikan ke seksi Kutatjane/Blangkedjeren di Kutatjane menjadi kepala Pekerjaan Umum, disertai surat pengantar. | asli | 2 lembar |
| 115. | SBPU Pusat dan Cabang Gedung Surakarta: surat-surat pernyataan tanggal 5, 11 Juni 1956 tentang sikap lowongan Sekretaris Jenderal Kementerian PU dan Tenaga, disertai surat pengantar. | asli | 3 lembar |
| 116. | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 9 Juni 1956 tentang pengangkatan Hidayat dan Mr. Erman Muriantoro sebagai pegawai negeri tetap, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 117. | PB Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Sumatera Utara resolusi tanggal 16 Juni 1956 tentang pencalonan Ismail dan Lay menjadi koordinator inspeksi pengajaran daerah Sumatera Utara. | asli | 1 lembar |
| 118. | Sekretaris Presiden RI kepada Universitas Gajah Mada : surat tanggal 30 Juni 1956 tentang keputusan Sekretaris Negara untuk Wirjotenojo, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 119. | Ketua Panitia Negara Urusan Perayaan Hari Kemerdekaan : Surat Keputusan No.5/K/56 tanggal 19 Juli 1956 tentang pengangkatan beberapa orang sebagai penasehat kepada Panitia Negara urusan Perayaan Hari Kemerdekaan. | salinan | 1 lembar |
| 120. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 4 Agustus 1956 tentang permohonan dikirimkan Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan L.N. Palar sebagai Dubes Istimewa RI di Uni Soviet. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 121. | Ketua DPR Ri: Surat Keputusan No. UP/69/1-3/56, tanggal 22 Agustus 1956 tentang penunjukan S. Purwadi pengganti Islan sebagai pegawai yang bertanggung jawab mengenai Sekretariat Panitia Pemeriksaan. | salinan | 1 lembar |
| 122. | Menteri Agama kepada kepala Jawatan perbendaharaan dan kas-kas Negeri: surat tanggal 10 september 1956 tentang pelaksanaan putusan dewan menteri dalam sidangnya ke - 46 mengenai soal kepegawaian, dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 123. | Menteri Pertanian kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai: surat tanggal 21 September 1956 tentang syarat-syarat minimum masa kerja untuk kenaikan pangkat. NB. Arsip soberk | tembusan | 1 lembar |
| 124. | Menteri Kehakiman kepada ketua pengadilan tinggi Medan: surat tanggal 1 Desember 1956 tentang pencatatan nomor dana pensiun Mr. Mahadi, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 125. | Sidang Harian ke-2 SBKP ranting XII, Cabang Surabaya kepada Menteri Pertahanan: surat pernyataan tanggal 14 Desember 1956 tentang sikap terhadap efficiency dan SK KSAD NO. Kpts 84/6/56 terhadap pegawai sipil dan harian. | tembusan | 1 lembar |
| 126. | LVRI Daerah Lebak: resolusi tt 1957 tentang tuntutan untuk mencalonkan Kol. Bambang Supeno sebagai Menteri Pertahanan. | asli | 1 lembar |
| 127. | Menteri Dalam Negeri: Peraturan No. 10/1957 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri dalam lingkungan kementerian Dalam Negeri. | stensilan | 2 lembar |
| 128. | R.M. Soehardjo Djajengasmoro: surat tanggal 1 Januari 1957 tentang kepangkatan/penyesuaian pangkat sebagai pengajar di Akademi Seni Rupa Yogyakarta, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 129. | Sekretaris Dewan Menteri: Pengumuman No. 51 tanggal 2 januari 1957 tentang pengangkatan Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai gubernur BI dan A. Hasjmy, pegawai tinggi pada Kementerian Sosial sebagai gubernur Aceh. | stensilan | 1 lembar |
| 130. | Brahim kepada Kepala PP & K Propinsi Jatim: surat pernyataan tanggal 31 Januari 1957 tentang desakan kepada pemerintah untuk meninjau pekerjaan PP & K Propinsi Jatim bagian UP yang tidak menghiraukan usul kabinet untuk minta tambahan tenaga. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 131. | Nja' Aisjah kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 1 Pebruari 1957 tentang permintaan surat keterangan bahwa suaminya pernah menjadi pegawai Pemerintah, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 132. | Srihandaningkoeng Widjoyokoesoemo Malang: Daftar tanggal 7 Pebruari 1957 tentang riwayat pekerjaan. | asli | 1 lembar |
| 133. | Kepala Seksi Pengiriman, Kementerian Pekerjan Umum dan Tenaga kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 8 Pebruari 1957 tentang wakil tetap pada l'Association International Permanente des Congress de la Route di Paris, dengan lampiran. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 134. | R. Abdul Salam kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 22 Pebruari 1957 tentang tuntutan penggantian Ketua Dewan Pengawas Keuangan. | asli | 1 lembar |
| 135. | Direktur Kabinet Presiden kepada Sekjen Kementerian Kehakiman: surat tanggal 19 Maret 1957 tentang kedudukan pengacara negara, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 136. | Pengurus Besar PGSTP: resolusi tanggal 20 Maret 1957 tentang dukungan atas pengangkatan Ondang sebagai kepala jawatan pengajaran bagian pendidikan kejuruan. | asli | 1 lembar |
| 137. | DPRD DI Jogjakarta: Surat Keputusan tanggal 26 Maret 1957 tentang penetapan H.J. Sumarto menjadi anggota delegasi Konsepsi Presiden menggantikan Moh. Djamhari, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 138. | E.M. Choesnoen kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 15 Mei 1957 tentang usul pengisian lowongan jabatan Menteri Sosial, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 139. | Sin Po, bekas pejuang Kalimantan: surat pernyataan tanggal 27 Mei 1957 tentang keadaan pemerintah dan pegawai tinggi pemerintah yang bersifat kebarat-baratan. NB: sebagian B. Tionghoa. | asli | 4 lembar |
| 140. | Konperensi PGTI daerah Jateng Utara ke -I: resolusi tanggal 27 Juli 1957 tentang desakan pencabutan putusan menteri PP & K mengenai pengangkatan pimpinan jawatan pendidikan kejuruan dan mohon agar pejabat tersebut dipilih dari kalangan pendidikan tehnik. | asli | 1 lembar |
| 141. | Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan: surat tanggal 26 Agustus 1957 tentang specimen tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani surat kep. Otorisasi dan surat kuasa. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|----------|--|-----------|----------|
| 142. | Soewarno cs kepada Ketua Dewan Nasional RI: surat tt September 1957 tentang sumbangan pendapat untuk kepentingan para pegawai dan penganggur khususnya. | tembusan | 1 lembar |
| 143. | Kabinet Presiden RI: Daftar Pejabat Tinggi Pemerintah tanggal 5 Oktober 1957. | stensilan | 1 lembar |
| 144. | Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan: surat tanggal 4 Nopember 1957 tentang pejabat yang berhak menandatangani Surat Keputusan Otorisasi dan Surat Kuasa. | tembusan | 1 lembar |
| 145. | Menteri Perhubungan , Mr. Sukardan kepada Perdana Menteri: surat tanggal 13 Nopember 1957 tentang pemberitahuan bahwa dirinya sudah dapat bekerja kembali seperti semula, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 146. | SBKA Daerah Inspeksi 8 Madiun: surat pernyataan tanggal 14 Desember 1957 tentang sikap terhadap peremajaan pegawai (keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 25 Juli 1957 dan 21 Agustus 1957). | asli | 1 lembar |
| 147. | Kementerian PU & T: proses verbal tanggal 31 Desember 1957 tentang timbang terima kepala jawatan gedung-gedung pusat. | tembusan | 1 lembar |
| 148. | Ketua Panitia Negara Urusan Protokol kepada PM: surat tanggal 18 Februari 1959 tentang ketentuan-ketentuan sistem pembagian tanda kehormatan jasa-jasa di bidang militer dan sipil, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |
| 149. | Serikat Buruh Kesehatan Cabang Pemberantasan Malaria Cirebon kepada Presiden: resolusi tanggal 16 Maret 1959 tentang masalah-masalah kepegawaian. | asli | 5 lembar |
| C. AGAMA | | | |
| 150. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 17 Agustus 1950 - 5 Oktober 1959 tentang saran/pendapat masyarakat mengenai masalah keagamaan. NB: Bhs Arab & Jawa | asli | 1 sampul |
| 151. | Ketua Konperensi Penghulu kepada Presiden RI: telegram tanggal 20 Agustus 1950 tentang tuntutan mosi mengenai kebebasan beragama. | asli | 2 lembar |
| 152. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Agustus 1950 - 17 Pebruari 1958 tentang urusan haji, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 153. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1 Oktober 1950 - 12 Agustus 1959 tentang urusan nikah. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 154. | Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo: resolusi tanggal 11 Desember 1950 tentang kekuasaan pembagian waris dikembalikan kepada pengadilan agama. | asli | 1 lembar |
| 155. | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Pebruari - 15 Maret 1951 tentang penjelasan bahawa pedoman Umat Islam adalah Iman, Islam dan Al-Quran. NB: Dalam Bahasa Arab Melayu | asli | 4 lembar |
| 156. | Kementerian Agama: Maklumat tanggal 8 Pebruari 1951, 17 Juni 1954 tentang hari lahirnya Kong Hu Tju pada tahun 1951. | stensilan | 2 lembar |
| 157. | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Agama: Surat-surat tanggal 14 Pebruari 1951 - 11 Nopember 1957 tentang Agama Islam, dengan lampiran. | peringgal | 1 sampul |
| 158. | Organisasi politik dan massa: resolusi-resolusi tanggal 17 April 1951 - 8 Nopember 1953 tentang tuntutan mempertahankan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. | asli | 1 sampul |
| 159. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 Mei 1951 - 3 Juli 1957 tentang ketentuan-ketentuan akan tanggal, hari dan bulan Islam. | salinan | 1 sampul |
| 160. | Misi Kementerian Agama kepada Menteri Agama RI: Laporan tanggal 20 Juli 1951 tentang perjalanan misi kementerian agama RI, disertai surat. | salinan | 1 sampul |
| 161. | Kementerian Agama RI: surat tanggal 18 Oktober 1951 tentang pengiriman copy dari siaran "Front Islam Surabaya tanggal 6 Oktober 1951", disertai lampiran. | asli | 4 lembar |
| 162. | Kementerian Agama: Surat pemberitahuan tanggal 22 oktober 1951 tentang jawaban Pemerintah atas interpelasi amelz. | asli | 1 lembar |
| 163. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1 Nopember 1951 - 25 September 1953 tentang Kitab Suci Al-quran. | asli | 1 sampul |
| 164. | Kementerian Agama kepada Presiden RI: surat tanggal 8 Desember 1951 tentang jaminan kebebasan beragama di Indonesia, disertai lampiran. | asli | 1 sampul |
| 165. | Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) dan PERTI: Statement Bersama tanggal 25 Januari 1952 tentang tindakan Kementerian Agama yang melangsungkan suatu konperensi ulama-ulama mulai tanggal 25 Januari 1952 dimana kaum ulama partai politik tidak diundang. | stensilan | 1 lembar |
| 166. | Organisasi politik dan massa: resolusi-resolusi tanggal 15 Maret 1952 - 6 Maret 1959 tentang tuntutan dibentuknya UU perkawinan. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 167. | Ki Tjokrodirdjo kepada Presiden RI: surat tanggal 9 September 1952 tentang pandangan mengenai agama dan pengaruhnya terhadap situasi politik di beberapa negara. | asli | 1 lembar |
| 168. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 23 September 1952 - 3 Nopember 1956 tentang Agama Kristen. | asli | 1 sampul |
| 169. | Menteri Agama: Penetapan No. 19 tanggal 1 Oktober 1952 tentang tempat kedudukan dan daerah hukum dari kerapatan qadi di sebagian daerah Kalimantan Selatan, dengan surat pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 170. | Perorangan : surat tanggal 20 Nopember 1952 tentang percaya bulat kepada Allah. | asli | 1 lembar |
| 171. | DPRD Lamongan kepada Presiden RI: mosi tanggal 4 Desember 1952 - 26 Agustus 1953 tentang zakat fitrah. | asli | 3 lembar |
| 172. | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Moh. Kanapi, Ketua Partai Sosialis Indonesia Cabang Tegal: surat tanggal 10 Desember 1952 tentang tanggapan mengenai adanya 'Dawuh Allah' di Jatirawa, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 173. | Persatuan Guru Agama kepada Presiden RI: resolusi tanggal 26 Desember 1952 - 5 Oktober 1959 tentang penerangan agama, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 174. | Partai Islam PERTI: statement tanggal 11 Januari 1953 tentang pengangkatan (taulijah) dan pemberhentian wali hakim (kadli nikah) di luar Jawa dan Madura menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1952, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 175. | Konperensi Kementerian Agama dengan para Alim Ulama: Surat Keputusan tanggal 6 Mei 1953 di Bogor tentang soal-soal agama. | salinan | 1 lembar |
| 176. | Organisasi-organisasi/Partai-partai Islam di Makassar: resolusi tanggal 17 Mei 1953 tentang tuntutan kepada pemerintah RI, supaya segera menarik dari peredaran buku "Agama Islam" karangan Prof. Dr. H. Kraemer dan C. Taroreh. | asli | 1 lembar |
| 177. | Kementerian Agama: surat-surat tanggal 8 Juni 1953, 10 Pebruari 1954 tentang kebijaksanaan Pemerintah terhadap Agama Islam, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 178. | Kongres Persatuan Pemuda Kristen Indonesia: resolusi tanggal 1 Oktober, 6 asli Nopember 1953 tentang sokongan terhadap resolusi sidang lengkap dewan gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 30 Jui 1953. | | 2 lembar |
| 179. | H. Abdurrahman kepada Presiden RI: surat tanggal 15 Oktober 1953 tentang larangan kotbah Jumat dengan memakai Bahasa Indonsia. | asli | 1 lembar |
| 180. | Hoo Poo Tik kepada Presiden: surat tanggal 12 - 21 Desember 1953 tentang pendirian-pendirian Klenteng, dengan lampiran. | | 1 sampul |
| 181. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 34763/Kab, tanggal 16 Desember 1953 tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat baru pemeriksaan kesehatan bagi calon haji. | salinan | 1 lembar |
| 182. | Kementerian Agama: Ichtisar, tanggal 1 Pebruari 1954 tentang peraturan- peraturan yang menjadi dasar campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan agama dan keagamaan, disertai pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 183. | Kabinet Presiden RI : Teks sambutan Menteri Penerangan tanggal 19 Pebruari 1954 pada upacara pembukaan Muslim Press Exhibition di Lahore. | asli | 1 lembar |
| 184. | Persatuan Pemuda/i Kristen Indonesia (PPPKI): surat tanggal 16 Maret 1954 tentang tugas untuk menyelidiki adat istiadat perkawinan Suku Dayak d disesuaikan dengan faham Kristen. | stensilan | 1 lembar |
| 185. | DPRDS Kabupaten Lampung: mosi tanggal 10 Mei 1954 tentang perundangan Pengadilan Agama daerah Lampung disetujui sepenuhnya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 186. | Menteri Dalam Negeri: surat-surat tanggal 17 Juni, 10 Juli 1954 tentang keputusan Konperensi Alim Ulama di Cipanas, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 187. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14 Agustus 1953 - 26 Juni 1958 tentang agama Hindu dan Budha. NB: sebagian dalam Bahasa Inggris | asli | 1 sampul |
| 188. | Muhammad Koerdi kepada Presiden RI: surat tanggal 2 Pebruari 1955 tentang pengaduan perceraian antara Moh. Koerdi dan Ipah Binti H. Samsaeri. | asli | 1 lembar |
| 189. | Kabinet Presiden RI: naskah ceramah, tanggal Maret 1955 tentang Agama Budha di Birma oleh U. Mya Sein (Wiasa Usaha Birma) atas undangan UI di Yogyakarta. NB: B. Inggris | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 190. | H. Abduljalil kepada Presiden RI: surat tanggal 13 Juni 1955 tentang usul agar ucapan Assalamualaikum dipakai oleh seluruh Angkatan Perang dan Polisi. | asli | 1 lembar |
| 191. | Gerwani Cabang Cisarua Bandung: surat tanggal 3 Desember 1955 tentang protes disyahnannya kawin paksa Maisura dengan KH. Ahmad. | asli | 1 lembar |
| 192. | Oemi Kalsoem kepada Kepala Pengadilan Negeri Kediri: surat tanggal 8 Desember 1955 tentang permohonan penyelesaian masalah warisan, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 193. | Partai-partai Katolik di daerah: resolusi-resolusi tanggal 5 Maret, 15 Juli 1956 tentang kebutuhan akan tenaga rohaniwan Katolik di Sumba dan Sumbawa. | asli | 2 lembar |
| 194. | Konsepsi, tanpa tanggal 1956 tentang tujuan pendidikan kearah pembentukan sifat manusia, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 195. | Kepala KUA Kec. Tangan-tangan Aceh: surat pernyataan tanggal 21 Nopember 1956 tentang usulan pengaktifan kembali Moh. Sjari'yeh di tiap kecamatan di daerah Aceh. | asli | 1 sampul |
| 196. | Kementerian Agama: Surat Penetapan tanggal 18 Pebruari, 21 September 1957 tentang izin penerbitan Al-Quran, dengan lampiran. | salinan | 9 lembar |
| 197. | Konperensi Pemuda Muhammadiyah seluruh daerah Pekalongan: resolusi tanggal 26 - 27 Februari 1957 tentang desakan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat peribadatan bagi umat Islam di tempat-tempat yang bersifat umum. | asli | 1 lembar |
| 198. | A/n Sidang Synode Corporasi Gereja Kristen Jateng Sebelah Utara Perepatan Agung: surat pernyataan tanggal 17 April 1957 tentang sikap terhadap organisasi gereja kristen Jawa Tengah. | asli | 1 lembar |
| 199. | Badan Pekerja Lengkap Dewan Gereja-gereja di Indonesia : seruan dan sambutan, tanggal 15 Agustus 1957 tentang gerakan hidup baru dan doa untuk keselamatan bangsa disertai surat pengantar. | stensilan | 2 lembar |
| 200. | DPRD Bogor dan Mojokerto: resolusi-resolusi tanggal 24 Juni, 10 Desember 1957 tentang sikap terhadap masalah pergundikan/desakan untuk mengadakan undang-undang atau peraturan yang melarang ada pergundikan. | asli | 2 lembar |

D. AGRARIA

| | | | |
|------|---|-----------|-------------|
| 201. | Kabinet Presiden RI: naskah ceramah, tanggal 5 Januari 1959 tentang "Pembangunan Rohani Para Pegawai Negeri" oleh HM Saleh Suaidy. | stensilan | 1 lembar |
| 202. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 21 Nopember 1950 .- tembusan 31 Nopember 1953 tentang sengketa tanah | | 1 sampul |
| 203. | Raja Koening Pagar Roeyung ke XVIII dan Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 2 April 1951 - 28 Desember 1953 tentang tuntutan penyelesaian Warisan tanah. NB: arsip sobek. | asli | 1 sampul |
| 204. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 28 Juli 1951 - 19 September 1958 tentang masalah tanah. | tembusan | 1 sampul |
| 205. | Menteri PU & Kehakiman : Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1951 - 22 Januari 1955 tentang masalah tanah. | salinan | 1 sampul |
| 206. | Perorangan: surat tanggal 13 Maret 1952 tentang ijin jual beli tanah. | asli | 1 lembar |
| 207. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 26 Juli 1952 - 20 Nopember 1956 tentang permohonan dan penolakan uang tanah. | asli | 1 sampul |
| 208. | Perorangan: surat-surat tanggal 24 Agustus 1952 - 21 Oktober 1957 tentang permohonan penggunaan tanah. | asli | 1 sampul |
| 209. | Organisasi-organisasi massa, DPRDS-DPRDS: resolusi-resolusi tanggal 24 September 1952 - 5 Oktober 1959 tentang sewa tanah (erffacht). | tembusan | 1 sampul |
| 210. | PNI Sumatera Utara: resolusi tanggal 10 September 1952 tentang pembagian tanah di Sumatera Timur, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 211. | Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi: Laporan tahun 1953, 1945 disertai pengantar. | asli | 2 eksemplar |
| 212. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 1 Mei 1953, 21 Maret 1954 tentang usul pembuatan undang-undang pembagian tanah, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 213. | Kepala Jawatan Harta peninggalan kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 3 September 1953 tentang permohonan warisan dari M.A. Mohd. Ishak, dengan lampiran dalam Bahasa Inggris. | asli | 2 lembar |
| 214. | Kementerian Kehakiman Ri: Surat Keputusan tt tahun 1954 tentang pemindahan hak persil engendom atas nama Pemerintah Mesir. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 215. | DPRDS-DPRDS/organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 3 Nopember 1953 - 26 Februari 1958 tentang tuntutan untuk segera mengeluarkan UU agraria yang bersifat nasional dan menguntungkan rakyat. | tembusan | 1 sampul |
| 216. | Organisasi massa, DPRDS, perorangan: surat-surat tanggal 31 Desember 1953 - 25 September 1956 tentang permohonan menggarap tanah. | tembusan | 1 sampul |
| 217. | kepada Menteri Pertanian: surat tanggal 1 Oktober 1954 tentang permohonan menghapuskan Perusahaan Pertanian Pemerintah 'Tjihea' dan tanahnya dikembalikan kepada rakyat. | tembusan | 1 lembar |
| 218. | Kepala Jawatan Pegadaian Negeri kepada Kementerian Keuangan: surat tanggal 25 Agustus 1955 tentang permohonan ahli waris Punggowiharjo atas uang pembelian tanah yang digunakan Rumah Gadai Negeri di Prambanan, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 219. | DPRDS Tanggerang dan Ciamis, perorangan: surat-surat tanggal 7 April 1956 - 8 April 1957 tentang permohonan hak milik tanah. | asli | 4 lembar |
| 220. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 26 Januari 1956 - 17 Nopember 1957 tentang protes terhadap penyalahgunaan Undang-undang Darurat No. 8/1954 mengenai kedudukan tanah. | tembusan | 7 lembar |
| 221. | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 26 Februari 1957 tentang permohonan Siti Rachmah mengenai pembebasan pembayaran sewa tanah. | pertinggal | 1 lembar |
| 222. | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 28 Maret 1957 tentang kesukaran tanah untuk perkampungan umum bagi Suku Bangsa Sangihe-Talaud di Amurang. | pertinggal | 1 lembar |
| 223. | Barisan Tani Indonesia Ranting Desa Manis Pulo Rakyat kepada Perdana Menteri Republik Indonesia: pernyataan, tanggal 17 April 1957 tentang status kaum tani yang berladang di tanah-tanah perkebunan dari tahun 1941. | tembusan | 1 lembar |
| 224. | Kepala Staf Angkatan Darat: Peraturan No. PN/PM/013/1957 tanggal 29 Nopember 1957 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin pemilik atau kuasanya, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |

F.ANGGARAN
DAN

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 225. | Kementerian-kementerian: Rancangan Anggaran Belanja RI Tahun 1950-1957. | stensilan | 1 bundel |
| 226. | Menteri Keuangan: Penjelasan Surat Keputusan No. PUI pasal 11 tanggal 19 Maret, September 1950 tentang penyerahan simpanan-simpanan bank yang telah dibukukan ke rekening "kumpulan" (3% obligasi 1950). | stensilan | 1 lembar |
| 227. | Kantor Pusat Perbendaharaan: surat tanggal 6 Juni 1950 tentang pembersihan uang negara, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 228. | Kementerian-kementerian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 16 Agustus 1950 - 5 Juli 1958 tentang pembelian gaji dan tunjangan, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 229. | Menteri Luar Negeri dan Keuangan kepada Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 27 September 1950 - 5 Mei 1956 tentang ijin pengiriman uang dan barang ke luar negeri. | asli | 1 sampul |
| 230. | PB Pusat Ekonomi Rakyat Indonesia Kemanusiaan: surat tanggal 10 oktober 1950 tentang permohonan agar Pemerintah dapat menyokong memberikan devisen barang luar negeri dengan pembayaran seperuhnya. | asli | 1 lembar |
| 231. | Beberapa kementerian dan perorangan kepada Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 16 Oktober 1950 - 1 Nopember 1957 tentang permohonan kembali pinjaman dan ganti rugi kepada Pemerintah akibat perang. | asli | 1 sampul |
| 232. | Perorangan: surat-surat tanggal 18 Oktober 1950 - 21 September 1957 tentang permohonan perngurangan pajak. | tembusan | 3 lembar |
| 233. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 16 Nopember 1950 - 18 Juni 1957 tentang pajak pendapatan, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 234. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran - Surat Edaran tanggal 20 Nopember 1950 - 4 September 1957 tentang pemberian gaji dan tunjangan. | stensilan | 1 sampul |
| 235. | Menteri PP & K: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 30 Nopember 1950 - 3 Juli 1957 tentang penetapan pemberian honorarium tenaga pengajar. | salinan | 1 sampul |
| 236. | Penerbitan Jawatan Tera: Laporan Tahunan Jawatan Tera tanggal 1951 - 1953. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 237. | Prof. Dr. M. Sardjito, Presiden Univ, Gama: surat tanggal 6 Januari 1951 tentang penerimaan uang dari Presiden Soekarno sebesar Rp. 2.500,00. | asli | 1 lembar |
| 238. | Menteri PP & K: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1951 - 1 Desember 1953 tentang biaya penyelenggaraan asrama. | salinan | 6 lembar |
| 239. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 20 Pebruari 1951 - 5 Juni 1953, 29 Januari 1957 tentang pendapat dan saran masyarakat terhadap keuangan negara. | asli | 3 lembar |
| 240. | Perorangan, organisasi massa, DPRD: surat-surat, resolusi-resolusi tanggal 14 Pebruari 1951 - 30 Agustus 1957 tentang pajak. | tindakan | 1 sampul |
| 241. | Menteri Keuangan, Perdana Menteri: Surat Edaran tanggal 26 Pebruari 1951 - 22 Mei 1957 tentang pembelian kendaraan milik Pemerintah oleh pegawai, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 242. | G. Beers, Kepala Arsip Negara: surat-surat tanggal 15 Maret, 12 Juni 1951 tentang peminjaman Corr. Stukken Instituut International du Froid mengenai uang iuran. | asli | 6 lembar |
| 243. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Keuangan: surat tanggal 17 Maret 1951 tentang pertanyaan anggota DPR RI, Mohd. Noer el Ibrahim mengenai penggunaan dana. | pertinggal | 3 lembar |
| 244. | Perorangan: surat tanggal 7 April 1951 tentang pengeluaran biaya untuk pembentukan Kabinet Demisioner (Hatta-Moh. Natsir), dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 245. | Menteri Pertanian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 10 April 1951 - 15 Desember 1954 tentang pembagian keuntungan oleh Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (PERRIN). | salinan | 5 lembar |
| 246. | Kementerian-kementerian kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 18 April 1951 - 24 Mei 1958 tentang anggaran belanja kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan yang bersangkutan, dengan lampiran. | asli | 2 sampul |
| 247. | Kementerian Keuangan: Surat - Surat tanggal 30 Mei 1951 - 20 Juni 1956 tentang keadaan hutang negara, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 248. | Kepala Staf KMKB Bandung/ex Dir. Pendidikan Corps TT AD kepada SU VI AD : surat tanggal 31 Mei 1951 tentang pertanggung-jawaban keuangan pendidikan Corps territorial AD selama Januari - Maret 1951. | copy | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 249. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 28 Juni, 2 Juli 1951 tentang pembebasan harga sertifikat deviesen oleh Yayasan Pendidikan Masyarakat. | pertinggal | 2 lembar |
| 250. | Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan: surat tanggal 30 Juni 1951 tentang peraturan gaji presiden, wakil presiden dan menteri-menteri, dengan lampiran | tembusan | 2 lembar |
| 251. | Menteri Keuangan, LAAPLN: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 2 Juli 1951 - 11 September 1957 tentang biaya/penggantian ongkos perjalanan dinas pegawai negeri. | stensilan | 1 sampul |
| 252. | DPRD Jawa Tengah dan perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 21 Juli 1951 - 23 Agustus 1956 tentang permohonan keringanan pajak. | asli | 1 sampul |
| 253. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 4 Agustus 1951 , 16 Pebruari 1955 tentang pengiriman uang untuk dana Irian. | asli | 2 lembar |
| 254. | Menteri Penerangan: Surat Edaran No. 12 tanggal 7 Agustus 1951 tentang daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunggu, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 255. | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 1951 - 23 Oktober 1957 tentang pungutan biaya sekolah lanjutan. | salinan | 1 sampul |
| 256. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 14 Agustus, 30 Nopember 1951 tentang pembayaran "valutabijslay". | salinan | 3 lembar |
| 257. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 15 Agustus 1951 - 3 Agustus 1957 tentang pemberian kuasa keuangan. | salinan | 1 sampul |
| 258. | Kementerian Dalam Negeri, DPRDS Tk. II kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 6 September 1951 - 3 Maret 1959 tentang pemberian gaji dan tunjangan , kepada ketua, wakil ketua dan anggota DPRD. | asli | 1 sampul |
| 259. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Oktober 1951 - 23 Juli 1953 tentang aturan pembayaran gaji pegawai di Jerman dan Belanda. NB: Bahasa Belanda | asli | 6 lembar |
| 260. | Kementerian Keuangan, Perburuhan, Agama: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 20 Oktober 1951 - 11 Desember 1957 tentang biaya/ganti ongkos perjalanan dinas. | salinan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 261. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 21 Oktober 1951 tentang putusan/tindakan sesuatu kementerian RI di Indonesia yang mengakibatkan pengeluaran uang di Negeri Belanda oleh Komisariat Agung RI. | salinan | 1 lembar |
| 262. | DR. Hjalmar Schacht kepada Preseiden RI: tanggal 26 Oktober 1951 tentang penyampaian laporan mengenai masalah ekonomi, keuangan, dengan lampiran. NB: Bahasa Inggris dan Belanda. | asli | 1 sampul |
| 263. | Kementerian Dalam Negeri: Surat Keputusan- Surat Keputusan tanggal 3 Nopember 1951 - 12 Desember 1957 tentang biaya kunjungan presiden/wakil presiden ke daerah-daerah, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 264. | Jawatan Perjalanan: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 3 Nopember 1951, 6 September 1955, 10 September 1956 tentang persediaan biaya eksploitasi kendaraan bermotor, dengan lampiran. | stensilan | 5 lembar |
| 265. | Kementerian Keuangan, LAAPLN: surat-surat tanggal 13 Nopember 1951 - 19 Mei 1954 tentang hutang perorangan kepada negara. | tembusan | 1 sampul |
| 266. | Menteri Keuangan, Perekonomian, Kabinet Perdana Menteri kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Desember 1951 - 17 September 1957 tentang penyelesaian hutang negara, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 267. | Mangkunegoro VIII: surat tanggal 12 Desember 1951 tentang fonds van Eigendommen VH Mangkunegorosche Rijk, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 268. | Kementerian-kementerian: Anggaran-anggaran Tahun Dinas 1952-1959. | stensilan | 1 sampul |
| 269. | Menteri Agraria: Surat Keputusan- Surat Keputusan tanggal 7 Januari 1952 - 29 Agustus 1955 tentang uang sewa tanah, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 270. | Kepala Kantor Pusat Statistik: Daftar perhitungan pengeluaran keperluan hidup pegawai negeri, tanggal 16 Januari 1952, disertai surat pengantar. | stensilan | 2 lembar |
| 271. | kabinet Presiden kepada Gubernur Sunda Kecil: surat tanggal 19 Januari 1952 tentang anggaran perbaikan jalan-jalan di Bali, dengan lampiran. | Konsep | 4 lembar |
| 272. | Menteri PP dan K: Surat Edaran tanggal 19 Januari 1952 tentang penghematan uang negara. | turunan | 1 lembar |
| 273. | Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri: Surat Edaran- Surat Edaran tanggal 21 Januari 1952 - 11 Desember 1957 tentang devizen dan valuta asing. | stensilan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 274. | Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon: Surat Edaran tanggal 23 Januari 1952 tentang pembayaran ongkos telegram pemerintah, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 275. | Kepala Staf Khusus Angkatan Laut: Surat Edaran No. 6/Sec/Chus/52, tanggal 30 Januari 1952 tentang instruksi/petunjuk mengenai penyelesaian penagihan uang kesehatan, disertai surat pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 276. | LAAPLN kepada Kabinet Presiden: Surat-surat pemberitahuan, tanggal 21 Februari 1952 - 19 Desember 1953 tentang biaya import barang, dengan lampiran. NB: sebagian arsip dalam bahasa Belanda. | stensilan | 1 sampul |
| 277. | Kepala BRN cabang Sulawesi kepada Gubernur Sulawesi: surat tanggal 29 Februari 1952 tentang permohonan modal (kredit rekonstruksi) untuk perusahaan Batu Tela, disertai surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 278. | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan, tanggal 1 Maret 1952 tentang pembiayaan air, penerangan, dan gas untuk Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. | salinan | 1 lembar |
| 279. | Mas Poeradiedja: surat tanggal 7 Maret 1952 tentang permohonan agar uang ORI dan nasional pinjaman uang Jepang dapat ditukar di BRI Purwakarta, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 280. | PNI cabang Santolo kepada Presiden: Resolusi tanggal 9 Maret 1952 tentang desakan pengeluaran biaya pembuatan pengairan di Kalibawang. | asli | 1 lembar |
| 281. | Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri RI: surat-surat tanggal 15 Maret, 16 Agustus 1952 tentang perabot rumah tanggal para menteri, dengan lampiran. | tembusan | 6 lembar |
| 282. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tahun 1952, 1956, 1957 tentang tarif restitusi dan pengobatan bagi pegawai negeri. | salinan | 5 lembar |
| 283. | Kementerian Pertahanan, Kehakiman, Perhubungan: Peraturan-peraturan, tanggal 4 April 1952 - 10 Oktober 1957 tentang aturan bea, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 284. | Menteri-menteri (PMRI, DN, Penerangan, Keuangan): Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 21 April 1952 - 16 Februari 1957 tentang peraturan pembiayaan panitia negara. | salinan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 285. | Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan: memorandum singkat atas nota keuangan Menteri Keuangan tanggal 1 Juni 1952. | tembusan | 1 lembar |
| 286. | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden RI: surat tanggal 21 Juni 1952 tentang keuangan Kementerian Sosial, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 287. | Menteri Pertanian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 Juli 1952 - 28 Juli 1956 tentang uang sidang bagi dewan harian/pengurus yayasan karet pusat, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 288. | DPRDS-DPRDS. Ormas: resolusi-resolusi tanggal 5 Agustus 1952 - 16 Desember 1957 tentang pelaksanaan Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 289. | Mr. Sumanang, Menteri Perekonomian kepada Mendagri: surat tanggal 19 Agustus 1952 tentang perubahan waktu rapat mengenai rancangan urgensi memperbaiki kredit, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 290. | Kantor Pusat Perbendaharaan: surat terbuka tanggal 25 Agustus 1952 tentang penghentian pengiriman daftar-daftar pertanggungjawaban kas yang tidak diperlukan. | tembusan | 1 lembar |
| 291. | Menteri Sosial kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 9 September 1952 tentang subsidi untuk pekerjaan umum daerah-daerah otonom. | tembusan | 2 lembar |
| 292. | Kabinet Presiden RI: risalah-risalah ringkas Dewan Ekonomi dan Keuangan, tanggal 28 Mei 1951 - 26 September 1952. | asli | 1 sampul |
| 293. | .Kementerian Urusan Pegawai: Pemberitahuan tanggal 30 September 1952 - 23 Maret 1953 tentang biaya hotel untuk pegawai negeri | stensilan | 6 lembar |
| 294. | Menteri Keuanga: surat tanggal 28 Oktober 1952 tentang perubahan mata anggaran, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 295. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 25468/Perb tanggal 29 Oktober 1952 tentang pengadaan perubahan kepala pembukuan mengenai pemberian kredit menurut pos-pos pengeluaran untuk presiden dan wakil presiden, dengan lampiran. | salinan | 1 lembar |
| 296. | surat-surat tanggal 6 November 1952 - 26 Desember 1953 tentang pemindahan pembukuan pada rekening generals the savrie untuk kepentingan GIA NV dan NV Handel Mij Mataram. | tembusan | 4 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 297. | Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada semua bendahara dalam wilayah Kantor Pusat Perbendaharaan: surat pemberitahuan, tanggal 12 November 1952 tentang penutupan buku taun 1952 (kas negara). | salinan | 1 lembar |
| 298. | Menteri Agama: Peraturan No. 14 tanggal 19 November 1952 tentang biaya pernyataan nikah, talaq, dan rudju. | salinan | 1 lembar |
| 299. | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan, tanggal 27 November 1952 tentang pemusatan pembelian penerbitan-penerbitan pada Kementerian PP & K | salinan | 2 lembar |
| 300. | Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Agung dan badan-badan Pemerintah Tertinggi: surat tanggal 1 Desember 1952 tentang uraian dalam segi-segi buku kas-kas pembantu, dengan lampiran. | tembusan | 1 berkas |
| 301. | Kementerian Keuangan , kabinet Perdana Menteri kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10 Desember 1952 - 9 Oktober 1953 tentang rekening-rekening giro dan tahun pembukuan pada de Javasche Bank, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 302. | Kepala Kantor Penghubung Pengendalian Harga Surabaya: surat tanggal 13 Desember 1952 tentang pekerja di Kantor Penghubung Pengendalian Harga, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 303. | Kementerian keuangan, Pekerjaan Umum, Perdagangan kepada Presiden: surat-surat tanggal 17 Desember 1952 - 31 Agustus 1957 tentang biaya perjalanan dinas pegawai. | asli | 1 sampul |
| 304. | Kepanitiaan kepada kepala Kantor Pusat Perbendaharaan: surat tanggal 29 Desember 1952 tentang pertanggungjawaban keuangan, dengan lampiran. NB: Arsip rusak. | tembusan | 1 sampul |
| 305. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 312886/UU tanggal 30 Desember 1952 tentang larangan mempunyai uang perak lama, dengan lampiran. | petikan | 1 sampul |
| 306. | Perdana Menteri RI, Menteri Kesehatan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 12-19 Januari 1953 tentang pemberian premi penangkapan obat bius, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 307. | Beberapa kementerian dan perorangan kepada Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 16 Oktober 1950 - 1 Nopember 1957 tentang permohonan kembali pinjaman dan ganti rugi kepada Pemerintah akibat perang. | stensilan | 3 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 308. | Menteri Keuangan: SK No. 30304/G. T tanggal 10 Pebruari 1953 - 27 Januari 1957 tentang permohonan uang tunjangan dan pemulihan. | tembusan | 2 sampul |
| 309. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 10 Pebruari 1953 - 27 Januari 1957 tentang permohonan uang tunjangan dan pemulihan. | tembusan | 2 sampul |
| 310. | Kementerian Keuangan: surat pemberitahuan tanggal 26 Pebruari 1953 tentang letters of credit (I/C), dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 311. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 8 Maret - 2 Mei 1953 tentang tuntutan kepada Pemerintah agar uang begrooting gedung segera dikeluarkan. | asli | 3 lembar |
| 312. | Kabinet Presiden : surat-surat tanggal 31 Maret 1953, 28 Agustus 1956 tentang asuransi kendaraan bermotor. | asli | 8 lembar |
| 313. | Notule: rapat tanggal 10 April 1953 tentang lanjutan pembicaraan pasal demi pasal RUU pokok BI. | stensilan | 1 sampul |
| 314. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 18 April 1953 - November 1957 tentang penagihan utang kepada negara. | asli | 1 sampul |
| 315. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 2 Mei 1953 tentang Buku 'Perbendaharaan Negara Indonesia' karangan A. P. Van Gogh. | stensilan | 1 lembar |
| 316. | Kepala Jawatan Pendidikan Agama: Surat Edaran tanggal 4 Mei 1953 tentang PMA No.7/1952 mengenai bantuan madrasah. | salinan | 1 lembar |
| 317. | Kabinet PM kepada Presiden RI: Surat tanggal 9 Mei 1953 tentang penanaman modal asing di Indonesia, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 318. | Kabinet Presiden Menteri RI kepada Presiden RI: memo Menteri PU & T tanggal 11 Mei 1953 tentang rencana UU Bank Negara selain bank sentral, disertai surat. | asli | 2 lembar |
| 319. | Menteri Kehakiman: Surat Keputusan No.J.M/2/11/14 tanggal 1 Juni 1953 tentang pemungutan pembayaran atas formulir-formulir pendaftaran Orang Asing dan surat-surat Imigrasi lainnya. | stensilan | 1 lembar |
| 320. | Menteri Keuangan: Surat Kputusan No. 119941/PKN tanggal 13 Juni 1953 tentang penetapan peraturan pembayaran uang-uang kurnia pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dengan lampiran. | kutipan | 4 lembar |
| 321. | Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 27 Juni 1953 tentang pajak tahun 1952, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 322. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 30 Juni 1953 - 28 Desember 1955 tentang devisa, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 323. | Menteri Luar Negeri kepada Dubes RI di New Delhi: Surat tanggal 29 Juli 1953 tentang penukaran uang kertas Nederland Indie sebesar F.1282, 50 dengan uang rupiah. | tembusan | 2 lembar |
| 324. | Menteri Keuangan kepada Mangil: Surat tanggal 9 Oktober 1953 tentang nilai uang J.B/H.B. | tembusan | 2 lembar |
| 325. | Wali Kota/KH Kota Besar Surakarta kepada Panitia Seperempat Abad Kesatuan Wanita Indonesia Surakarta: Surat tanggal 15 Desember 1953 tentang penerimaan kembali voorschoot dari Panitia Pasar Derma Panitia 1/4 Abad kes. Wanita Indonesia Surakarta sebesar Rp. 5.000,00, dengan lampiran. | tindakan | 3 lembar |
| 326. | Ketua Rapat Inter Kementerian kepada Kabinet Presiden: Notulen Rapat tanggal 23 Desember 1953 membahas tentang pengurusan pengaturan dana/anggaran untuk kementerian-kementerian/jawatan-jawatan. | stensilan | 1 sampul |
| 327. | R. Hasan Moestapha, pensiunan residen kepada Menteri Dalam Negeri: Surat tanggal 5 Januari 1954 tentang dipergunakannya uang kredit RI untuk karesidenan Cirebon, dengan surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 328. | Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri: Surat Edaran tanggal 11 Januari 1954 tentang instruksi-instruksi kerumahtangga mengenai pengurusan keuangan. | stensilan | 1 lembar |
| 329. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 22 Januari 1954 tentang pemeriksaan (inspeksi) pada jawatan-jawatan dan kantor. | stensilan | 1 lembar |
| 330. | Kepala Kas Negei dan Ketua TU Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 10 Januari, 13 Januari 1954 tentang penyetoran uang di kas negeri Jakarta. | asli | 2 lembar |
| 331. | Yayasan Kantor Berita Nasional Antara: Pemberitahuan tanggal 13 Pebruari 1954 tentang kenaikan uang langganan bulletin berita-berita Antara. | asli | 1 lembar |
| 332. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 Juni 1952 - 14 Agustus 1957 tentang tuntutan pemberian kredit kepada petani. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 333. | Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan: Edaran tanggal 16 Pebruari 1954 tentang kesempatan untuk menukar uang kertas pemerintah dari Rp 0.50,00, Rp 1,00 dan Rp 2.50,00 yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan s/d 30 Juni 1954, dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 334. | DPRDS Kabupaten Bandung dan Ciamis: mosi-mosi tanggal 19 Pebruari - 19 Maret 1954 tentang desakan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif listrik. | asli | 5 lembar |
| 335. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 9 Maret 1954 - 10 Januari 1955 tentang ketentuan pertanggung-jawaban keuangan. | stensilan | 1 sampul |
| 336. | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan 5985/M tanggal 11 Maret 1954 tentang penyetoran sisa uang transaksi panitia stockpiling kepada kas negara. | stensilan | 1 lembar |
| 337. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden RI: Surat tanggal 27 Maret 1954 tentang penjelasan persetujuan keuangan RI dengan Nederland, dengan lampiran. NB: lampiran dalam Bahasa Belanda. | asli | 2 lembar |
| 338. | Beberapa DPRDS di Jawa-Tengah dan Tuban: Resolusi-resolusi tanggal 28 April 1954 - 21 Maret 1958 tentang tuntutan diadakan Badan Bea Perkreditan. | tembusan | 1 sampul |
| 339. | Lembaga Missi Reclassering RI kepada Menteri Perekonomian: Surat tanggal 1 Mei 1954 tentang permohonan pembagian devisen reserve Pemerintah RI seharga Rp 3.000.000,00 kain kasar. | tembusan | 1 lembar |
| 340. | Kementerian Perhubungan, organisasi profesi: Surat-surat tanggal 6 Mei 1954, 7 Mei 1955 tentang tarif-tarif kendaraan | tembusan | 2 lembar |
| 341. | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan No. 8251/M tanggal 26 Mei 1954 tentang penetapan jumlah 'optrektoelage' dari Ir. Ukar Bratakusumah, pegawai tinggi pada Kementerian Perekonomian disertai tugas kepala perusahaan tambang timah Bangka sebesar Rp. 2.000,00. | stensilan | 1 lembar |
| 342. | Menteri Keuangan: Surat Edaran tanggal 17 Mei, 18 Juni, 30 Nopember 1954 tentang petunjuk tata pembukuan keuangan pada kementerian-kementerian, dengan lampiran. | stensilan | 7 lembar |
| 343. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 23 Juni 1954 tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan straits dollar di daerah Riau, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 344. | Menteri Keuangan kepada semua kementerian: Surat tanggal 9 Juli 1954 tentang belanja modal tahun 1954, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 345. | Eks Pabrik Senjata dan mesin tentara 'Smeru': Surat tanggal 23 Agustus 1954 tentang pertanggung-jawaban keuangan, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 346. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 198989/U.M.I tanggal 17 September 1954 tentang pinjaman Bank Indonesia kepada pemerintah dengan jangka waktu panjang. | salinan | 1 lembar |
| 347. | Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kec. Dampit kepada Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): resolusi tanggal 18 September 1954 tentang desakan dikeluarkannya pengeluaran uang jerih payah para anggota PPP. | tindakan | 1 lembar |
| 348. | Dewan Ekonomi Indonesia Pusat: statement tanggal 5 Oktober 1954 tentang tuntutan peninjauan kembali Bleid Pemerintah dalam pelaksanaan di bidang perekonomian dan keuangan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 349. | Bank Negara Indonesia: Surat Pemberitahuan tanggal 25 Oktober 1954 tentang peraturan bea materai. | asli | 1 lembar |
| 350. | Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal tanggal 25 Oktober 1954 tentang daftar Kepala Pembukuan Anggaran, disertai surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 351. | Pusat Gabungan Kebudayaan kepada Kepala Jawatan Kebudayaan: Laporan, tanggal 20 Nopember 1954 tentang pertanggung-jawaban keuangan subsidi Pusat Gabungan Kebudayaan. | tembusan | 1 sampul |
| 352. | Beberapa Kementerian: Surat-surat tanggal 23 Nopember 1954 , 4 Juli 1957 tentang larangan pemberian devisen untuk mendatangkan buku/majalah berbahasa Indonesia dan daerah dari luar negeri. | tembusan | 3 lembar |
| 353. | Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 25 Nopember 1954 tentang permintaan kembali ongkos pelabuhan penerima (K.B atau koster Bestemmingshaven) | stensilan | 1 lembar |
| 354. | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan No. 17.490/M, tanggal 11 Desember 1954 tentang pencabutan kembali pemberian batas besarnya persediaan modal Yayasan Kredit Daerah. | stensilan | 1 lembar |
| 355. | Kementerian Keuangan: SE tanggal 16 Desember 1954 tentang peninjauan kembali peraturn pelaksanaan perhitungan (regularisasi) anggaran, dengan lampiran. | petikan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 356. | Perdana Menteri RI kepada para Menteri: Surat Edaran No. 5/RI/1955, tahun 1955 tentang pembelian karangan bunga atas beban negara. | stensilan | 1 lembar |
| 357. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan, tanggal 10 Januari 1955 - 22 Mei 1957 tentang surat perintah membayar uang (SPMU). | salinan | 1 sampul |
| 358. | Kementerian Keuangan: Laporan tanggal 19 Pebruari 1955 tentang keuangan Sumatera Selatan. | stensilan | 1 sampul |
| 359. | Prins-Regent de Rechthebbende van Geheel Sumatra: Surat tanggal 22 Pebruari 1955 tentang pengeluaran penetapan untuk mendapat pembayaran tunjangan beserta tambahan-tambahannya, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 360. | DPRDS-DPRDS: resolusi-resolusi tanggal 24 Pebruari - 20 April 1955 tentang tuntutan peraturan pemberian restitusi ongkos perawatan bagi buruh otonom. | asli | 1 sampul |
| 361. | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 5 Maret 1955 - 15 Desember 1956 tentang sikap terhadap dilaksanakannya peninjauan kembali PGPN 1955 oleh pemerintah. | asli | 1 sampul |
| 362. | Kementerian-kementerian: Surat-surat tanggal 5 Maret 1955 - 29 Oktober 1956 tentang pemberian tunjangan jabatan. | tembusan | 1 sampul |
| 363. | Menteri Perhubungan, Dr. A. K. Gani kepada Kabinet Presiden RI: Surat tanggal 7 Maret 1955 tentang proyek-proyek baru Kementerian Perhubungan dalam rangka pinjaman luar negeri, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 364. | Perorangan kepada Wakil Presiden: Surat tanggal 10 Maret 1955 tentang permohonan dana untuk membangun suatu armada perang. | asli | 1 lembar |
| 365. | Kepala Jawatan Pegadaian Negara: Surat Edaran No. 4/1955 tanggal 18 Maret 1955 tentang penaksiran barang perhasan jemaah haji, dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 366. | Bank Rakyat Indonesia kepada Kabinet Presiden RI: Surat tanggal 25 April 1955 tentang simpanan uang atas nama Sabirin, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 367. | Menteri Luar Negeri kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat tanggal 4 Mei 1955 tentang kenaikan saham-saham Indonesia di Bursa Amsterdam, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 368. | N.V. Stoom Vaart Maatschappij Nederland kepada Jawatan Kereta Api : Surat tanggal 9 Juni 1955 tentang ongkos pembongkaran dan pengeluaran barang-barang dari kapal Karimata, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 369. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 143826/I.N. Tanggal 23 Juli 1955 tentang bea masuk kendaraan-kendaraan bermotor bagi keperluan tenaga-tenaga bangsa asing yang bekerja pada Republik Indonesia. | salinan | 1 lembar |
| 370. | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan No. 10.734/M, tanggal 6 Agustus 1955 tentang penunjukan Yayasan Perbekalan dan Persediaan di Jakarta atau cabang-cabangnya diwajibkan menerima bukti pembayaran penghasilan lebih. | stensilan | 1 lembar |
| 371. | DPRD Maluku Tenggara kepada Mendagri: Surat tanggal 12 September 1955 tentang permohonan kabar atas penyelesaian tunjangan Pemerintah Negeri Pulau-pulau Kei berjumlah Rp. 90.000,00. | tembusan | 1 lembar |
| 372. | Panitia Pembela Pelajar Kurang Mampu SMAN III A/C Medan: surat pernyataan tanggal 22 September 1955 tentang keringanan pembayaran uang pembangunan sekolah. | asli | 1 lembar |
| 373. | Panitia Pendong Pelajar / Mahasiswa Daerah Tertutup Sulawesi Selatan: surat pernyataan tanggal 22 September 1955 tentang bantuan pinjaman untuk pelajar/mahasiswa. | asli | 1 lembar |
| 374. | Menkeu: Surat tanggal 26 September 1955 tentang cara baru untuk memajukan likwidasi bangunan milik warga musuh, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 375. | Mr. H.J. Adiwinata, Kepala Jawatan Imigrasi: surat tanggal 10 Desember 1955 tentang uang jerih penjualan surat kependudukan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 376. | Menteri Perekonomian: Keputusan No. 17235/M, tanggal 14 Desember 1955 tentang instruksi kepada Inspektur Keuangan, Almatsir untuk mengadakan pemeriksaan keuangan tambang-tambang minyak Sumatera Utara, dengan lampiran dan surat pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 377. | Dewan Pengawas Keuangan kepada para menteri: Surat tanggal 20 Desember 1955 tentang petunjuk-petunjuk terhadap penyelesaian masalah pembayaran gaji pegawai. | tembusan | 1 lembar |
| 378. | Menteri Kehakiman: Surat Keputusan tanggal 9 Januari 1956 tentang pembubaran ' Stichting Cridiet Hulpbank voor Nedeland Indie'. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 379. | Kantor Urusan Pegawai kepada Direktur Presiden RI: Surat tanggal 26 Januari 1956 tentang pelaksanaan peraturan gaji pegawai yang baru (PGPN 1955), dengan lampiran. | asli | 8 lembar |
| 380. | Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri kepada KUA Propinsi Sulawesi: Surat tanggal 23 Januari 1956 tentang kelambatan pembayaran biaya ongkos penginapan pegawai RI (RPH. Nganteng), dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 381. | Yayasan Gemah Ripah kepada Presiden RI: Surat tanggal 8 Februari 1956 tentang Bank Rekonstruksie Gemah Ripah, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 382. | Kabinet PM: laporan, tanggal 28 Maret 1956 tentang ralat anggaran belanja tahun dinas 1956, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 383. | N.V. JANEHA: Surat tanggal 7 Mei 1956 tentang gugatan kepada Bank Negara Indonesia atas pembatalan pemberian kredit, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 384. | Perorangan: Surat-surat tanggal 4, 21 Juni, 2, 27 Agustus 1956 tentang permohonan penggantian uang dan penyelesaian mengenai pendaftaran menurut PP 16/1954 (penyaluran bekas pejuang bersenjata). | tindakan | 4 lembar |
| 385. | Menteri Keuangan: Surat Edaran tanggal 3 Juli 1956 tentang pengadaan buku kas umum, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 386. | Kedutaan Besar RI di Roma: Surat-surat tanggal 13, 14 Juli 1956 tentang biaya pembelian patung, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 387. | Jawatan Pusat Pembelian Pemerinta RI (DJAPPP) kepada Kepala Bagian Perlengkapan Kepolisian Negara: Surat tanggal 22 Juni - 24 Agustus 1957 tentang pengesahan pembelian ransel dan karpet. | tembusan | 2 lembar |
| 388. | Organisasi-organisasi massa: Resolusi-resolusi tanggal 27 Juli 1956 - 17 September 1957 tentang pembayaran gratifikasi tahun 1956 (tambahan pembayaran istimewa). | tembusan | 4 lembar |
| 389. | Kementerian Keuangan: surat-surat terbuka tanggal 4 September 1956 - 14 Januari 1957 tentang masalah keuangan. | tembusan | 1 sampul |
| 390. | I.M. Qaimuddin, bekas Inspektur Pendidikan Masyarakat di Makassar: Surat tanggal 7 Oktober 1956 tentang pengemaliam uang sebanyak Rp. 11.503,50, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|------------------------|----------|
| 391. | Sekretaris Presiden kepada Direksi BRI: Surat tanggal 24 Oktober 1956 tentang Simpanan kas desa Madiun Lor sebelum perang, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 392. | DPR: usul UU tentang anggaran RI tahun dinas 1956 yang telah disetujui Rapat Pleno DPR tanggal 19 Desember 1956. | salinan, pertinggal | 1 sampul |
| 393. | DPRD Kabupaten Lahat: resolusi tanggal 2 Januari 1957 tentang tuntutan pengeluaran otorisasi rencana perluasan irigasi. | asli | 1 lembar |
| 394. | Persatuan Padi Rakyat Indonesia kepada Dewan Konstituante RI: Surat tanggal 11 Januari 1957 tentang permohonan kredit oleh koperasi dan organisasi rakyat padi/beras Indonesia, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 395. | Kementerian Keuangan: Surat-surat tanggal 21 Januari - 1 Desember 1957 tentang peredaran uang tahun 1951 - 1957, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 396. | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri: Surat tanggal 14 Pebruari 1957 tentang pengeluaran modal untuk PT "Penerbitan Universitas", dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 397. | Perorangan : surat-surat tanggal 22 Maret, 14 Juni 1957 tentang permohonan penyelesaian pembayaran uang inpassing, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 398. | Jawatan Kepolisian Negara kepada Kantor Pusat Perbendaharaan: surat tanggal 11 April 1957 tentang pertanggungjawaban Bulan Januari 1957, dengan lampiran. NB: lampiran tidak ada. | tembusan | 1 lembar |
| 399. | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Kehakiman: Surat tanggal 8 Mei 1957 tentang ketekoran penjara Sukamiskin di Bandung, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 400. | Kementerian Keuangan: Surat-surat tanggal 18 Mei, 22 Juli 1957 tentang peredaran uang pada akhir bulan September 1956, Mei dan Juli 1957, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 401. | Gabungan partai-partai politik/organisasi-organisasi masa dan buruh di Kuala Tungkal: surat-surat pernyataan tanggal 29 Mei 1957 tentang tuntutan kepada pemerintah pusat agar mencegah akibat-akibat timbulnya inflasi yang umumnya merugikan/menekan rakyat. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 402. | Kabinet Perdana Menteri: surat tanggal 13 Juni 1957 tentang Keputusan PMRI No. 416.57/Keu.OT., tanggal 29 Mei 1957 mengenai persetujuan pemberian kredit kepada panitia-panita negara, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 403. | Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI: Surat tanggal 3 Juni 1957 tentang permohonan dana untuk pembangunan perpustakaan keb. Bangsa Asia, dengan lampiran. NB: lampiran dalam Bahasa Inggris dan Jepang. | asli | 2 lembar |
| 404. | Ki Moesa'1 Machfoed kepada PM: nota sumbangsih, tanggal 14 Juni 1957 tentang bahaya 'hot money' dan usaha mengatasinya. | tembusan | 1 lembar |
| 405. | General Trading Company Ltd. NV kepada Menteri Keuangan: Surat tanggal 15 Juli 1957 tentang pinjaman rehabilitasi/operasi luar negeri, dengan lampiran. | tembusan | 5 lembar |
| 406. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 21 Juli - 10 September 1957 tentang permohonan peninjauan kembali UU Darurat, No. 16/1957 mengenai pajak bangsa asing. | tembusan | 1 sampul |
| 407. | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 235 tanggal 3 Agustus 1957 tentang pembubaran panitia penyaringan pembagian devisen terbatas dan pembentukan panitia penyaringan transfer linvisibles. | salinan | 1 lembar |
| 408. | KSAD: Surat Keputusan, tanggal 9 September 1957 tentang pembentukan panitia penyelesaian tunggakan-tunggakan hutang terhadap Yayasan Persediaan dan Perbekalan. | salinan | 1 lembar |
| 409. | Konstituante: notulen rapat terbuka ke-57 tanpa tanggal Oktober 1957 tentang RUU persetujuan RI terhadap anggaran dasar Badan Tenaga Atom Internasional. | stensilan | 1 sampul |
| 410. | Kementerian Keuangan kepada Perdana Menteri RI: Surat tanggal 11 Nopember 1957 tentang permintaan kredit untuk membayar kekurangan ongkos rombongan gending Sriwidjaya Palembang - Jakarta PP, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 411. | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Bea dan Cukai: Surat tanggal 19 Desember 1957 tentang pembebasan bea barang. | pertinggal | 1 lembar |
| 412. | DPRD Minahasa: mosi tanggal 15 Januari 1958 tentang pemberian ganti rugi Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia (pampasan perang) dan realisasi perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. | stensilan | 2 lembar |

F. HUBUNGAN
LUAR NEGERI

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 413. | Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jabar: Surat Keputusan No. 214/9/PPD/58 tanggal 15 September 1958 tentang wewenang untuk menerima overloopgelden untuk gubernur Jawa Barat. | salinan | 1 lembar |
| 414. | Direksi CV Umum, Ny. Enny Mariany: Surat tanggal 29 Agustus 1959 tentang permohonan menukar uang di bank mana saja yang ditunjuk oleh Presiden sehubungan dengan kebijaksanaan moneter, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 415. | Organisasi buruh: surat-surat pernyataan tanggal 1 September - 5 Oktober 1959 tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi sanering uang. | asli | 3 lembar |
| 416. | Kedutaan-kedutaan RI di luar negeri: laporan-laporan tahun 1950-1959 tentang kegiatan kedutaan-kedutaan RI di luar negeri. | tembusan | 3 sampul |
| 417. | Kedutaan-kedutaan Besar dan Organisasi-organisasi Luar Negeri: surat-surat tanggal Juli 1950 - 7 September 1957 tentang informasi kunjungan misi kebudayaan, ahli hukum, ahli aluminium dan Perdana Menteri ke Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 418. | Kemlu: surat kawat tanggal 13 Agustus 1950 tentang percakapan Mr. Mohamad Roem dengan Spender. | asli | 1 lembar |
| 419. | Kementerian Luar Negeri Desk Tiiongkok: memo tanggal 12 September 1950 tentang kawat dari Hoa Kiauw Bandung mengenai penukaran duta (kewarganegaraan anggota Perhimpunan Hoa Kiauw), dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 420. | Kedutaan Besar - Kedutaan Besar RI di luar negeri: surat-surat tanggal 12 September 1950 - 12 Desember 1958 tentang masalah-masalah diplomatik, dengan lampiran. NB: sebagian arsip dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda. | tembusan | 4 sampul |
| 421. | Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 28 Oktober 1950 - 19 Maret 1959 tentang pendapat, saran masyarakat terhadap politik luar negeri Indonesia. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 422. | Kementerian Luar Negeri kepada Kabinet Presiden RI: teks pidato Presiden India tanggal 14 Nopember 1950 dan pidato Senator Claro M. Recto berjudul "loyalty Can't be Assured by Blood", tanggal 7 Juli 1952, dengan pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 423. | Kabinet Presiden RI: daftar consulat jendral dan konsulat dari berbagai negara, Desember 1950. | stensilan | 1 lembar |
| 424. | Kabinet Perdana Menteri: surat tanggal 5 Desember 1950 tentang penyampaian salinan kawat Mr. Roem dan Dr. Leimena dari Den Haag, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 425. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1951 - 1956 tentang perundingan Indonesia-Belanda. | asli | 1 sampul |
| 426. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 13 Pebruari 1951 tentang memperkuat pertalian kultur India-Indonesia, dengan lampiran. NB: lampiran ada yang berbahasa Inggris | pertinggal | 1 sampul |
| 427. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 7 Maret 1951 tentang permohonan Konsulat RRT di Banjarmasin dipindah ke Pontianak, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 428. | Kabinet Presiden RI kepada Hitoshi Simizu: surat tanggal 20 Maret 1951 tentang balasan surat mengenai permohonan pertolongan atas diri Yaichiro Shibata, eks Panglima Angkatan Laut Jepang terhadap tuntutan hukuman mati oleh Pemerintah Australia, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 429. | Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Kementerian Pertanian: surat tanggal 21 Maret 1951 tentang penerbitan Philipina, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 430. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Perhimpunan Pemuda Indonesia (Indonesian Youth Association) Baghdad Irak: surat tanggal 29 Maret 1951 tentang pernyataan perhimpunan Indonesia mengenai masalah Marokko, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |
| 431. | Sekretaris Dewan Ekonomi dan Keuangan kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 4 April 1951 tentang perjanjian dengan Swedia, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 432. | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 10 April 1951 - 8 Mei 1952 tentang perkembangan politik luar negeri, RRT, Yugoslavia, Warsawa, dengan lampiran. | asli | 2 sampul |
| 433. | Kabinet Presiden RI kepada The Pincipal Secretary UNCI: surat tanggal 23 April 1951 tentang permintaan 2 copy laporan UNCI kepada Security Council. NB: dalam Bahasa Inggris. | pertinggal | 1 lembar |
| 434. | Menteri Penerangan kepada Presiden RI: surat tanggal 9 Mei 1951 tentang publikasi Tn H.K. Bullock bekas militer Australia di Indonesia, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 435. | Menteri Luar Negeri kepada Ingram M. Stainback Gubernur Territory of Hawaii Executive Chambere: surat tanggal 19 Mei 1951 tentang jawaban terhadap undangan pertemuan Hawaii Visitor Bureau, dengan lampiran dan surat pengantar. | tembusan | 3 lembar |
| 436. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 3 Juni 1951 - 11 Juni 1958 tentang tuntutan kepada pemerintah agar mengusulkan terlaksananya pakta perdamaian 5 negara besar (USSR, USA, Inggris, Perancis dan RRT). | asli | 1 sampul |
| 437. | Kementerian Agama RI: surat-surat tanggal 18 Juni, 10 September 1951 tentang permohonan foto dan tanda tangan Presiden untuk organisasi-organisasi ikatan Indonesia di luar negeri, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 438. | sekretaris Dewan Ekonomi dan Keuangan kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 4 April 1951 tentang perjanjian dengan Swedia, dengan lampiran. | turunan | 3 lembar |
| 439. | Menteri Luar Negeri: kawat-kawat tanggal 10 Juli 1951 tentang permohonan diadakan suatu konsulat RRT di Surabaya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 440. | Pengurus Partai Kuo Min Tang Pontianak kepada Presiden: surat tanggal 8 Agustus 1951 tentang pertentangan atas masalah pembukaan konsulat RRT di Pontianak, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 441. | Kementerian Luar Negeri: telegram dari London tanggal 18 Agustus 1951 tentang keikutsertaan dalam World Goverment Conference, disertai surat pengantar. | turunan | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 442. | Kementerian Luar Negeri: telegram tanggal 27 Agustus - 18 Desember 1951 tentang perundingan Uni Indonesia Nederland, disertai surat pengantar. | turunan | 7 lembar |
| 443. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 Agustus 1951 - 24 Januari 1951 tentang perundingan Republik Indonesia dengan Jepang. | tembusan | 1 sampul |
| 444. | Gubernur Sulawesi kepada Kabinet Presiden RI: laporan tanggal 13 Nopember 1951 tentang kunjungan R. Brash (Sekretaris III Kedutaan Inggris di Jakarta) yang diiringi H. Hopkins (Wartawan Daily Horald) ke Makassar. | asli | 1 lembar |
| 445. | Laporan-laporan tanggal 7 Desember 1951 - 14 Desember 1955 tentang keikutsertaan Indonesia dalam Konperensi International Labour Organization (ILO) di berbagai negara. NB: Bahasa Inggris dan Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 446. | Organisasi-organisasi massa, DPRDS Kab. Lampung Selatan : surat-surat pernyataan tanggal 15 Desember 1951 - 1 Desember 1956 tentang dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Timur Tengah. | tembusan | 1 sampul |
| 447. | C.A. Rebeira: ulasan berita tanggal 31 Desember 1951 - 21 Januari 1952 tentang tinjauan mingguan Dunia Politik. NB: Bahasa Inggris | stensilan | 3 lembar |
| 448. | Menteri Luar Negeri: Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dengan Pakistan, tanpa tanggal 1951. NB: berupa lampiran. | konsep | 2 lembar |
| 449. | Menteri Luar Negeri kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 5 Februari 1952 tentang 3.000 orang dewasa yang mohon pulang kembali dari New Caledonia ke Indonesia, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 450. | Kabinet Presiden kepada Prof. Ir. Jac. P. Thysse: surat tanggal 7 Pebruari 1952 tentang kesediaan Kementerian PU & T memberi fasilitas untuk terselenggaranya kongres International mengenai perumahan rakyat dan perancangan kota, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 451. | Mr. Ahmad Soebardjo, Menteri Luar Negeri: surat tanggal 9, 13 Pebruari 1952 tentang utusan ke konperensi Panitia Perdamaian Dunia. | asli | 2 lembar |
| 452. | Sekjen Kementerian Penerangan: pidato tanggal 26 Maret 1952 dalam rapat dengan Ny. Roosevelt, dengan lampiran. NB: B. Inggris | stensilan | 2 lembar |
| 453. | Kementerian Dalam Negeri: surat terbuka tanggal 2 April 1952 tentang upacara perayaan orang-orang asing. | tembusan | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 454. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14, 21 April 1952 tentang Kongres Islam di Karaci. | salinan | 2 lembar |
| 455. | Menteri Kesehatan: laporan Konperensi WHO ke-V di Genewa tanggal 5 - 22 Mei 1952, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 456. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Luar Negeri: surat-surat tanggal 8, 26 Mei 1952 tentang terjemahan surat Sultan Lahaj Fhadel Andulkarim mengenai permintaan campur tangan Presiden atas masalah Lahaj dan Inggris. | pertinggal | 4 lembar |
| 457. | Kementerian Penerangan: surat tanggal 15 Mei 1952 tentang pertimbangan permintaan tanda tangan Soekarno dari CJM Leyten, Etten NB (Nederland), dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 458. | Organisasi massa-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 25 Mei 1952 - 25 Desember 1953 tentang desakan pembukaan Kedutaan RI di Moskow. | asli | 1 sampul |
| 459. | N.V. Sibual-buali Pusat kepada Mr. Asmaun, Ketua Delegasi Dagang Indonesia - Jepang: surat tanggal 11 Juni 1952 tentang perjanjian dagang Indonesia - Jepang, disertai pengantar. | asli | 3 lembar |
| 460. | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 17 Juni 1952 tentang misi Supomo dalam perundingan RI-Belanda. | asli | 1 sampul |
| 461. | Kementerian Penerangan: surat tanggal 1 Juli 1952 tentang pertambangan dalam Paviliun Indonesia di Colombo Exhibition yang dilaporkan oleh P. Mangunsong dari Jawaatan Pertambangan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 462. | Delegasi Indonesia ke Konperensi Palang Merah International di Toronto Kanada: laporan harian No. I, III, tanggal 8 - 25 Juli 1952, disertai terjemahan pengesahan Perhimpunan PMI. NB: B. Perancis, Indonesia, Inggris. | stensilan | 1 sampul |
| 463. | Laporan tanggal 11 Juli - 7 Agustus 1952 tentang perundingan dagang dan moneter Indonesia - Jepang. | stensilan | 1 sampul |
| 464. | Menteri Perhubungan kepada ketua DPR RI: surat tanggal 6 Agustus 1952 tentang tugas delegasi yang dikirim ke Konperensi Hydrografi di Monaco, dengan lampiran. | tembusan | 6 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 465. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14 -30 Juli 1952 tentang kunjungan asli Dubes Inggris ke Surabaya dan Makassar. | | 4 lembar |
| 466. | Konperensi SOBSI Cab. Madiun: surat pernyataan tanggal 14 Agustus 1952 tentang desakan kepada pemerintah RI supaya segera membuka hubungan diplomatik serta perdagangan dengan Uni Sovyet dan RRT dengan dasar saling menguntungkan. | asli | 1 lembar |
| 467. | Bahan Pidato Presiden 17 Agustus 1952 tentang keadaan International dan hubungan Indonesia dengan negara-negara asing, disertai pengantar, tanggal 31 Juli 1952. | asli | 2 lembar |
| 468. | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Luar Negeri: surat-surat tanggal 5 September -17 Oktober 1952 tentang perangko gambar Soekarno-Quirino, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 469. | Laporan-laporan tanggal 16 September 1952 - 23 September 1957 tentang perjalanan ke luar negeri dalam berbagai acara, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 470. | Kabinet Presiden RI kepada Mr. Alexander Wiley: surat tanggal 7 Oktober 1952 tentang tanggapan Presiden Sukarno terhadap proposal Alexander Wiley mengenai kerjasama Sovyet- Amerika Serikat.N.B. Bhs. Inggris | konsep | 3 lembar |
| 471. | Menteri Luar Negeri: surat tanggal 13 Oktober 1952 tentang rombongan penari bali ke Amerika Serikat, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 472. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14 Oktober 1952 - 10 Maret 1953 tentang kerja sama Indonesia dengan perusahaan penerbangan KLM di bidang transportasi. NB: Bahasa Belanda. | stensilan | 1 sampul |
| 473. | Sekretariat Dewan Menteri: surat-surat tanggal 3 November 1952, 21 November 1955 tentang pertukaran perwakilan diplomatik antara Indonesia dengan Syiria, Jordanis, Libanon dan Libia. | tembusan | 4 lembar |
| 474. | Pengurus Partai Kuo Min Tang Pontianak kepada Presiden: surat tanggal 8 Agustus 1951 tentang pertentangan atas masalah pembukaan konsulat RRT di Pontianak, disertai surat pengantar. | asli | 1 lembar |
| 475. | R.J. Imawan: Laporan SEARAN Meeting di Melbourne Australia, tanggal 13 Januari - 9 Pebruari 1953, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 476. | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden RI: surat tanggal 15 Januari 1953 asli tentang permintaan persetujuan pengangkatan duta Denmark untuk Indonesia, dengan lampiran. | | 2 lembar |
| 477. | South India Indonesia Merchants Association: surat tanggal 17 Januari 1953 tentang pengiriman memorandum mengenai "South India Indonesia Merchante Assocation (Asosiasi Pedagang India di Indonesia)", dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 478. | Menteri Perekonomian: laporan tanggal 23 Januari - 7 Pebruari 1953 tentang perundingan dagang dengan Pakistan dan India. NB: B. Inggris. | stensilan | 1 sampul |
| 479. | Kabinet Perdana Menteri: laporan Pemerintah Belanda tanggal 16 Pebruari 1953 tentang Irian yang dimajukan Pemerintah Belanda ke PBB, disertai surat. NB: arsip sedikit rusak | stensilan | 1 sampul |
| 480. | Menteri Luar Negeri: Laporan Pameran Colombo di Cylon, tanggal 26 Pebruari 1953, disertai surat. | stensilan | 2 lembar |
| 481. | Sekretariat Komite Pusat Pembela Perdamaian Dunia untuk Indonesia: surat tanggal 29 April 1953 tentang penyampaian surat Dewan Perdamaian Dunia mengenai Kongres Perdamaian Dunia, dengan lampiran. NB: lampiran dalam B. Inggris | asli | 3 lembar |
| 482. | Kabinet Presiden RI: telegram sampai 2 - 5 Juni 1953 tentang permohonan Prof. Sardjito kepada Sri Paku Alam mengenai perpanjangan waktu untuk tinggal di London. | asli | 8 lembar |
| 483. | Menteri Luar Negeri: Surat Edaran, tanggal 3 Juni 1953 tentang pengiriman surat-surat dan atau parkit-parkit ke luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 484. | Delegasi Indonesia: laporan tanggal 15 - 27 Juni 1953 ke konperensi Working Party of The International Tin Study Group di Brussel, disertai pengantar. | tembusan | 1 sampul |
| 485. | Laporan Kongres Pemuda Se-Dunia Ke -III di Bukarest tanggal 25 - 30 juli 1953. | salinan | 1 sampul |
| 486. | Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 28 juli 1953 tentang dimasukkannya soal Tunisia Marokko kedalam agenda sidang umum PBB, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 487. | Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Jenderal kementerian Penerangan: surat tanggal 8 Agustus 1953 tentang pernyataan terima kasih kepada John Coast. | tembusan | 1 lembar |
| 488 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 25 Agustus 1953 supaya A. Mononutu jantang permohonan ch. Tangha supaya A. Mononutu jangan dilantik menjadi Duta Besar di Peking, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 489. | Perutusan Pejabat Sekretaris: laporan konperensi ECAPE di Bangkok Thailand tanggal 21 - 23 September 1953 tentang sidang ke II Economic for Asia and Feast, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 490. | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 2 Oktober 1953 tentang Konperensi Wakil-wakil Hwachioo di Peking, dengan lampiran. | tindasan | 2 lembar |
| 491. | Serikat Buruh Pelabuhan Pelayaran Surabaya: surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1953 tentang dukungan sepenuhnya terhadap kongres nasional untuk perdamaian yang diadakan di Jakarta bulan Oktober 1953. | tembusan | 1 lembar |
| 492. | Partai PERMAI: surat pernyataan tanggal 16 Oktober 1953 tentang sekitar hubungan Indonesia dengan Belanda dan sekitar politik luar negeri. | stensilan | 2 lembar |
| 493. | Menteri Luar Negeri kepada Bambang Robert dan kawan-kawan: surat tanggal 21 Nopember 1953 tentang sumbangan tenaga untuk Perwakilan RI di Davao. | tembusan | 1 lembar |
| 494. | Delegasi Indonesia: laporan sidang konperensi FAO ke-VII dan VIII di Roma, tanggal 23 November 1953 - 25 November 1955, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 495. | Beberapa organisasi internasional dan perorangan: Surat-surat tanpa tanggal 1953 -1957 tentang masalah perdamaian dunia, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 1 sampul |
| 496. | Beberapa organisasi internasional dan perorangan: kepada Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 1954 - 1957 tentang masalah politik internasional. NB: dalam Bahasa Inggris, Jerman, Perancis | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 497. | Kementerian Luar Negeri surat tanggal 9 Januari 1954 tentang pengiriman memorandum mengenai aspek-aspek pembicaraan dengan E. Wajima (Ketua Permanent Asian Conference), bantuan militer USA kepada Pakistan, Indo China, dengan lampira. | asli | 1 sampul |
| 498. | Menteri Luar Negeri: surat tanggal 8 Pebruari 1954 tentang tempat konperensi dan penginapan para kepala perwakilan RI di Asia, Arab dan Pasifik, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 499. | Sekjen Kongres Islam kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 9 Maret 1954 tentang pembukaan konsulat-konsulat Islam. NB: B. Arab | asli | 4 lembar |
| 500. | Partai Sosialis Indonesia: surat-surat pernyataan tanggal 30 Maret, 24 Mei 1954 tentang tidak dapat berlangsungnya Konperensi Sosialis Asia di Indonesia, disertai surat pengantar dan surat. | asli | 5 lembar |
| 501. | Kementerian Kesehatan: laporan kunjungan pada Royal Sanitary Institute Congress di Scarborough England, tanggal 21 April 1954, disertai pengantar. NB: dalam B. Inggris dan Indonesia | asli | 1 sampul |
| 502. | Missi Goodwill Indonesia: laporan-laporan tanggal 30 April 1954, 30 November 1955 ke Timur Tengah dan Australia, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 503. | Beberapa organisasi Jepang: Seruan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan PBB, tanpa tanggal Mei 1954 tentang menentang percobaan senjata International khususnya bom atom. NB: B. Inggris. | stensilan | 5 lembar |
| 504. | Resum pembicaraan antara delegasi Pemerintah Perancis dan anggota-anggota panitia industrialisasi, tanggal 31 Mei 1954. | salinan | 1 lembar |
| 505. | Kabinet Presiden RI: pidato Sunario, Ketua Delegasi Indonesia dalam Konperensi di Den Haag tanggal 29 Juni 1954 tentang pembubaran Uni Indonesia Nederland. | stensilan | 1 lembar |
| 506. | S'gravenhage kepada Kementerian Luar Negeri Jakarta: kawat tanggal 1 Juli 1954 tentang teks pidato Delegasi Belanda tanggal 29 Juni 1954, dengan surat pengantar. NB: sebagian arsip dalam B. Belanda | turunan | 1 lembar |
| 507. | Organisasi politik: surat pernyataan tanggal 20 Agustus - 8 Oktober 1954 tentang tidak ikut sertanya Indonesia di dalam " <i>Pact Seato</i> ". | stensilan | 2 lembar |
| 508. | Muhammad Al Husni, Karachi kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 10 September 1954 tentang krisis perpecahan kaum muslimin, dengan lampiran. NB: B. Arab + terjemahan | asli | 5 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 509. | Sekretariat Central Comite Partai Komunis Indonesia: surat tanggal 20 September 1954 tentang keterangan DN Aidit (Sekjen CCPKI) yang mendukung adanya pembicaraan Ali-Nehru untuk membicarakan masalah di Asia dan Afrika, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 510. | Front Pemuda Islam Indonesia Pare-Pare: surat pernyataan tanggal 5 Oktober 1954 tentang sokongan delegasi Indonesia yang sedang bersidang di PBB ke - 9. | asli | 1 lembar |
| 511. | Vicente L Pastrana (Formerly Cheef, Asian and Pasific Affairs, Dept. Of Foreign Affairs): artikel tanggal 29 Oktober 1954 berjudul " Our Foreign Relations and the Imperative of Foreign Policy". NB: B. Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 512. | World Ass of Parliamentarians for World Goverment: Surat tanggal 15 Nopember 1954 tentang penyampaian Proposals for the Revisions of the United Nations Charter, dalam bahasa Inggris, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 2 lembar |
| 513. | Menteri Kehakiman: Surat Kputusan No. J. S. 8/204/23 tanggal 17 Nopember 1954 tentang perpanjangan waktu perjalanan Jakarta - Rangoon dalam seminar kriminolog di Rangoon. | stensilan | 1 lembar |
| 514. | A/N Bangsa dan Rakyat Serawak: surat tanggal 24 Nopember 1954 tentang permohonan kepada Presiden dan Rakyat Indonesia untuk menyampaikan cita-citanya kepada PBB untuk mengusir penjajah Inggris dari Serawak. | asli | 1 lembar |
| 515. | PSII kepada Presiden: teks tanpa tanggal 1955 tentang penilaian PSII terhadap suatu atau yang dilakukan raja Saudi Arabia dalam menyambut presiden RI. | stensilan | 1 lembar |
| 516. | Kabinet Presiden RI: naskah tanpa tanggal 1955 tentang perjanjian persahabatan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Uni Birma. | stensilan | 1 lembar |
| 517. | Presiden Republik Venezuela kepada Presiden RI: surat tanggal 3 Januari 1955 tentang sambutan terhadap surat kepercayaan yang disampaikan oleh Duta Besar RI, Mr. Usman Sostroamidjojo. NB: B. Inggris + terjemahan | asli | 2 lembar |
| 518. | Menteri Luar Negeri kepada sekretaris presiden RI: surat tanggal 26 Januari 1955 tentang tulisan mengenai Indonesia oleh pers asing, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 519. | Menteri PP & K kepada Menlu: surat tanggal 27 Januari 1955 tentang persetujuan kebudayaan dengan Mesir. | tembusan | 1 lembar |
| 520. | S. Roeslan Darmadjati: laporan tanggal 4 Pebruari 1953 tentang affair di Rangoon. | asli | 1 lembar |
| 521. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Pebruari 1955 - 24 Januari 1957 tentang Konferensi Asia Afrika. NB: sebagian bahasa Inggris. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 522. | Menteri Luar Negeri India kepada Presiden RI: surat tanggal 11 Pebruari 1955 tentang dukacita terhadap prospek pertemuan di Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 523. | Laporan tanggal Mei 1955 tentang World Health Assembly ke - VIII di Meksiko City, disertai pengantar. | tembusan | 1 sampul |
| 524. | Kementerian Perhubungan RI: laporan tanggal 2 - 14 Mei 1955 tentang Komisi Penyelenggaraan dan Penghubung dari Uni Pos Sedunia di Lugano (Swiss). | cetak | 1 sampul |
| 525. | Nationalis Popular Revolution/by Communitied of Vietnam kepada Presiden RI: telegram tanggal 20 Mei 1955 tentang dukungan terhadap <i>Ngochinhdiem</i> untuk melantik <i>Regins Republican</i> . | asli | 1 lembar |
| 526. | Kementerian Luar Negeri kepada Presiden RI: surat tanggal 7 Juni 1955 tentang perbandingan kertas kerja Indonesia mengenai kebudayaan dengan laporan sub komisi kerjasama kebudayaan, dengan lampiran dalam bahasa Inggris. | asli | 3 lembar |
| 527. | Partai Islam Indonesia: surat tanggal 10 Juni 1955 tentang protes adanya Hospitality Committee sewaktu diadakannya Konperensi Asia Afrika. | asli | 1 lembar |
| 528. | Front rakyat yang telah berpartai kepada Presiden: surat tanggal 1 Juli 1955 tentang wakil non partay pada pemerintahan PBB, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 529. | Ketua Delegasi Indonesia untuk PBB: surat tanggal 8 Juni 1955 tentang pengiriman pidato peringatan 10 tahun PBB, dengan lampiran. NB: Bahasa Inggris dan Indonesia | asli | 1 sampul |
| 530. | Formateur Front Kemerdekaan Malaya: Pengumuman tanggal 20 Juli 1955 tentang pernyataan ulang tahun ke - VII perang di Malaya. | stensilan | 1 lembar |
| 531. | Institute of World Peace and Philosophy of Peace: kata sambutan Misao Tsurhwa dalam E.A.R. R. Conference, tanggal Agustus 1955. NB: B. Inggris | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 532. | Ir. Ong Ping Liang, Kepala Jawatan Pelabuhan: surat tanggal 2 Agustus 1955 asli tentang pengiriman laporan mengenai rapat tahunan Permanent International Association of Navigation Congressses di Paris, dengan lampiran. | | 1 sampul |
| 533. | Dewan Pimpinan Partai Al Tahir Jerusalem: surat tanggal 15 Agustus 1955 asli tentang protes terhadap isi pidato Menteri Luar Negeri AS Dulles mengenai persoalan-persoalan di Timur Tengah, dengan lampiran NB: B. Inggris | | 4 lembar |
| 534. | Kepala Direksi Planning & Research Kelapa International: laporan tanggal 26 - 31 Agustus 1955 tentang Konperensi Perkebunan di Manila, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 535. | Pengurus Partai Kuo Min Tang Pontianak kepada Presiden: surat tanggal 8 Agustus 1951 tentang pertentangan atas masalah pembukaan konsulat RRT di Pontianak, disertai surat pengantar. | stensilan | 3 lembar |
| 536. | Sekretaris Universitas Gajah Mada Kepada Kepala Biro Hubungan Luar Negeri dan urusan UNESCO Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 5 September 1955 tentang pengiriman Drs. R. Asoeng Pranoto, Lektor Fak. Kedokteran Hewan untuk menghadiri Technical Meeting on Poultry Production di India. | tembusan | 1 lembar |
| 537. | Warganegara Mesir kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 20 September 1955 tentang permohonan agar Presiden Soekarno menjadi perantara di dalam menyampaikan keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan kepada Pemerintah Mesir, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 3 lembar |
| 538. | Menteri Luar Negeri: Surat Edaran tanggal 19 Oktober 1955 tentang pengiriman delegasi ke Luar Negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 539. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 28 Nopember 1955 tentang kenaikan tingkat kedutaan RI d Thailand menjadi Kedutaan Besar. | tembusan | 1 lembar |
| 540. | Gerakan Pemuda Anson: surat pernyataan, tanggal 9 Desember 1955 tentang tuntutan perhatian kepada pemerintah mengenai delegasi. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 541. | Sekretaris Presiden kepada Soetomo, Direktorat tenaga Kerja Kementerian Perburuhan: surat tanggal 11 Januari 1956 tentang ucapan terima kasih atas pengirim laporan ' Asian Technical Conference on Vocational Training for Industry, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 542. | Wakil Presiden India dan Masyarakat Luar Negeri kepada Presiden RI: surat- asli surat tanggal 18 Januari - 3 Desember 1956 tentang permintaan tanggapan mengenai negara-negaranya (India, Amerika Serikat , Italia dan Pasific). NB: B. Inggris | | 1 sampul |
| 543. | Wakil Ketua Delegasi Indonesia kepada Presiden RI: laporan tanggal 6 Maret 1956 tentang sidang GATT ke- X di Genewa, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 544. | Menteri Luar Negeri kepada Kabinet Presiden RI: daftar referensi menteri luar negeri RI, tanggal 10 April 1956. | stensilan | 1 lembar |
| 545. | Menteri Luar Negeri: kawat dari Kedubes RI di Lisbon tanggal 14, 19 April 1956 tentang Basuki Abdullah disertai surat pengantar. | turunan | 3 lembar |
| 546. | Kabinet Presiden RI: text of Eisenhower's, tanggal 22 April 1956 tentang masalah perdamaian dunia. NB: B. Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 547. | W.A Mahahanap kepada Presiden RI: surat tanggal 5 Mei 1956 tentang surat yang ditujukan presiden USA mengenai sikap rakyat RI terhadap allied forces, dengan lampiran. NB: lampiran dalam bahasa Inggris. | asli | 3 lembar |
| 548. | Kabinet Presiden kepada Jawaharlal Nehru: surat tanggal 5 Mei 1956 tentang jawaban surat tanggal 5 Mei 1956 tentang jawaban surat tanggal 7 April 1956 mengenai tinjauan beberapa masalah Internasional. NB: B. Inggris | konsep | 1 lembar |
| 549. | Washington kepada Kementerian Luar Negeri: telegram tanggal 9 Mei 1956 tentang berita yang memuat Soekarno nervous berkunjung ke UNSS. NB: B. Inggris | turunan | 1 lembar |
| 550. | Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 5 Juni 1956 tentang bantuan luar negeri. | tembusan | 1 lembar |
| 551. | Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower kepada Presiden Soekarno: surat tanggal 5 Juni 1956 tentang ajakan kerjasama dalam berbagai bidang. NB: B. Inggris | turunan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 552. | Kabinet Presiden RI: surat tanggal 16 Juni 1956 tentang pemberitahuan pembukaan perwakilan Aldjazair di Jakarta. | asli | 1 lembar |
| 553. | The South East Asia Association, INC: anggaran dasar, tanggal 15 Juli 1956. NB: dalam Bahasa Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 554. | Miguel Angel Rubinec, Argentina kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 30 Juli 1956 tentang seruan kaum Nasionalis Ukraine di dunia merdeka, dengan lampiran. NB: B. Argentina + terjemahan | asli | 5 lembar |
| 555. | Perdana Menteri Republik Indonesia: Pengumuman Pemerintah tanggal 8 Agustus 1956 tentang masalah Terusan Suez di Mesir. | stensilan | 1 lembar |
| 556. | Kabinet Presiden RI: surat-surat pemberitahuan, tanggal 11 Agustus, 10 Oktober 1956 tentang kedatangan rombongan ketua Parlemen Mr. Sartono dari RRT. | asli | 2 lembar |
| 557. | Kabinet Presiden RI kepada James C. Baird, Direktur International Corporation Administaton (ICA): surat tanggal 20 September 1956 tentang kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 558. | Sekretaris Dewan: Menteri Luar Negeri : surat tanggal 26 September 1956 tentang pemberian <i>verdienstkreuz</i> der Bundes Republik Deutschland. | tembusan | 1 lembar |
| 559. | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal Oktober - 1 Nopember 1956 tentang sikap terhadap penandatanganan <i>joint venture</i> RI-URSS. | asli | 5 lembar |
| 560. | Kementerian Perhubungan : laporan tanggal 13 Oktober 1956 tentang perjalanan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ke Eropa dan AS, disertai surat. | stensilan | 2 lembar |
| 561. | Presiden Amjad Elzahawy kepada Presiden RI: telegram tanggal 16 Oktober 1956 tentang ajakan berpartisipasi kepada seluruh Bangsa dan Pemerintah Islam untuk membantu Yordan atas agresi Israel. | asli | 1 lembar |
| 562. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 30 Oktober 1956 tentang Agreement Duta Besar Australia yang baru untuk Indonesia, L.R Mc Intyre. | tembusan | 1 lembar |
| 563. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 8 November 1956 tentang pengiriman delegasi Indonesia ke Sidang Majelis Umum PBB ke-11 tahun 1956 di New York, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 564. | Society for Prevention of World War III. Inc :surat tanggal 19 Nopember 1956 tentang krisis Timur Tengah , dengan lampiran. NB. B. Inggris | asli | 2 lembar |
| 565. | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kesehatan: surat tanggal 21 Nopember 1956 tentang pengiriman delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Colombo Plan di Wellington New Zealand. | tembusan | 1 lembar |
| 566. | The Asia Foundation kepada Presiden RI: surat tanggal 12 Desember 1956 tentang perwakilan AF di Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 567. | DPRDP Bogor: Surat pernyataan tanggal 13 Desember 1956 tentang dukungan terhadap sikap Pemerintah dalam menghadapi persoalan Timur Tengah. | asli | 1 lembar |
| 568. | Mr. Wanggai Dbourbon kepada Presiden: telegam tanggal 2 Pebruari 1957 tentang usul pengangkatan Abhirubuy menjadi anggota delegasi ke PBB. | asli | 1 lembar |
| 569. | Bureau Mahasiswa Veteran Central Jogjakarta: surat tanggal 2 Februari 1957 tentang permohonan pengiriman misi kebudayaan Indonesia ke negara-negara Mesir, Timur Tengah. | asli | 1 lembar |
| 570. | Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 8 Februari 1957 tentang konsep jawaban atas pertanyaan mahaiswa Heidelber, Jerman terhadap pendirian Presiden Soekarno atas masalah Hongaria, dengan lampiran. NB: sebagian arsip B. Jerman dan rusak. | asli | 2 lembar |
| 571. | Para Alim Ulama Islam, Karbala (Irak) kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 20Maret 1957 tentang permohonan kepada Presiden Soekarno agar mendesak Pimpinan Syiria untuk meninjau kembali keputusan hukuman mati beberapa orang terkemuka Syiria, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 572. | World Association of World Federalists kepada Presiden RI: surat tanggal 21 Maret 1957 tentang himbauan untuk mendukung pasukan keamanan PBB, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 2 lembar |
| 573. | Delegasi Indonesia : laporan <i>Asian Legal Consultative Committee Conference</i> di New Delhi pada tanggal 18 - 27 April 1957. NB: B. Inggris | stensilan | 1 sampul |
| 574. | Direktur The Yamanashi Prefectural Conference of the Atomie and Hydrogen Bombs Prohibition: surat tanpa tanggal April 1957 tentang rencana konperensi larangan penggunaan bom atom dan hidrogen, dengan lampiran. NB: dalam bahasa Inggris. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 575. | Indo-Pacific Fisheries Council kepada Presiden RI: surat tanggal 14 Juni 1957 tentang penghargaan kepada Indonesia atas kesediannya menyelenggarakan sidang ke-VII di Bandung. NB: B. Inggris | asli | 1 lembar |
| 576. | Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Presiden RI: surat tanggal 14 Juni 1957 tentang memorandum Irian Barat di PBB, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 577. | Anggota Federasi Algeria kepada Presiden: telegram tanggal 30 Juli 1957 tentang kerja-sama seluruh Masyarakat yang mencintai kebebasan. NB: B. Inggris | asli | 1 lembar |
| 578. | Direktur Kabinet Presiden kepada Mr. Sunarjo, Dubes RI di London: surat tanggal 24 Agustus 1957 tentang Afro-Asian Student Association, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 579. | Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 25 September 1957 tentang rencana U.S. National Commission for UNESCO untuk mengadakan sebuah Konferensi Asia and the United States di San Fransisco pada tanggal 6 - 9 Nopember, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 580. | Kesatuan Malaya Merdeka: surat tanggal 15 Oktober 1957 tentang pengiriman pernyataan yang maksudnya menjelaskan pada Pemerintah Indonesia bahwa Malaya belum merdeka penuh, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 581. | Wakil Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat: surat pertanyaan, TASS tanggal 19 Oktober 1957 tentang penyanggahan peranan AS dalam persiapan-persiapan penyanggahan peranan AS dalam persiapan-peperangan di Timur Tengah. | stensilan | 1 lembar |
| 582. | <i>The Committe of One Million: A Report to the Political Committee of the Assembly of Captive Europeanen Nations dengan judul "Does Liberation Mean War?"</i> , dengan surat pengantar tanggal 11 Nopember 1957. NB: B. Inggris | cetak | 1 sampul |
| 583. | DPRD Kabupaten Pati kepada Presiden RI: resolusi tanggal 12 Nopember 1957 tentang dukungan atas tuntutan Delegasi Indonesia di PBB. | asli | 1 lembar |
| 584. | Presiden Open Door International kepada ILO: surat tanggal 12 Nopember 1957 tentang emansipasi ekonomi pekerja wanita, dengan lampiran. NB: dalam B. Inggris | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|-------------|
| 585. | Ketua Misi Perwakilan FAO di Indonesia kepada Sekretaris Menteri Pertanian: surat tanggal 27 Nopember 1957 tentang penempatan tenaga ahli kapas FAO untuk Indonesia. NB: B. Inggris | tembusan | 1 lembar |
| 586. | Kementerian Luar Negeri kepada Presiden RI: laporan tanggal 21 Desember 1957 tentang Sidang Preparatory Commision & Konperensi Umum Badan Tenaga Atom International di Wiena, disertai surat. | stensilan | 2 sampul |
| 587. | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 26 Desember 1957 tentang surat dari Amador A Main, direktur LATINO Inc. Mengenai hubungan masyarakat di Amerika Latin, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 588. | SBPU Jatim kepada Presiden RI: telegram tanggal 15 Pebruari 1958 tentang protes keras terhadap putusan Pemerintah Perancis atas hukuman mati kepada 4 gadis pejuang Aljazair. | | 1 lembar |
| 589. | Organisasi Massa dan Politik kepada presiden RI: surat-surat tanggal 1 April - 17 Juni 1958 tentang tindakan AS yang campur tangan terhadap soal-soal dalam negeri Indonesia. | tembusan | 1 sampul |
| 590. | Perorangan: pernyataan tanggal 7 April - 26 Juni 1958 tentang tuntutan agar pemerintah RI memutuskan hubungan dengan negara-negara Amerika dan Kuo Min Tang serta pembubaran SEATO. | asli | 1 sampul |
| 591. | Perdana Menteri Republik Indonesia: Pengumuman Pemerintah No. 135 tanggal 27 September 1958 tentang pengakuan Pemerintah RI terhadap Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Aljazair. | stensilan | 1 lembar |
| 592. | Menteri Penerangan: Pengumuman Pemerintah No. 135 tanggal 27 September 1958 tentang hubungan dengan Pemerintah Aljazair. | stensilan | 1 lembar |
| 593. | Kedutaan Besar RI di Peking: laporan berita Hsinhua News Agency Reliase tanggal 24 dan 29 Oktober 1959. NB: B. Inggris | stensilan | 1 eksemplar |
| G. | | | |
| 594. | Warga Asing kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 24 Oktober 1950 - 15 September 1959 tentang permohonan menetap di Indonesia. NB: B. Inggris, Belanda, Lisbon | asli | 1 sampul |
| 595. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 1951 - 1955 tentang permohonan penggantian nama. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 596. | Beberapa organisasi warga Tionghoa kepada Presiden RI: telegram tanggal 12 - 26 April 1951 tentang permohonan memperbolehkan redaktur Sinhwapo tetap tinggal di Indonesia. | asli | 3 lembar |
| 597. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Juli 1951 - 30 Nopember 1957 tentang permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 598. | Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 3 Nopember 1951 tentang permohonan memakai titel 'gusti', dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 599. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 24 November 1951 - 6 Agustus 1953 tentang permohonan kewarganegaraan Indonesia, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 600. | Hakim Pengadilan Negeri Jakarta: surat tanggal 14 Desember 1951 tentang keterangan memilih kebangsaan Indonesia atas nama Wijchgel, Jean Godfried Gustave Hubert. | salinan | 1 lembar |
| 601. | Chung Hwa Chong Hui Bima, Sumbawa kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 5 Januari 1952 tentang permohonan waktu untuk menerima/menolak kewarganegaraan Indonesia dapat diundur sampai hubungan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sehat kembali. | tembusan | 1 lembar |
| 602. | Menteri Kehakiman: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 12 Januari 1952 - 20 Maret 1956 tentang pemberian ijin masuk ke Indonesia. | salinan | 1 sampul |
| 603. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Maret 1952 - 6 Oktober 1953 tentang pembatalan akte kelahiran orang-orang Tionghoa, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 604. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Maret 1952 - 18 Mei 1953 tentang permohonan pengesahan anak. | tembusan | 1 sampul |
| 605. | Organisasi massa-organisasi massa Sumatera: resolusi-resolusi tanggal 28 Maret 1952 - 10 Nopember 1954 tentang tuntutan pengakuan marga-marga di Sumatera. | asli | 6 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 606. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 2 April 1952 - 15 Agustus 1957 tentang permohonan perubahan nama dan penggantian nama Warga Asing dan Warg Negara Indonesi, dengan lampiran. NB: lampiran tidak lengkap | tembusan | 1 sampul |
| 607. | Menteri Kehakiman kepada R.A. Apon dan Ranaju: surat-surat tanggal 12 AI 1952, 17 Desember 1955 tentang permohonan mengubah nama, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 608. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Mei 1952 - 7 Pebruari 1954 tentang permohonan memperoleh visa dan paspor ke Indonesia, dengan lampiran dan surat pengantar. NB: sebagian dalam B. Inggris | tembusan | 6 lembar |
| 609. | Komite Warga Semarang kepada Kepala Negara RI: surat tanggal 30 Juni 1952 tentang rencana UU pendaftaran bangsa asing dan warga negara turunan asing supaya ditinjau kembali, disertai surat pengantar. | asli | 1 lembar |
| 610. | WNI turunan Arab di Pasuruan kepada Presiden RI: surat pernyataan tanggal 26 Nopember, 11 Desember 1952 tentang desakan kepada Pemerintah agar mencabut peraturan kewarganegaraan Indonesia untuk turunan asing. | asli | 2 lembar |
| 611. | Pertemuan Umum WNI dibeberapa daerah Jatim: resolusi-resolusi tanggal 7 - 16 Desember 1952 tentang persamaan hak-hak WNI, disertai dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 612. | Kabinet Perdana Menteri: surat tanggal 28 Januari 1953 tentang kepergian orang-orang Tionghoa dari Indonesia ke tanah airnya, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 613. | Peserta Konferensi Kilat Jawatan-Jawatan Kemakmuran Propinsi Kalimantan: resolusi tanggal 11 April 1953 tentang syarat-syarat penting bagi perkembangan Jawatan-jawatan Kemakmuran dalam usaha membantu pelaksanaan pembukaan Kalimantan, disertai surat. | asli | 2 lembar |
| 614. | Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Luar Negeri : surat tanggal 19 Juni 1953 tentang permohonan F.M. Kilian untuk dikembalikan ke negeri Belanda, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 615. | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 6 Agustus 1955 - 11 Nopember 1957 tentang tuntutan status kewarganegaraan. | asli | 5 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 616. | Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 181113/I.N tanggal 8 Agustus 1953 tentang pemeriksaan pabean terhadap pemegang-pemegang paspor diplomatik Indonesia. | salinan | 1 lembar |
| 617. | Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menlu: surat tanggal 14 Agustus 1953 tentang WNI di Suriname, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 618. | Suroso, surat tanggal 7 September 1953 tentang kenaikan kelas Rasid Rido Hamid yang tidak Sah. | asli | 1 lembar |
| 619. | Kepala Bagian Hukum Sipil Kehakiman kepada Irene Frederika de Bok: surat tanggal 14 Oktober 1953 tentang permohonan dispensasi untuk kawin, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 620. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Januari -6 Juli 1954 tentang kegiatan warga negara asing di Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 621. | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Kehakiman: surat tanggal 18 Januari 1954 tentang permohonan pencabutan kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara Belanda atas nama J. Buist, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 622. | DPD Istimewa PERBEPBSI: surat pernyataan tanggal 2 Maret 1954 tentang desakan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan keputusan Jawatan Imigrasi Pusat mengenai pengeluaran Yong Shattar dan Hyder, ayahnya agar diijinkan tetap tinggal di Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 623. | Habib Po Kim Tjui: surat tanggal 29 September 1954 tentang pengesahan menjadi WNI, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 624. | Menteri Kehakiman: Surat Keputusan No. J.M.2/36/6, tanggal 23 Oktober 1954 tentang pendaftaran orang asing bagi mereka yang sudah ada di Indonesia. | stensilan | 1 lembar |
| 625. | Kepala Jawatan Imigrasi kepada Presiden RI: surat tanggal 29 Agustus 1955 tentang pidato-pidato pembukaan Konferensi Dinas Para Kepala Kantor Imigrasi II, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 626. | Kementerian Sosial: laporan tanggal 21 Pebruari 1956 tentang seminar Kependudukan, disertai surat. | stensilan | 1 lembar |
| 627. | John G. Breman: kawat tanggal 6 September 1956 tentang permohonan re-enter permist, disertai surat pengantar. | salinan | 2 lembar |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------|
| 628. | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan No. Perat/PM/09/1957 tanggal 4 Juni 1957 tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan. | salinan | 1 lembar |
| 629. | Persatuan Rakyat Indonesia Luar Negeri (PRILUN): resolusi tanggal 17 Oktober 1957 tentang desakan agar Pemerintahan RI menyelesaikan persoalan pengembalian Bangsa Indonesia di Philipina, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 630. | DPRD Kotapraja Sukabumi dan Tjar. Liong Hoo: resolusi tanggal 20 Maret, 7 Juli 1958 tentang Undang-Undang Dwi kewarganegaraan. | tembusan | 2 lembar |
| 631. | Konstituante RI: Surat Keputusan No. 38/k/58 tanggal 9 September 1958 tentang penetapan nama bab mengenai hak-hak azasi manusia/hak dan kewajiban warganegara. | stensilan | 1 lembar |
| H. KESEHATAN | | | |
| 632. | Menteri Kesehatan: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 30 September 1950 - 17 Oktober 1957 tentang penetapan dan pembatalan daerah-daerah yang ketularan penyakit cacar dan kolera. | salinan | 1 sampul |
| 633. | Mahasiswa Fakultas Kedokteran Jakarta dan Surabaya kepada Presiden RI: surat pernyataan tanggal 17, 21 April 1951 tentang tuntutan supaya RUU pembagian tenaga-tenaga ahli kesehatan secara rasional ditinjau kembali. | asli | 7 lembar |
| 634. | Menteri Kesehatan: surat-surat tanggal 23 Juni 1951, 15 Pebruari 1952 tentang pendirian rumah sakit di Palembang, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 635. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 4 Juli 1951, 23 Januari 1952 tentang perawatan orang-orang sakit jiwa dan rohani di rumah sakit Pemerintah. | salinan | 7 lembar |
| 636. | Kabinet Presiden RI: Jawaban atas pertanyaan seksi kesehatan di DPR tanggal 1 Agustus 1951. | stensilan | 1 lembar |
| 637. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 15 Agustus 1951 - 13 Januari 1955 tentang penutupan Praktek baru bagi dokter-dokter daerah. | salinan | 4 lembar |
| 638. | Pengurus Besar PMI: surat-surat tanggal 31 Agustus 1951 - 4 Oktober 1952 tentang susunan pengurus, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 639. | Menteri Kesehatan kepada Kabinet Presiden RI: laporan tanggal 11 September 1951 tentang rapat besar Organisasi Kesehatan Dunia di Jenewa yang disampaikan oleh Delegasi Indonesia, disertai surat. NB: sebagian dalam B. Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 640. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 1880/UU tanggal 14 Januari 1952 tentang biaya pemeriksaan pada laboratorium-laboratorium kesehatan, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 641. | Menteri Kesehatan: Maklumat II tanggal 19 Januari 1952 tentang praktek dokter oleh mereka yang tidak berhak (<i>onbevoegd</i>). | stensilan | 1 lembar |
| 642. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kepala Sanatorium Tentara, Bandung: surat tanggal 19 Pebruari 1952 tentang rontgen-toestel untuk Sanatorium Tentara Dago, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 643. | Menteri Kesehatan: Daftar tanggal 23 Pebruari 1952 - 12 Maret 1957 tentang majelis-majelis penguji kesehatan pegawai dan dokter-dokter penguji kesehatan, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 644. | Kementerian Kesehatan: Laporan Bulanan tanggal 13 Maret 1952 - 1 Desember 1954 tentang pelabuhan-pelabuhan yang ditetapkan ketularan penyakit menular, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 645. | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Kesehatan: surat tanggal 21 Maret 1952 tentang pengesahan Rumah Sakit Kusta Pelantungan, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 646. | Perorangan: surat-surat tanggal 3 Mei 1952 - 15 Juli 1957 tentang pendapat dan saran terhadap masalah kesehatan masyarakat. | asli | 1 sampul |
| 647. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 10490/UU, tanggal 5 Mei 1952 tentang peraturan untuk poliklinik kesehatan. | salinan | 1 lembar |
| 648. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 17 Juni 1952 - 19 Agustus 1957 tentang permohonan perawatan di rumah sakit dan obat-obatan. | asli | 1 sampul |
| 649. | Rumah Sakit Palang Merah Indonesia: surat keterangan tanpa tanggal September 1952 tentang kesehatan Mr. R.M Sartono, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 650. | Menteri Penerangan kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 2 September 1952 tentang hasil kesehatan Roeslan Abdulgani, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 651. | Kabinet Perdana Menteri dan Kementerian Pertanian: surat-surat tanggal 12 Nopember 1952 - 16 Nopember 1952 tentang daftar pemeriksaan pegawai di Rumah Sakit Umum Pusat. | tembusan | 1 sampul |
| 652. | Kabinet Presiden kepada KUP, Dewan Pengawas Keuangan: surat-surat tanggal 25 Nopember 1952 tentang peraturan Pegawai Negeri yang menderita sakit TBC. | pertinggal | 6 lembar |
| 653. | Komisariat Daerah Persatuan Juru Kesehatan Indonesia (PDKI) Propinsi Maluku: statement tanggal 3 Februari 1953 tentang dukungan terhadap beleid inspektur kesehatan Propinsi Mauku mengenai pembangunan Jawatan Kesehatan di Maluku. | stensilan | 1 lembar |
| 654. | Lembaga Makanan Rakyat: paper, tanggal 9 Pebruari 1953 tentang " <i>Preeliminary Survey on Malignant Malnutrition Jakarta Toddlers</i> " oleh Dr. H.A. I. C Oomen, WHO, disertai surat pengantar. NB: dalam Bahasa Inggris | stensilan | 1 naskah |
| 655. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 18 Desember 1953, 4 Desember 1956 tentang pemberantasan penyakit malaria , framboesia, disertai surat. (RAPUH/KOSONG) | stensilan | 1 sampul |
| 656. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 22 Desember 1953 - 15 Agustus 1957 tentang tuntutan kepada pemerintah untuk menambah tenaga-tenaga ahli kesehatan pelosok-pelosok desa. | asli | 6 lembar |
| 657. | Kementerian Kesehatan kepada Presiden RI: laporan tanggal 9 Juni 1954 tentang perjalanan WHO-fellowship, disertai surat. | asli | 1 sampul |
| 658. | Soenjoto kepada Wali Kota Jakarta Raya, Soediro: surat tanggal 17 Juli 1954 tentang gangguan kesehatan rakyat. | tindakan | 1 lembar |
| 659. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 16 Agustus - 16 Oktober 1954 tentang tuntutan jaminan kesehatan dan fasilitas-fasilitas kesehatan. | asli, tembusan | 8 lembar |
| 660. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 55524/UU tanggal 21 Agustus 1954 tentang perundingan antara Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah dengan Inspektur Kesehatan Maluku mengenai rumah sakit dan lain-lain, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 661. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 6 Desember 1954 - 28 Nopember 1955 tentang penyerahan hak milik dan kekuasaan atas rumah-rumah sakit, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 662. | DPRDS Maluku Tenggara: mosi tanggal 14 Desember 1954 tentang desakan kepada Pemerintah untuk membangun sanatorium bagi penderita TBC di daerah Maluku Tenggara, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 663. | Panitia korban kebakaran Gunung Sahari Ancol: surat pernyataan tanggal 22 Desember 1954 tentang desakan kepada pemerintah agar supaya memperbaiki saluran-saluran yang mengganggu kesehatan. | asli | 1 lembar |
| 664. | Dr. Med. J. Klein kepada Kepala Inspeksi Kesehatan Propinsi Kalimantan: surat tanggal 1 Januari 1955 tentang laporan tahunan kesehatan tahun 1954 Propinsi Kalimantan, dengan lampira. NB: Bahasa Jerman | tembusan | 3 lembar |
| 665. | Wongso kepada Direktur RSUP: surat-surat tanggal 17 Desember 1954, 8 Januari 1955 tentang sikap terhadap kondisi dan pelayanan di RSUP dan Rumah Sakit BKK Jatinegara, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 666. | Menteri Kesehatan RI kepada Presiden: laporan tanggal 22 Pebruari 1955 tentang keadaan banjir di sekitar daerah Kabupaten Batanghari Jambi, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 sampul |
| 667. | Federasi Veteran Dunia kepada Presiden RI: surat tanggal 17 Maret 1955 tentang informasi kedatangan Dr Louglas D. Foffelmick, ahli bedah ortopedi Amerika terkenal yang bekerja sama dengan Dr Raden Soeharso di Pusat Rehabilitasi Solo. NB: dalam bahasa Inggris | asli | 1 lembar |
| 668. | DPRDS Kabupaten Kebumen: mosi persetujuan tanggal 19 Maret 1955 tentang desakan pelaksanaan peraturan pemberian obat-obatan kepada murid-murid Sekolah Rakyat yang membutuhkan dan penyediaan kakus. | asli | 1 lembar |
| 669. | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 62762/Stat tanggal 19 Juli 1955 tentang penentuan keperluan statistik persakitan maupun keperluan surat keterangan sebab kematian, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 670. | Menteri Sosial kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 11 Agustus 1955 tentang ksehatan pelajar-pelajar di negeri Belanda, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 671. | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 58269/S, tanggal 26 Juni 1957 tentang pendirian Rumah Sakit Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. | salinan | 1 lembar |
| 672. | Konperensi Wanita Demokrat Indonesia Jateng: resolusi tanggal 30 Juni 1957 tentang desakan kepada pemerintah agar mengatasi wabah penyakit influenza. | stensilan | 1 lembar |
| 673. | Suroso Kosasih: surat tanggal 18-19 September 1957 tentang pemeriksaan RS Fatmawati. | asli | 2 lembar |
| 674. | Kepala Staf Angkatan Udara kepada kantor besar Oil Supply Committee: surat tanggal 7 Oktober 1957 tentang pelayanan OSC kepada AURI. | tindakan | 1 lembar |
| 675. | Rakyat Tjibeureum: surat pengaduan tanggal 4 Desember 1959 tentang gangguan pembuangan bekas pengolahan air celup N.V. Tjempaka terhadap pangan rakyat. | asli | 1 lembar |
| I. | | | |
| 676. | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 Agustus 1950 - 4 Desember 1959 tentang tuntutan perbaikan nasib rakyat, buruh, dan pegawai. | asli | 1 sampul |
| 677. | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Hankam, Dalam Negeri, Agama: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 25 Nopember 1950 - 18 Pebruari 1956 tentang pemberian sumbangan. | salinan | 1 sampul |
| 678. | Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai: Surat Edaran tanggal 28 Desember 1950 tentang pembagian dalam rayon-rayon kemahalan (biaya/bahan penghidupan) di berbagai tempat di daerah Indonesia, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 679. | Kepala KUP: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 15 Pebruari 1951 - 5 Desember 1955 tentang makanan dan pemondokan yang disediakan oleh pemerintah. | tembusan | 4 lembar |
| 680. | Organisasi-organisasi buruh dan massa lainnya kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 16 Februari 1951 - 25 Agustus 1952 tentang tuntutan pembagian beras untuk seluruh lapisan masyarakat. | asli | 1 sampul |
| 681. | Menteri Perdagangan/Perindustrian: surat tanggal 9 Mei 1951 tentang permohonan untuk menyinggung masalah kemakmuran untuk keterangan pemerintah dalam sidang dengan DPR, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 682. | Panitia 1 Juni Perayaan Hari Kanak-kanak International di Sibolga kepada Presiden RI: resolusi tanggal 2 Juni 1951 tentang tuntutan rakyat kepada pemerintah RI agar menambah belanja negara untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 683. | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 23 Juni 1951 - Nopember 1959 tentang tuntutan pengadaan perumahan bagi rakyat dan pegawai, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 684. | Komandan Brigade "O"/Sub Terr 11 T. D. Th/ Diponegoro kepada Jenderal Mayor Soehardjo: surat tanggal 27 Agustus 1951 tentang keluarga alm. PB Jenderal Soedirman, dengan lampiran. NB: ada foto | tembusan | 9 lembar |
| 685. | Kementerian Perekonomian: Surat Edaran tanggal 10 September 1951 tentang pengleveran sepeda pegawai kepada kementerian-kementerian dan atau jawatan-jawatan pemerintah. | stensilan | 1 lembar |
| 686. | Organisasi-organisasi buruh Indonesia kepada Presiden RI: surat-surat prnyataan tanggal 15 September 1951 - 17 Agustus 1959 tentang tuntutan tunjangan hari lebaran bagi kaum buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 687. | Dinas Urusan Sosial Tentara Staff 'A' kepada Abdul Jabar: surat tanggal 22 Oktober 1951 tentang jaminan sosial sebagai penderita cacat. | tindakan | 2 lembar |
| 688. | Kementerian PU & T kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 2 Desember 1951 tentang penyelenggaraan kongres perumahan rakyat, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 689. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 16 Pebruari 1951 - 22 Nopember 1957 tentang permohona ganti rugi uang dan harta benda, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 690. | Oey Goan Hoey, Soemopranoto kepada Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Menteri RI: surat-surat tanggal 28 Januari 1952, 28 Juni 1958 tentang saran untuk kemakmuran rakyat. | tembusan | 2 lembar |
| 691. | Perorangan: surat-surat tanggal 9 Pebruari 1952 - 31 Juli 1957 tentang pendapat dan permohonan perbaikan perekonomian. | tembusan | 1 sampul |
| 692. | Kabinet Presiden kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 18 Februari 1952 tentang permohonan panitia rakyat Kampung Baru VI dan Petojo Kulon untuk pengesahan rumah-rumah yang telah didirikan, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 693. | Gubernur Sulawesi: Surat Keputusan No. 188 tanggal 28 Maret 1952 tentang pembatalan pembagian beras dari pemerintah untuk pegawai negeri yang bertempat tinggal di seluruh daerah bawahan Enrekang, daerah Pare-pare, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 694. | Menteri PU & T: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 April 1952 - 5 Oktober 1957 tentang penyewaan rumah, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 695. | Kepala Kantor Sosial RI Karesidenan Cirebon: surat tanggal 28 April 1952 tentang anjuran kepada segenap tenaga sosial. | asli | 1 lembar |
| 696. | Menteri Kehakiman: surat tanggal: 21 Mei 1952 tentang permintaan ganti rugi uang atas meninggalnya seorang anak, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 697. | Menteri Urusan Pegawai kepada Panitia Perayaan 1 Mei 1952 Radio Penerimaan Rancaekek Kabupaten Badung: surat tanggal 7 Juni 1952 tentang resolusi tanggal 1 Mei 1952 yang dikirimkan tidak dapat dikabulkan karena pembagian beras kepada seluruh pegawai negeri telah berakhir tanggal 1 Mei 1952. | tembusan | 1 lembar |
| 698. | Organisasi Bekas Pejuang RI: resolusi-resolusi tanggal 21 Juni 1952 - 12 Desember 1956 tentang tuntutan agar diberikan jaminan bagi bekas dan janda pejuang. | tembusan | 1 sampul |
| 699. | DPRDS Kab. Pacitan & Ormas: resolusi-resolusi tanggal 15 Juli 1952, 20 Februari 1955, 19 Februari 1956, 9 Maret 1959 tentang bencana banjir & kelaparan di Kupang dan Jatim. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 700. | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 173 tanggal 25 Juli 1952 tentang penetapan sebuah Badan Pengurus Dana Semeru yang baru. | salinan | 1 lembar |
| 701. | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 30 Juli 1952 - 7 April 1955 tentang sewa rumah. | asli | 1 sampul |
| 702. | J. Baoh kepada Inspektur Polisi RI di Kupang: surat tanggal 2 Agustus 1952 tentang pengaduan atas pengusiran tempat tinggal, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 703. | Surat-surat tanggal September 1952 - Desember 1957 tentang pembangunan rumah pegawai, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 704. | Menteri Sosial: Peraturan No. 2 tanggal 1 September 1952 tentang rumah-rumah dan ruangan-ruangan instansi. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|---------------------|----------|
| 705. | Sekretaris Presiden kepada Ketua Yayasan Centrum Pemuda: surat tanggal 2 Oktober 1952 tentang permohonan Panti Nasional, dengan lampiran. | pertinggal | 7 lembar |
| 706. | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden RI: surat tanggal 15 Januari 1953 tentang kesulitan yang dihadapi pegawai-pegawai negeri di Kebayoran Baru. | asli | 3 lembar |
| 707. | Kepala Kantor Sosial Daerah Cirebon: surat-surat tanggal 23 Januari - 19 September 1953 tentang penyuluhan sosial, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 708. | G. Ekel dan DPRDS Surabaya: surat-surat tanggal 6 Februari, 23 Desember 1953 tentang permohonan uang duka. | tembusan, stensilan | 2 lembar |
| 709. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 26 Februari 1953 - 28 Februari 1957 tentang pengadaan undian, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 710. | Pah Wongso Boys Home kepada Kepala Jawatan Sosial Kotapraja Jakarta Raya: surat-surat tanggal 6 Mei - 22 Mei 1953 tentang penitipan anak-anak terlantar, jahat, dan gembel di Jakarta. | tembusan | 4 lembar |
| 711. | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 20 Mei 1953 tentang pendirian dana jaminan sosial negara, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 712. | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 28 Mei 1953 tentang penunjukan rumah sakit-rumah sakit partikelir yang merawat orang-orang miskin dan tidak mampu, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 713. | Perdana Menteri Republik Indonesia kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 9 Juni 1953 tentang uang duka atas meninggalnya Mayor R. Abdul Halik pada tahun 1948, dengan lampiran. | tembusan | 7 lembar |
| 714. | DPRDS Kabupaten Cilacap: mosi persetujuan tanggal 31 Juli 1953 tentang bantuan terhadap korban teror DI/TII. | asli | 1 lembar |
| 715. | Ketua Panitia Negara Perbaikan Makanan kepada Kabinet Presiden RI: laporan tahunan 1951 - 1952, tanggal 4 Agustus 1953 tentang makanan rakyat, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 716. | Saharjo kepada Menteri Kehakiman: surat-surat tanggal 7 September - 9 November 1953 tentang permohonan tempat tinggal, disertai pengantar. | tembusan | 3 lembar |
| 717. | Serikat Buruh Daerah Otonomi Kulonprogo: resolusi tanggal 31 Januari 1954 tentang penambahan anggaran untuk dana bencana alam. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------------|----------|
| 718. | Perorangan: surat-surat tanggal 22 Februari, 30 Oktober 1954 tentang pemindahan rumah rakyat. | asli, stensilan | 4 lembar |
| 719. | Walikota KDH Kab. Bandung, R. Enoch dan DPRDS Kebumen: surat-surat tanggal 24 Februari, 27 Juli 1954 tentang sikap terhadap anjuran untuk membentuk suatu badan sosial yang berupa dana bencana alam yang permanen untuk seluruh Indonesia. | asli | 2 lembar |
| 720. | DPRDS Kabupaten Boyolali, Bojonegoro: resolusi tanggal 30 Maret 1954, 24 September 1957 tentang tuntutan ganti rugi akibat bencana alam. | stensilan | 2 lembar |
| 721. | I.I Usman: surat pernyataan tanggal 17 April 1954 tentang tuntutan sumbangan bagi anak-anak yatim piatu yang terlantar di daerah Kebun Kacang Tanah Abang. | asli | 1 lembar |
| 722. | Sub-Secom PKI Karang Sembung kepada Bupati Cirebon: mosi tanggal 20 April 1954 tentang sokongan terhadap protes Khoo Tjeng Lan, C. Berkenaan adanya pembangunan gedung bioskop di Desa Karang Sembung Sindang Laut Cirebon. | asli | 1 lembar |
| 723. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 Juni 1954 - 9 Oktober 1957 tentang sengketa rumah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 724. | Menteri Sosial: Surat Keputusan No. BV, 1-33-8/2256 tanggal 12 Agustus 1954 tentang Centrum Rehabilitasi di Surakarta. | salinan | 1 lembar |
| 725. | Menteri Sosial: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 2 September 1954 - 27 Desember 1955 tentang ketentuan penyelenggaraan undian berhadiah. | salinan | 5 lembar |
| 726. | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10 September 1954, 8 Mei 1957 tentang pendirian yayasan yang bergerak di bidang sosial, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 727. | DPD Kota Besar Malang: mosi adhaesi tanggal 25 Oktober 1954 tentang sokongan terhadap resolusi DPRDS Kab. Bojonegoro mengenai desakan pembayaran sewa rumah-rumah partikelir untuk jawatan-jawatan pemerintah dibebankan kepada kementerian masing-masing. | asli | 1 lembar |
| 728. | Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Maluku di Ambon: surat tanggal 26 Oktober 1954 tentang permohonan rehabilitasi untuk M.J. Arif. NB: lampiran tidak lengkap | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 729. | DPRDS Kabupaten Tulungagung, Kebumen: mosi-mosi tanggal 26 Nopember - 30 Desember 1954 tentang tuntutan kepada pemerintah untuk meringankan penderitaan rakyat. | asli | 5 lembar |
| 730. | Baginda Indang Sabolaen kepada KSAD: surat tanggal 31 Desember 1954 tentang permohonan unuk mengembalikan rumah-rumah yang dipakai tentara AU, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 731 | Kepala Kampung Purwosari Desa Pekalipan Cirebon kepada Asisten Wedana Kota Besar Cirebon: surat tanggal 7 Januari 1955 tentang rencana pembongkaran rumah, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 732 | Perorangan: Surat-surat tanggal 31 Agustus - 3 Oktober 1955 tentang usul pembentukan biro pemberantasan kemiskinan rakyat jelata. NB: tulisan tangan | asli | 3 lembar |
| 733 | Menteri Sosial: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 12 Desember 1955, 23 Oktober 1956 tentang usaha penitipan anak yatim dan anak terlantar, dengan lampiran. | salinan | 4 lembar |
| 734 | Tain Datuk Bagindo Basa CS kepada Menteri Dalam Negeri: surat pernyataan tanggal 27 Desember 1955 tentang tuntutan akan pembangunan kembali toko-tokonya yang terbakar di Pasar pendopo Tl. Ubi. | tembusan | 1 lembar |
| 735 | DPRDS Ciamis: resolusi tanggal 17 Januari 1956 tentang sikap terhadap Angkatan Perang (terutama penambahan anggota dan kesejahteraannya). | asli | 1 lembar |
| 736 | Persatuan Tani Nasional Kab. Tapanuli Selatan: resolusi tanggal 2 Agustus 1956, 4 Maret, 17 Juni 1957 tentang desakan untuk memberikan bantuan/uang perpindahan bagi warga negara yang pindah tempat. | asli | 3 lembar |
| 737 | Soerahman kepada KDH III Jawatan Bea dan Cukai: surat tanggal 19 April 1956 tentang permohonan penyelesaian perkara schorsnya yang berlarut-larut. | tembusan | 1 lembar |
| 738 | Biro Pemberantasan Penderitaan Rakyat Jelata RI: surat pernyataan tanggal 30 April 1956 tentang permohonan kebijaksanaan presiden untuk mengesahkan kantor Biro Pemberantasan Penderitaan Rakyat Jelata RI (skill human's), dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 739 | Corps Demobilisan Seluruh Indonesia Cabang Kuningan kepada bupati Kuningan: resolusi tanggal 4 Mei 1956 tentang sikap terhadap perubahan status balai desa menjadi gedung bioskop. | tembusan | 1 lembar |
| 740 | Yayasan Perguruan Nasional Medan kepada Gub/Kdh Sumut: surat tanggal 6 Oktober 1956 tentang permohonan penjelasan instansi manakah yang berwenang mengeluarkan ijin pengutipan derma. | tembusan | 2 lembar |
| 741 | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 27 Oktober 1956 - 24 April 1957 tentang sikap terhadap ganti rugi pembongkaran rumah. | tembusan | 3 lembar |
| 742 | DPC SARBUPRI Subang kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P): pernyataan, tanggal 12 Desember 1956 tentang keputusan P4P tanggal 21 Nopember 1956 mengenai penolakan tuntutan buruh akan lampu tempel dan minyak tanah | tembusan | 1 lembar |
| 743 | Naskah Mrs. S. Sutarman c/o Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia tanggal 24 Desember 1956 tentang masalah prostitusi di Indonesia. NB: Bahasa Inggris dan arsip tidak lengkap | stensilan | 1 berkas |
| 744 | Kepala Kantor Sosial RI Daerah Keresidenan Cirebon: pedoman penyusunan masyarakat baru dan laporan sosial technis, tahun 1957. | stensilan | 2 lembar |
| 745 | Menteri Sosial RI: Surat Keputusan, tanggal 10 Januari 1957 tentang penyewaan kendaraan bermotor untuk menjemput pegawai-pegawai negeri yang beristirahat di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (BPPN) Ciumbuleuit Bandung. NB: Arsip sobek dan nomor tidak ada | salinan | 1 lembar |
| 746 | Staf Perwakilan TKR Surabaya kepada KSAD: surat tanggal 17 Januari 1957 tentang permohonan realisasi Naskah Cipayung dan jaminan bagi TKR. | tembusan | 1 lembar |
| 747 | DPRDP Kab. Kudus: resolusi tanggal 31 Januari 1957 tentang tuntutan penghapusan Yayasan Urusan Bahan Makanan (JUBM). | asli | 1 lembar |
| 748 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 April, 21 Mei 1957 tentang lembaga rumah buta/tunanetra di Bandung, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 749 | Serikat Buruh Gula Proklamasi: surat tanggal 6 Mei 1957 tentang pembayaran istimewa untuk lebaran tahun 1957, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 750 | Beberapa kementerian RI: surat-surat tanggal 4 Juli - 11 September 1957 tentang restitusi pengobatan/perawatan, dengan lampiran. | asli, tembusan | 7 lembar |

| | | | |
|--------------|---|------------|----------|
| 751 | Panitia Pertahanan Perumahan Rakyat Priok: surat pernyataan tanggal 13 Juli 1957 tentang pemindahan 400 bangunan rakyat untuk pembuatan pelabuhan minyak di Tanjung Priok. | asli | 1 lembar |
| 752 | Rukun Kampung Tambaksari seksi sosial ekonomi kepada Panitia Pembantu Korban Peristiwa SR Cikini: surat tanggal 19 Desember 1957 tentang sokongan untuk korban Peristiwa Cikini Raya, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 753 | Yayasan Panti Nasional Jakarta kepada Penguasa Militer Jakarta Raya: surat tanggal 29 Nopember 1957 tentang permohonan agar Gedung Harmoni digunakan/dijadikan Panti Nasional, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 754 | Saiman Dipojoyo: surat tanggal 16 Nopember 1959 tentang usul agar diberikan penerangan kepada rakyat untuk bekerja gotong royong. | asli | 1 lembar |
| J. OLAH RAGA | | | |
| 755 | Kongres Organisasi-organisasi Olah Raga di Indonesia kepada Perdana Menteri: surat tanggal 18 Nopember 1951 tentang permohonan persetujuan pemerintah atas peleburan PORI dalam KOI dan pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua. | tembusan | 1 lembar |
| 756 | Panitia Besar Pekan Olah Raga Mahasiswa I: surat tanggal 24 Nopember 1951 tentang permintaan disediakan sebuah piala. | asli | 1 lembar |
| 757 | Panitia Penyelenggara Pekan Olah Raga Mahasiswa ke-III: surat tanggal 25 Juli 1956 tentang laporan POR Mahasiswa ke-III, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 758 | Direktur Kabinet Presiden kepada Maladi, Ketua KOI: surat tanggal 6 November 1956 tentang surat Martamin kepada Presiden mengenai permohonan advis untuk pemeliharaan badan agar dapat ikut serta dalam Olimpiade Internasional di Melbourne. | pertinggal | 1 lembar |
| 759 | Pendidikan Kebudayaan Pencak Silat Nasional kepada Presiden: surat tanggal 5 Desember 1952 tentang pencak silat, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 760 | Angkatan Darat TT III Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya: surat tanggal 3 Agustus 1953 tentang hasil rapat Collecte POR/N III Jakarta Raya, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 761 | Panitia Penyelenggara Pertandingan Kejuaraan Tenis Indonesia tahun 1953: surat tanggal 20 Januari 1954 tentang pemegang piala bergilir. | asli | 1 lembar |
| 762 | DPRD Kotapraja Bandung: resolusi tanggal 9 Juli 1958 tentang penyelenggaraan Asian Games ke-IV tahun 1962. NB: lampiran tidak ada | asli | 1 lembar |

K. ORGANISASI
POLITIK DAN

| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 763 | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Agustus 1950 - 2 September 1959 tentang usul, saran, kritik terhadap masalah pemerintahan. | asli | 2 sampul |
| 764 | Organisasi massa kepada Presiden RI: telegram tanggal 4 September 1950, 18, 29 April 1956 tentang pernyataan setia dan bakti kepada pemerintah RI. | asli | 3 lembar |
| 765 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 18 Oktober 1950 - 21 Nopember 1957 tentang pendirian organisasi-organisasi masa, dengan lampiran. | asli, tembusan | 2 sampul |
| 766 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 10 Nopember 1950 - 27 Juli 1959 tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan anggota-anggota organisasi massa. | tembusan | 1 sampul |
| 767 | Organisasi massa kepada Presiden RI: telegram tt 1950 - 1958 tentang pernyataan politik organisasi-organisasi massa. | asli | 2 sampul |
| 768 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 23 Nopember 1950 - 29 Oktober 1954 tentang Partai Murba dan sikap politiknya. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 769 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 23 Nopember 1951 - 26 September 1957 tentang hasil-hasil kongres. | asli | 1 sampul |
| 770 | Organisasi massa: surat-surat pemberitahuan tanggal 31 Maret 1951 - 17 Desember 1956 tentang penggantian nama-nama dan pengfusiaan beberapa organisasi massa. | asli | 1 sampul |
| 771 | Organisasi massa & politik: resolusi-resolusi tanggal 8 April 1951 - 1 Mei 1959 tentang sikap politik terhadap masalah keamanan, kabinet, politik, pendidikan, kesehatan, UU perkawinan, hak demokrasi, masalah tanah, dan Irian Barat. | tembusan | 2 sampul |
| 772 | Kepala Kepolisian Karesidenan Madura kepada Kepala Jawatan Urusan Agama: surat tanggal 29 Mei 1951 tentang organisasi Partai Tharikat Islam, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 773 | Badan Permusyawaratan Partai-partai Tanjung Balai kepada Presiden RI: resolusi tanggal 11 Mei 1951 tentang menyetujui program Badan Permusyawaratan Partai-partai. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 774 | Organisasi massa & politik: resolusi-resolusi tanggal 20 Mei 1951 - 23 Pebruari 1954 tentang desakan untuk menggalang persatuan nasional. | asli | 1 sampul |
| 775 | Badan Usaha Perbaikan Perumahan Rakyat Indonesia (BUPPRI) kepada presiden RI: pengumuman tanggal 31 Juli 1951 tentang rapat pleno DPHP GWI pada tanggal 29 Juli 1951, dengan lampiran dan pengantar. | asli | 6 lembar |
| 776 | Markas Besar Gabungan Kepanduan Makassar kepada Presiden RI: surat pernyataan, tanggal 7 September 1951 tentang PRI tidak mewakili kepanduan di Indonesia tetapi hanya merupakan salah satu organisasi dari sekian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 777 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 November 1951 - 17 September 1957 tentang permohonan agar presiden menjadi pelindung yayasan/organisasi-organisasi lainnya, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 778 | Badan Permusyawaratan Partai-partai :resolusi tanggal 19 Mei 1952 tentang seruan kepada seluruh partai dan organisasi supaya rakyat dalam melaksanakan jiwa hari kebangunan nasional itu sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan rakyat banyak, disertai surat. | asli | 1 lembar |
| 779 | Partai Politik Rakyat Marhaen Indonesia kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 23 Mei 1952 tentang satu daftar susunan lengkap anggota dewan partai permai, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 780 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 Agustus 1952 - 7 November 1957 tentang keorganisasian dan konperensi SOBSI, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 781 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 8 Agustus 1952 - 7 Juni 1958 tentang tuntutan status organisasi. | asli | 5 lembar |
| 782 | Organisasi massa kepada Presiden RI: Keputusan-keputusan kongres dan konferensi organisasi-organisasi massa tahun 1952 - 1958. | asli | 1 sampul |
| 783 | Partai Rakyat Indonesia: surat tanggal 20 Maret 1953 tentang anggaran rumah tangga PRI. | asli | 2 lembar |
| 784 | Onder Seksi Komite Partai Komunis Indonesia kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 26 Mei - 2 Juni 1953 tentang protes terhadap pihak kepolisian yang melarang pemasangan gambar pemimpin PKI, Muso dan Alimin. | asli | 3 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 785 | Himpunan Mahasiswa Bandung (HMB): surat pernyataan tanggal 3 Juli 1953 tentang desakan kepada pemerintah agar memberi dukungan moril dan materil. | asli | 1 lembar |
| 786 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 19 Agustus 1953, 6 Desember 1954, 17 Desember 1955 tentang pendirian yayasan-yayasan. | asli | 4 lembar |
| 787 | Liga Pembela Demokrasi: statement, tanggal 10 September 1953 tentang tuntutan pembubaran kabinet yang mendapat perlindungan dari PKI, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 788 | Organisasi profesi: surat-surat tanggal 10 Nopember 1953 - 15 Maret 1957 tentang pembentukan organisasi profesi, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 789 | Ormas dan perorangan: resolusi-resolusi tanggal 7 Desember 1953 - 22 Juli 1959 tentang pendirian dan pembubaran partai. | asli | 1 sampul |
| 790 | Partai Indonesia Raya: surat-surat tanggal 23 April - 5 Nopember 1954 tentang pernyataan berdirinya Partai Partai Indonesia dan pengurusnya. | asli, salinan | 5 lembar |
| 791 | Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara kepada Presiden RI: surat tanggal 24 April 1954 tentang pemberhentian anggota CTN transmigrasi Kopanji Lampung, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 792 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 13 Juni - 24 Desember 1954 tentang desakan kepada pemerintah untuk meninjau kembali nama tanda gambar PKI dan orang tak berpartai. | asli, tindasan | 1 sampul |
| 793 | PNI Cab. Demak kepada ketua DPP PNI Jakarta: mosi, tanggal 1 Agustus 1954 tentang tidak percaya dan pernyataan tidak menjadi anggota PNI Cab. Demak sejak tanggal 1 Oktober 1954, dengan lampiran dan surat. | tembusan | 6 lembar |
| 794 | Organisasi Perjuangan Mencari/membela Kebenaran: surat pemberitahuan, tanggal 30 Agustus 1954 tentang peringatan ulang tahun ke-5 PMK. | stensilan | 1 lembar |
| 795 | Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Jakarta Ra: laporan, tanggal 12 September 1954 tentang susunan pengurus dan program kerja pengurus IPPI daerah, dengan lampiran. | asli | 7 lembar |
| 796 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 April 1952 - 9 Desember 1955 tentang Partai Komunis Indonesia, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------|
| 797 | Ex Pimpinan Laskar Rakyat kepada Presiden RI: surat pemberitahuan , tanggal 27 Desember 1954 tentang daftar jumlah bekas serdadu Laskar Rakyat Bandung Timur, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 798 | DPP Partai Buruh: surat tanggal 28 Desember 1954 tentang kedudukan kantor sekretariat dewan Partai Buruh di jalan Cikini Raya 99, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 799 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 1955, 11 September 1956, 1957 tentang pengiriman rencana anggaran dasar dan skema-skema. | asli | 1 sampul |
| 800 | DPRDS Kab. Sawahlunto: surat tanggal 24 Januari, 3 Pebruari 1955 tentang dukungan keputusan konperensi besar ' Perwanest' ke-3, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 801 | Pengurus Persatuan Islan Cab. Bima kepada KDH Swapraja Bima: surat tanggal 7 Maret 1955 tentang pemberitahuan mengenai rapat umum, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 802 | Dewan Umum Perikatan Pemuda Malaya di luar Tanah Air kepada badan-badan resmi pemerintah RI: Keputusan, tanggal 27 Maret 1955 tentang sikap politik terhadap organisasi Perikatan Pemuda Malaya di luar tanah air, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 803 | Organisasi massa dan politik: surat-surat pernyataan tanggal 16 Januari - 20 Agustus 1955 tentang sikap terhadap rencana Konggres Rakyat Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 804 | DPD Mahasiswa Progresip Indonesia: surat tanggal 14 Mei 1955 tentang tanggapan anggota terhadap surat terbuka Dr. Halim yang diluar tanggung jawab organisasi. | asli | 1 lembar |
| 805 | Ikatan Kaum Gerilya Sumatera Utara kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 20 Mei 1955 tentang penghargaan terhadap anggota-anggota PRS (Pertahanan Rakyat Semesta). | tembusan | 1 lembar |
| 806 | Panitia Konges Rakyat Jambi: notulen tesepsi pembukaan Kongres Rakyat Daerah Jambi pada tanggal 15 Juni 1955 di Gedung Capitol Jambi. | stensilan | 1 sampul |
| 807 | Front Revolusi Rakyat Pembebasan Irian Barat kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 8 Agustus 1955 tentang pengembalian kartu donatur FRR, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|-----|---|----------|----------|
| 808 | Sidang Kongres ke-II Kooperasi Batik Nasional Indonesia Pusat Daerah Cirebon: pengumuman, tanggal 17 November 1955 tentang reorganisasi/perubahan susunan pengurus. | asli | 2 lembar |
| 809 | Panitia Korban 40.000 Jiwa : laporan tanggal 12 Desember 1955 tentang perayaan pernyataan korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 810 | Nahdlatul Ulama Cab. Cirebon: resolusi tanggal 11 Februari 1956 tentang sokongan terhadap beleid PB Partai Nahdlatul Ulama. | asli | 1 lembar |
| 811 | Serikat Buruh Direktorat Perindustrian : resolusi tanggal 27 Juni 1956 tentang sikap politik terhadap amandemen PGPN-1955, Kementerian Perindustrian, aplikasi kursus dan tuntutan RKS Pusat. | asli | 1 sampul |
| 812 | Presidium Kongres Pemuda Sunda: surat tanggal 9 November 1956 tentang pengiriman keputusan/hasil-hasil kongres, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 813 | Djohansjah. S: surat tanggal 1 Desember 1956 tentang pencalonan diri untuk mengikuti kader pendidikan masyarakat desa di Makassar, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 814 | Perorangan: laporan-laporan tanggal Januari 16 Juni 1957 tentang perkembangan keadaan partai-partai, buruh, dan masalah sosial di daerah-daerah. | asli | 2 lembar |
| 815 | Kongres Pembangunan Indonesia: nota tanggal 17 Pebruari 1957 tentang Kongres Pembangunan Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 816 | A.G. Pope (warga Scotland) kepada Presiden RI: surat tanggal 16 April 1957 tentang berita mengenai kebijakan partai politik, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 2 lembar |
| 817 | Kementerian Dalam Negeri kepada DPP Partai Persatuan Dayak Kalteng/Selatan: surat tanggal 7 Mei 1957 tentang permohonan pembentukan Partai Persatuan Dayak tersendiri di Kalteng. | tembusan | 1 lembar |
| 818 | Pedoman ex Penderita Korban Masa Sulawei Selatan/Tenggara: surat tanggal 17 Mei 1957 tentang keputusan mengkoordinasi masa yang pimpinnya terdiri dari Kahar Muzakkar dan stafnya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|-------------------|--|------------|----------|
| 819 | Partai Pancasila: surat tanggal 2 Agustus 1957 tentang pengiriman piagam asli fusi gerakan pembela pancasila kedalam Partai Pancasila, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 820 | Organisasi-organisasi massa kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 30 Agustus 1957 - 17 Juni 1958 tentang sikap terhadap musyawarah nasional. | asli | 1 sampul |
| 821 | Dewan Nasional Kongres Rakyat Seluruh Indonesia: Keputusan-keputusan sidang II tanggal 9, 10 Nopember 1957 tentang konsepsi panitia revisi keorganisasian kongres rakyat dan perjuangan pembebasan Irian Barat, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 822 | SBPP seksi stroohoeden veem Indonesia kepada pengusaha PT. Stoohoeden veem Indonesia: pernyataan, tanggal 21 Nopember 1957 tentang protes terhadap penurunan dan pemindahan koran 'Pemuda' tanggal 19 Nopember 1957 yang berisi amanat presiden. | tindakan | 1 lembar |
| 823 | Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah: surat pernyataan tanggal 7 Maret 1958 tentang dukungan kepada pemerintah RI mengenai mobilisasi pemuda-pemuda Sulawesi Tengah, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 824 | Organisasi-organisasi ex pejuang seluruh Indonesia: surat-surat tanggal 2 - 30 Mei 1958 tentang pengiriman hasil keputusan konperensi dan delegasi ke Jakarta, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| L. OTONOMI DAERAH | | | |
| 825 | Badan Pertimbangan Pemerintahan Kalimantan Barat : nota tanggal 11 Agustus 1950 tentang Kota Praja Pontianak, disertai surat pengantar. | stensilan, | 1 lembar |
| 826 | Acting Gubernur Sunda Kecil, Ketua D.P. Bali: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 September - 8 Desember 1950 tentang pengadaan "Majelis Pemerintah Harian Sementara di Swapraja Buleleng, Badung, Gianjar. | salinan | 3 lembar |
| 827 | Beberapa DPRDS, Organisasi massa dan politik: resolusi-resolusi tanggal 14 Nopember 1950 - 16 Maret 1959 tentang tuntutan segera diberikan status daerah menjadi Dati I, II dan III. | tembusan | 2 sampul |

| | | | |
|-----|---|---------------|----------|
| 828 | DPRDS-DPRDS, Ormas-ormas: resolusi-resolusi tanggal 8 Desember 1950 - tembusan 12 Nopember 1957 tentang penyempurnaan pelaksanaan pembentukan daerah-daerah otonom dan hak-hak otonom. | | 1 sampul |
| 829 | Mentei Agama kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 3 Januari - 3 Oktober 1951 tentang Kantor Perwakilan Agama Daerah, dengan lampiran. | | 1 sampul |
| 830 | DKP kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 6 Pebruari 1951 tentang perubahan bentuk Pemerintahan Buton - Bau-Bau, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 831 | Organisasi massa, perorangan: surat-surat tanggal 4 Juni 1951 - 11 Pebruari 1954 tentang pengangkatan, pengesahan dan pemecatan pejabat-pejabat daerah. | asli | 1 sampul |
| 832 | Beberapa Pemda: surat-surat tanggal 20 Juni 1951 - 3 Desember 1957 tentang usaha dan rencana pembangunan kota/daerah propinsi, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 833 | DPRDS Jawa Barat, Organisasi massa dan politik: resolusi-resolusi tanggal 8 Agustus 1951 - 12 Juni 1957 tentang tuntutan akan perubahan rayon kemahalan daerah. | asli, salinan | 1 sampul |
| 834 | DPRD Jawa Barat dan Sumatera Selatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 22 Agustus, 29 Desember 1951 tentang pedoman kerja DPD Propinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan, dengan lampiran. | salinan | 6 lembar |
| 835 | DPRDS Jawa Timur dan Barat : resolusi-resolusi tanggal 3 Januari - 12 Juli 1952 tentang tuntutan perbaikan kedudukan jabatan sekretaris kabupaten/kota. | asli | 1 sampul |
| 836 | Gubernur Propinsi Sulawesi kepada Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 16 Januari 1952 tentang pengumuman berdirinya Panitia Penuntut Propinsi Sulawesi Selatan, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 837 | Mangkoenagoro VIII kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 22 Januari 1952 tentang kekuasaan swapraja, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 838 | Wakil Gubernur Sunda Kecil kepada Menteri Dalam Negeri: surat-surat tanggal 23 Januari 1952 - 17 April 1959 tentang pembagian wilayah di beberapa daerah Indonesia. | tembusan | 7 lembar |

| | | | |
|-----|---|---------------|----------|
| 839 | Organisasi politik dan massa kepada Kabinet Presiden: resolusi-resolusi tanggal 27 Januari - 19 Nopember 1952 tentang masalah pemerintahan daerah. | asli, salinan | 1 sampul |
| 840 | Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 28 Januari 1952 tentang permohonan M.A. Gelar St. Bagindo untuk memperoleh gelar sebagai Wedana, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 841 | Direktur Kabinet Presiden kepada Dewan Menteri: surat-surat tanggal 6 - 28 Februari 1952 tentang penyelesaian masalah Swapraja Surakarta, Mangkunegaran dan Kasunanan, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 842 | Menteri DN, Gubernur Jabar, Jateng, Kalimantan, Residen Pati: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 21 Pebruari 1952 - 6 Nopember 1957 tentang pembagian dan penghapusan nama-nama daerah di Indonesia. | salinan | 1 sampul |
| 843 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 11 Maret - 27 Oktober 1952 tentang desakan diadakannya peraturan gubernur Jabar mengenai upah buruh. | asli | 1 sampul |
| 844 | Organisasi politik Propinsi Maluku: statement bersama tanggal 27 April 1952 tentang tuntutan pertanggung jawaban A.B. Latuconsina dan Moh. Iskandar Alam, anggota DPRDS Maluku atas penandatanganan program bersama di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1952. | asli | 1 lembar |
| 845 | DKP kepada Mendagri: surat-surat tanggal 8 Mei 1952, 19 April 1955 tentang pengesahan Perda Prp. Sumsel No. 1/tahun 1951 dan Perda Prop. Kalimantan No. 9 Tahun 1954, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |
| 846 | Gubernur Jawa Tengah: nota, tanggal 28 Mei 1952 tentang penetapan daftar desa dalam daerah Kabupaten Sukohardjo, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 847 | Acting Walikota Bukittinggi kepada Presiden: surat tanggal 4 Juni 1952 tentang laporan Occasioneel mengenai rapat ninik mamak dan alim ulama serta cerdik pandai di Mandiangin, sekitar penyerahan tanah Padang kepada Pemerintah Daerah. | salinan | 2 lembar |
| 848 | Komite Aksi Bersama Kab. Bengkulu Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan: resolusi tanggal 20 Juli 1952 tentang desakan agar Gb. No.54/51 dapat dilaksanakan terlebih dahulu. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 849 | Dewan Pembangunan Ekonomi: surat tanggal 4 Agustus 1952 tentang pembukaan Kalimantan selaku perwujudan kemakmuran raksasa. | asli | 1 sampul |
| 850 | Soekardja Danapradata: surat tanggal 11 Agustus 1952 tentang pelaksanaan penghapusan swapraja se-nusantara (terutama Solo Kasunanan di Mangkunegaran), dengan lampiran. NB: Bahasa Jawa dan tulis tangan. | asli | 2 lembar |
| 851 | Sultan Buton La Ode Falihi: surat tanggal 23 Agustus 1952 tentang permohonan agar adat Buton ditetapkan Pemerintah dan susunan anggota swapraja dibangun kembali, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 852 | Kepala Jawatan Urusan Daerah kepada Wali Kota Jakarta Raya: surat tanggal 27 Agustus 1952 tentang timbang terima urusan daerah, dengan lampiran | tembusan | 2 lembar |
| 853 | Menteri Dalam Negeri, Gubernur Maluku: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 3 Oktober 1952, 19 Pebruari 1957 tentang pemindahan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Kutai. | salinan | 2 lembar |
| 854 | DPRDS Jawa Barat dan Tengah: resolusi-resolusi tanggal 3 Nopember 1952 - 9 Juni 1958 tentang desakan untuk mengadakan Undang-Undang Otonomi Daerah. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 855 | DPRDS Kab. Lampung Utara: mosi, tanggal 10 Januari 1953 tentang desakan kepada Pemerintah Pusat agar mengeluarkan peraturan untuk membayar uang K.M.W yang disimpan pada Wedana/Assiten Wedana. | salinan | 1 lembar |
| 856 | Penduduk Dukuhan-Dukuhan Desa Gedongombo kepada Asisten Wedana Semanding: surat tanggal 13 Januari 1953 tentang permohonan diberinya besluit penetapan kepada Lurah Ngaspan Wongsosastro sebagai Lurah Gedongombo. | tindakan | 2 lembar |
| 857 | Gubernur Jawa Barat: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 14 Pebruari 1953 tentang penggantian nama, pembagian daerah dan desa-desa di Propinsi Jawa Barat, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 858 | Penerangan I. S Usman: surat tanggal 17 Pebruari 1953 tentang tanggapan atas pidato wali negara di Kalimantan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 859 | Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri: Daftar Pembagian Daerah, tanggal 10 Maret - 5 November 1953, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|-----|--|------------|----------|
| 860 | Organisasi Islam dan Partai Buruh: surat pernyataan bersama tanggal 12 Maret 1953 tentang statement tanggal 17 Desember 1952 mengenai kebijaksanaan Gubernur Maluku untuk ayat 2 agar dihapuskan. | asli | 1 lembar |
| 861 | Kementerian Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 24 Juni 1953 tentang penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau. | salinan | 2 lembar |
| 862 | Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjung Pinang: surat tanggal 9 Juni 1953 tentang penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau mulai 1 Juli 1953, dengan lampiran. | tindakan | 2 lembar |
| 863 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 19 Juni 1953 - 30 Oktober 1957 tentang daerah-daerah pemilih dalam menjalankan UU pemilu dianggap sebagai desa, kecamatan dan kabupaten, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 864 | Menteri Keuangan: Surat Edaran tanggal 10 Agustus 1953 tentang Jakarta Raya sebagai daerah Jabatan yang tertentu. | stensilan | 1 lembar |
| 865 | Sekretaris Presiden kepada Ketua DPD Prop. Jabar dan DPDS Jateng : surat-surat tanggal 14, 18 September 1953 tentang pembatalan peraturan-peraturan daerah dan Keppres. | pertinggal | 1 sampul |
| 866 | DPRD Jawa Tengah: Surat Keputusan tanggal 30 September 1953 tentang penugasan kepada DPD untuk meninjau kesanggupan Prop. Jateng menerima sejumlah 20.000 orang guru sebagai pegawai otonom. | salinan | 1 lembar |
| 867 | Para Demonstranten: Statement tanggal 8 Desember 1953 tentang hasrat rakyat Swapraja Amanuban mengenai perkembangan-perkembangan politik di dalam Daerah Timor dan kepulauannya. | asli | 1 lembar |
| 868 | Perorangan dan organisasi politik di Timor Tengah kepada Presiden: surat pernyataan tanggal 6 Februari, 30 Maret 1954 tentang tuntutan pengoperan pengadilan daerah/swapraja kepada pengadilan negeri. | asli | 4 lembar |
| 869 | SPBU Cab. Soreang Bandung: resolusi tanggal 8 Maret 1954 tentang sokongan terhadap pernyataan kongres ke-1 SOBSI daerah Jabar mengenai pengoperan Jawatan PU oleh daerah otonom Jabar. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|---|------------|----------|
| 870 | Menteri Kehakiman: Surat Keputusan tanggal 11 Maret 1954 tentang perubahan SK Menteri Kehakiman No. J.A.10/9/5, tanggal 22 Pebruari 1954 mengenai daerah hukum Pengadilan Negeri yang tidak ada berkedudukan seorang bupati. | stensilan | 3 lembar |
| 871 | Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 18 Maret 1954 tentang ralat laporan perjalanan perutusan Panitia Rakyat Swapraja Bima, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 872 | Kementerian Pertahanan: surat-surat tanggal 2, 6 April 1954 tentang berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan militer atas darah Kep. Anambas, Natuna dan Riau, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 873 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 9 Juni 1954 - 7 Desember 1955 tentang keorganisasian Kraton Surakarta. | salinan | 1 sampul |
| 874 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1954 tentang penunjukan sebagai pejabat yang melakukan kewajiban Camat. | salinan | 1 lembar |
| 875 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Dalam Negeri: surat-surat tanggal 19 Juli, 2 Agustus 1954 tentang Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, tanggal 28 Agustus 1953 beserta gambar situasi peta kontrol No. 1281/51, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |
| 876 | DPRDS & Ormas: resolusi-resolusi tanggal 2 Oktober 1954 - 30 Juli 1957 tentang tuntutan pemberian subsidi ke daerah-daerah. | stensilan | 4 lembar |
| 877 | Organisasi massa kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 4 Oktober 1954 - 16 Oktober 1959 tentang dukungan dan penolakan terhadap UU/Perda. | asli | 3 sampul |
| 878 | Kabinet Presiden RI kepada Ketua DPD Kota Besar Malang, Bogor, DPRDS Banjarmasin: surat-surat tanggal 26 Oktober 1954 - 24 Oktober 1957 tentang penetapan lambang dan bendera kota besar Malang, Bogor, Banjarmasin, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 879 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 8 Desember 1954 - 17 Oktober 1955 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota panitia pendaftaran pemilih di daerah. | salinan | 1 sampul |
| 880 | Menteri Dalam Negeri : Surat Keputusan, tanggal 11 Pebuari 1955 tentang perubahan Surat Keputusan Menteri DN mengenai kalimat "Walikota Sukabumi" diubah menjadi "Camat Kota Kecil Sukabumi". | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------|
| 881 | DPRDS Pemekasan: surat pernyataan adhaesi tanggal 31 Maret 1955 tentang tindakan yang menjamin terus berlangsungnya pemerintahan daerah yang bersifat Collegiaal. | asli | 1 lembar |
| 882 | Residen Madura kepada Presiden RI: laporan, tanggal 20 April 1955 tentang urusan daerah mengenai pemerintahan, pembangunan, perekonomian, rekonstruksi, agraria dan biro penyelesaian golongan kecil, disertai surat. | stensilan | 12 jilid |
| 883 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 1 Juni 1955 - 24 Juni 1957 tentang pemindahan ibukota-ibukota kabupaten. | tembusan | 3 lembar |
| 884 | DPRD/S beberapa kabupaten: surat-surat pernyataan tanggal 10 Juni 1955 - 10 Maret 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada daerahnya masing-masing. | tembusan | 1 sampul |
| 885 | Presidium Kongres Rakyat Jambi: pre advise Mr. Nasroen, Komisariat Daerah Otonom yang diucapkan dalam sidang ke - II dari Konges Rakyat Daerah Jambi pada tanggal 16 Juni 1955. | stensilan | 1 lembar |
| 886 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan, tanggal 13 Juli 1955 tentang pemberian kuasa kepada Gubernur Nusa Tenggara, untuk sementara mengatur Pemerintahan Swapraja. | salinan | 1 lembar |
| 887 | Serikat Sekerja Perbendaharaan dan Kas-kas Negara cab. Tomohon (SSPKN): resolusi tanggal 15 Agustus 1955 tentang desakan kepada pemerintah supaya meninjau kembali status kantor pusat perbendaharaan Tomohon. | asli | 1 lembar |
| 888 | Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 22 Agustus 1955 tentang eksperimen daerah otonom tingkat III, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 889 | BTI Cab. RembangL resolusi tanggal 18 Septemner 1955 tentang tuntutan penyelesaian UU nasional baru pengganti oud monopoli ordonantie tahun 1941. | asli | 1 lembar |
| 890 | Sekretairat Pelajar Seluruh Indonesia kepada Presiden RI: surat tanggal 23 Agustus 1955 tentang kesediaan S.R. Jans menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun daerah Maluku | asli | 1 lembar |
| 891 | Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri : Surat Edaran tanggal 27 Agustus 1955 tentang pemindahan tata usaha keuangan dari kantor pusat perbendaharaan Makassar ke Ambon. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 892 | DPRD Swapraja Dampu: surat pernyataan tanggal 8 Nopember 1955 tentang SK Gubernur Nusa Tenggara, tanggal 25 Agustus 1955 mengenai jaminan Kepala Swapraja Dampu/penghasilan/gaji yang tidak sesuai ditinjau kembali, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 893 | Asisten Wedana Badegan kepada Kabinet Presiden RI: surat keterangan tanggal 21 Nopember 1955 tentang Mr. Santono sebagai Pegawai Negeri Tetap sejak menjabat Assisten Wedana di Badegan. | asli | 1 lembar |
| 894 | Gubernur Jateng: Surat Keputusan tanggal 28 Nopember 1955 tentang pemindahan tempat kedudukan camat di Karesidenan Semarang, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 895 | Gubernur Jawa Tengah: turunan tambahan lembaran negara RI No. 942, tanggal 17 Juli 1956 tentang penggantian nama Kecamatan Krasak Wonosobo menjadi Kec. Selomerto. | asli | 2 lembar |
| 896 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 3 Desember 1950 - 27 Agustus 1956 tentang tafsiran kepala daerah menurut UU, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 897 | DPRD Kabupaten Rembang dan Tuban: surat-surat pe1957 tentang pernyataan tanggal 28 Desember 1956 - 22 September 1957 tentang tuntutan akan penetapan status pamong desa lengkap dengan jaminan sosialnya. | asli, tindasan | 2 lembar |
| 898 | Rapat Bersama Partai-partai Politik Marga Tembelang Gedung Agung Lahat: resolusi tanggal 3 Januari 1957 tentang dukungan atas kebijaksanaan pemerintahan R. Winarno Danuatmodjo, gubernur Sumatera Selatan. | asli | 1 lembar |
| 899 | DPRD Kabupaten Kotawaringin: resolusi tanggal 5 Januari 1957 tentang desaka agar segera penetapan kota Sampit menjadi ibu kota propinsi Kalimantan Tengah. | asli | 1 lembar |
| 900 | Organisasi massa dan politik: surat-surat pernyataan tanggal 18 Januari 1957 - 1 Juni 1958 tentang desakan pembentukan dewan-dewan perwakilan daerah dan dewan penasehat daerah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 901 | Mendagri: Surat Edaran, tanggal 5 Pebruaru 1957 tentang pembagian Kalimantan dalam 3 propinsi otonom. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 902 | DPRDP Kabupaten Bengkulu Utara kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Sumatera Selatan: resolusi tanggal 25 Pebruari 1957 tentang desakan rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dalam jangka pendek. | tembusan | 1 lembar |
| 903 | BTI Ranting Bajem Taman Magetan: resolusi tanggal 2 Maret 1957 tentang sikap terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masih adanya desa perdikan di Kec. Karangmodjo Magetan. | asli | 1 lembar |
| 904 | Radja Uteh Tambak kepada Mendagri: surat tanggal 30 April 1957 tentang usul agar daerah Oostkust van Sumatra tahun 1942 tetap menjadi satu Propinsi Sumatra. | tembusan | 1 lembar |
| 905 | Wakil Kepala Wanua Akkoteng: surat tanggal 5 Mei 1957 tentang pembentukan daerah Wajo berdasarkan UU darurat No. 4 tahun 1957. | asli | 1 lembar |
| 906 | DPRDP di Jawa: resolusi-resolusi tanggal 14 Mei 1957 - 5 Mei 1958 tentang pencabutan dan penggantian IGO (PP Kotapraja/pribumi/dalam negeri) dengan UU yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan dan demokrasi. | asli | 5 lembar |
| 907 | DPRDP Labuhan Batu: Surat Keputusan, tanggal 10 Juli 1957 tentang pembentukan panitia daerah Kab. Labuhan Batu urusan pembentukan Kec. Bilah tengah. | salinan | 1 lembar |
| 908 | Badan Kongres Rakyat Jambi: surat tanggal 12 Juli 1957 tentang realisasi Propinsi Jambi. | asli | 1 lembar |
| 909 | Ormas, perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 12 Juli - 18 April 1959 tentang tuntutan pembagian wilayah di Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 910 | Panitia Negara Pembagian Daerah kepada PMRI: surat tanggal 20 Juli 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa kerja Panitia Pembagian Daerah. | tembusan | 1 lembar |
| 911 | Perorangan, Ormas: surat-surat tanggal 25 Juli - 3 Desember 1957 tentang tuntutan perubahan status kabupaten dan karesidenan. | asli | 1 sampul |
| 912 | Gubernur Aceh: Surat Keputusan tanggal 20 Juli 1957 tentang pembentukan Panitia Ad Hoc guna menyusun rencana perayaan ultah ke-XII hari Kemerdekaan Indonesia di ibu kota Aceh. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| 913 | DPDP Sumatera Utara: Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 1957 tentang pembentukan panitia pembelian barang-barang untuk dinas otonom Prop. Sumut. | salinan | 1 lembar |
| 914 | DP PNI Sulut, Tengah kepada Presiden: surat pernyataan tanggal 4 September 1957 tentang musyawarah nasional Dati I - III. | asli | 2 lembar |
| 915 | DPRDP Kalbar: Surat Keputusan tanggal 5 September 1957 tentang pemisahan daftar Surat Keputusan-Surat Keputusan dan Perda, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 916 | Kementerian Kesehatan kepada Mendagri: surat tanggal 6 September 1957 tentang penyerahan berbagai-bagai urusan pemerintahan Pusat secara reel kepada daerah-daerah otonom dengan lampiran | tembusan+E973: F985E99F977:F98 5 | 3 lembar |
| 917 | Gubernur Jawa Timur, Samadikoen: surat tanggal 11 Oktober 1957 tentang pamong praja sebagai alat pemerintah pusat yang diperbantukan kepada daerah-daerah swatantra, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 918 | DPRD Kotapraja Jakarta Raya: resolusi tanggal 14 Oktobe 1957 tentang desakan penambahan anggota DPD sesuai dengan kebutuhan tanpa pembubaran DPD yang telah terbentuk dan diatur dengan peraturan tersendiri. | asli | 1 lembar |
| 919 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 30 Oktobe - 13 Desember 1957 tentang pengesahan pemilihan kepala daerah-daerah, daerah swatantra tingkat II. | salinan | 1 sampul |
| 920 | DPRD Sumut : Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1957 tentang pembentukan panitia daerah Prop. Sumut urusan otonom tk.II di Medan. | salinan | 1 lembar |
| 921 | DPRD Kotapraja Tanjung Balai kepada Presiden RI: Surat Keputusan 8 Oktober 1959 tentang sikap DPRD terhadap Penetapan Presiden Presiden RI no. 6/1959 mengenai pemerintah daerah. | asli | 1 lembar |
| 922 | D. Siswosartanto kepada Mr. Ratmoko : memo, tanggal 25 Mei tanpa tahun tentang kunjungannya yang akan membicarakan RUU Darurat Nusa Tenggara. | konsep | 1 lembar |

M. PARLEMEN
DAN PEMILU

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 923 | Bardide kepada Minister Bangsa-bangsa di Pemerintah Pusat (NRI), Medan: surat tanpa tanggal 1950 tentang uraian mengenai DPR. | asli | 1 lembar |
| 924 | Risalah rapat pleno dengan Konstituante , DPR. 1950-1959. | stesilan | 1 bundel |
| 925 | Suhardjo, Tasikmalaya kepada Presiden RI: telegram. Tanggal 2 September 1950 tentang usul dengan adanya perebutan kursi agar calon-calon dari partai-partai desten oleh Parlemen. | asli | 1 lembar |
| 926 | DPRDS RI: Surat Keputusan No. 21/k/50, tanggal 20 September 1950 tentang penyempahan Presiden Negara Kesatuan RI, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 927 | DKP kepada PMRI: surat tanggal 25 September 1950 tentang pengangkatan Wakil PIR untuk Jabar dalam DPRS RI, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 928 | DPRDS RI: Surat Keputusan No. 28/K/1950 tanggal 26 September 1950 tentang peraturan cara pencalonan dan pemilihan calon untuk dianjurkan sebagai Wakil Presiden RI yg pertama, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 929 | DPR RI: risalah rapat pleno tanggal 14 Oktober 1950 tentang pemilihan calon wakil presiden RI, disertai surat. | stensilan | 1 lembar |
| 930 | Kabinet Perdana Menteri kepada Sektetaris Jenderal DPR RI: surat tanggal usul undang-undang DPR. | tembusan | 1 lembar |
| 931 | Ketua DPR RI, Ketua Konstituante: surat-surat pemberitahuan tanggal 26 Oktober 1950 - 29 Juli 1959 tentang ketentuan-ketentuan rapat dan sidang pleno DPR, Konstiuanate. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 932 | Menteri Dalam Negeri dan DPRDP: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 6 Nopember 1950 - 3 Desember 1957 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota DPRDP, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 933 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 23 Nopember 1950 - 19 September 1958 tentang calon-calon anggota DPR dan Konstituante. | asli | 1 sampul |
| 934 | Kementerian Penerangan: Surat Edaran, tanggal 1 Januari 1951 tentang ichtisar parlemen. | stensilan | 1 lembar |
| 935 | Sekretaris Dewan Menteri: Keterangan Pemerintah tanggal 27 Januari 1951 tentang mosi Hadikusumo Cs mengenai pembubaran DPRD, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|-----|---|------------------|----------|
| 936 | Perdana Menteri RI kepada para menteri: surat tanggal 8 Maret 1951 tentang soal-soal DPR yang perlu mendapat perhatian Pemerintah, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 937 | Panitia Ad Hoc urusan amandemen-amandemen Pemerintah terhadap inisiatif DPR: laporan tanggal 12 Maret 1951 tentang kedudukan hukum dan keuangan anggota. | salinan | 2 lembar |
| 938 | Darsono, Pegawai Kementerian Luar Negeri kepada Ir. Soekarno: surat tanggal 28 Maret 1951 tentang usul mengadakan dan pengejalan hubungan persoonlijk antara wakil-wakil Pemerintah dan wakil-wakil rakyat, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 939 | Sekretaris DW: surat tanggal 28 Mei 1951, 11 Pebruari 1952 tentang pendapat DPR mengenai program-program Pemerintah. | asli | 1 sampul |
| 940 | DPR Dompus: mosi tanggal 5 Juni 1951 tentang tuntutan pembubaran DPR yang tidak demokratis. | asli | 1 lembar |
| 941 | DPRDS Jawa Barat dan Jawa Timur, perorangan: mosi-mosi tanggal 2 Juli 1951 - 17 Juni 1958 tentang tuntutan dilaksanakannya pemilu. | asli, salinan | 2 sampul |
| 942 | DPRDS Kabupaten Purwakarta kepada Presiden: mosi tanggal 4 Agustus 1951 tentang penolakan cara pemilihan anggota Konstituante dengan dasar langsung dan bertingkat satu. | stensilan | 1 lembar |
| 943 | Organisasi-organisasi politik dan massa: resolusi-resolusi tanggal 7 Nopember 1951 - 30 Mei 1957 tentang tuntutan pembentukan dan pembubaran DPRDS Dati II dan propinsi. | asli, tembusan | 4 sampul |
| 944 | 14 Anggota DPRDS Malang kepada Mendagri: surat tanggal 19 Desember 1951 tentang sekitar soal sidang DPRDS Malang dan pendapat Gubernur Jatim, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 945 | Panitia Pemeriksaan: surat-surat/laporan tanggal 1952 - 1957 tentang pengangkatan, pengunduran calon untuk menjadi anggota DPR. | asli, pertinggal | 1 sampul |
| 946 | DPDS Sumatra Selatan kepada semua gubernur dan ketua DPRDS propinsi di Indonesia: surat-surat tanggal 31 Januari - Pebruari 1952 tentang perihal kemungkinan untuk mengadakan inter-DPRDS propinsi seluruh Indonesia, disertai pengantar. | tembusan | 3 lembar |

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------|
| 947 | Kabinet Presiden kepada Ketua DPR: surat tanggal 18 Maret 1952 tentang penundaan pembicaraan rancangan undang-undang oleh parlemen, dengan lampiran. | konsep | 4 lembar |
| 948 | DPRDS Kabupaten Wonogiri: Surat Keputusan tanggal 31 Maret 1952 tentang desakan agar supaya orang-orang yang diliindugni oleh negara diadakan penyelesaian terutama anggota DPRDS, DPD, dan alat-alat negara lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pemerintahan. | asli | 1 lembar |
| 949 | Menteri Dalam Negeri : Peraturan-peraturan tanggal 13 Agustus 1952 - 2 April 1954 tentang penyusunan DPRDS di daerah Sulawesi, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 950 | Organisasi-organisasi politik dan massa: resolusi-resolusi tanggal 7 Nopember 1951 - 30 Mei 1957 tentang tuntutan pembentukan dan pembubaran DPRDS Dati II dan propinsi. | tembusan | 1 sampul |
| 951 | DPRDS, Perorangan, ormas, kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Oktober - 29 Juni 1952 tentang tuntutan pembubaran parlemen. | asli | 3 lembar |
| 952 | Pemerintah Kotapraja Yogyakarta: pidato Walikota/ketua DPR dimuka corong RRI Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 1952 tentang tanggapan terhadap tuntutan pembubaran parlemen, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 953 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 29 Desember 1952 tentang telegram yang berisi tuntutan pengaktifan kembali DPR Sumatera Tengah yang dibekukan dan menyetujui sepenuhnya konsepsi KPPPST, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 954 | Kabinet Perdana Menteri RI: surat terbuka tanggal 28 Januari 1953 tentang jawatan pertanyaan-pertanyaan anggota DPR-RI. | stensilan | 1 lembar |
| 955 | Front Pemuda Indonesia Propinsi Maluku: pernyataan tanggal 5 Februari 1953 tentang penegasan sikap terhadap statement delegasi DPRDS Maluku Tengah. | tembusan | 1 lembar |
| 956 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 23 Pebruari 1953 tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak II DPR RI mengenai RUU pemilihan anggota DPR dan Konstituante yang diucapkan di depan sidang parlemen dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 957 | Sekretaris Dewan Menteri, Kabinet Presiden: Pengumuman Surat Edaran tanggal 3 Maret 1953, 22 September 1955 tentang pemilihan umum. | stensilan, konsep | 3 lembar |

| | | | |
|-----|---|------------|----------|
| 958 | Wakil Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 23 April 1953 tentang pertanyaan anggota DPR RI Sjah Sutan Makmur. | tembusan | 1 lembar |
| 959 | Daftar hasil pemungutan suara terhadap Kabinet Ali-Wongso tanggal 10 September 1953. | stensilan | 1 lembar |
| 960 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 9 Oktober 1953 tentang tuntutan agar anak Aceh duduk dalam parlemen pemerintah RI. | asli | 1 lembar |
| 961 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 3 November 1953 tentang protes terhadap bangsa Cina yang duduk dalam parlemen. | asli | 1 lembar |
| 962 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: daftar isi RUU pemilihan anggota Konstituante dan DPR serta kumpulan usul amandemen anggota DPR tahun 1953, disertai surat. | asli | 3 lembar |
| 963 | Organisasi partai politik/massa: resolusi-resolusi tanggal 15 Nopember 1953 - 18 September 1955 protes terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia yang tidak demokratis. | asli | 1 sampul |
| 964 | Kabinet Presiden kepada Menteri Kehakiman: surat tanggal 2 Desember 1953 tentang penunjukan pada lampiran 'risalah dan risalah perundangan' DPR dalam Lembaran Negara mengenai pengundangan UU. | pertinggal | 1 lembar |
| 965 | Camat/Ass. Wedana dari berbagai daerah: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 5 Desember 1953 - 28 April 1959 tentang penetapan Ketua dan para anggotaee panitya pendaftaran pemilihan suara Kecamatan di beberapa daerah. | salinan | 1 sampul |
| 966 | Panitya-panitya Pemilihan Kabupaten: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 24 Desember 1953 - 25 Pebruari 1957 tentang penetapan pengurus dan para anggota dari panitia pemungutan suara dalam daerah Kabupaten dan kecamatan, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 967 | Kabinet Presiden RI: daftar tahun 1951, 1953, 1956 tentang pendapat fraksi DPR mengenai beberapa mosi-mosi dan masalah-masalah yang muncul di DPR, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |
| 968 | Partai Tharikat Islam: kawat, tanggal Januari 1954 tentang permintaan lowongan kursi di Parlemen. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-----|--|---------------------|----------|
| 969 | Gubernur, DPRDP Kalimantan dan Sumatera: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 2 Januari 1954 - 23 Nopember 1957 tentang pembebasan dan penetapan sebagai anggota-anggota Panitia Pemilihan Kabupaten dan Propinsi. | salinan | 1 sampul |
| 970 | Dewan Pimpinan Tjabang Masyumi Cabang Sukoharjo: resolusi, tanggal 20 Januari 1954 tentang protes atas tindakan Hadisaputra yang menerangkan dihadapan para <i>Conference System</i> bahwa kelambatan pemilu disebabkan karena perbuatan-perbuatan dari partai-partai oposisi. | asli | 1 lembar |
| 971 | Partai Politik Masyumi di Jabar: resolusi-resolusi tanggal 26 dan 29 Januari 1954 tentang sikap politik terhadap keanggotaan PPS di beberapa daerah Jabar. | asli | 2 lembar |
| 972 | Organisasi-organisasi politik: resolusi-resolusi tanggal 11 Februari - 11 Agustus 1954 tentang protes keras terhadap penambahan anggota-anggota DPKS (Dewan Perwakilan Kotapraja Sementara) Jakarta Raya yang bersifat diktator. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 973 | DPR RI: surat tanggal 20 Pebruari 1954 tentang penyumpahan anggota-anggota baru DPR, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 974 | Dewan Pimpinan Ranting SARBUPRI Cinta Raja dan Serikat Buruh Pelabuhan Pelayaran: surat pernyataan tanggal 27 Februari 1954, 26 Agustus 1955 tentang penerangan pemilu bagi kaum buruh. | tindakan | 1 lembar |
| 975 | Organisasi-organisasi massa daerah Tuban dan Bondowoso resolusi-resolusi tanggal 28 Februari - 17 Oktober 1954 tentang pernyataan turut aktif dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang. | tembusan, stensilan | 3 lembar |
| 976 | PB Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau kepada Presiden: surat tanggal 27 April 1954 tentang telegram mengenai Dr. Setiabudi sebagai anggota Parlemen oleh Datuk Simaradjo, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 977 | Dewan Pimpinan Ranting SARBUPRI: surat-surat pernyataan tanggal 10 Juni - 29 Juli 1954 tentang tuntutan pencabutan nama organisasi SARBUPRI dari daftar pemilih. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 978 | Ormas dan Perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 25 Juni 1954 - 24 Januari 1955 tentang tanda gambar PKI dalam pemilu. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------|
| 979 | DPT PARKINDO Daerah Maluku Tenggara: pernyataan tanggal 15 Juli 1954 tentang tuntutan kepada pemerintah agar mengambil tindakan yang tegas dalam masalah DPDS Maluku Tenggara demi kepentingan daerah Maluku Tenggara. | asli | 1 lembar |
| 980 | Ikatan Bekas Pejuang Islam (IKABEPI) : surat pernyataan tanggal 30 Juli 1954, 2 Maret 1957 tentang penolakan pembentukan pengawal pemilu. | stensilan | 2 lembar |
| 981 | Sekretariat Central Komite PKI: surat pernyataan tanggal 25 Juli 1954 tentang sikap politik terhadap daftar pemilihan dan perdamaian dunia, disertai pengantar. | stensilan | 2 lembar |
| 982 | Partai NU Cab. Bondowoso: statatement, tanggal 22 Agustus 1954 tentang ' <i>Minderheids-nota</i> ' . diajukan oleh R. A. Goerjaningpradja kepada wakil dalam PPI. | asli | 1 lembar |
| 983 | DPRDS Kab. Lampung Selatan: Surat Keputusan no. 257/DPR/54, tanggal 2 September 1954 tentang pengutusan delegasi/panitia khusus pleno DPR Lampung Selatan untuk mengunjungi pemerintah alasan mengenai kota Tanjung Karang/Teluk Betung. | salinan | 1 lembar |
| 984 | Panitia Penghubung Pengusaha Nasional: surat pernyataan tanggal 7 Oktober 1954 tentang desakan kepada parlemen supaya usul mosi Margono Djojohadikusumo, cs: mengenai pembentukan panitya angket sebagai penghubung pengusaha nasional dengan Pemerintah diterima parlemen, disertai pengantar. | asli | 1 lembar |
| 985 | NU Cab. Surabaya: surat pernyataan tanggal 27 Oktober 1954 tentang desakan kepada KDH Jatim, supaya memberi keleluasaan kepada rakyat untuk membicarakan soal-soal politik dan pemilu, disertai pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 986 | DPRDS-DPRDS Jawa Barat dan Jawa Tengah: surat-surat pernyataan tanggal 17 Nopember 1954 - 13 Desember 1955 tentang larangan bagi para pejabat dan pegawai negeri untuk menggunakan kekuasaannya dalam pemilu. | tembusan | 1 sampul |
| 987 | DPC Masyumi Cab. Bojonegoro: resolusi, tanggal 29 Mei 1955 tentang isi dan makna pengumuman dari PPI yaitu WNI yang diluar negeri tidak turut serta menggunakan hak pilih dalam pemilu. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| 989 | Partai NU Cab. Banyuwangi kepada PM: surat pernyataan tanggal 8 Juni 1955 tentang desakan kepada PPI untuk bertindak terhadap adanya pemasangan tanda gambar yang dibubuhi perkataan-perkataan lain dari ketetapan PPI. | asli | 1 lembar |
| 990 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 21 September 1955 - 2 Nopember 1957 tentang penambahan anggota panitia pemilihan. | tembusan | 1 sampul |
| 991 | Persatuan Pejuang Islam Bekas Bersenjata Seluruh Indonesia Daerah Jabar: surat pernyataan tanggal 25 September 1955 tentang pelanggaran untuk mengadakan rapat raksasa dalam menghadapi pemilu. | asli | 1 lembar |
| 992 | Kepala Rumah Tangga Presiden: Surat Edaran No. 754/55 tanggal 28 September 1955 tentang pemberian suara Presiden di Kementerian Penerangan Merdeka Barat 9. | stensilan | 1 lembar |
| 993 | Ormas: surat-surat pernyataan tanggal 3 Oktober 1955, 28 Pebruari 1956 tentang tuntutan diumumkannya hasil pemilu dan pemungutan suara, tanggal 19 September 1955 - 1 Maret 1956. | asli | 2 lembar |
| 994 | Kabnet Presiden: surat-surat tanggal 16 Oktober , 2 Desember 1955 tentang protes terhadap tindakan PPI Pusat yang merugikan Partai Politik Tharikat Islam(PPTI). | asli, tembusan | 3 lembar |
| 995 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 22 Oktober , 4 Desember 1955 tentang wakil-wakil buruh dalam panitia pemilihan. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 996 | Guru-guru Gereja Protestan Maluku dan pegawai yang berasal dari Ambon: surat pernyataan tanggal 27 Oktober 1955 tentang salinan surat dari John Bakker/anjuran John Bakker dalam pemilu untuk memilih partainya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 997 | Rapat Akbar Umat Islam Daerah Kec. Tg. Tebat, Palembang: resolusi, tanggal 29 Oktober 1955 tentang desakan kepada ketua PPI supaya mengadakan peraturan-peraturan baru dan instruksi kepada petugas pemilu supaya pendaftaran susulan/tambahan diperpanjang. | asli | 1 lembar |
| 998 | Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata RI. Cab. Blitar: surat pernyataan tanggal 31 Oktober 1955 tentang kecurangan dalam pemilu. | asli | 1 lembar |
| 999 | Menteri Penerangan: Peraturan No.21/S.K./S.D./55 tanggal 1 Nopember 1955 tentang sikap pegawai kementerian dalam waktu kampanye pemilihan dan menjelang pemungutan suara Anggota Konstituante. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1000 | Mr. Loekman Wiradinata, Menteri Kehakiman: surat tanggal 14 Nopember 1955 tentang pelantikan dan pengambilan pengangkatan sumpah Achmad Roeslan sebagai anggota PPI. | asli | 1 lembar |
| 1001 | Front Marhaenis Sumbawa Besar: Statement tanggal 9 Desember 1955 tentang sikap terhadap tulisan Kepala Daerah P. Sumbawa dalam seruan pemerintah yang bersangkutan dengan pemilu, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1002 | M. Sa'loed Soeriono kepada Presiden RI: surat tanggal 29 Pebruari 1956 tentang pengiriman tulisan mengenai pengisian perwakilan golongan kecil yang sesuai dengan isi dan jiwa UUDS dan UUPU yang berlaku, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1003 | DPR: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 1, 2 Maret 1956 tentang lowongan jabatan ketua DPR dan penyerahan tugas ketua DPR kepada wakil ketual, disertai surat pengantar. | asli | 3 lembar |
| 1004 | Badan Konferensi Bangsa Indonesia Turunan Arab kepada PMRI: surat tanggal 23 Maret 1956 tentang pelaksanaan pasal 58 UUD RI mengenai ketentuan bagi warga keturunan asing dalam pemilu. | tembusan | 1 lembar |
| 1005 | Sekretariat DPR RI: surat tanggal 30 April 1956 tentang kuasa pengambil sumpah anggota DPR, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1006 | Ketua Panitia Pemeriksaan Kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 17 Mei - 20 Desember 1956 tentang keputusan-keputusan panitia mengenai penentuan penerimaan terpilih sebagai Anggota Konstituante, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1007 | DPRD Kab. Swatantra Pekalongan kepada Ketua Parlemen: resolusi tanggal 29 Juni 1956 tentang desakan untuk mengadakan UU DPRD Peralihan. | tembusan | 1 lembar |
| 1008 | Menteri Dalam Negeri: Peraturan tanggal 11, 17 Juli 1956 tentang ketentuan-ketentuan dalam panitia persiapan pembentukan DPRDP, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 1009 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: surat pemberitahuan tanggal 31 Oktober 1956 tentang misi parlemen yang telah kembali dari luar negeri. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1010 | Kabinet Presiden RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat: surat tanggal 3 Nopember 1956 tentang penyampaian surat Djaguar Panggabean kepada sidang konstituante, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 1011 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Perintaj No. SP - 651/11/1956, tanggal 6 Nopember 1956 tentang pembentukan pasukan pengawal kehormatan pada acara pembukaan konstituante. | tembusan | 1 lembar |
| 1012 | Konstituante: risalah sementara tanggal 12 November 1956 tentang rancangan peraturan Panitia Ad hoc, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1013 | DPP SBKA Jabar kepada Konstituante: surat pernyataan tanggal 21 Nopember 1956 tentang sambutan kepada sidang konstituante. | tindakan | 1 lembar |
| 1014 | Organisasi politik dan massa: surat-surat pernyataan tanggal 21 Nopember 1956 - 25 Nopember 1957 tentang permohonan agar Konstituante agar membuat UUD yang demokratis, yang menguntungkan rakyat pada umumnya. | asli | 1 sampul |
| 1015 | DPRD Peralihan Kota Besar Cirebon: Putusan No. 25/II/DPR, tanggal 7 Desember 1956 tentang sokongan terhadap resolusi DPRD Peralihan Kota Besar Bandung mengenai desakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menarik kembali penetapan keanggotaan Panitia Pemilihan Dati Kabupaten/kota besar. | salinan | 1 lembar |
| 1016 | Rancangan Peraturan tata tertib Konstituante, tanggal 3 Januari 1957, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1017 | Ketua Panitia Pemeriksaan Kepada Presiden RI: laporan ke 34 - ke -37, tanggal 4 Pebrurari 1957 tentang penentuan penerimaan para terpilih Anggota konstituante, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 1018 | Konstituante: risalah-risalah sementara sidang I, tanggal 4 Januari - 14 Pebruari 1957 tentang penambahan rancangan tata tertib Konstituante, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 1019 | DPRD Kalimantan Timur: resolusi tanggal 8 Maret 1957 tentang tuntutan penyampaian kembali UU No. 7/ 1953 mengenai perwakilan minimum dalam DPR dan Konstituante. | asli | 1 lembar |
| 1020 | Konstituante kepada Presiden: risalah sementara Panitia Persiapan Konstitusi, tanggal 11 - 19 Maret 1957 tentang pembentukan komisi-komisi dan cara kerjanya. | stensilan | 8 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1021 | Konstituante: risalah sementara Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 20 - 21 Maret 1957 tentang pembentukan komisi-komisi dan cara kerjanya. | stenslan | 4 lembar |
| 1022 | Wakil Bupati Bengkulu Selatan: surat tanggal 23 Maret 1957 tentang sidang pleno DPRDP Bengkulu Selatan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1023 | Konstituante: risalah sementara Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 25 - 26 Maret 1957 tentang pengesahan laporan lengkap panitia perumus. | stensilan | 4 lembar |
| 1024 | DPRDP Kabupaten Belitung kepada Menteri Dalam Negeri: surat pernyataan tanggal 2 April 1957 tentang penghargaan kepada anggota DPRD/DPD Kabupaten Belitung. | tembusan | 1 lembar |
| 1025 | DPRDP Kabupaten Magelang: mosi tanggal 15 April - 11 Juni 1957 tentang desakan peninjauan kembali UU No. 14/1950 mengenai masa tugas DPRDP. | asli, tembusan | 6 lembar |
| 1026 | R. Rachmat Niti Soepoerbo, ahli praja Kabupaten Semarang kepada ketua Konstituante: surat tanggal 1 April 1957 tentang analisis mengenai proses pembuatan UU, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1027 | Yayasan Cinta Tanah Air: surat tanggal 20 April 1957 tentang duduknya wakil pelaut dalam Dewan Nasional, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1028 | Kabinet Presiden RI: surat pernyataan-surat pernyataan tanggal 29 April - 2 Juni 1957 tentang tanda gambar peserta (partai) dalam pemilu yang mirip dengan partai lainnya. | asli | 1 sampul |
| 1029 | Camat/KDH Kec. Bunut Hilir: Surat Keputusan No. 28/PU-57 tanggal 30 April 1957 tentang keanggotaan Panitia Pendaftaran Pemilih, dengan lampiran dan pengantar. | asli | 3 lembar |
| 1030 | Ormas: resolusi tanggal 20 Mei 1957 tentang desakan agar meninjau kembali putusan Mendagri No. BPU/7/6 mengenai pengunduran pemilu di luar P. Jawa & Madura karena keadaan darurat perang. | asli | 1 lembar |
| 1031 | BTI Sukabumi: surat pernyataan tanggal 27 Mei 1957 tentang tanda gambar yang mirip. | asli | 1 lembar |
| 1032 | DPDP Propinsi Kalimantan kepada Kementerian Dalam Negeri: surat kawat tanggal 12 Nopember 1957 tentang dukungan penghargaan kepada bekas para DPRD/DPD. | tindasan | 1 lembar |

| | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|
| 1033 | PKI Kecamatan Kota Muara Enim kepada Kepala Wilayah Muara Enim: surat tanggal 25 Nopember 1957 tentang perusakan tanda-tanda gambar dan spanduk PKI. | tembusan | 1 lembar |
| 1034 | Secom PKI Lampung Tengah kepada PDM Lampung Tengah: surat tanggal 29 Nopember 1957 tentang pemasangan tanda gambar. | tembusan | 1 lembar |
| 1035 | Serikat Buruh Perkebunan RI: surat tanggal 29 September 1959 tentang calon-calon untuk anggota MPRS dari SOBSI. | asli | 1 lembar |
| 1036 | Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada Menteri Kehakiman: surat tanggal 2 Juli 1957 tentang penyempahan Abdoel'sis Djojohadiningrat sebagai anggota panitia, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1037 | DPRDS Sumedang: pernyataan adhaesi tanggal 17 Maret 1958 tentang kedudukan dan tugas anggota DPRD di tengah-tengah masyarakat. | asli | 2 lembar |
| 1038 | DPRD Nias kepada Presiden: surat tanggal 17 Januari 1959 tentang kunjungan anggota DPR seksi H ke daerah Nias, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| N. PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | |
| 1039 | Perorangan: surat-surat tanggal 17 Agustus 1950 - 20 Agustus 1959 tentang pendapat dan saran kepad pemerintah terhadap kebudayaan dan kesenian Indonesia. NB: sebagian tulisan tangan. | asli | 1 sampul |
| 1040 | Perorangan : surat-surat tanggal 10 September 1950 - 20 Maret 1959 tentang pendapat dan saran terhadap Pendidikan di Indonesia. NB: sebagian tulisan tangan | asli | 1 sampul |
| 1041 | KPRI kepada Walikota Jakarta: surat tanggal 4 Oktober 1950 tentang pembongkaran monumen : 'Amsterdamsche Poort.' | pertinggal | 2 lembar |
| | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 20 Oktober 1950 - 30 Oktober 1957 tentang aliran kepercayaan. | asli | 1 sampul |
| 1043 | Yayasan Gedung-gedung Bersejarah: surat tanggal 14 Nopember 1950 tentang rancangan anggaran dasar Yayasan Gedung-gedung Bersejarah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1044 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Residen Bogor, Panitia Penyelenggara Perbaikan Makam: surat-sura tanggal 22 Nopember 1950-1957 tentang perbaikan kembali beberapa makam pahlawan nasional, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1045 | Beberapa menteri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 30 Nopember 1950 - 5 Nopember 1957 tentang ketentuan penyelenggaraan pendidikan kursus-kursus di lapangan kementerian masing-masing. | salinan | 2 sampul |
| 1046 | Kabinet Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa Agung: surat-surat tanggal 1 Januari - 7 April 1951 tentang ijin Presiden atas penerbitan buku 'Pancasila' dalam bahasa Tionghoa, dengan lampiran. | pertinggal | 9 lembar |
| 1047 | Kementerian PP & K dan peroranganL surat-surat tanggal 2 Januari 1951 - 30 Oktober 1957 tentang permohonan ikatan dinas. | tembusan | 1 sampul |
| 1048 | Menteri Luar Negeri : Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 9 Januari 1951 - 23 Juli 1952 tentang penunjukan mahasiswa pada Akademi Dinas Luar Negeri di Jakarta dan ikatan dinas. | salinan | 1 sampul |
| 1049 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 Januari 1951 - 17 Desember 1957 tentang permohonan untuk melanjutkan sekolah. | asli | 1 sampul |
| 1050 | Panitia 'Mardi Budaya' Jogjakarta kepada Kepala Negara: surat tanggal 8 Pebruari 1951 tentang terbentuknya sebuah badan yang bertujuan memelihara, memupuk dan memajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1051 | Kementerian-kementerian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tangal 13 Pebruari 1951 - 13 Nopember 1957 tentang ketentuan penyelenggaraan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. | salinan | 5 sampul |
| 1052 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Presiden Ri: surat tanggal 15 Pebruari 1951 tentang pertunjukan potret-potret Tiongkok Baru di gedung Sin Ming Hui, dengan lampiran. NB: lampiran Bahasa Inggris | asli | 2 lembar |
| 1053 | Kepala Jawatan Kebudayaan kepada Bachtarudun: surat tanggal 26 Pebruari 1951 tentang pembuatan patung presiden, dengan lampiran dan photo. | tembusan | 4 lembar |
| 1054 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 April 1951 - 10 Oktober 1957 tentang pembangunan beberapa taman makam pahlawan, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1055 | Kepala Kantor Urusan Pegawai: Surat Edaran tanggal 25 April 1951 tentang berakhirnya ikatan dinas dari pegawai dalam ikatan dinas terbatas yang pada waktu penyerahan kedaulatan berdiam di Irian. | stensilan | 1 lembar |
| 1056 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 25 April 1951 tentang permohonan keterangan syarat-syarat untuk menjadi penterjemah yang diakui pemerintah. | asli | 1 lembar |
| 1057 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 16 Mei 1951 - 31 Agustus 1957 tentang usul hari-hari besar. | asli | 1 sampul |
| 1058 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 26 Juni 1951 - 25 Mei 1958 tentang tuntutan pelaksanaan sistem-sistem pendidikan nasional yang demokratis. | asli | 1 sampul |
| 1059 | Kementerian PP &K, Keuangan, Sosial: surat-surat tanggal 25 Juli 1951 - 29 September 1953 tentang kursus-kursus pegawai. | tembusan | 1 sampul |
| 1060 | Kabinet Presiden RI kepada Wali Kota Malang: kawat tanggal 27 Juli 1951 tentang pengiriman acara peringatan hari nasional. | pertinggal | 2 lembar |
| 1061 | Kementerian PP & K: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 27 Juli 1951 - 13 Maret 1957 tentang pengadaan kongres, seminar dan pekan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. | salinan | 1 sampul |
| 1062 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14 Agustus 1951 - 25 Februari 1956 tentang hasil-hasil kongres. | asli | 1 sampul |
| 1063 | Parpol Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI): surat pernyataan tanggal 15 Agustus 1951 tentang peringatan 17 Agustus sebagai hari untuk memperkuat persatuan nasional, dengan lampiran dan pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1064 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 16 Agustus 1951 - 9 Mei 1957 tentang tuntutan kepada pemerintah agar pelajaran agama dijadikan pelajaran wajib sekolah. | asli | 6 lembar |
| 1065 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 20 Agustus 1951 - 9 Pebruari 1957 tentang pegawai-pegawai yang akan belajar diluar negeri, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 1066 | Artikel-artikel dari surat kabar 'Pedoman', tanggal 8 - 25 September 1951 tentang gelar "Doctor Honoris Causa" pada Presiden Soekarno dalam Fakultas Hukum dan Sosial UGM. | salinan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|--------------------------------|----------|
| 1067 | Beberapa DPRDS di Jawa, Maluku Tenggara: surat-surat tanggal 15 September 1951 - 20 April 1955 tentang tuntutan pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan dan pemberian subsidi kepada sekolah partikelir. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1068 | Bank Tabungan Pos: surat tanggal 27 September 1951 tentang saran kepada anak-anak sekolah untuk menabung. | asli | 1 lembar |
| 1069 | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian PP & K: sura-surat tanggal 17, 31 Oktober 1951 tentang inspeksi pengajaran asing, dengan lampiran. | asli, pertinggal | 4 lembar |
| 1070 | Acting Kepala Dinas Purbakala: surat tanggal 25 Oktober 1951 tentang pengurusan arca Brahmmana di Dieng. | asli | 1 lembar |
| 1071 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Pertahanan : Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 21 Nopember 1951 - 4 Juni 1957 tentang ketentuan-ketentuan hari raya/libur bagi sekolah dan kursus. | salinan | 1 sampul |
| 1072 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 27 Nopember 1951 - 9 Maret 1957 tentang permohonan ikut berbagai kursus. | asli, tembusan , pertinggal | 1 lembar |
| 1073 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Desember 1951, 17 Juni 1953 tentang penghargaan pemerintah kepada Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. Sardjito dan Raja Sisingamangaraja. | asli | 2 lembar |
| 1074 | Theodore Smith kepada Presiden RI: surat tanggal 12 Desember 1951 tentang beberapa ahli teknologi yang akan belajar di Indonesia, dengan lampiran. NB. Bhs. Inggris | salinan | 2 lembar |
| 1075 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 15 Desember 1951 - 28 Nopember 1957 tentang usul pengangkatan guru besar di beberapa universitas di Indonesia. | pertinggal | 1 sampul |
| 1076 | Kementerian PP & K RI: statistik hasil usaha Jawatan Pendidikan Masyarakat akhir tahun 1951. | stensilan | 1 sampul |
| 1077 | Kementerian PP & K : Daftar Laporan Bulanan Hasil Usaha PBH, KPU, KKOD Triwulan III/1952-1953 , disertai surat pengantar. | asli | 1 sampul |
| 1078 | Kabinet Presiden RI : surat-surat tahun 1952 - 1958 tentang perguruan tinggi di Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 1079 | Perorangan: surat tanggal 12, 23 Januari 1952 tentang Universitas Sawergading, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 1080 | Gubernur Sunda Kecil: Surat Keputusan No. 15/UP/3/3/34 tanggal 24 Januari 1952 tentang pemberian kesempatan belajar kepada V.H.R. Koroh, Kepada Daerah Swapraja Amarassi di SMA Makassar. | salinan | 1 lembar |
| 1081 | Kepala Daerah Bali, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Badan Pengurus Nasional, perorangan: surat-surat tanggal 29 Januari 1952 - 9 Juli 1956 tentang Seni Tari Bali, Solo, Timor asli, dengan lampiran. NB: ada bahasa Belanda, Inggris, Jerman | asli | 1 sampul |
| 1082 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Pebruari 1952 - 6 Nopember 1957 tentang pemutaran film. | asli | 1 sampul |
| 1083 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Pebruari 1952 - 27 Januari 1955 tentang permohonan penerbitan artikel dan buku. | asli, pertinggal | 1 sampul |
| 1084 | Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Gama: surat tanggal 22 Pebruari 1952 tentang putusan sidang mengenai pengajaran dan pendidikan pada umumnya dan bahasa khususnya. | asli | 1 lembar |
| 1085 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 26 Pebruari 1952 tentang keperluan tenaga guru di Aceh, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 1086 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 10 Maret 1952 - 10 Juni 1955 tentang tuntutan pengangkatan guru. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1087 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 133/BPT/A, tanggal 20 Maret 1952 tentang pengajar pada Perguruan Tinggi Pancasila dari Yayasan Sriwijaya di Padang. | salinan | 1 lembar |
| 1088 | Soehandrar kepada Presiden: surat tanggal 1 April 1952 tentang permohonan dikeluarkannya PP mengenai Sekolah Teknik Negeri (STN). | asli | 1 lembar |
| 1089 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 4 April 1952 - 22 Nopember 1956 tentang permohonan memperoleh ijazah. | tembusan, pertinggal | 3 lembar |
| 1090 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Kabinet Presiden: notulen rapat ke-10 Badan Pertimbangan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1952 tentang Bahasa Belanda yang dipakai sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1091 | Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan ADLN-0038 tanggal 20 Mei 1952 tentang susunan Panitia Sementara Akademi Dinas Luar Negeri. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1092 | Wakil Kepala Balai Planologie Pusat kepada Ir. R. Sarengat Kertanegara: surat tanggal 21 Mei 1952 tentang tugas Balai Planologi keluar, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1093 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 1 Juni 1952 - 30 Nopember 1957 tentang tuntutan sensor film-film dan buku-buku cabul. | asli | 1 sampul |
| 1094 | Kepala Bagian Kewanitaan Jawatan Pendidikan Masyarakat kepada Direktur Kabinet Presiden: daftar, tanggal 19 Juni 1952 rencana pelajaran latihan pegawai bagian kewanitaan. | stensilan | 3 lembar |
| 1095 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 31 Juli 1952 - 13 Agustus 1957 tentang pembangunan tugu-tugu pahlawan, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1096 | Menteri PP & K: Surat Keputusan tanggal 11 Agustus 1952 tentang perubahan tugas dan perubahan nama Balai Bahasa, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1097 | Jawatan Pengajaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 22 Agustus 1952, 22 September 1955 tentang penghargaan ijazah kursus pendidikan pegawai, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 1098 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat Keputusan No. 32209/Kab, tanggal 11 September 1952 tentang penambahan jumlah wakil Indonesia pada Internasional Cancer Research Commission dari pada Union Internationale Contre la Cancer. | salinan | 1 lembar |
| 1099 | Partoharjo: surat tanggal 17 September 1952 tentang permohonan surat tugas resmi untuk para ahli purbakala. | asli | 1 lembar |
| 1100 | SB Katolik Santo Joseph Daerah Timor: petisi tanggal 21 September 1952 tentang permintaan kepada pemerintah RI agar selekas mungkin diadakan UU dan peraturan persekolahan. | asli | 1 lembar |
| 1101 | Right Roverend Exarch John Hadoad, Chicago USA: surat tanggal 12 Oktober 1952 tentang usul agar angkatan paru Indonesia diberi pelajaran Bahasa Arab, disertai pengantar. NB: Tidak lengkap | asli | 2 lembar |
| 1102 | Menteri PP & K kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 27 Oktober 1952 tentang pidato Menteri PP & K mengenai perayaan tri windu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1103 | Kepala Kepolisian Negara: surat tanggal 5 Nopember 1952 tentang pengiriman surat keputusan perutusan Akademi Polisi. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1104 | Menteri Perekonomian kepada Dewa Menteri: surat tanggl 27 Nopember 1952 tentang tuntutan mengadakan peraturan khusus guna academici yang berharga atau berjasa, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1105 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 3 Desember 1952 - 12 Nopember 1959 tentang penghargaan kepada para pahlawan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1106 | Beberapa DPRDS di Jawa, Sumatera, Madura: resolusi-resolusi tanggal 4 Desember 1952-9 Juli 1959 tentang tuntutan pendirian sekolah-sekolah lanjutan dan fakultas kedokteran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1107 | Kabinet Presiden RI kepada Sekretaris PMRI: surat tanggal 24 Desember 1952 tentang surat K.H. Samanhudi tertanggal 2 Oktober 1952 mengenai pertanyaan sebagai golongan pendekar perintis jalan kemerdekaan Indonesia, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1108 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 29 Desember 1952 - 15 Januari 1957 tentang penyelenggaraan perpustakaan. | salinan | 1 sampul |
| 1109 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 5 Januari 1953 - 12 Oktober 1955 tentang pendirian universitas. | asli | 1 sampul |
| 1110 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 19 Pebruari 1953, 2 Agustus 1957 tentang penutupan sekolah Tionghoa di Jogjakarta, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1111 | DPRDS Kabupaten Tuban, Bone dan organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 25 Pebruari 1953 - 26 April 1957 tentang persamaan ijazah. | asli, tembusan | 6 lembar |
| 1112 | Presiden Universitas Negeri Gajah Mada: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 Maret - 27 Juli 1953 tentang masalah kepanitiaan di lingkungan UGM. | salinan | 6 lembar |
| 1113 | Gubernur Kalimantan, Gubernur Militer Nusa Tenggara: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 26 Maret 1953 - 22 Juni 1957 tentang penutupan sekolah-sekolah tionghoa. | salinan | 3 lembar |
| 1114 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 April 1953, 5 Pebruari 1954 tentang pembangunan gedung-gedung sekolah, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1115 | Kepala Kantor Sosial RI Cirebon: laporan tanggal 13 April 1953 tentang mata pelajaran pendidikan sosial umum dan soal ujian, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1116 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 15 April 1953, 20 Juli 1954 tentang pengiriman demobilisasi pelajar. | asli | 2 lembar |
| 1117 | Menteri Perburuhan : Peraturan No. 63 tanggal 23 April 1953 tentang pemberian pinjaman pakaian kerja kepada pelajar dan guru-guru praktek dari latihan kerja yang diselenggarakan oleh Jawatan Penempatan Tenaga, dengan penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 1118 | Pemimpin Sekolah Bidan Bukit Tinggi: surat tanggal 4 Mei 1953 tentang pribadi Ida Ayoe Mega Murni Mahayani, dengan lampiran. | asli | 8 lembar |
| 1119 | Presiden UGM: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 6 Mei 1953 - 10 April 1954 tentang penunjukan panitia pengawas asrama mahasiswa UGM di Jogjakarta. | salinan | 6 lembar |
| 1120 | Menteri Luar Negeri kepada Direktur Kabinet Presiden: Surat-surat tanggal 19 Mei - 24 Juni 1953 tentang kuliah Presiden mengenai Pakistan dan India, dengan lampiran. NB: sebagian Bhs. Inggris | asli | 6 lembar |
| 1121 | Kabinet Perdana Menteri kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 21 Mei, 30 Desember 1953 tentang perlindungan gelar "akuntan", dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 1122 | Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik Universitas Gajah Mada kepada Presiden RI: surat tanggal 22 Mei 1953 tentang susunan pengurus baru Senat Mahasiswa Fakultas HESP, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1123 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 19 Juni 1953 tentang pendapat Prof. Prijono mengenai cara penulisan huruf latin Indonesia, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1124 | Notulen Konperensi Kepala-kepala Sekolah Pertanian Menengah Atas pada tanggal 19-20 Juni 1953. | stensilan | 1 lembar |
| 1125 | Badan Kongres Pendidikan Indonesia: surat tanggal 3 Agustus 1953 tentang permohonan bantuan demi terselenggaranya/berhasilnya kongres, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1126 | Persatuan Guru Islam N.O Surabaya: resolusi tanggal 7 Agustus 1953 tentang tuntutan subsidi Madrasah. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1127 | Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan No. ADLN-0135 tanggal 14 Agustus 1953 tentang pembentukan panitia untuk menyaring pelamar-pelamar calon mahasiswa ADLN angkatan 1953. | salinan | 1 lembar |
| 1128 | Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 18 Agustus 1953 tentang permohonan ijin istimewa Persatuan Demobilisasi Pelajar Jakarta tanggal 30 Juli 1953, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1129 | DPR kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 18 Agustus 1953 tentang saran-saran seksi D mengenai pelajaran, dengan lampiran. | tembusan | 5 lembar |
| 1130 | Ketua Yayasan Universiteit Pinaesaan Tondano kepada Presiden: surat tanggal 21 Agustus 1953 tentang permohonan dana untuk pembukaan fakultas hukum, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1131 | Sekretaris Jenderal Kementerian PP & K kepada Presiden RI: surat tanggal 22 Agustus 1953 tentang jumlah sekolah dan banyaknya murid, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1132 | Sidang Dewan Pemuda: surat pernyataan tanggal 2 September 1953 tentang dukungan perluasan bagian pemuda dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. | stensilan | 1 lembar |
| 1133 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 17 September 1953 - 6 Desember 1956 tentang tuntutan pemberantasan buta huruf. | pertinggal | 1 sampul |
| 1134 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat pemberitahuan tanggal 12 September - 26 November 1953 tentang pembentukan perpustakaan ilmu pengetahuan. | salinan | 2 lembar |
| 1135 | Beberapa DPRDS di Jawa, Bangkalan: mosi-mosi tanggal 28 September 1953 - 27 Mei 1958 tentang tuntutan pengadaan buku-buku pelajaran sekolah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1136 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 20 Oktober 1953, 1 Desember 1954 tentang tuntutan mengadakan kursus-kursus. | asli | 2 lembar |
| 1137 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 1 Nopember 1953, 27 April 1956 tentang desakan kepada pemerintah supaya mengesahkan dan mengundang UU tentang pokok pendidikan dan pengajaran RI No. 4/1950. | tindakan | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|-------------|----------|
| 1138 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Nopember 1953, 23 Nopember 1955 tentang kegiatan mahasiswa dalam organisasi. | asli | 6 lembar |
| 1139 | Dewan Pimpinan Univ. Islam Sumut: surat tanggal 23 Maret 1954 tentang permohonan persetujuan perubahan nama PTII menjadi Universitas Islam Sum-Ut sejak tanggal 6 Pebruari 1954. | asli | 1 lembar |
| 1140 | Kementerian Penerangan kepada Biro reklame dan penerangan ' De Unie': surat tanggal 31 Maret 1954 tentang keberatan mengenai permohonan foto R.A Kartini. | tembusan | 1 lembar |
| 1141 | Kementeria PP&K: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 10 April 1954 - salinan 17 Oktober 1957 tentang ketentuan dan pelaksanaan ikatan dinas bagi mahasiswa/pelajar. | | 1 sampul |
| 1142 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 28 April, 10 Juni 1954 tentang Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta. | salinan | 3 lembar |
| 1143 | Konperensi Yin Ni Chung Lien Hui kepada Kementerian PP & K: statement tanggal 19 Mei 1954 tentang penyediaan diri untuk membentuk usaha kementerian mengenai pendidikan WNI keturunan asing, disertai pengantar. | tindakan | 2 lembar |
| 1144 | Gubernur Sunda Kecil kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 24 Mei 1954 tentang pembukaan Museum Ende, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1145 | Wakil Presiden UI kepada Gulam: surat tanggal 8 Juni 1954 tentang permohonan diterima pada Fakultas Ekonomi, dengan lampiran. | carbon copy | 2 lembar |
| 1146 | Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian PP & K: surat tanggal 12 Juni 1954 tentang Perda dari Jogjakarta tanggal 15 Oktober 1953 mengenai barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu pengetahuan. | tembusan | 1 lembar |
| 1147 | Dewan Mahasiswa UI Jakarta dan UI Makassar: statement tanggal 14 Juni 1954, 30 September 1955 tentang peninjauan kembali pengangkatan presiden UI Jakarta dan dekan FH Makassar. Dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1148 | DPRDS Grobogan dan Trenggalek: mosi-mosi tanggal 3 Agustus 1954, 30 Maret 1955 tentang penerimaan pelajar sekolah lanjutan. | asli | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1149 | Kementerian PP & K kepada Kepala Jawatan Pengajaran: surat tanggal 4 Agustus 1954 tentang pembentukan panitia khusus. | tembusan | 2 lembar |
| 1150 | Presiden UGM: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 12 Agustus, 22 September 1954 tentang penunjukan anggota-anggota panitia peneliti. | salinan | 2 lembar |
| 1151 | Menteri Pertanian: peraturan no. 7/1954, tanggal 16 Agustus 1954 tentang tunjangan ikatan dinas bagi pelajar-pelajar kursus Akademi Penyelidikan Pertanian, dengan lampiran. | salinan | 4 lembar |
| 1152 | Panitia Besar Perayaan 17 Agustus 1954 Sumater-Utara: surat tanggal 17 Agustus 1954 tentang pernyataan kecewa atas sikap wali kota Medan yang tidak menyediakan lapangan merdeka untuk perayaan 17 Agustus. | asli | 1 lembar |
| 1153 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 Agustus, 3 Nopember 1954 tentang protes terhadap perayaan hari nasional yang diselenggarakan dengan pesta pora. | asli | 2 lembar |
| 1154 | Lembaga Islam (Badan Pendidikan dan Perpustakaan) : surat pemberitahuan tanggal 21 Agustus 1954 tentang pembukaan sekolah menengah pertama dan sekolah guru bawah dari Lembaga Islam. | asli | 1 lembar |
| 1155 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 1 September 1954, 6 Juli 1956 tentang perguruan tinggi pendidikan guru, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 1156 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1954 - 18 Oktober 1955 tentang daerah-daerah pengawasan kantor inspeksi Sekolah Tehnik Pertama dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Daerah. | salinan | 8 lembar |
| 1157 | Inspeksi Pusat Pendidikan Guru kepada kepala bagian perguruan tinggi c III Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 25 Nopember 1954 tentang tugas belajar untuk Sitti Fatimah, Guru SGB I Jogjakarta, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1158 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI: surat tanggal 6 Desember 1954 tentang rapat pertemuan Seksi E dengan presiden UI bersama dekan-dekan dan ketua kurator. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1159 | Perdana Menteri: Surat Edaran No. 1/RI/1955 tanggal 17 Januari 1955 tentang larangan untuk mengambil tenaga pengajar pada perguruan tinggi. | tembusan | 1 lembar |
| 1160 | Universitas Negeri Gajah Mada: pidato tanggal 19 Desember 1954 pada acara Dies Natalis V oleh Prof. Dr. Sardjito. | cetak | 1 sampul |
| 1161 | DPD BAPERKI Sumut: resolusi tanggal 30 Januari 1955 tentang penggunaan bahasa. | asli | 1 lembar |
| 1162 | Gabungan organisasi-organisasi pelajar pandu dan pemuda: surat pernyataan bersama, tanggal 31 Januari 1955 tentang pemakaian baju-baju yang melampaui batas-batas kesusilaan timur. | asli | 1 lembar |
| 1163 | Badan Kepanduan Bangsa Indonesia: surat tanggal 15 Pebruari 1955 tentang peristiwa Presiden dengan KBI, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1164 | Menteri PP & K kepada Kepala Jawatan Pengajaran: surat tanggal 1 Maret 1955 tentang penggunaan ejaan yang keliru, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1165 | Himpunan Mahasiswa Apoteker : "Ars Praeperandi" Bandung: resolusi tanggal 5 Maret 1955 tentang protes terhadap menteri PP & K mengenai perkataan <i>bacaloreaat di belakang</i> titel apoteker , disertai surat pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1166 | kepala Pusat Jawatan Perikanan Darat: Surat Keputusan No. 98/5.2/55/Pend tanggal 26 Maret 1955 tentang pembentukan panitia ujian penghabisan kursus calon mantri perikanan darat tahun 1954/1955, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1167 | Menteri PP & K kepada pemimpin umum Lembaga Bahasa dan Budaya: surat tanggal 28 Maret 1955 tentang pengesahan Panitia Inter-Departemenal. | tembusan | 1 lembar |
| 1168 | DPRDS Sukabumi: surat pernyataan adhesi tanggal 30 Maret 1955 tentang pungutan uang pangkal bagi sekolah lanjutan pemerintah dan partikelir, agar tidak memberatkan orang tua murid, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1169 | Beberapa DPRDS di Jawa: resolusi-resolusi tanggal 20 April 1955 - 31 Desember 1957 tentang soal ujian dan rencana pelajaran sekolah. | asli | 5 lembar |
| 1170 | Kementerian Keuangan RI kepada Kementerian PP & K : surat tanggal 6 Mei 1955 tentang ikatan dinas untuk waktu terbatas Prof. Dr. Ir. J. Van Schylenborgh. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1171 | Menteri Sosial: Surat Keputusan No.P. 20-24-22/1748 tanggal 31 Mei 1955 tentang pendidikan pegawai-pegawai khusus dalam lingkungan Kementerian Sosial. | salinan | 1 lembar |
| 1172 | Presiden Universitas Gajah Mada: surta tanpa tanggal Mei 1955 tentang penyampaian laporan kunjungan ke Manilla dan Pakistan serta buku mengenai Summary of The Reveval of Sculpture in Indonesia, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1173 | Himpunan Keluarga PGSLP Jogjakarta kepada Menteri PP & K surat tanggal 10 Juni 1955 tentang tuntutan agar diadakan peraturan yang tegas dan tepat untuk PGSLP. | tembusan | 1 lembar |
| 1174 | Perkumpulan Orang tua/Murid/Guru (POMG) seluruh Kab. Sumedang kepada Menteri PP & K: resolusi tanggal 16 Juni 1955 tentang tuntutan Konperensi PGRI Jabar tanggal 4-6 Juni 1955 yaitu mengenai SK Penetapan jabatan negeri. | tembusan | 1 lembar |
| 1175 | Kementerian Pertahanan kepada M. Ramli bin Dangas: surat tanggal 8 September 1955 tentang permohonan surat tanda jasa, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1176 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 54843/Kab, tanggal 20 September 1955 tentang hari libur sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pada waktu pemungutan suara untuk pemilu anggota-anggota DPR dan Konstituante. | salinan | 1 lembar |
| 1177 | Kongres HMI ke-IV di BandungL keputusan tanggal 9 - 15 Oktober 1955 tentang sikap terhadap penyiaran kembali pidato presiden oleh RRI pada tanggal 28 September 1955 dan keseretan UI Makassar, disertai surat pengantar. | asli | 3 lembar |
| 1178 | Ketua tata usaha kepala bagian pendidikan Kementerian Kesehatan kepada Mursik: surat tanggal 24 Oktober 1955 tentang lamaran untuk pendidikan asisten apoteker Medan. | tembusan | 2 lembar |
| 1179 | Menteri PP & K: Surat Keputusan tanggal 2 Nopember 1955 tentang perubahan nama Lembaga Akademis Pendidikan Jasmani di Bandung menjadi Akedemi pendidikan Jasmani. NB: tidak lengkap | salinan | 1 lembar |
| 1180 | Kepala Inspeksi SMA kepada Direktur SMAN Bojobegoro: surat-surat tanggal 3, 29 Nopember 1955 tentang resolusi pelajar. | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1181 | Konperensi Seni Tari Jogjakarta: resolusi/putusan tanggal 12 November 1955 tentang desakan pemberian subsidi kepada organisasi kesenian, mengadakan Akademi Seni Tari, membantu mendirikan gedung-gedung kesenian, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1182 | Komite Aksi Pelajar SMA Partikelir Surabaya kepada Kementerian PP & K: resolusi tanggal 14 Nopember 1955 tentang perlakuan yang tidak adil antara sekolah partikelir dan negeri. | tembusan | 1 lembar |
| 1183 | Organisasi-organisasi pelajar: surat-surat pernyataan tanggal 28 Nopember 1955 - 5 Pebruari 1956 tentang permohonan pencabutan peraturan testing bagi pelajar-pelajar partikelir. | asli, tembusan | 4 lembar |
| 1184 | Menteri PP & K kepada PMRI: surat tanggal 22 Desember 1955 tentang referensi mengenai buku yang diterjemahkan, disadur, diterbitkan di Indonesia, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1185 | DKP kepada Rusmiputro, pemimpin Akademi Penyelidik Pertanian Bogor: surat tanggal 6 Januari 1956 tentang pengiriman Widowati untuk melanjutkan pelajaran ke Amerika, dengan lampiran. | pertinggal | 5 lembar |
| 1186 | Pemda Istimewa Jogjakarta kepada Kwartir Besar Umum Nasional Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) : surat tanggal 9 Januari 1956 tentang pengangkatan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pandu agung, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1187 | M. A. Djohan kepada Menteri PP & K: surat tanggal 17 Januari 1956 tentang permohonan disamakan/diakui sederajat atas ijazah sekolah tehnik partikelir dengan ijazah negeri, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1188 | PB Lembaga Kebudayaan Melayu: resolusi tanggal 8 Pebruari 1956 tentang desakan kepada Kementerian PP & K agar membuat peraturan bentuk pakaian nasional. | asli | 1 lembar |
| 1189 | Panitia Pembina Universitas Muhammadiyah kepada Presiden: surat tanggal 13 Februari 1956 tentang pendirian suatu fakultas yang diberi nama falsafah dan hukum, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1190 | Ketua Persatuan RK Surabaya: risalah, tanggal 23 Pebruari 1956 tentang perkembangan sejarah RI. | stensilan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1191 | S. Raffandie kepada Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang: surat tanggal 20 April 1956 tentang permohonan dispensasi dari pemerintah agar diluluskan dalam ujian SMPN tahun 1955/1956. | tembusan | 1 lembar |
| 1192 | Panitia mempertahankan Taman Raden Saleh: surat tanggal 21 April 1956 tentang Taman Raden Saleh Syarif Bustaman, dengan lampiran. NB: ada foto | asli | 1 lembar |
| 1193 | Menteri PP & K : surat tanggal 26 April 1956 tentang pokok hasil kompetensi kementerian PP & K pada tanggal 23 dan 24 April, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1194 | Direktur Jendral Jawatan RRI kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 27 April 1956 tentang dalang Sukajuatmadja, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1195 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 25315/S tanggal 3 Mei 1956 tentang pelaksanaan SK No. 47809/kab mengenai pesanan buku-buku ilmu pengetahuan dan pelajaran guna mendapat potongan harga 50%, dengan lampiran. | salinan | 7 lembar |
| 1196 | Rapat bersama tokoh-tokoh terkemuka di Kabupaten Pasuruan kepada kepala pusat Jawatan Perikanan Laut: resolusi tanggal 24 Mei 1956 tentang desakan modernisasi perikanan dan didirikannya sekolah perikanan laut. | tembusan | 1 lembar |
| 1197 | Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan Indonesia di San Fransisko: telegram, tanggal 27 Juni 1956 tentang keberangkatan Didi Kartasmita ke luar negeri untuk tugas belajar. | tembusan | 1 lembar |
| 1198 | Perguruan Tinggi Islam Jakarta: resolusi tanggal 5 Juli 1956 tentang desakan agar pemerintah mengeluarkan/menciptakan UU perguruan tinggi yang menjamin hak Perguruan Tinggi partikelir. | asli | 1 lembar |
| 1199 | Panitia SMP Kec. Tarusan kepada Menteri PP & K: surat tanggal 17 Juli 1956 tentang permohonan bantuan Bogroting pemerintah untuk penyudahan SMP Tarusan dan tambahan guru. | tembusan | 1 lembar |
| 1200 | Ormas kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 10 Agustus, 1 Desember 1956 tentang permohonan kepindahan sekolah. | asli | 2 lembar |
| 1201 | Organisasi massa, DPRDP: surat-surat pernyataan, tanggal 30 Oktober 1956 - 23 Nopember 1957 tentang sikap terhadap pengumuman Kementerian PP & K yaitu mengenai kenaikan uang ujian. | asli, tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1202 | PB PINDA (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Aceh) kepada Direktur SMPN I Padang: surat tanggal 14 Nopember 1956 tentang permohonan berhenti Tg. Mhd. Ramli dari sekolah. | tembusan | 1 lembar |
| 1203 | Komisaris Daerah Persatuan Pelajar Sekolah Guru Kab.Blitar kepada menteri PP & K: resolusi tanggal 15 Nopember 1956 tentang desakan agar PP No. 74103/S tanggal 12 Oktober 1956 dicabut dan diganti dengan yang lama, mengenai peraturan pengendalian harga buku dan alat-alat pelajaran lainnya. | tembusan | 1 lembar |
| 1204 | Kementerian PP & K: surat tanggal 4 September 1956 tentang permohonan asli scholarship PP & K untuk Hans Wilhelm Richrath, dengan lampiran. | | 3 lembar |
| 1205 | DPRD Kab. Tasikmalaya: mosi tanggal 21 Desember 1956 tentang permohonan pembuatan/mengundangkan UU wajib belajar sebelum parlemen baru terbentuk dan mempertahankan adanya warning verbetring. | asli | 1 lembar |
| 1206 | Persatuan Pelajar Sekolah Guru Semarang: resolusi tanggal 25 Desember 1956 tentang ujian tambahan dan pemberian ikatan dinas bagi yang tidak naik. | asli | 1 lembar |
| 1207 | Inspeksi Pendidikan Guru Daerah V Jateng kepada Kasina: surat tanggal 16 Januari 1957 tentang penerimaan pelajar lulus ujian akhir SGB bag.I di SGB. | tembusan | 1 lembar |
| 1208 | Akademi Ilmu Pelayaran kepada Menteri Perhubungan : resolusi tanggal 20 Januari 1957 tentang desakan peresmian AIP, disertai surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 1209 | Kabinet Presiden Ri: Notulen Diskusi Ilmuwan Indonesia tanggal 2 Pebruari 1957 tentang masalah provinsialisme.N.B. Bhs. Inggris. | stensilan | 1 lembar |
| 1210 | Menteri PP & K : Surat Keputusan No. 21160/S tanggal 23 Pebruari 1957 tentang syarat-syarat untuk menjabat pekerjaan guru kepala pada sekolah pengajaran asing. | salinan | 1 lembar |
| 1211 | Kabinet Presiden: resolusi-resolusi tanggal 4 Maret 1957, 15 April 1958 tentang permohonan akan status Universitas Dharma Bakti di Tarutung dan SKN. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1212 | F.O Janis kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 21 Maret 1957 tentang permohonan akan kebenaran berita tidak lulus ujian, disertai surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 1213 | Kepala Biro Koordinasi Perguruan Tinggi kepada Keduataan Besar Republik Indonesia di Paris: surat tanggal 23 Maret 1957 tentang permohonan The Ting Tien untuk memperpanjang delegasi yang mempelajari spesialisasi piano solist di Paris, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1214 | Kepala Dinas Purbakala: surat, tanggal 2 April 1957 tentang laporan wartawan Bramono mengenai penyelidikan rahasia sejarah Jawa, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1215 | DPO Parpol Tharikat Islam, Sumatera Utara: surat tanggal 3 Mei 1957 tentang pembangunan Madrasah Maktab yang digagalkan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1216 | Panitya Persiapan Pembentukan Universitas Negeri di Bandung: Surat Keputusan No. 27/PPUN/57, tanggal 6 Mei 1957 tentang penambahan anggota panitya PPUN di Bandung. | tembusan | 1 lembar |
| 1217 | Mr. AK Pringgodigdo/KPRI kepada Prof. Dr. Bahder Djohan, Presiden UI: surat tanggal 29 Mei 1957 tentang kesukaran-kesukaran di UI, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 1218 | Persatuan Pelajar Indonesia di Inggris: surat tanggal 27 Juni 1957 tentang permintaan terhadap salah satu utusan Indonesia untuk menghadiri konperensi. | asli | 1 lembar |
| 1219 | Siswa SMEAN Makassar kepada Dewan Guru SMEA: surat pernyataan, tanggal 7 Agustus 1957 tentang protes atas tindakan guru-guru bersama TU SMEAN Makassar mengenai peraturan pembayaran sumbangan pendidikan dan gedung. | tembusan | 1 lembar |
| 1220 | Kongres Mahasiswa/pelajar se-Nusa Tenggara Timur: surat tanggal 15 Agustus 1957 tentang pengiriman hasil-hasil kongres Mahasiswa dan Pelajar se -Nusa Tenggara Timur, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1221 | Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Guru Bengkalis: surat tanggal 1 September 1957 tentang sumbangan pembangunan sekolah guru Bengkalis, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1222 | Panitia Panel Konsepsi Presiden Soekarno Senat Mahasiswa Fakultas Sosial Politik UGM: surat tanggal 3 April 1957 tentang hasil panel pada tanggal 12 Maret 1957, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1223 | Kementerian PP & K: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 7 Juni, 22 Agustus 1957 tentang penunjukan daerah-daerah sebagai tempat percobaan wajib belajar, dengan lampiran. | sallinan | 7 lembar |
| 1224 | Menteri Perindustrian kepada Sekretaris Dewan Menteri, surat tanggal 9 September 1957 tentang pidato PM untuk memperingati hari Kemerdekaan RI, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1225 | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri PP & K: surat tanggal 9 Agustus 1957 tentang pembentukan Panitia Negara Pendidikan Teknik. | tembusan | 1 lembar |
| 1226 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 11 Agustus 1957, 13 April 1958 tentang desakan penyeragaman buku pelajaran untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. | tindakan | 3 lembar |
| 1227 | Pengurus PII Cab. Malang kepada Menteri Agama: surat pernyataan, tanggal 4 September 1957 tentang sikap terhadap peraturan/instruksi Kementerian Agama mengenai penyaringan nilai angka bagi pelajar-pelajar tamatan PGAPN/partikelir yang melanjutkan ke PGAAN. | tindakan | 1 lembar |
| 1228 | Menteri Sosial : Surat Keputusan No. Penu. 10 - 2 / 2081 tanggal 6 September 1957 tentang penunjukan beberapa orang untuk mengikuti pelajaran-pelajaran pada kursus dinas sosial menengah atas (KDSA) di Bandung, dengan lampiran dan ralat. | salinan | 2 lembar |
| 1229 | Pimpinan Universitas Rakyat Medan: Surat Keputusan tanggal 23 September 1957 tentang pendirian Perguruan Tinggi Rakyat Pematang Siantar. | kutipan | 1 lembar |
| 1230 | Kabinet Presiden: resolusi-resolusi tanggal 26 September, 1 Oktober 1957 tentang sikap terhadap peraturan mengenai pembatasan jumlah ujian yang dapat ditempuh mahasiswa. | tembusan | 2 lembar |
| 1231 | Menteri Sosial: Surat Keputusan No. Penu. 11 -25/2558 tanggal 3 Oktober 1957 tentang pemberian tugas belajar kepada pegawai-pegawai Kementerian Sosial, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1232 | Ketua Persatuan Pelajar Demobilisan Koordinator Jatim: surat tanggal 8 Oktober 1957 tentang penyaluran pelajar demobilisant dan pioners brigade untuk pembangunan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1233 | Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia: Laporan Bulanan, tanggal 15, 28 Oktober 1957 disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1234 | Kabinet Presiden RI: pidato radio tanggal 10 Nopember 1957 dalam rangka menyambut hari Pahlawan oleh Menteri Urusan Veteran. | stensilan | 2 lembar |
| 1235 | Kementerian PP &K : surat tanggal 21 November 1957 tentang rencana pendidikan dokumentasi, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1236 | Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani Daerah II Sumatera Tengah: laporan setahun Pemerintahan Sumatera Tengah, tanggal 15 Nopember 1957 tentang jumlah kantor-kantor IPD Sumatera Tengah, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1237 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kabupaten Hulu Sungai Utara: revolusi tanggal 18 Nopember 1957 tentang sarannya agar guru-guru/pendidik yang dikirim ke daerah-daerah selain dibekali pengajaran ilmu pendidikan diajarkan juga ilmu sosiologi/kemasyarakatan. | asli | 1 lembar |
| 1238 | Hidajat Tarja Amidjaja kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Seksi E Bagian Pengajaran: surat tanggal 19 Nopember 1957 tentang peraturan mengikuti ujian akhir SMA yang dikeluarkan oleh Kementerian PP & K di Jakarta tidak adil. | tembusan | 1 lembar |
| 1239 | Panitia Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional Kam. Cempaka Wangi Kemayoran Jakarta: surat tanggal 1 Februari 1958 tentang pembentukan panitia pembangunan sekolah rakyat nasional. | asli | 1 lembar |
| 1240 | Pemuda Demokrat Indonesia Cab. Wonogiri: resolusi tanggal 9 Februari 1958 tentang pelajaran Pancasila. | asli | 1 lembar |
| 1241 | Rakyat Sungai Seranan kalimantan Tengah kepada Pengadilan Negeri RI Kab. Kotawaringin: surat pernyataan, tanggal 24 Juni 1958 tentang L.T. Basen dapat mengajar kembali. | tembusan | 1 lembar |
| 1242 | Organisasi Perfilman kepada Presiden RI : telegram tanggal 13 Oktober 1959 tentang penghargaan terhadap perencanaan peraturan baru dalam usaha melindungi kebudayaan nasional. | asli | 3 lembar |

O.

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1243 | Sekretaris Dewan Menteri: laporan tanggal 1950 - 1951, tentang keputusan- asli keputusan rapat Dewan Menteri. | | 1 sampul |
| 1244 | Sekretaris Dewan Menteri: surat tanggal 31 Agustus 1950 tentang nama asli dan lingkungan pekerjaan kementerian-kementerian negara kesatuan, dengan lampiran. | | 1 sampul |
| 1245 | Jawatan Pemerintah atas pandangan umum Babakan Pertama DPR tanggal 10 Oktober 1950 tentang program Kabinet Natsir, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 sampul |
| 1246 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Oktober 1950 - 14 Agustus 1959 tentang tuntutan sikap tegas dari Soekarno. | asli | 1 sampul |
| 1247 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 9/P/M?1950, tanggal 14 Oktober 1950 tentang pembentukan suatu panitia teknis yang berkewajiban menyiapkan segala usaha Pemerintah yang akan dilaksanakan berhubung dengan hasil-hasil perundingan mengenai masalah kedudukan kenegaraan Keresidenan Irian Barat. | salinan | 2 lembar |
| 1248 | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 16 Oktober 1950 - 5 Nopember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Keuangan. | salinan | 1 sampul |
| 1249 | Organisasi Massa/politik: resolusi-resolusi tanggal 18 Oktober 1950 - 18 Nopember 1957 tentang tuntutan pembangunan-pembangunan di segala bidang. | tembusan | 1 sampul |
| 1250 | Sekretaris Dewan Menteri kepada Kabinet Presiden RI: laporan, tanggal 31 Oktober 1950 tentang susunan jawaban pemerintah dan perundangan umum babakan II DPR atas program Kabinet Natsir, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1251 | Perdana Menteri Republik Indonesia: Keputusan No. 15 tanggal 2 Nopember 1950 tentang penetapan tugas perwakilan kantor jawatan urusan umum pegawai di Makassar dipimpin oleh L.C. Latumahina, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1252 | Sekretaris Dewan Menteri: surat pengumuman-surat pengumuman tanggal 4 Nopember 1950 - 23 September 1958 tentang masalah-masalah yang dibicarakan dalam sidang-sidang. | stensilan | 6 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1253 | Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 16 Nopember 1950 tentang Menteri Negara Harsono Tjokroaminoto, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1254 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 Nopember 1950 - 4 September 1957 tentang penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pimpinan di lingkungan Angkatan Darat. | salinan | 1 sampul |
| 1255 | Menteri Sosial: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 1 Desember 1950- 5 Agustus 1958 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Sosial. | salinan | 1 sampul |
| 1256 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung: surat-surat tanggal 5 Desember 1950, 23 Agustus 1951 tentang penempatan jaksa agung muda dan penunjukan registrasi pembantu pada kejaksaan-kejaksaan , dengan lampiran. | tembusan | 6 lembar |
| 1257 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Presiden RI: surat rahasia, tanggal 16 Desember 1950 tentang penjelasan mengenai pekerjaan di Kejaksaan Agung, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1258 | Menteri PP & K: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 18 Desember 1950 - 5 September 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian PP & K. | salinan | 1 sampul |
| 1259 | Mr. Memet Tanumidjaja kepada PMRI: surat tanggal 20 Desember 1950 tentang <i>excessen boycott</i> , dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 1260 | Organisasi Massa: mosi, tanggal 31 Desember 1950, 7 Januari 1951 tentang desakan kepada presiden agar Kabinet Natsir dibubarkan, dengan lampiran. | stensilan | 1 lembar |
| 1261 | Putusan-putusan rapat kabinet Sukiman tahun 1951 - 1952. | asli | 1 sampul |
| 1262 | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 5 Januari 1951 - 25 Nopember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Kesehatan. | salinan | 1 sampul |
| 1263 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Januari 1951 - 17 Januari 1957 tentang permohonan tempat/bangunan untuk kantor-kantor. | tembusan | 3 lembar |

| | | | |
|------|---|---------|----------|
| 1264 | Kementerian Pertanian: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 10 Januari 1951 - 22 Nopember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Pertanian. | salinan | 1 sampul |
| 1265 | Menteri Perhubungan : Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 25 Januari 1951 - 13 April 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Perhubungan. | salinan | 1 sampul |
| 1266 | Kementerian Agama: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1951 - 10 Desember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Agama. | salinan | 1 sampul |
| 1267 | Menteri Pertahanan: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 13 Pebruari 1951 - 15 Nopember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Pertahanan. | salinan | 1 sampul |
| 1268 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 23 Pebruari 1951, 20 Agustus 1952, April 1953 tentang permohonan pendapat Presiden mengenai arsitektur bangunan Indonesia, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1269 | Menteri Perdagangan dan Industri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 8 Maret 1951 - 21 Desember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Industri. | salinan | 4 lembar |
| 1270 | Menteri Perburuhan: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1951 - 11 Desember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Perburuhan. | salinan | 1 sampul |
| 1271 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Maret 1951 - 4 Oktober 1959 tentang pencalonan dan pengangkatan gubernur militer, residen, sultan Sumbawa Dati I dan II di Maluku, Sulawesi, Sumatera dan Jawa. | asli | 1 sampul |
| 1272 | KSAD: Surat Keputusan no. 46 /KSAD?kpts/1951 , tanggal 18 Maret 1951 tentang organisasi dan prosedur kerja Corps Cadangan Nasional, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1273 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 2 April 1951 - 6 Juli 1954 tentang tuntutan penghapusan UU yang bersifat kolonial. | asli | 1 sampul |
| 1274 | PNI Daerah Madiun kepada Presden RI: statement tanggal 3 Mei 1951 tentang pernyataan setuju terhadap kebijaksanaan formateurs dalam usaha pembentukan kabinet. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1275 | Organisasi massa kepada Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 4 Mei 1951 - 2 Juni 1957 tentang usul dan tuntutan pencalonan, mempertahankan dan penggantian pejabat tinggi pemerintah dan negara. | asli | 1 sampul |
| 1276 | Menteri Penerangan: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 17 Mei 1951 - 5 Desember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Penerangan. | stensilan | 1 sampul |
| 1277 | Kabinet Presiden RI: surat tanggal 29 Mei 1951 tentang Dewan Perancang Negara, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 1278 | Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden: surat tanggal 18 Juni 1951 tentang rancangan mengenai nama dan lingkungan pekerjaan menteri RI, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1279 | Sekretaris Dewan Menteri: naskah PP tanggal 18 Juni 1951, 24 September 1952 tentang nama dan lingkungan pekerjaan menteri RI, disertai pengantar. | stensilan | 1 sampul |
| 1280 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 58/UM/51 tanggal 30 Juni 1951 tentang penetapan bentuk palu-tok bagi seluruh Jawatan Kehutanan, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1281 | Menteri Perekonomian kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 12 Juli 1951 tentang gedung untuk kantor pemerintahan pusat Negara Kesatuan RI. | tembusan | 1 lembar |
| 1282 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 14 Juli 1951 - 26 Januari 1956 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Perekonomian. | stensilan | 1 sampul |
| 1283 | Organisasi politik dan massa: surat-surat tanggal 13 Nopember 1950 - 2 Nopember 1959 tentang dukungan penolakan terhadap pencalonan pengangkatan, mutasi dan penggantian pejabat Dati I dan II. | asli | 2 sampul |
| 1284 | Menteri PU & T: Surat Keputusan -Surat Keputusan tanggal 10 September 1951 - 28 Oktober 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. | salinan | 1 sampul |
| 1285 | Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 24 September 1951 tentang rencana PP mengenai pembentukan Kantor Urusan Agraria, disertai pengantar. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|---------------------|----------|
| 1286 | Menteri PU & T: proses verbal tanggal 29 September 1951 tentang penyerahan dan penerimaan urusan pelabuhan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga ke Kementerian Perhubungan, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1287 | Kabinet Presiden RI: Surat - Surat tanggal 28 Nopember 1951 - 23 Nopember 1957 tentang tanda tangan, paraf dan stempel para notaris. | asli | 1 sampul |
| 1288 | Kementerian Penerangan: surat tanggal 8 Desember 1951 tentang pembubaran Kementerian Penerangan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1289 | Kabinet Presiden RI: surat kaleng tanggal 21 Desember 1951 tentang minta penjelasan mengenai status Republik Indonesia, dengan lampiran. N.B. Bhs Tiongkok & dengan terjemahan. | asli | 2 lembar |
| 1290 | Fu Thiam Fat, wakil PBB untuk Hindia Belanda kepada Soekarno: surat tanpa tanggal 1952 tentang pernyataan sebagai bapak dari kemerdekaan Indonesia. | salinan | 3 lembar |
| 1291 | Kabinet Presiden RI: Nota tt 1952 tentang bentuk UU, UU Darurat, PP dan Keppres. | konsep | 1 sampul |
| 1292 | Direktur Kabinet kepada Kyai Taufik d/a Prawoto Mangkusasmito: surat tanggal 26 Pebruari 1952 tentang pembentukan kabinet baru. | pertinggal | 1 lembar |
| 1293 | Kementerian Kehakiman: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 28 Pebruari 1952 - 14 Oktober 1955 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Kehakiman. | stensilan | 1 sampul |
| 1294 | Berkas mengenai perbedaan antara peraturan Presiden dengan Penetapan Presiden dan Keppres, tanggal Maret - Juni 1952. | konsep, tembusan | 4 lembar |
| 1295 | Kabinet Presdian RI kepada Sidik Djojokusarto: surat tanggal 1 Maret 1952 tentang pengangkatannya sebagai pembentuk kabinet dan penyampaian petikan Keppres No. 60 tahun 1952. | pertinggal | 1 lembar |
| 1296 | Tengku Mohammad Daoed Bereueh kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 1 Maret 1952 - 16 Juni 1955 tentang kedudukan Tengku Mohammad Daoed Bereueh dalam Pemerintah RI, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1297 | Partai Indo-Nasional kepada Formatur Kabinet: surat tanggal 2 Maret 1952 tentang program pemerintah. | tembusan | 1 lembar |
| 1298 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 2 Maret 1952 tentang tuntutan pembubaran kabinet imperalisme feodalisme. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1299 | Subono Kridosupono: surat tanggal 19 Maret 1952 tentang permintaan agar Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai PM. NB: tulis tangan | asli | 1 lembar |
| 1300 | Direktur Kabinet Presiden kepada Formateur Kabinet: surat tanggal 22 Maret 1952 tentang penyampaian suatu kompilasi dari mosi-mosi mengenai pembentukan kabinet, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 1301 | DPRDS Wonogiri, Pekalongan, Yogyakarta, Batang Hari: surat-surat tanggal 22 Maret 1952-24 Januari 1957 tentang tanggapan terhadap pemutasian pejabat daerah oleh pusat, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1302 | Menteri Dalam Negeri: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 28 Maret 1952-11 Oktober 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. | salinan | 1 sampul |
| 1303 | DPRDS Kab. Demak: mosi tanggal 29 Maret 1952 tentang pendirian gedung-gedung jawatan untuk menjamin keselamatan pegawai, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1304 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 9 Maret 1952-27 Desember 1952 tentang usul pembentukan kabinet yang baru. | asli | 1 sampul |
| 1305 | Organisasi massa kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 2 April 1952-19 Mei 1953 tentang dukungan kepada Kabinet Wilopo. | asli | 4 lembar |
| 1306 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 April 1952-9 Desember 1955 tentang Pancasila. | asli | 1 sampul |
| 1307 | Ketua Persatuan Tenaga Indonesia Radikal (PETIR): surat tanggal 11 April 1952 tentang Kabinet Angkatan Baru, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1308 | Kementerian Agama: surat tanggal 23 April 1952 tentang permohonan Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia untuk mempertahankan Kementerian Agama, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1309 | Kantor Penerangan Agama Prop. Sulawesi kepada Gub. Sulawesi: surat tanggal 24 April 1952 tentang pengiriman bahan untuk konperensi para gubernur mengenai tugas instansi, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1310 | Kabinet Presiden RI kepada semua instansi: surat tanggal 24 April 1952 tentang permohonan pengiriman susunan dan tugas/struktur organisasi dari kementerian-kementerian. | pertinggal | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------------------|----------|
| 1311 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat-surat tanggal 28 Mei 1952-1 Juni 1953 tentang penyampaian putusan-putusan rapat Kabinet Wilopo, dengan lampiran. | asli | 4 sampul |
| 1312 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 31 Mei 1952 tentang putusan-putusan rapat ke-10 tahun 1952, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1313 | Perdana Menteri RI: SE No.2/RI/1952 tanggal 31 Mei 1952 tentang kerja sama antara KDH dengan kepala-kepala jawatan dan organisasi-organisasi lainnya. | tembusan | 1 lembar |
| 1314 | Kepala Jawatan Transmigrasi: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 10 Juni 1952-1 Oktober 1953 tentang pembubaran dan pembentukan kantor cabang transmigrasi di daerah-daerah. | salinan | 5 lembar |
| 1315 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 19 Juni 1952-18 Agustus 1954 tentang kedudukan para sekretaris jenderal kementerian-kementerian dalam PGPN. | tembusan | 1 sampul |
| 1316 | Kepala Bagian Keamanan a/n Perdana Menteri: surat tanggal 5 Agustus 1952 tentang ralat Keputusan PM No. 16, tanggal 29 Januari 1952 ayat 3, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1317 | Kementerian Sosial kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 12 Agustus 1952 tentang susunan kementerian. | tembusan | 1 lembar |
| 1318 | Kabinet Presiden RI kepada Perdana Menteri: surat tanggal 23 Agustus 1952 tentang pemuatan peraturan-peraturan pemerintah dalam majalah resmi RI yaitu berita negara atau tambahan lembaran negara RI. | konsep, pertinggal | 4 lembar |
| 1319 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 Agustus 1952-25 September 1953 tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya. | asli | 1 sampul |
| 1320 | Kepala Jawatan Regi Garam kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat Kementerian PU&T: surat tanggal 1 September 1952 tentang pendirian gedung untuk Kantor Pusat Jawatan Regi Garam, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1321 | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: surat tanggal 15 September 1952 tentang permohonan J.E. Turangan untuk melakukan tugas prive sekretariat, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1322 | Dewan Pengawas Keuangan kepada PMRI: surat tanggal 16 September 1952 tentang kedudukan ketua, wakil ketua dan anggota DPK, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 1323 | Serikat Buruh Perindustrian dan Kerajinan Jawa Barat kepada Inspektur Jawatan Perindustrian Jabar di Bandung: surat pernyataan tanggal 18 September 1952 tentang susunan Jawatan Perindustrian sebagai jawatan baru harus dilengkapi baik tenaga maupun biayanya, disertai surat. | tembusan | 2 lembar |
| 1324 | Dewan Perwakilan Rakyat RI: surat tanggal 23 September 1952 tentang pencalonan ketua Mahkamah Agung, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1325 | Perorangan: surat-surat tanggal 17 Oktober 1952-1 Desember 1957 tentang dukungan terhadap Presiden Soekarno. | asli | 4 lembar |
| 1326 | Komisaris Partai Murba Propinsi Jateng: surat pernyataan tanggal 19 Oktober 1952 tentang tuntutan pembentukan kabinet zonder KMB. | stensilan | 1 lembar |
| 1327 | Mr. A.K. Pringgodigdo kepada Mr. Wilopo, Perdana Menteri RI: surat tanggal; 7 November 1952 tentang pasal 3 Lid 3 rancangan DPR mengenai hak enquete yang berbunyi Presiden, Wapres dan para menteri tidak dikecualikan dari kewajiban pada ayat 1 dan 2 pasal ini. | pertinggal | 2 lembar |
| 1328 | Komite Daerah Tapanuli kepada Kabinet Presiden RI: surat pernyataan tanggal 27 Nopember 1952 tentang keadaan kabinet hendaknya memikul tanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang ditugaskan oleh UUD, disertai pengantar. | asli | 1 lembar |
| 1329 | Kementerian Pu&T: Surat Keputusan tanggal 7 Nopember 1952-28 September 1957 tentang pembangunan gedung-gedung dan rumah pemerintah. | salinan | 1 sampul |
| 1330 | P. Babys, anggota DPRD Timor kepada Gubernur Sunda kecil: surat tanggal 1 Desember 1952 tentang protes terhadap adanya susunan Pemerintahan sistem famili di Timor. | tembusan | 1 lembar |
| 1331 | Perdana Menteri Republik Indonesia: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 Desember 1952-13 September 1956 tentang panitia-panitia interdepartemental, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1332 | Presiden RI kepada ketua DPR RI: surat tanggal 24 Desember 1952 tentang rancangan UU mengenai penetapan UU darurat sebagai UU, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 1333 | Perorangan: surat tanggal 20 Januari 1953 tentang protes terhadap sistem Pemerintahan Soekarno. | asli | 1 lembar |
| 1334 | Menteri Luar Negeri : surat tanggal 22 Januari 1953 tentang mutasi dan pengangkatan kepala-kepala perwakilan RI di luar negeri, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 1335 | Sekretaris Dewan Menteri: surat-surat tanggal 11 Pebruari-7 Mei 1953 tentang penyampaian informasi mengenai masalah-masalah yang baru/akan dibicarakan dalam sidang kabinet, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1336 | Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri: Surat Edaran tanggal 4 Maret 1953 tentang cara penyelenggaraan peraturan restitusi dan tafsiran serta sikap terhadap 'rechthebbende', dengan lampiran. | stensilan | 5 lembar |
| 1337 | Sekretaris Dewan Menteri: Pengumuman No. 89 tanggal 20 Maret 1953 tentang pekerjaan perundang-undangan. | stensilan | 1 lembar |
| 1338 | Presiden kepada Ketua DPR: surat tanggal 10 April 1953 tentang pengangkatan para hakim perwira pada Mahkamah tentara Agung | pertinggal | 1 lembar |
| 1339 | Sekretaris Dewan Menteri: surat-surat tanggal 25 April-20 Juli 1953 tentang pengiriman bahan yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet, dengan lampiran. NB : Bahasa Indonesia dan Perancis | asli | 1 sampul |
| 1340 | Perdana Menteri RI: surat tanggal 13 Mei 1953 tentang perubahan susunan DM dan peletakan jabatan Mensos Anwar Tjokroaminoto. | asli | 1 lembar |
| 1341 | Perdana Menteri Republik Indonesia: Keputusan No. 80 tanggal 15 Mei 1953 tentang perubahan pasal kedua Keputusan PMRI No. 75, tanggal 2 Mei 1953 tentang penunjukan panitia I dan II, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1342 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 18 Mei 1953 tentang pendapat dan usul panitia negara mengenai Kementerian Sosial, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1343 | Sekretaris I Presiden kepada Sekjen Kementerian Perekonomian: surat tanggal 21 Mei 1953 tentang perubahan nama organisasi dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kementerian Perekonomian, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1344 | Perdana Menteri RI: rencana keterangan pemerintah sehubungan dengan pembicaraan Parlemen dalam sidang, tanggal 21-22 Mei 1953, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1345 | Presiden kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 3 Juni 1953 tentang penyerahan mandat Kabinet Wilopo. | pertinggal | 2 lembar |
| 1346 | Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia: surat pernyataan tanggal 8 Juni 1953 tentang usul pembentukan susunan pemerintahan yang luas dan terdiri dari wakil-wakil partai politik seluruhnya. | stensilan | 1 lembar |
| 1347 | Direktur Kabinet Presiden kepada Ketua Panitia Negara: surat tanggal 19 Juni 1953 tentang nama baru untuk Kementerian Pertanian, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1348 | Kementerian Perhubungan: surat pemberitahuan tanggal 23 Juni 1953 tentang Perubahan susunan dewan menteri, disertai pengantar. | stensilan | 2 lembar |
| 1349 | Kabinet Presiden RI: teks tanggal 6 Juli 1953 tentang jawaban atas soal pembentuk kabinet, dengan lampiran. | stensilan | 5 lembar |
| 1350 | Panitian Negara Urusan Protokol: keputusan rapat seksi V tanggal 3 Juli 1953 , tanggal 6 Juli 1953 tentang rancangan pemakaian bendera kebangsaan RI, dengan lampiran. | stensilan | 8 lembar |
| 1351 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 Agustus 1953-17 Desember 1954 tentang dukungan dan tuntutan atas terbentuknya Kabinet Ali-Wongso. | asli | 1 sampul |
| 1352 | Sekretaris Dewan Menteri: pengumuman tanggal 1 September 1953 tentang keterangan pemerintah atas program kabinet. | stensilan | 1 lembar |
| 1353 | Perdana Menteri Republik Indonesia: Keputusan No. 195 tanggal 4 September 1953 tentang pencabutan kembali Penetapan PMRI No.6, tanggal 3 Oktober 1950 mengenai pengaturan pembagian pekerjaan antara PM, Wakil PM ke-I dan ke-II. | salinan | 1 lembar |
| 1354 | Organisasi politik dan Massa: surat-surat pernyataan tanggal 24 Oktober 1953-2 Maret 1959 tentang dukungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara RI. | tembusan | 3 sampul |
| 1355 | Ketua Zionist Organisations Dias Santilhano: surat tanggal 28 Oktober 1953 tentang pemberitahuan pemilihan pengurus baru dari Jewish Community (Vereniging voor Jaardse Belangen). | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1356 | Wasirun CS: surat tanggal 28 Oktober 1953 tentang permohonan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bidang ekonomi. | asli | 1 lembar |
| 1357 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada para menteri: surat tanggal 29 Oktober 1953 tentang rencana PP mengenai Kementerian Pertahanan, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1358 | Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung kepada Presiden RI: surat tanggal 3 Nopember 1953 tentang kedudukan Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama), dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1359 | Kementerian Urusan Kesejahteraan Negara: surat pemberitahuan, tanggal 5 Desember 1953 tentang pembentukan Sekretariat Menteri Urusan Kesejahteraan Negara. | stensilan | 1 lembar |
| 1360 | Ketua Penitya I kepada Ketua Rapat Inter Kementerian : surat tanggal 16 Desember 1953 tentang rapat inter kementerian, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1361 | Kabinet Perdana Menteri RI: Notulen tanggal 22 Desember 1953-12 Desember 1954 tentang keputusan-keputusan rapat Kabinet Ali Sastroamidjojo, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 1362 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Direktur Biro Perancang Negara: surat tanggal 28 Desembet 1953 tentang bahan-bahan rencana pembangunan untuk Biro Perancang Negara, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1363 | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tahun 1954 tentang proses negara berdasarkan Islam. | asli | 2 lembar |
| 1364 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia: Surat Edaran tanggal 7 Januari 1954 tentang pemakaian Bendera/lambang Sang Merah Putih, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 1365 | Kepala Kepolisian negara kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 12 Januari 1954 tentang kebijaksanaan politik Kementerian Kehakiman dan status kepolisian, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1366 | Kabinet Presiden RI: nota tanggal 12 Pebruari 1954 tentang rancangan peraturan penggunaan lambang negara, disertai surat pengantar. | konsep | 1 sampul |
| 1367 | Direktur Kabinet Presiden Ri kepada Kementerian Pertahanan: surat tanggal 15 Mei 1954 tentang Surat permohonan RM Romlie mengenai ketentuan status Jawatan Penerangan Kementerian Pertahanan di Banten, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1368 | Menteri Keuangan: surat tanggal 19 Juli 1954 tentang pembaharuan pembagian pekerjaan dalam bagian inspeksi anggaran thessaurie negara. | stensilan | 2 lembar |
| 1369 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Keuangan: surat tanggal 3 Agustus 1954 tentang pembentukan panitia negara yang ditugaskan khusus untuk mempercepat penyusunan baharu dari <i>Indonesische comptabiliteitswet</i> , dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1370 | Assumption Commerical Collega kepada Presiden Soekarno: surat tanggal 13 Agustus 1954 tentang pergerakan politik di Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 1371 | DPRDS Kabupaten Bekasi: mosi persetujuan tanggal 14 September 1954 tentang dukungan terhadap resolusi DPRDS Kabupaten Blitar mengenai desakan agar Kementerian PP & K dimasukkan ke dalam golongan Kementerian-kementerian yang terpenting. | asli | 1 lembar |
| 1372 | J.A. Lamuda kepada Mohamad Natsir, anggota DPRDS: surat tanggal 20 September 1954 tentang persoalan-persoalan yang perlu diajukan dalam pemandangan umum. | tembusan | 1 lembar |
| 1373 | DPRDS Kota besar Pekalongan: pernyataan adhesi tanggal 7 Oktober 1954 tentang desakan kepada pemerintah pusat agar segera menghapuskan Kantor Pusat Pembelian (KPP). | asli | 1 lembar |
| 1374 | Ketua DPR RI kepada Perdana Menteri: surat tanggal 11 Oktober 1954 tentang usul angket Marjono Djojohadikusumo, dkk. Atas pekerjaan Kementerian Perekonomian dalam lapangan perdagangan, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1375 | Organisasi Massa: Surat-surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1954, 27 Juni 1954 tentang pencalonan anggota-anggota Dewan Nasional. | asli | 3 lembar |
| 1376 | Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 23 Nopember 1954 tentang pernolakan permohonan pensiun Sjarif Hamid algadri, bekas menteri RIS dan anggota KNIL. | tembusan | 1 lembar |
| 1377 | Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 23 Nopember 1954 tentang perubahan susunan Dewan Menteri, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1378 | Gubernur Jawa Tengah: Surat Edaran tanggal 1 Desember 1954 tentang usaha penyusunan arsip baru dari kantor gubernur Jawa Tengah. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1379 | DPRDS Maluku Tenggara: mosi tanggal 15 Desember 1954 tentang desakan asli kepada pemerintah untuk menempatkan pemimpin Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Maluku Tenggara di Tual, dengan pengantar. | | 2 lembar |
| 1380 | DPRDS Krawang: resolusi tanggal 22 Desember 1954 tentang desakan kepada pemerintah untuk menyediakan pembangunan kantor-kantor Jawatan di kota Kabupaten Krawang dalam tahun 1955. | asli | 1 lembar |
| 1381 | Direktur Biro Perancang Negara: Surat Keputusan No. 1/BPN/1955 tanggal 1 Januari 1955 tentang pembatalan susunan, formasi dan bezetting lama dan menetapkan susunan dan tugas-tugas bagian-bagian Biro Perancang Negara, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |
| 1382 | Kabinet Presiden RI: surat terbuka Kabinet Perdana Menteri tanggal 6 Januari 1955 tentang ralat atas putusan-putusan rapat ke-85 Kabinet Ali Sastroamidjojo tanggal 30 Nopember 1954. | stensilan | 2 lembar |
| 1383 | Organisasi Massa kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 7 Januari 1955-24 Desember 1956 tentang Kabinet Ali-Arifin. | asli | 1 sampul |
| 1384 | Kementerian Dalam Negeri kepada semua kepala daerah propinsi: surat tanggal 19 Januari 1955 tentang Biro Inspeksi Umum Pemerintah, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1385 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 10/PM/IV/1955, tanggal 5 Perbuari 1955 tentang pengesahan reorganisasi Biro Perancang Negara. | salinan | 1 lembar |
| 1386 | Menteri sosial kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 19 Pebruari 1955 tentang singkatan titel jabatan untuk tahun 1955, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1387 | Organisasi dan Politik kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 21 Pebruari-7 Agustus 1955 tentang dukungan mempertahankan demokrasi parlementer. | asli | 2 sampul |
| 1388 | Kementerian Agama kepada Salomo Radjagukguk: surat tanggal 4 Maret 1955 tentang permohonan/izin pendirian Sipele Sumangat di daerah Suku Batak, disertai pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 1389 | Soemahadi kepada Ketua Parlemen: surat tanggal 10 Maret 1955 tentang kebebasan Presiden selaku warga negara demokrasi dalam pengembangan ideologinya. | tindasan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1390 | Panitian 1 Mei 1955 Kecamatan Krembung: resolusi tanggal 1 Mei 1955 tentang sikap terhadap program-program pemerintah yang menguntungkan rakyat. | asli | 1 lembar |
| 1391 | Perdana Menteri RI kepada Ketua DPR RI: surat tanggal 19 Juli 1955 tentang penunjukan Menteri Pertahanan ad-interim. | tembusan | 1 lembar |
| 1392 | Kementerian Urusan Kesejahteraan Negara: surat pemberitahuan tanggal 24 Agustus 1955 tentang penghapusan Kementerian Urusan Kesejahteraan Negara mulai tanggal 23 Agustus 1955 berada dalam pimpinan Wakil Perdana Menteri Pertama. | stensilan | 1 lembar |
| 1393 | Sekretaris Daerah Istimewa Bulongan Tanjung Selaor kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 14 September 1955 tentang proses Verbal sumpah jabatan instansi, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 1394 | Menteri Sosial kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 19 September 1955 tentang penunjukkan pejabat yang mewakili Sekretaris Jenderal selama di luar negeri. | asli | 1 lembar |
| 1395 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 28 September 1955-18 Februari 1956 tentang tuntutan pembubaran Kabinet Burhanuddin Harahap. | asli | 1 sampul |
| 1396 | Sekretaris Dewan Menteri: risalah sementara rapat tanggal 7 Oktober 1955 tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap. | stensilan | 1 lembar |
| 1397 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan No. 16.387/M tanggal 26 November 1955 tentang pencabutan kembali instruksi susunan Kantor Pusat Statistik dan pimpinan serta pembagian tugas yang berhubungan dengan susunan itu, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1398 | Perorangan kepada Presiden: surat tanggal 17 Desember 1955 tentang usul pembentukan Kabinet Presidentil. | asli | 2 lembar |
| 1399 | Risalah-risalah sementara Konstituante RI dalam berbagai sidang rapat Konstituante, tanggal 1956-1957. | asli | 1 sampul |
| 1400 | Kabinet Presiden RI: surat-surat, tanggal 1956, 20 Mei 1957 tentang pengangkatan dan mutasi gubernur. | tembusan | 4 lembar |
| 1401 | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 6 Januari 1956-17 Juni 1958 tentang usul pembentukan Kementerian dan Jawatan beserta tugas-tugasnya. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1402 | Menteri Agraria: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 27 Pebruari 1956-9 Desember 1957 tentang masalah keorganisasian di lingkungan Kementerian Agraria. | salinan | 1 sampul |
| 1403 | Kabinet PM: surat tanggal 5 Maret 1956 tentang pemberitahuan penyelesaian pekerjaan di masa Kabinet Domisioner. | stensilan | 1 lembar |
| 1404 | Thesaurie Jenderal, Kementerian Keuangan kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 6 Maret 1956 tentang kelanjutan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kalibata. | tembusan | 1 lembar |
| 1405 | PERBEPBSI cang Madiun, GERWANI Ciamis: surat pernyataan-surat pernyataan tanggal 6 Maret 1956 tentang permohonan untuk segera membentuk pemerintahan yang baru sesuai dengan hasil pemilu yang lalu. | asli | 2 lembar |
| 1406 | Mr. Ade Anak Agung Gde Agung kepada Menlu: surat tanggal 27 Maret 1956 tentang memorie van overgave menteri luar negeri demisioner, Ruslan Abdulgani. | asli | 1 jilid |
| 1407 | Organisasi-organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 1 April 1956-2 Desember 1957 tentang dukungan terhadap Kabinet Ali-Rum-Idham. | tembusan | 1 sampul |
| 1408 | Panitia 1 Mei Cisaga, Banjar kepada presiden: telegram tanggal 7 Mei 1956 tentang anjuran lekas dilaksanakannya program pemerintah sepeninggalan Jungschlagen. | asli | 1 lembar |
| 1409 | Organisasi massa dan partai politik: telegram tanggal 9-30 Mei 1956 tentang usul perubahan susunan personal kabinet yang disusun oleh formatur Ali Sastroamidjojo. | asli | 1 sampul |
| 1410 | Ormas-ormas kepada ketua DPR: surat pernyataan tanggal 31 Juli 1956, 9 Desember 1957 tentang protes terhadap pengunduran diri wakil presiden Mohammad Hatta. | tembusan | 2 lembar |
| 1411 | Panitia Perayaan HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Karo: resolusi tanggal 17 Agustus 1956 tentang sikap terhadap situasi/perkembangan politik di tanah air (pemerintahan pada umumnya). | asli | 2 lembar |
| 1412 | Menteri Penerangan: Surat Keputusan No. 29/SK/SD/56 tanggal 24 Agustus 1956 tentang peraturan pelaksanaan peraturan-peraturan menteri penerangan mengenai kabinet. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1413 | Sekretaris Dewan Menteri: surat tanggal 24 Agustus 1956 tentang pembubaran Komite Nasional Pusat, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1414 | Perdana Menteri RI: Keputusan No. 379 tanggal 24 September 1956 tentang pencabutan kembali SK <i>Hoge Vertegenwoordiger van de Kron</i> No. 4 tanggal 18 Oktober 1949 dalam pasal 2 keputusan SK <i>Luitenant Gouverneur Generaal</i> No. 3 tanggal 21 Mei 1948 angka 5% diubah menjadi 3%. | salinan | 1 lembar |
| 1415 | Serikat Buruh Pendaftaran Tanah Milik Cab. Pamekasan kepada DPR RI : surat tanggal 29 Oktober 1956 tentang status/tugas Jawatan Pendaftaran Tanah Milik dan nasib pegawai, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1416 | Organisasi massa kepada Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 5-28 November 1956 tentang dukungan untuk RUU Pimpinan Kepolisian Kehakiman dan Kedudukan Jaksa Agung. | asli | 1 sampul |
| 1417 | Kabinet Perdana Menteri RI: surat terbuka tanggal 12 Nopember 1956 tentang perjalanan dinas para menteri. | stensilan | 1 lembar |
| 1418 | DPP Ikatan Kaum Gerilya Daerah Sumatera Utara: resolusi tanggal 24 Nopember 1956 tentang desakan peninjauan kembali surat tanda demobilisasi ajudan jenderal pusat dan TT tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang. | asli | 1 lembar |
| 1419 | Kementerian Penerangan kepada para sekretaris jenderal kementerian-kementerian: surat tanggal 8 Desember 1956 tentang permohonan pengiriman bahan untuk brosur sekitar aktivitas Pemerintah selama 8 bulan. | tembusan | 1 lembar |
| 1420 | Perorangan: surat-surat tanggal 22 Desember 1956-18 Desember 1957 tentang saran-saran dan usul untuk memperbaiki situasi pemerintahan. | asli | 1 sampul |
| 1421 | Soebari Semarang: surat tanggal 24 Desember 1956 tentang usul agar di seluruh Indonesia didirikan organisasi-organisasi rukun tetangga, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 1422 | Front Pendukung Gubernur Sulawesi: pernyataan bersama tanggal 6 Januari 1957 tentang sikap protes terhadap penggantian Gubernur Sulawesi yang dimuat dalam beberapa surat kabar. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 1423 | Organisasi partai dan massa kepada Presiden RI: telegram tanggal 7-19 Januari 1957 tentang dukungan terhadap pelaksanaan program kabinet. | asli | 1 sampul |
| 1424 | BTI Ranting Purwodjojo Banyuwangi: surat tanggal 8 Januari 1957 tentang pernyataan permohonan pencabutan UU No. 1/1956. | asli | 1 lembar |
| 1425 | Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 9 Januari 1957 tentang pengunduran diri menteri-menteri dari Masjumi dan penunjukan menteri-menteri ad interim. | asli | 1 lembar |
| 1426 | Organisasi massa dan politik, perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 17 Januari 1957-21 September 1959 tentang dukungan dan tuntutan pembubaran Kabinet Karya. | asli | 1 sampul |
| 1427 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 20 Januari 1957-17 Agustus 1959 tentang dukungan terhadap Konsepsi Presiden Soekarno. | tembusan | 1 sampul |
| 1428 | Gerakan Wanita Indonesia: surat tanggal 26 Januari 1957 tentang pernyataan keberatan jika Moh. Hatta memegang kekuasaan lagi. | asli | 1 lembar |
| 1429 | Organisasi massa kepada Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 1 Pebruari-13 Maret 1959 tentang penolakan terhadap ide demokrasi terpimpin. | asli | 1 sampul |
| 1430 | Organisasi massa, politik, perorangan: resolusi-resolusi tanggal 8 Pebruari 1957-15 Maret 1958 tentang dukungan terhadap Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. | tembusan | 1 sampul |
| 1431 | Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo kepada PMRI: surat tanggal 8 Pebruari 1957 tentang permohonan suatu instruksi dari Pemerintah Pusat mengenai pengirima utusan-utusan dari Pusat Jawatan/Kementerian ke daerah, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1432 | Internasional Sosial Demokrat kepada Presiden: surat tanggal 14 Pebruari 1957 tentang usul penyusunan kembali kabinet Ali-Idham, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1433 | Organisasi buruh, perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 18 Pebruari-12 Nopember 1957 tentang sikap terhadap pembentukan/keanggotaan Dewan Nasional, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1434 | Dewan Ekonomi Indonesai Majelis Perniagaan dan Perumahan Indonesia Konsulat Makassar: surat tanggal 25 Pebruari 1957 tentang permohonan diadakannya Kementerian Pelayaran, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1435 | Organisasi buruh dan massa: surat-surat pernyataan tanggal 13 Maret-2 Juli 1957 tentang sikap terhadap keputusan Menteri Pertanian, Eni Karim yaitu mengenai penghapusan Jawatan Pembangunan Usaha Tani. | tembusan | 1 sampul |
| 1436 | Dewan Maritim Indonesia: surat tanggal 4 April 1957 tentang sikap terhadap rencana Presiden untuk membentuk kabinet darurat, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1437 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 13 April-28 Juni 1957 tentang penghapusan SPUT (Djawatan Pembangunan Usaha Tani). | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1438 | Konperensi kaum lemah di Priangan Timur: resolusi tanggal 17 April 1957 tentang pergantian pimpinan negara. | asli | 1 lembar |
| 1439 | Partai Rakyat Indonesia (PRI): surat-surat tanggal 26 April, 28 Agustus 1957 tentang penjelasan Kabinet Dewan Nasional dan pengurusnya. NB: tulisan tangan. | asli | 5 lembar |
| 1440 | DPRDP Bali: resolusi tanggal 7 Mei 1957 tentang permohonan untuk segera mengundangkan UU Veteran. | asli | 1 lembar |
| 1441 | Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, Berita acara tanggal 9 Mei 1957 tentang timbang terima penyerahan pimpinan. | asli | 2 lembar |
| 1442 | Konstituante: notulen rapat terbuka tanggal 24 Mei 1957 tentang program Pemerintah dan pembentukan Dewan Nasional. NB: tidak lengkap. | stensilan | 1 sampul |
| 1443 | S.I. Goenawan kepada Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan: surat tanggal 25 Mei 1957 tentang pengiriman skema dan susunan organisasi dan tata kerja jawatannya, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1444 | Gabungan pemborong/perusahaan Nasional 'Waringin': surat pernyataan tanggal 13 Juli 1957 tentang dukungan kepada Biro Arsitek Pemborong dan Industri Kayu Awet N.V/Panti Tekhnik N.N yang ingin membangun gedung kantor Gubernur Maluku. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1445 | Perdana Menteri RI: Keputusan No. 198 tanggal 15 Juli 1957 tentang pembentukan Biro Pembangunan Masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil kementerian. | salinan | 1 lembar |
| 1446 | Menteri UHAD: Peraturan NO. 1/sk?UHAD/57 tanggal 24 Juli 1957 tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan pembagian tugas kewajiban Kementerian UHAD. | salinan | 1 lembar |
| 1447 | Kabinet Presiden RI: surat-surat kawat tanggal 5 Agustus 1957-19 April 1958 tentang pemberitahuan mengenai Dewan Nasional. | asli | 1 sampul |
| 1448 | Perorangan: surat-surat tanggal 20 Agustus-14 Desember 1957 tentang tuntutan pemindahan ibu kota Negara RI. | asli | 1 sampul |
| 1449 | Ormas, perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 26 Agustus 1957-17 Juni 1958 tentang dukungan terhadap gerakan hidup baru. | asli | 1 sampul |
| 1450 | Staf Angkatan Darat kepada Penguasa Militer: surat tanggal 27 Agustus 1957 tentang pejabat yang mempunyai wewenang melakukan pengusutan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1451 | Walikota Jakarta kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 29 Agustus 1957 tentang surat seorang warga negara bernama J. Kooshamp tanggal 20 Agustus 1957 mengenai bendera pusaka, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1452 | DPRD, Buruh: surat tanggal 10 September 1957-23 Januari 1958 tentang sambutan atas hasil Munas. | asli | 3 lembar |
| 1453 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Agraria: surat tanggal 20 September 1957 tentang Keppres NO. 190 tahun 1957 mengenai pemindahan Jawatan Pendaftaran Tanah dari lingkungan Kementerian Kehakiman dalam lingkungan kementerian Agraria. | pertinggal | 1 lembar |
| 1454 | Menteri Luar Negeri: Surat Edaran tanggal 20 September 1957 tentang pekerjaan Biro Protokol kementerian Luar Negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 1455 | Trisnapertiwi: surat tanggal 28 Oktober 1957 tentang pengiriman, konsepsi '17 Prasetia-Sila Patriot Proklamasi', dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1456 | DPRDP Kotapraja Malang: resolusi tanggal 9 Nopember 1957 tentang dukungan supaya kota Malang dipilih menjadi ibukota Negara RI. | asli | 1 lembar |
| 1457 | N.A. Hukummy kepada Menteri Agama: surat tanggal 20 November 1957 tentang permohonan jawaban atas beberapa pertanyaan mengenai ketatanegaraan. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1458 | Perorangan: surat-surat tanggal 17 Juni 1954, 26 Nopember 1957 tentang pernyataan tidak setuju RI berdasarkan Islam. NB: sebgaiain dalam Bahasa Arab Melayu. | asli | 3 lembar |
| 1459 | PERBAPRI Lb. Basung kepada Gubernur Sumatera Barat: surat tanggal 1 Juni 1958 tentang pernyataan Nursjuhud termasuk dalam dewan penasehat. | tembusan | 1 lembar |
| 1460 | Panitia Negara Urusan Protokol: Keputusan Rapat seksi IX tanggal 19 Juni 1958 tentang perundang-undangan mengenai tanda-tanda kehormatan, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1461 | Putusan-putusan rapat kabinet Juanda, tanggal Agustus- September 1958. | asli | 2 lembar |
| 1462 | Sekretaris Dewan Menteri: surat tanggal 24 September 1958 tentang jawaban Pemerintah atas pemandangan umum, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1463 | Panitia Negara Urusan Protokol kepada Sekretaris Panitia Negara Urusan Protokol: surat tanggal 8 Januari 1959 tentang ruang tanya jawab No. 34 tahun ke-VIII mengenai lambang negara, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1464 | Dewan Menteri: Putusan tanggal 19 Pebruari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. | stensilan | 1 lembar |
| 1465 | Organisasi massa, perorangan kepada Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 1 Maret-31 Agustus 1959 tentang dukungan terhadap kembalinya ke UUD 1945. | asli | 1 sampul |
| 1466 | Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh PP & K Banjarnegara kepada Menteri PP&K : surat pernyataan tanggal 1 Maret 1959 tentang nama Kementerian PP&K menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. | tembusan | 1 lembar |
| 1467 | Sekretaris Jenderal Konstituante kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 29 Mei 1959 tentang usul kembali ke UUD 1945, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1468 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 12 Agustus-13 Nopember 1959 tentang dukungan terhadap program kabinet di bidang moneter. | tembusan | 1 sampul |
| 1469 | Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra Tk.I Kalimantan Barat: daftar-daftar tanggal 14 Agustus 1959 tentang bahan-bahan bangunan untuk asrama dan Pusat Penyuluhan Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Barat, disertai denah. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1470 | Organisasi serikat buruh kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 22, 25 Agustus 1959 tentang manifesto politik Presiden yang diamanatkan pada tanggal 17 Agustus 1959 , disertai surat pengantar. | asli | 2 lembar |
| P. | PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA | | |
| 1471 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 25 Oktober 1950-7 Nopember 1957 tentang permohonan lamaran kerja. | tembusan, asli | 3 sampul |
| 1472 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 12 November 1950-18 Januari 1955 tentang tuntutan UU/peraturan-peraturan yang menguntungkan kaum buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1473 | Direksi Lever's Zeepfabrieken Indonesia N.V kepada Presiden: surat tanggal 9 Januari 1951 tentang prestasi dari pada buruh Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan unilever di Indonesia, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1474 | Perorangan: surat-surat tanggal 15 Februari 1951-24 Agustus 1959 tentang permohonan mendapat pekerjaan dan bersedia mengabdikan pada negara, Bangsa dan Pemerintah, dengan lampiran. NB: B. Inggris, Arab, Italia, Spanyol. | asli | 1 sampul |
| 1475 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 28 Februari 1951-17 Maret 1959 tentang tuntutan dicabutnya UU Darurat No. 16/1951 yaitu mengenai larangan mogok bagi kaum buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1476 | Organisasi massa dan politik: pernyataan-pernyataan tanggal 3 Maret 1951-17 Februari 1959 tentang hak mogok dan hak demokrasi. | tembusan | 1 sampul |
| 1477 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 8 Maret 1951-13 Agustus 1957 tentang ketenagakerjaan. | tembusan | 1 sampul |
| 1478 | Menteri Pertanian kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 19 April 1951 tentang permohonan syarat-syarat serikat buruh. | tembusan | 1 lembar |
| 1479 | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 6 Mei 1951-16 Desember 1957 tentang penempatan tenaga ahli secara tepat dan pembatasan tenaga ahli bangsa asing. | asli | 1 sampul |
| 1480 | Kementerian Pertahanan: nota dinas tanggal 23 Juni 1951-6 Pebruari 1952 tentang buruh dan tenaga asing, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1481 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 27 Agustus 1951-4 Mei 1956 tentang keterangan pekerja-pekerja. | asli | 1 sampul |
| 1482 | Menteri Perburuhan: Surat Edaran tanggal 25 Oktober 1951 tentang kepengurusan/komisaris dari organisasi-organisasi buruh, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1483 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 5 Nopember 1951, 8 Oktober 1954 tentang jumlah dan nasib pemogokan. | asli, tembusan | 2 lembar |
| 1484 | Kementerian Perburuhan: surat tanggal 2 Januari 1952 tentang laporan panitia peraturan perundangan perburuhan, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1485 | Organisasi massa kepada Presiden RI: resolusi tanggal 5 Pebruari 1952-17 Mei 1958 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1486 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 18 Maret - 14 Desember 1952 tentang pernyataan tidak setuju dengan surat pengumuman Mendagri, tanggal 20 Pebruari 1952 No. 50/52 yang mencabut SK Gubernur Jabar mengenai penetapan upah. | tembusan | 1 sampul |
| 1487 | Menteri Perburuhan : Peraturan tanggal 20 Maret 1952 tentang pemberian kerja darurat kepada kaum penganggur, dengan lampiran. | salinan | 5 lembar |
| 1488 | Organisasi Buruh Perniagaan Seluruh Indonesia: resolusi tanggal 5 April 1952 tentang desakan kepada pemerintah untuk mengadakan peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai staf bangsa Indonesia di Perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia, disertai pengantar. | asli | 1 lembar |
| 1489 | Pengurus Besar Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (PB SARBUKSI) : surat-surat pernyataan tanggal 3 April 1952 - 1 Mei 1958 tentang tuntutan penetapan hari libur tanggal 1 Mei bagi kaum buruh. | asli | 1 sampul |
| 1490 | Menteri Penerangan: Surat Keputusan No. 769/SK/UP/52 tanggal 18 April 1952 tentang beberapa wartawan Birma akan kembali ke negaranya sehubungan dengan tugasnya di Indonesia telah selesai. | stensilan | 1 lembar |
| 1491 | SB Kementerian Pertahanan Cabang Surabaya kepada Presiden RI: statement tanggal 25 Mei 1952 tentang menyerukan dan mengajak SBAL dan SBAP untuk mengadakan diskusi dalam usaha menggalang persatuan segenap organisasi buruh Kementerian Pertahanan di bawah panji SBKP. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1492 | SOBSI cabang Jogjakarta: resolusi tanggal 13 Agustus 1952 tentang desakan tembusan kepada pemerintah supaya memberi sokongan dan bantuan kepada konperensi nasional SOBSI. | | 1 lembar |
| 1493 | Organisasi-organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 17 September 1952 - 16 Maret 1959 tentang tuntutan kenaikan dan pembayaran upah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1494 | Serikat Buruh Gula Madiun kepada Pemerintah RI: surat pernyataan tanggal 30 Oktober 1952 tentang memperkuat sepenuhnya pernyataan DPP SBG No. 1901/u. | asli | 1 lembar |
| 1495 | Konperensi Pleno PB SB Jawatan PU: statement tanggal 30 November 1952 tentang penolakan tiap-tiap tindakan penghematan oleh pemerintah yang mengakibatkan pengangguran. | asli | 1 lembar |
| 1496 | Serikat Buruh Gula (SBG) kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Jakarta: surat tanggal 8 Desember 1952 tentang rencana masa omslag, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1497 | Kabinet Perdana Menteri: surat tanggal 7 Mei 1953 tentang rencana peraturan pemerintah mengenai istirahat tahunan bagi buruh, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1498 | Kabinet PM Kepada Presiden RI: surat tanggal 8 Mei 1953 tentang peraturan putusnya hubungan kerja yang dibicarakan oleh Dewan Ekonomi dan Keuangan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1499 | Wakil Rakyat Surabaya kepada Presiden Soekarno: surat tanggal 31 Juli 1953 tentang bantuan tenaga sukarela. | asli | 1 lembar |
| 1500 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 29 Agustus 1953-28 Oktober 1958 tentang tuntutan penghargaan bagi kaum tehnik. | tembusan | 1 sampul |
| 1501 | Ikatan Pegawai Negeri Rendah Lahat: surat tanggal 3 Nopember 1952 tentang protes terhadap penggantian kepala bengkel DKA Lahat oleh tenaga dari Padang. | tembusan | 4 lembar |
| 1502 | Pimpinan Pabrik Kertas Letjes kepada Menteri Perburuhan surat tanggal 4 Desember 1953 tentang perselisihan perburuhan di Pabrik Kertas Letjes. | tembusan | 2 lembar |
| 1503 | Organisasi buruh: resolusi-resolusi tanggal 21 Desember 1953-5 Pebruari 1954 tentang penolakan rencana UU pendaftaran serikat buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1504 | Kabinet Presiden RI: pidato tanggal 2 Januari 1954 pada acara Tahun Baru oleh Menteri Perburuhan di depan pegawai-pegawainya. | asli | 1 lembar |
| 1505 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 5 Juli 1954-7 Maret 1959 tentang protes terhadap pengusaha yang sewenang-wenang terhadap kaum buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1506 | SB Islam Indonesia Daerah Malang: mosi tanggal 19 - 22 November 1954 tentang sokongan terhadap interpelasi S. Narto mengenai buruh minyak di Sumatera Utara. | asli | 1 sampul |
| 1507 | Organisasi buruh: surat-surat pernyataan tanggal 4 Januari 1955-18 Agustus 1959 tentang protes pemecatan kaum buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1508 | Jawatan Penempatan Tenaga: notulen rapat surat tanggal 4 April 1955, 26 Pebruari 1957 tentang penyaluran tenaga pelajar, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 1509 | DPC SOBSI Surabaya : surat tanggal 11 Oktober 1955 tentang penarikan kembali 115 pegawai Jawatan bea dan cukai. | tembusan | 1 lembar |
| 1510 | DPP SBIMM kepada R. Sarpa, Kepala Jawatan Bea dan Cukai III: surat pernyataan tanggal 24 Oktober 1955 tentang protes atas penolaan penerimaan delegasi bersama. | tembusan | 1 lembar |
| 1511 | Djawidi kepada Kementerian Perburuhan: surat tanpa tanggal November 1955 tentang masalah penggangguran. | tembusan | 1 lembar |
| 1512 | SEBDA Ranting Sumber Putjung kepada DPD/S kab. Malang surat pernyataan tanggal 22 April 1956 tentang pengangkatan tenaga baru di Pasar Wadjak yang melanggar peraturan. | tindakan | 1 lembar |
| 1513 | Perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 7 Juli, 1 Oktober 1956, 15 Juli 1957 tentang desakan pelaksanaan konperensi buruh Asia Afrika. | asli | 3 lembar |
| 1514 | Organisasi buruh: pernyataan-pernyataan tanggal 19, 21, 2 Juli 1956 tentang permohonan peninjauan kembali atas putusan Panitia Pusat Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) mengenai upah buruh. | tembusan | 3 lembar |
| 1515 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 12 November 1956-5 Agustus 1957 tentang tuntutan pencabutan dan pelaksanaan terhadap UU perburuhan. | tembusan | 8 lembar |
| 1516 | Kementerian Perburuhan RI: Proyek percobaan tanggal 15 April 1957 tentang penyelidikan pasar kerja dalam wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-------------|
| 1517 | Organisasi buruh: surat-surat pernyataan tanggal 9-20 Mei 1957 tentang tuntutan kelonggaran kerja untuk menyambut tamu negara. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 1518 | KSAD: Surat Keputusan No. Prt/PM/07/1957 tanggal 28 Mei 1957 tentang mempekerjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan pembangunan dan kesejahteraan negara, dengan penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 1519 | S. L. Tobing: surat tanggal 27 September 1957 tentang pernyataan tidak terganggu atas jalannya perusahaan Kweek to Factory. | asli | 1 lembar |
| 1520 | Dewan Nasional SOBSI kepada Ketua Panitia 7 Perdana Menteri RI: telegram tanggal 19 Oktober 1957 tentang tidak setuju adanya dewan-dewan partikelir, dengan lampiran. NB: arsip rusak | asli | 2 lembar |
| 1521 | Daftar Formasi Pusat-pusat Latihan Kerja Kementerian Perburuhan RI, 12 Mei 1958. | stensilan | 1 lembar |
| 1522 | DPR SARBUPRI Tg. Djati Desk. Bindjai kepada Ketua P4P: resolusi tanggal 3 Juni 1958 tentang sikap SARBUPRI di bidang perburuhan, keamanan dan penetapan pimpinan perusahaan perkebunan Tg. Djati. | asli | 1 lembar |
| 1523 | Saksi Barus, eks Ass. RCMA Medan kepada DP PPN Baku cq. NV RCMA: surat tanggal 27 Agustus 1958 tentang tuntutan ganti rugi penahanan surat pemberhentian oleh NV RCMA. | tembusan | 1 lembar |
| 1524 | Kabinet Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 2 September - 12 Oktober 1959 tentang tuntutan peninjauan kembali terhadap PP no.6/1959 mengenai sengketa buruh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| Q. PERINDUSTRIAN | | | |
| 1525 | Koninklijke Rotterdamsche Lyod N.V.: Laporan tahun 1950, 1951 tentang tutup tahun buku. NB: B. Belanda | asli | 2 eksemplar |
| 1526 | N.V. Electricitet Maatschappij: laporan-laporan tanggal 1950-1957 tentang tahun buku perusahaan. | asli | 1 sampul |
| 1527 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 18 Oktober 1950-20 November 1957 tentang pertambangan di Bangka, Jambi, Langkat dan Batur. | tembusan | 1 sampul |
| 1528 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 26 Oktober 1950 - 10 Agustus 1959 tentang nasionalisasi perusahaan asing. | tembusan | 1 sampul |
| 1529 | Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping: surat pemberitahuan tanggal 27 Nopember 1950 tentang lelang paksa. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1530 | Menteri Kehakiman kepada NV Tiswan Trading Company Cs: surat tanggal 4 Desember 1950 tentang putusan hakim Tanjung Pinang atas penangkapan perahu-perahu yang memuat kopra, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1531 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1951-1956 tentang pendirian perusahaan-perusahaan di Indonesia, dengan lampiran | asli | 1 bundel |
| 1532 | LAAPLN: Surat Edaran tanggal 15 Januari-24 Desember 1957 tentang ketentuan ekspor import barang. | stensilan | 1 sampul |
| 1533 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 21 Pebruari 1951-3 Oktober 1956 tentang tuntutan penyelesaian Tambang Minyak Sumatera Utara. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1534 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 22 Pebruari 1951 - 3 Juni 1957 tentang pembelian barang dari luar negeri untuk beberapa kementerian. | tembusan | 1 sampul |
| 1535 | H. Achmad Tajib: surat tanggal 10 Maret 1951 tentang permohonan bantuan Presiden untuk menangani persoalan keuntungan uang saham di N.V. P My Balikpapan yang sudah 19 tahun, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1536 | Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping: surat pemberitahuan tanggal 27 Nopember 1950 tentang lelang paksa. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1537 | Badan Pengurus IPERTI: resolusi tanggal 1 April 1951 tentang permohonan kepada menteri perdagangan dan perindustrian supaya dibentuk panitia ahli percetakan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1538 | Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Surat Keputusan No. 3923/TU tanggal 17 April 1951 tentang penanganan produksi tanaman-tanaman keras, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 1539 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 17 Mei 1951 - 10 Desember 1957 tentang ekspor dan import, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1540 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 18 Mei 1951-1 Juli 1954 tentang masalah persediaan beras. | tembusan | 1 sampul |
| 1541 | Menteri Perekonomian , Sujono Hadinoto kepada PMRI: surat tanggal 31 Mei 1951 tentang <i>Oorlogseconomie</i> . | tembusan | 1 lembar |
| 1542 | Menteri Pertanian kepada Kabinet PM: surat tanggal 16 Juni 1951 tentang putusan-putusan rapat Kabinet Soekiman ke-VI mengenai Perusahaan Perkebunan Negara, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1543 | Teko Sumodiwirjo, ketua rombongan koperasi: laporan-laporan tanggal 20 Juni-15 Oktober 1951 tentang gerakan koperasi di berbagai negara, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 1544 | Kementerian Perekonomian: surat pemberitahuan rahasia tanggal 28 Juni 1951 tentang kenaikan harga barang-barang konsumsi. | tembusan | 1 lembar |
| 1545 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 3 Juli 1951-21 September 1959 tentang pendirian perusahaan-perusahaan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1546 | Kementerian Pertanian: surat tanggal 12 Juli 1951 tentang pemberian lisensi buat perdagangan hewan yang tidak adil, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1547 | Sekretaris I Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 25 Juli 1951 tentang badan internasional BB: lampiran B. Perancis | pertinggal | 2 lembar |
| 1548 | Menteri Perekonomian kepada PMRI: surat tanggal 8 Agustus 1951 tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1549 | Kementerian Perburuhan: laporan tanggal 8 Agustus 1951 tentang perusahaan minyak Sumut, disertai pengantar dan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1550 | Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 1951-30 Juni 1954 tentang perusahaan-perusahaan listrik. | salinan | 1 sampul |
| 1551 | Kabinet Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 11 Agustus 1951-18 September 1959 tentang desakan pengadaan distribusi barang-barang, disertai pengantar. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1552 | Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri: surat tanggal 26 Agustus 1951 tentang penggeledahan dan penyitaan buku-buku dan surat-surat dagang dari perusahaan dan rumah-rumah pengusaha India. | tembusan | 1 lembar |
| 1553 | Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Perekonomian: surat tanggal 3 September 1951 tentang keinginan 'Basic Chemical Corp' untuk mengadakan hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam bidang obat-obatan, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 1554 | Menteri Keuangan RI: Surat Edaran tanggal 3 September 1951 tentang pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan anti komulasi/anti penimbunan barang menurut persetujuan KMB, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1555 | Organisasi massa, perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 9 September 1951-25 Agustus 1957 tentang tuntutan penurunan harga barang kebutuhan pokok. | tembusan | 1 sampul |
| 1556 | DPRDS-DPRDS: resolusi-resolusi tanggal 1 Nopember 1951-3 Mei 1958 tentang masala produksi beras dan padi. | asli | 1 sampul |
| 1557 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 22 November 1951, 14 Maret 1956 tentang pemasukan beras dari Thailand, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1558 | Perorangan: surat-surat tanggal 3 Januari 1951-25 Agustus 1959 tentang pendapat dan saran kepada Pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 1559 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 37/PM/1952 tanggal 22 Pebruari 1952 tentang pembentukan panitia cabang penyelenggaraan penjualan kendaraan-kendaraan dari Dump Angkatan Perang RI. | salinan | 1 lembar |
| 1560 | Kementerian Perekonomian: Laporan Dinas Hubungan Perdagangan Internasional dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Pemakaian Kontingen Import sampai 31 Maret 1952-1955 | stensilan | 1 bundel |
| 1561 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 19 Mei 1952, 15 September 1956 tentang pengaturan perdagangan, pengangkutan dan penimbunan beras, dengan lampiran dan surat pengantar. | stensilan | 8 lembar |
| 1562 | Hardy Moertman: surat tanggal 27 Juni 1952 tentang penyampaian keterangan yang berhubungan dengan keadaan ekonomi di masyarakat, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1563 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11-12 Juli 1952 tentang RUU mengenai penetapan "UU Darurat No.7/1952 tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan makanan sebagai UU. | pertinggal | 4 lembar |
| 1564 | Menteri PP & K Prof. Bahder Djohan kepada ketua dan anggota-anggot Panitia Pengawas Film: surat tanggal 15 Juli 1952 tentang perubahan susunan keanggotaan PPF, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1565 | Bank Industri Negara kepada Presiden RI: surat tanggal 25 tentang Panitia dan Undang-undangan untuk pembukaan Pabrik Semen Gresik, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1566 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 2 September 1952, Oktober 1954 tentang kerja sama perdangan RI dengan luar negeri. NB: dalam B. Inggris, Hongaria. | asli | 1 sampul |
| 1567 | De Javasche Bank: surat tanggal 5 September 1952 tentang pemberitahuan pembatalan kredit import. | asli | 1 lembar |
| 1568 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 262 tanggal 15 September 1952 tentang peraturan khusus penyelenggaraan penjualan kendaraan Dump Angkatan Perang. | salinan | 1 lembar |
| 1569 | Organisasi buruh: resolusi-resolusi tanggal 1 Oktober 1952 - 14 Maret 1958 tentang penutupan perusahaan-perusahaan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1570 | Kementerian Perekonomian kepada Oemar Sanoesi bin Said: surat tanggal 2 Oktober 1952 tentang pembelian padi untuk Pemerintah, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1571 | Menteri Pertanian : Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1952 tentang penetapan perusahaan-perusahaan perkebunan daerah Kota Praja Jakarta Raya. | salinan | 1 lembar |
| 1572 | Panitia Pembangkit Pusat Tenaga Listrik Antohon, Sumatera Tengah kepada Presiden RI: resolusi tanggal 19 Nopember 1952 tentang pembangunan pusat tenaga listrik. | asli | 1 lembar |
| 1573 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 24 Nopember 1952, 6 Desember 1954 tentang permohonan dispensasi dan perlindungan perusahaan, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1574 | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 14 Januari 1953 tentang tambang-tambang minyak Sumut dan Cepu, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1575 | M. Rasjid: surat-surat tanggal 17 Januari, 2 Maret 1953 tentang pembelian beras Iran. | asli | 2 lembar |
| 1576 | Menteri Perekonomian dan Keuangan: SKB tanggal 22 Januari 1953 tentang pembagian barang-barang yang dimasukkan dari luar negeri dalam golongan-golongan dan besarnya pembayaran untuk bukti indusemen yang selanjutnya disebut 'tambahan pembayaran import'. | stensilan | 1 lembar |
| 1577 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 20/PM/1953 tanggal 29 Januari 1953 tentang pembubaran panitia nasionalisasi perusahaan listrik dan gas. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|--------------------|----------|
| 1578 | Kementerian Perekonomian: surat-surat tanggal 5 Pebruari-28 Pebruari 1953 tentang RUU mendirikan perusahaan, disertai pengantar. | tindakan | 1 sampul |
| 1579 | Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 12 Pebruari 1953 - 11 Oktober 1957 tentang pembelian barang-barang. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1580 | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 20 Pebruari 1953 tentang pemusatn pemasangan advertensi pemerintah, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1581 | Menteri Keuangan: Surat Keputusan tanggal 27 Pebruari 1953 tentang syarat-syarat terhadap pengeluaran atau pemasukan barang-barang bagi Kep. Riau | stensilan | 1 lembar |
| 1582 | PERBEPBSI: surat tanggal 13 Maret 1953 tentang permohonan besi-besi tua yang akan dikerjakan sendiri oleh pihak kantor, disertai pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 1583 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 18 Maret 1953 - 14 Juni 1957 tentang perusahaan garam rakyat dan sabun. | asli, stensilan | 3 lembar |
| 1584 | Sekretaris DM kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 20 April 1953 tentang RUU darurat mengenai ancaman hukuman terhadap jual beli tembaga, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1585 | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 29 April 1953 tentang reaksi bankir dan pengusaha besar di New York terhadap rencana peraturan penanaman modal asing di Indonesia, dengan lampiran. NB: sebagian arsip dalam B. Inggris | asli | 3 lembar |
| 1586 | Menteri Pertanian kepada PM: surat tanggal 1 Juni 1953 tentang tuntutan SARBUPRI kepada seluruh perusahaan perkebunan, dengan lampiran. | stensilan | 4 lembar |
| 1587 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 Juni 1953-11 Mei 1954 tentang tuntutan UU perlindungan bagi pengusaha-pengusaha. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 1588 | Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 28 Juni 1953 - 22 Mei 1957 tentang pembelian dan penjualan kendaraan dinas, dengan lampiran. | stensilan, salinan | 1 sampul |
| 1589 | Direktur LAAPLN: Surat Edaran tanggal 30 Juni 1953 tentang perubahan nama De Javasche Bank menjadi BI. NB: B. Belanda dan Indonesia. | stensilan | 1 lembar |
| 1590 | Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKPI) : mosi tanggal 2 Juli 1953 tentang desakan untuk membat UU koperasi dan perikanan yang bersifat nasional, dengan lampiran dan surat. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1591 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 2 Juli 1953-10 Nopember 1957 tentang desakan kepada pemerintah untuk mencabut UU monopoli garam tahun 1941 diganti dengan UU penggarahan rakyat yang demokratis. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 1592 | A. Solok Sulawesi : surat tanggal 20 Juli 1953 tentang industri kayu di Sulawesi. | asli | 1 lembar |
| 1593 | Koperasi Atikan Karangnunggal kepada kepala Jawatan Pertambangan: surat tanggal 25 Juli 1953 tentang permohonan ijin mengadakan penyelidikan pertambangan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1594 | DPRDS Serang, Lampung Selatan: surat-surat tanggal 12 September 1953 - 14 Juni 1954 tentang keputusan-keputusan kongres GKPI (Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia). | tembusan | 2 lembar |
| 1595 | N.V. Usaha Tambang Sulawesi (UTAS): resolusi tanggal 23 September 1953 tentang kesediaan untuk bekerjasama dengan modal asing atas dasar-dasar nasional. | asli | 1 lembar |
| 1596 | M.T. Siregar Kepada Gubernur Jawa Barat: surat tanggal 28 September 1953 tentang permohonan surat ijin mendirikan dan menggunakan mesin penjoroh beras di Bogor, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1597 | Menteri Perekonomian: Surat Edaran tanggal 30 September 1953 tentang hubungan dengan kantor pusat pembelian di Amsterdam, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 1598 | Perorangan kepada Presiden: surat tanggal 6 Oktober 1953 tentang protes terhadap monopoli modal asing. | asli | 1 lembar |
| 1599 | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 29 Oktober 1953 - 14 Nopember 1953 tentang pemberian kelonggaran larangan kepada beberapa perusahaan untuk memasukkan barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. | salinan | 1 sampul |
| 1600 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 118/UM/53 tanggal 17 Nopember 1953 tentang pembentukan panitia penyelidikan perikanan laut. | salinan | 1 lembar |
| 1601 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan No. 2736/M tanggal 19 Pebruari 1954 tentang penghapusan peraturan-peraturan komisi pembelian barang dari luar negeri. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1602 | DPRDS Tegal kepada Menteri Dalam Negeri: surat tanggal 23 Pebruari 1954 tembusan tentang perluasan central diesel di Tegal | | 1 lembar |
| 1603 | Persatuan Perkebunan Getah (karet) Rakyat Ind onesia, Medan: surat-surat asli, tembusan tanggal 18 Maret - 11 Desember 1954 tentang yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. N.B. Arsip rusak. | | 1 sampul |
| 1604 | Persatuan Buruh Perkebunan Getah cabang Bukit Mas Pk. Brandan: resolusi tanggal 21 Maret 1954 tentang perkebunan bukit mas agar secepatnya diusahakan pemerintah. | asli | 1 lembar |
| 1605 | Pengusaha dan atas nama buruh-buruh percetakan lima: surat tanggal 21 Maret 1954 tentang penerimaan pesanan-pesanan percetakan/alat-alat tulis menulis. | asli | 1 lembar |
| 1606 | Organisasi-organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 24 April - 21 Agustus 1954 tentang adanya tuntutan adanya peraturan bank. | asli | 4 lembar |
| 1607 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 28 April 1954 - 3 Agustus 1957 tentang pembukaan Pabrik Semen Gresik, Pabrik Tapioka. | tembusan | 1 lembar |
| 1608 | Konperensi SBII Konsulaat: resolusi tanggal 1 Mei 1954 tentang desakan untuk mengadakan persediaan benang tenun yang cukup, disertai pengantar. | asli | 1 lembar |
| 1609 | DPRDS Kab. Bojonegoro dan Pandeglang: mosi persetujuan tanggal 21 Juni, 18 Desember 1954 tentang desakan pendirian bank tani. | asli | 3 lembar |
| 1610 | Persatuan Buruh Minyak : surat-surat tanggal 15 Juli 1954 - 28 Juni 1956 tentang kondisi perusahaan tambang minyak. | tembusan | 1 sampul |
| 1611 | Direktur Kabinet Presiden kepada KSAD: surat tanggal 25 September 1954 tentang surat dari NV UPENI yang menyatakan bahwa antara AD dengan NV UPENI tidak mempunyai hubungan resmi, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1612 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 4 Oktober 1954 - 11 Agustus 1956 tentang masalah kopra yang menjadi tanggung jawab Panglima TT VII, Kol. J. F. Warouw. | asli | 1 sampul |
| 1613 | Dewan Ekonomi Indonesia Pusat kepada Presiden: surat tanggal 20 Oktober 1954 tentang konperensi ekonomi Indonesia-Timur, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1614 | Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Indonesia: surat-surat tanggal 25 Oktober -30 Desember 1954 tentang pandangan umum masyarakat karet Indonesia dalam perkaretan dan dalam kebijakan ekonomi pemerintah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1615 | Dewan Daerah Parindra Jateng dan Yogyakarta: resolusi tanggal 14 Nopember 1954 tentang sokongan terhadap usaha Delegasi Indonesia di PBB untuk menghapuskan embargo yang merugikan perekonomian Bangsa Indonesia. | tembusan | 1 lembar |
| 1616 | Moh. Saleh: statement tanggal 1 Desember 1954 tentang permohonan agar struktur ekonomi di Kep. Bangka dan Belitung dirubah. | stensilan | 1 lembar |
| 1617 | Pilie kepada KW SUAD: surat-surat tanggal 9, 28 Desember 1954 tentang permohonan memborong kendaraan/alat-alat di Park Citadel. | tembusan | 2 lembar |
| 1618 | Residen Madura, R. Soenarto Hadiwidjojo: Laporan Tahunan 1955 tentang urusan perekonomian kantor Karesidenan Madura. | stensilan | 1 jilid |
| 1619 | Rivanie Saleh kepada Wakil Presiden M. Hatta: surat tanggal 8 Januari 1955 tentang koperasi pegawai negeri, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1620 | Direktur Electiciteit Maatschappij Amiera N.V. kepada direktur kabinet presiden: laporan tahunan 1953 tentang perusahaan, disertai surat. | stensilan | 1 sampul |
| 1621 | Menteri Perekonomian: Keputusan-Keputusan tanggal 27 Januari - 9 Mei 1955 tentang perundingan dagang antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara asing, dengan lampiran. | stensilan | 5 lembar |
| 1622 | DPR RI: Surat Keputusan No. 3/K/1955 tanggal 28 Januari 1955 tentang pembentukan panitia pengadaan angket atas usaha memperoleh dan cara menggunakan devisa, disertai surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 1623 | DPRDS Lampung Selatan kepada ketua SBII Komisariat Lamsel: resolusi tanggal 28 Januari 1955 tentang dukungan terhadap resolusi SBII mengenai larangan mengekspor karet slabs, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1624 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan: Surat Keputusan Bersama beberapa menteri tanggal 1 Pebruari 1955 tentang penetapan harga buku-buku yang dicetak dan diterbitkan di Indonesia, dengan lampiran. | salinan | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1625 | Dewan Koperasi Indonesia: surat tanggal 1 Pebruari 1955 tentang kepindahan kedudukan organisasi dan penyampaian piagam. Dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1626 | Koperasi Radja Godang Ulu Sihotang Taput: surat tanggal 22 Pebruari 1955 tentang permohonan peminjaman uang guna tambahan modal, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1627 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari - 16 Nopember 1955 tentang import barang-barang. | salinan | 1 sampul |
| 1628 | Kementerian Keuangan: Surat Edaran tanggal 19 Maret 1955 tentang percetakan penanggalan, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 1629 | Pg. Laksamana kepada Menteri Perekonomian: surat tanggal 1 April 1955 tentang permohonan istimewa konpentasi barter dengan Hongkong /Singapura. | tindasan | 1 lembar |
| 1630 | Direktur NV Djayakarta Lyod kepada Menteri Perekonomian: surat tanggal 6 April 1955 tentang usul pembentukan panitia interdepartemental yang bertugas memajukan dan mengkoordinir produksi dan ekspor hasil-hasil Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 1631 | DP BTI Bandung kepada Menteri Perhubungan: surat pernyataan tanggal 8 April 1955 tentang rencana pemerintah untuk meyayaskan jawatan pusat bengkel motor dan PN. DAMRI. | tembusan | 1 lembar |
| 1632 | Organisasi massa dan DPRDS-DPRSD: resolusi-resolusi tanggal 1 Mei 1955 - 17 September 1957 tentang tuntutan untuk mengambil tindakan tegs mengurangi hak-hak istimewa modal monopoli asing. | tembusan | 3 lembar |
| 1633 | Yayasan Kerja Seksi Usaha : surat tanggal 4 Mei 1955 tentang permohonan surat keterangan Presiden, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1634 | Organisasi buruh: surat-surat pernyataan tanggal 12 Mei - 8 Juni 1955 tentang kebijaksanaan pemerintah dalam menaikkan harga bensin. | asli | 7 lembar |
| 1635 | Accountantskantor: surat tanggal 16 Mei 1955 tentang keadaan ekonomi di Indonesia. | tembusan | 1 lembar |
| 1636 | Organisasi Panitia Aksi Masalah Tekstil Pejuang Bekas Bersenjata Indonesia kepada Menteri Perekonomian: surat tanggal 17 Mei 1955 tentang permohonan pencalonan I. D Pantoan dan T.V. Siregar untuk duduk dalam kepanitiaan. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1637 | Pipin Pangaribuan kepada Panitia Pusat Penyelenggara Penjualan Dump. Angkatan Perang: surat tanggal 31 Mei 1955 tentang permohonan pembelian Dump. Angkatan Perang. | tembusan | 1 lembar |
| 1638 | Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Indonesia: pernyataan tanggal 14 Juli - asli 7 September 1955 tentang Kongres Karet. | | 1 sampul |
| 1639 | Petani Penghasil Cengkeh Minahasa: pernyataan tanggal 15 Juli 1955 tentang keputusan menteri pertanian dan perekonomian mengenai kredit cengkih, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1640 | Menteri Penerangan: Surat Keputusan No. 18/SK/SD/55 tanggal 15 Juli 1955 tentang penetapan percetakan negara di Ambon. | stensilan | 1 lembar |
| 1641 | Rakyat Curup kepada Bupati Rejang Lebong: surat tang; 20 Agustus 1955 tentang permohonan bantuan agar mesin kincirnya dapat bekerja dan menghasilkan kembali. | tembusan | 1 lembar |
| 1642 | Laporan Delegasi Besi dan Baja ke Pertemuan VI dari Sub Communittee On Iron and Steel di Bangkok tanggal 24 - 29 Agustus 1955 | stensilan | 1 lembar |
| 1643 | Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan: Keputusan-keputusan tanggal 22 September 1955 - 23 Desember 1957 tentang perubahan dan penambahan daftar golongan-golongan barang, dengan lampiran. | stensilan | 1 lembar |
| 1644 | Kementerian Perekonomian: surat tanggal 3 Oktober 1955 tentang permohonan bukti prioriteit untuk meminta oktroi diluar negeri dari Goei Jong Tiang, dengan lampiran | asli | 1 sampul |
| 1645 | Pengurus Koperasi 'Rukun' Tanjung Karang: resolusi tanggal 24 Oktober 1955 tentang desakan kepada pemerintah supaya pelelangan ikan diserahkan kepada Koperasi Rukun. | asli | 1 lembar |
| 1646 | SBG Cab. Tersana Baru: surat pernyataan tanggal 31 Oktober 1955 tentang protes atas keterangan wapres pada pers mengenai pinjam paksa dan 8 jam kerja dalam mengatasi inflasi/kesulitan ekonomi. | asli | 1 lembar |
| 1647 | Serikat Buruh Tekstil dan Pakaian kepada Menteri Keuangan RI: surat tanggal 12 Nopember 1955 tentang proteksi terhadap perindustrian tekstil nasional. | tembusan | 1 lembar |
| 1648 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 7 Januari - 11 Oktober 1956 tentang urusan statistik, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1649 | Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Indonesia (PPKRI) Medan: pernyataan tanggal 23 Januari 1956 tentang penyelesaian revolusi nasional masyarakat karet di lapangan finec, dengan lampiran. | salinan | 4 lembar |
| 1650 | Angkatan Pembangunan RI kepada Presideann RI: surat tanggal 22 April 1956 tentang rencana pembentukan yayasan film, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1651 | DPH Badan Musyawarah Petani Kelapa Bolaang Mongondow: pernyataan, tanggal 16 Mei 1956 tentang desakan agar segera diadakan timbang terima tugas Jakop ke JKBM dalam daerah Bolaang Mongondow dan mempertahankan keputusan konperensi segitiga di Kinilow tanggal 21-22 Maret 1956. | asli | 4 lembar |
| 1652 | Has Baba: surat tanggal 17 Juni 1956 tentang laporan akan adanya hasil-hasil tambang di Maluku. | asli | 1 lembar |
| 1653 | Panitia Penyelenggara Kepentingan Pengusaha-pengusaha Nasional Tasikmalaya kepada Menteri Perekonomian: resolusi tanggal 18 Juli 1956 tentang desakan untuk mengabulkan <i>plafon deving</i> BRI Tasikmalaya menjadi sebesar Rp. 200.000,00, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1654 | Koordinasi Usaha Sosial Ekonomi Masyarakat: resolusi tanggal 1 September 1956 tentang desakan agar Pemerintah segera mengganti UU/peraturan-peraturan kolonial yang mengikat rakyat terutama peraturan pertambangan. | asli | 1 lembar |
| 1655 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan tanggal 4 September 1956 tentang pengubahan dan penambahan Surat Keputusan Menteri Perekonomian mengenai simpanan, pemindahan hak dan tempat barang-barang logam tua, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1656 | Serikat Perekonomian Indonesia: surat tanggal 27 September 1956 tentang tuntutan kepada Pemerintah atas pembekuan Perusahaan N.V. Serikat Perekonomian Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1657 | Kepala Direktorat Ekonomi Antar Negara kepada Biro Perancang Negara: surat tanggal 3 Oktober 1956 tentang administrasi Pemerintah Pusat dan training dalam industri, dengan lampiran. NB: Bahasa Inggris | tembusan | 3 lembar |
| 1658 | Organisasi-organisasi buruh: surat pernyataan tanggal 24 Oktober 1956-13 Agustus 1959 tentang sikap terhadap UU Penanaman Modal Asing. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1659 | Perseroan Dagang N.V. Koesoemajaya: pemberitahuan tanggal 29 November 1956 tentang pesanan ban-ban. | asli | 1 lembar |
| 1660 | Kepala Jawatan Pegadaian Negara: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 17 Desember 1956, 26 Pebruari 1957 tentang pembukaan Rumah Gadai Negara di Bali dan Surakarta. | stensilan | 2 lembar |
| 1661 | Biro Pusat Statistik kepada Kabinet Presiden RI: daftar tahun 1957 tentang harga kebutuhan pokok sehari-hari. | stensilan | 1 sampul |
| 1662 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Januari, 11 Juni 1957 tentang permintaan grafik/statistik perdagangan dan perekonomian. | tembusan | 2 lembar |
| 1663 | Gerakan Pemuda Sangihe Talaud kepada Presiden RI: telegram, tanggal 23 Januari 1957 tentang desakan kepada Panglima TT VII untuk menginstruksikan mayor Rahasia datang ke Sangihe Talaud guna membantu rakyat dalam soal kopra. | asli | 1 lembar |
| 1664 | Bureau Mahasiswa Veteraan Centraal Jogjakarta: surat tanggal 26 Januari 1957 tentang permohonan bantuan agar Yayasan Radio dan Film Pembangunan dapat terwujud. | asli | 1 lembar |
| 1665 | Panitia Usaha Pembukaan Pabrik Tapioka Turen Malang kepada Menteri Pertanian: surat tanggal 5 Pebruari 1957 tentang pembukaan kembali Pabrik Tapioka Turen. | tembusan | 2 lembar |
| 1666 | Gabungan Pedagang Daging Kecil: surat tanggal 10 Pebruari 1957 tentang permohonan menjadi anggota cabang Koperasi Djakarta Raya, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1667 | DPRDP Kabupaten Kulonprogo kepada Menteri PU & T: resolusi tanggal 28 Maret 1957 tentang sikap terhadap elektrifikasi di kota Wates. | tindakan | 1 lembar |
| 1668 | DPRDP-DPRDP: resolusi-resolusi persetujuan tanggal 7 Mei, 2 Agustus 1957 tentang desakan untuk segera merealisir pasal 59 ayat 2 UU No. 1 tahun 1957 tentang Perusahaan Daerah. | asli | 3 lembar |
| 1669 | Soeprapto Sokowati, Komandan Resimen Inf. 16 Kepada Presiden: surat tanggal 18 Juni 1957 tentang usul industrialisasi daerah Brantas sesuai dengan rencana 5 tahun Pemerintah, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1670 | NV. JANEHA: surat tanggal 10 Juli 1957 tentang rencana kerja 'rabuk' untuk Kabinet Karya, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1671 | M. Sitanggang kepada Pengadilan Negeri Medan: surat tanggal 15 Juli 1957 tentang pengaduan atas sensor surat yang ditujukan kepada Presiden mengenai permohonan modal usaha. | tembusan | 1 lembar |
| 1672 | PNI/Front Marhaenis Cab. Madiun: surat pernyataan tanggal 7 Agustus 1957 tentang dukungan akan ide overste Soeprapto Soekowati mengenai industrialisasi daerah Brantas. | asli | 1 lembar |
| 1673 | Organisasi Buruh: surat-surat tanggal 23 Agustus - 8 Desember 1957 tentang usul peninjauan kembali peraturan mengenai bea ekspor (BE). | tembusan | 1 sampul |
| 1674 | Pusat Koperasi Konsumsi Kahuripan: surat pernyataan tanggal 27 Agustus 1957 tentang sikap terhadap pernyataan Mr. Soebagio Reksodipuro dalam surat kabar harian 'Suluh Indonesia' tanggal 23 Agustus 1957 dan Suara Rakyat tanggal 26 Agustus 1957 mengenai kesulitan-kesulitan dalam perkoperasian. | salinan | 1 lembar |
| 1675 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 4 September, 25 Nopember 1957 tentang penempatan NV Kalimadu Jakarta di bawah pengawasan Badan Pengawas Devisen, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1676 | DPRDP Daerah Swatantra TK.II Indramayu: resolusi tanggal 10 September 1957 tentang desakan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian untuk segera mengesahkan penggalan sumber-sumber minyak tanah. | asli | 1 lembar |
| 1677 | Soedjono Wongso Sukarto kepada Ketua Yayasan Territorium IV Divisi Diponogoro: surat tanggal 5 Oktober 1957 tentang saran dan pendapat di bidang perekonomian. | tindakan | 1 lembar |
| 1678 | LAAPLN Bank Indonesia: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 7 Oktober - 11 Desember 1957 tentang ekspor - import, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |
| 1679 | Direktur Pelayaran Nasional Indonesia kepada Presiden RI: surat terbuka tanggal 8 Oktober 1957 tentang tanggapan atas surat KBKI mengenai kepengurusan Pelni, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1680 | Komite Suply Minyak kepada Kepala Staf Angkatan Udara: surat tanggal 13 Nopember 1957 tentang pengiriman avigas 100/130 grade. | tembusan | 1 lembar |
| 1681 | N.V. JANEHA: surat tanggal 14, 26 November 1957 tentang kewaspadaan nasional, sabotase dari asing dalam ekonomi, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1682 | DPRDS Tk. II Sumedang: resolusi tanggal 27 Nopember 1957 tentang realisasi UU No. 28/1956 dan UU No. 29/56 serta perlu adanya tindakan positif yang progresif dalam penggantian petugas-petugas pimpinan pengusaha penting dari hak asing kepada bangsa Indonesia sendiri. | asli | 1 lembar |
| 1683 | KSAD: Instruksi No. Instr/PM/013/1957 tanggal 29 Nopember 1957 tentang pelaksanaan SK Menteri Perdagangan tanggal 14 Nopember 1957 mengenai penetapan harga semen keluaran pabrik Semen Gresik, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1684 | SOBSI Cabang Langkat/T. Haru: surat pernyataan tanggal 2 Desember 1957 tentang protes kenaikan tarif N.V. DSM | asli | 1 lembar |
| 1685 | SARBUPRI Ranting Djatinegara: pernyataan tanggal 13 Desember 1957 tentang sikap terhadap komposisi dalam pimpinan pusat perkebunan negara yang baru. | asli | 1 lembar |
| 1686 | Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Indonesia kepada Menteri Perdagangan: surat pernyataan tanggal 15 Pebruari 1958 tentang permohonan ijin penjualan karet 10% lebih rendah dari harga karet menurut valuta-contract. | tembusan | 1 lembar |
| 1687 | Persatuan Tani Nasional Indonesia Cab. Jombang : surat pernyataan tanggal 16 Pebruari 1958 tentang RUU Koperasi dan peningkatan hasil-hasil bahan makanan. | asli | 3 lembar |
| 1688 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 13 Maret - 6 April 1958 tentang tuntutan pembubaran panitia sensor film. | asli | 4 lembar |
| 1689 | Panitia Peringatan Hari 1 Mei 1958 Ngunut kepada Menteri Pertanian: resolusi tanggal 1 Mei 1958 tentang sikapnya dalam menghadapi masalah Pabrik Gula Kunir, intervensi Belanda di Irian Barat dan percobaan bom nuklir di Kepulauan Eniwetok. | stensilan | 6 lembar |
| 1690 | Panitia Perayaan 1 Mei 1958 Kabupaten Kebumen: resolusi tanggal 1 Mei 1958 tentang desakan realisasi plan Pembangunan Nasional terutama mengenai perindustrian. | asli | 1 lembar |
| 1691 | Persatuan Tani Nasional Indonesia Seluruh Jawa Tengah: surat pernyataan tanggal 4 Mei 1958 tentang permohonan untuk merealisir tambahan produksi bahan makanan dalam waktu jangka panjang. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------|
| 1692 | Organisasi massa dan perorangan: surat-surat tanggal 5 Juni 1953 - 12 Agustus 1959 tentang permohonan surat ijin dagang/usaha. | asli | 1 sampul |
| 1693 | Firma Kemajuan kepada Kepala Biro Perdagangan (BAPPIT): surat tanggal 23 Pebruari 1959 tentang distributorschap dari Semen Padang, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1694 | Biro Pusat Statistik Jakarta: angka-angka indeks bahaan-bahan pokok periode Maret, April, Mei 1959. | stensilan | 2 lembar |
| 1695 | Rakyat kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 9 Juli - 31 Agustus 1959 tentang tanggapan mengenai larangan terhadap pedagang eceran bangsa asing. | asli | 1 sampul |
| 1696 | Pedagang-pedagang kecil/eceran asing Tionghoa: surat-surat tanggal 30 Juli - 18 September 1959 tentang permohonan perpanjangan lisensi/ijin dagang bagi pedagang kecil/eceran bangsa asing. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1697 | Biro Pusat Statistik Jakarta: Berita Ringkas Perdagangan Antar Pulau Bahan-bahan Kebutuhan Pokok Periode September 1959. | stensilan | 2 lembar |
| 1698 | Rakyat Sumatera Selatan: surat tanggal 30 Nopember 1959 tentang permohonan penertiban dalam segala bidang perdagangan nasional. | tembusan | 1 lembar |
| R. PERTAHANAN DAN | | | |
| 1699 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10 Maret 1950 - 7 Agustus 1959 tentang permohonan keadilan dan perlindungan hukum. | asli | 1 sampul |
| 1700 | Organisasi masa & politik: resolusi-resolusi tanggal 2 September 1950 - 7 Desember 1959 tentang tuntutan pembebasan tahanan yang tidak bersalah. | tembusan | 1 sampul |
| 1701 | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 2 September 1950-10 Desember 1957 tentang permohonan grasi, amnesti dan pembebasan tahanan yang tidak terbukti bersalah. | asli | 2 sampul |
| 1702 | Kabinet Presiden RI: resolusi-resolusi tanggal 4 September 1950, 12 Desember 1953 tentang tuntutan penghapusan PP RIS No. 6/ 1950 merugikan penderita cacat perang. | asli | 2 lembar |
| 1703 | Kejaksaaan Agung pada Mahkamah Agung: surat tanggal 11 September 1950 tentang keterangan mengenai Ibu Ratu Pekungwati, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|------------------|----------|
| 1704 | Perorangan : surat-surat tanggal 22 September 1950 - 20 April 1957 tentang pengaduan terhadap orang yang merugikan /membahayakan pihak lain. | tembusan | 1 sampul |
| 1705 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 23 September 1950 - 19 September 1959 tentang tuntutan sikap tegas terhadap tindakan korupsi. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1706 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 24 September 1950-20 Pebruari 1959 tentang tuntutan kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap razia Aceh. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1707 | Menteri Kehakiman: surat tanggal 12 Oktober 1950 tentang pengiriman surat tembusan kepada Ny. Madijah binti Umar mengenai permohonan agar jangan sampai dikeluarkan dari rumah yang ditempati, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 1708 | Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Pertahanan : surat tanggal 6 November 1950 tentang surat kawat ketua DPRDS Malang mengenai desakan supaya jangan sampai terjadi peristiwa di Makassar, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1709 | Perorangan: surat-surat tanggal 15 Nopember 1950 - 10 Maret 1959 tentang laporan keadaan keamanan di daerah. | asli | 1 sampul |
| 1710 | Perorangan: surat-surat tanggal 19 November 1950-30 September 1957 tentang keadaan peristiwa yang mempengaruhi keamanan masyarakat, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1711 | DPRDS, Organisasi massa & politik: resolusi-resolusi tanggal 3 Desember 1950-14 Oktober 1957 tentang protes atas larangan demonstrasi. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1712 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 4 Desember 1950-3 Mei 1958 tentang haokio, kuomitang dan propaganda komunisme. | asli, pertinggal | 1 sampul |
| 1713 | Panglima Tentara dan Territorium III Jawa Barat: Peraturan tanggal 8 Desember 19950 tentang organisasi/perkumpulan terlarang, disertai surat pengantar. | asli | 1 lembar |
| 1714 | PNI: surat-surat tanggal 10 Desember 1950, 23 Agustus 1952, 4 Maret, 7 Desember 1954, tentang masalah politik dan keamanan. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1715 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Presiden RI: surat tanggal 13 Desember 1950 tentang laporan ketegangan antar RRT dan Kuo Mintang di Bagan Siapi-api, dengan surat pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 1716 | Perorangan, Orpol, TNI: surat-surat tanggal 21 Desember 1950-27 Juni 1957 tentang pemulihan keamanan di daerah-daerah. | asli | 1 sampul |
| 1717 | Perorangan: surat-surat tanggal 1951-1957 tentang situasi politik dan keamanan di Sumatera, khususnya Aceh. | asli | 1 sampul |
| 1718 | KSAD: surat tanggal 6 Januari 1951 tentang perkumpulan Harimau liar, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1719 | DPRDS-DPRDS, Ormas, Orpol: resolusi-resolusi tanggal 10 Januari 1951-10 Mei 1958 tentang tuntutan pengembalian Irian Barat ke wilayah RI. | asli, tembusan | 3 sampul |
| 1720 | Panglima Tentara dan Terr. V: Surat Perintah No. 0079. Bs/Di I-51/PH tanggal 13 Januari 1951 tentang perintah kepada Lts. Sumanto untuk mengambil tindakan politonel (menahan, menggeledah dan memeriksa) terhadap Njoo Liem Cwan Surabaya, yang akan menyelundupkan emas. | salinan | 1 lembar |
| 1721 | Organisasi massa & politik; Perorangan: surat-surat tanggal 15 Januari 1951-26 Nopember 1957 tentang tindakan atas penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh alat-alat negara. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1722 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 22 Januari - 29 Juni 1951 tentang pembebasan Arief Hardjowiganda, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1723 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 28 Januari 1951 - 15 Oktober 1954 tentang tuntutan dibebaskannya semua tahanan Razia Agustus. | tembusan | 1 sampul |
| 1724 | Kabinet PM kepada Menlu: surat tanggal 30 Januari 1951 tentang pertanyaan anggot DPR RI Sjah Sutan Makmur mengenai penghinaan terhadap Kepala Negara Indonesia oleh Harian ' <i>De Telegraaf</i> ', dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1725 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10 Pebruari 1951 - 22 Nopember 1959 tentang keputusan pengadilan atas beberapa perkara pidana. | asli | 1 sampul |
| 1726 | Kejaksanaan Agung dan Perdana Menteri kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 22 Pebruari 1951 - 25 September 1957 tentang larangan terhadap terbitan-terbitan yang dianggap mengganggu keamanan. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1727 | Menteri Pertahanan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 26 Pebruari, 1 Maret 1951 tentang penerimaan kapal perang 'Herjk Hidders' oleh Mayor R.E. Martadinata dan sebagai komandan kapal perang RI 'Gajah Mada', disertai surat pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 1728 | Perorangan: surat-surat tanggal 27 Pebruari 1951 - 10 Desember 1957 tentang peristiwa penahanan/penangkapan beberapa oknum. | asli | 1 sampul |
| 1729 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 1 Maret 1951 - 15 Desember 1957 tentang tuntutan pembatalan KMB. | asli | 1 sampul |
| 1730 | DPRDS-DPRDS & Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 1 Maret 1951 - 29 September 1959 tentang keadaan darurat perang (SOB). | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1731 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 Maret 1951, 26 Agustus 1952, 26 Mei 1954 tentang penghinaan terhadap Kepala Negara. | tembusan | 3 lembar |
| 1732 | Perorangan: surat-surat tanggal 13 Maret 1951 - 17 April 1955 tentang pembelian eks Overste Rivai, Sukarni, Sjech Ibrahim dari segala tuntutan. | tembusan | 1 sampul |
| 1733 | Darimin: surat tanggal 16 Maret 1951 tentang dukungan agar Singapura, Kaltim dan Irian masuk wilayah Indonesia, dengan lampiran. NB: Bahasa Belanda | asli | 2 lembar |
| 1734 | Wedana Bangka Barat: laporan tanggal 20 Maret 1951 tentang situasi politik di bangka untuk bulan Maret 1951, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 1735 | Jaksa Agung kepada Presiden RI: surat tanggal 7 April 1951 tentang kunjungan Sukarni cs. Ke Sumatera-Tengah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1736 | Soeleiman, Radja Koening Pagar Roejoeng De XVII Medan: surat tanggal 11 April 1951 tentang pengiriman verslag warta berita mengenai adanya Pemerintahan Kedaulatan Sumatera, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1737 | Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya: Instruksi No. 86/adj/od/51 tanggal 12 April 1951 tentang pelaksanaan pemberitaan kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 9 April 1951 mengenai pencatutan karcis, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 1738 | Djauhari Umar Farhat, Prajurit I Infantri kepada Panglima Tertinggi: surat tanggal 21 April 1951 tentang keadaan pemimpin-pemimpin di Indonesia. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1739 | Gabungan Kepala-kepala Staf Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri RI: memorandum tanggal 30 April 1951 tentang tugas gabungan kepada Kepala Staf, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1740 | Daeng Parani: laporan tanggal 5 Mei 1951 tentang tindakan Komisaris Polisi Sulsel yang tidak benar/mengadu domba rakyat, di.sertai pengantar | asli | 2 lembar |
| 1741 | Perorangan kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 7 Mei 1951 tentang tuntutan hukum yang tetap dan kuat untuk menjaga diri. NB: Bahasa Arab Melayu | asli | 1 lembar |
| 1742 | Perorangan: surat-surat tanggal 8 Mei 1951 - 16 November 1957 tentang keamanan negara RI. | asli | 1 sampul |
| 1743 | Menlu kepada Oei Tek Sim: surat tanggal 15 Mei 1951 tentang permohonannya untuk mengibarkan bendera RRC disamping bendera RI, dengan lampiran | tembusan | 1 sampul |
| 1744 | Organisasi massa dan politik: surat-surat pernyataan tanggal 16 Mei 1951- 23 Agustus 1959 tentang protes terhadap pengekangan hak-hak demonstrasi. | asli | 1 sampul |
| 1745 | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Pertahanan: surat tanggal 23 Mei 1951 tentang permohonan Sultan Ab Muthalkim M.H agar diberi status militer. | pertinggal | 1 lembar |
| 1746 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 Mei 1951 - 6 Januari 1954 tentang pergolakan BRI di Jabar dan Jakarta disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1747 | Mabes Polisi Militer kepada DKP: surat tanggal 12 Juni 1951 tentang pengaduan Ny. A. Smith Geboren Simon Contr.R.M. Soerjoseputro yang mengaku sebagai penasehat Presiden Soekarno, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1748 | Panglima Tendata & Terr. V Divisi I: Pengumuman No. 24/Ks. Di I-51/ Peng tanggal 12 Juni 1951 tentang larangan membuat, menyimpan dan mempergunakan mercon/bahan peledak lainnya, dengan surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 1749 | IAAPLN Bank Indonesia: Surat Edaran-Surat Edaran tanggal 7 Oktober - 11 Desember 1957 tentang ekspor - import, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 1750 | Kepala Jawatan Imigrasi kepada Presiden RI: surat tanggal 21 Juni 1951 tentang demobilisasi Tentara Belanda, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1751 | Pengurus Ikatan Perwira RI Daerah Jati: surat tanggal 21 Juni 1951 tentang pandangan rapat pleno di Malang mengenai nasib negara dan pejuang negara. | asli | 1 lembar |
| 1752 | Comisaris Dewan Partai Permai Propinsi Jawa Timur: statement tanggal 24 Juni 1951 tentang kekecewaan terhadap kabinet yang menghalangi terciptanya perdamaian dan perbaikan ahlak. | tindakan | 2 lembar |
| 1753 | DPRDS Kota Malang kepada Presiden RI: mosi tanggal 2 Juli 1951 tentang sokongan pendapat Seksi Pertanian DPRRI dalam rapat tanggal 24 April 1951 mengenai penggilingan beras, pembelian beras dan penyelundupan beras ke luar negeri. | stensilan | 1 lembar |
| 1754 | Kementerian Pertahanan: nota dinas tanggal 4 Juli 1951 tentang keadaan buruh di PAL, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1755 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung: surat tanggal 11 Juli 1951 tentang rampasan 1000 baal kopi, teh dan karet di Pamanukan, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1756 | Kementerian Penerangan: surat tanggal 17 Juli 1951 tentang karangan Louise Heren dalam harian "Times" yang berjudul "Stability in Indonesia", dengan lampiran dalam bahasa Inggris. | asli | 1 sampul |
| 1757 | Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Presiden RI: laporan tanggal 20 Juli 1951 tentang kegiatan komando kesatuan pelajar di Banyuwangi, dengan lampiran dan surat pengantar. | kutipan | 2 lembar |
| 1758 | Corps Polisi Militer MABES kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung: surat tanggal 25 Juli 1951 tentang penahanan A.P.C. Dado, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1759 | DPRDS-DPRDS & Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 26 Juli 1951-6 September 1959 tentang tuntutan pemulihan keamanan. | asli, tembusan | 2 sampul |
| 1760 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 1 Agustus 1951 - 19 Agustus 1957 tentang penolakan kedatangan pejabat-pejabat tinggi luar negeri yang akan membawa pengaruh keamanan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1761 | Rakyat Amsterdam kepada Presiden RI: telegam tanggal 29 Agustus 1951 tentang protes atas kemerdekaan Indonesia. NB: B. Belanda | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1762 | KSAP kepada Presiden RI : surat tanggal 29 Agustus 1951 tentang usul agar PM dan Menteri Penerangan mengadakan desakan secara pribadi kepada pemimpin-pemimpin di Makassar untuk menghadapkan Kahar Muzakkar kepada pemerintah. | asli | 1 lembar |
| 1763 | Perorangan kepada Direktur Kabinet Presiden: telegram tanggal 1 September 1951 tentang berita Gunung Kelud meletus dan keamanan kota. | asli | 1 lembar |
| 1764 | Kepala Staf Angkatan Darat: surat penetapan No. 71/KSAD/PNT/51 tanggal 29 November 1951 tentang pembentukan Kesatuan Polisi Militer Baru. | salinan | 1 lembar |
| 1765 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 1 Oktober 1951-20 Oktober 1959 tentang tuntutan hukuman bagi tahanan yang bersalah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1766 | Kementerian Penerangan RI: release tanggal 5 Oktober 1951 tentang pidato Kepala Staf Angkatan Perang RI. | stensilan | 1 lembar |
| 1767 | Menteri Pertanian: surat tanggal 10 Oktober 1951 tentang pengaduan Udin mengenai perampasan sebagian dagangannya oleh pegawai Polisi Kehutanan , dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1768 | Koordinator/Kepala Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar Pusat kepada Jaksa Agung: surat tanggal 17 Oktober 1951 tentang usul untuk mengadakan rehabilitasi dan recluseering pelajar dan mahasiswa yang tersangkut dalam perkara kriminal, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1769 | Menteri Pertahanan kepada dewan Menteri: nota tanggal 19 Oktober 1951 tentang penyempurnaan Angkatan Darat, disertai pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 1770 | DKP kepada Mendagri : surat tanggal 22 Oktober 1951 tentang laporan mengenai kekeruhan dalam Swapraja Sumbawa, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 1771 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 26 Oktober 1951, 27 Pebruari 1952, 30 April 1955 tentang lamaran menjadi tentara dan polisi, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 1772 | Gubernur Maluku: surat tanggal 28 Oktober 1951 tentang situasi politik dan keamanan di Maluku. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1773 | Panglima Tentara dan Terr.V: Surat Keputusan No. 202 Bs/Di.I-51/kpt tanggal 2 Nopember 1951 tentang larangan bertempat tinggal di dalam territorium Ja-Tim kepada Ch-Herman, warga negara Belanda, disertai penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 1774 | Proses verbal tanggal 7 Nopember 1951 tentang timbang terima komandan tentara dan territorium VII/Indonesia Timur. | asli | 1 lembar |
| 1775 | Kepala Kepolisian Negara kepada PMRI: surat tanggal 15 Nopember 1951 tentang status kepolisian, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1776 | Duta Besar RI di Washington kepada Duta Besar RI di Paris: surat kawat tanggal 15 Nopember 1951 tentang Wakil Gerombolan RMS, Niki Lujuw, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1777 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 3 Desember 1951, 12, 16 Pebruari 1952 tentang latihan Candra Dimuka. | asli | 3 lembar |
| 1778 | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Pertahanan: surat tanggal 4 Desember 1951 tentang permohonan Fliming mengenai pesawat udara Catalinia Amphibian Aircraft RI, dengan lampiran. NB: sebagian arsip berbahasa Inggris. | pertinggal | 1 sampul |
| 1779 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia: surat-surat tanggal 16 Mei, 22 Desember 1951 tentang pengajaran komunistis pada sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 1780 | Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan Darat: surat tanggal 22 Desember 1951 tentang rencana 700 Batalyon dari Angkatan Darat. | salinan | 1 lembar |
| 1781 | Pengurus lama sekolah Chung Hwa di Siantar: surat tanggal 24 Desember 1951 tentang pemberitahuan atas putusan pengadilan Negeri Pematang Siantar mengenai pengembalian sekolah yang sejak 20 Juni 1951 dirampas pengacau | asli | 1 lembar |
| 1782 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 28 Desember 1951-29 November 1952 tentang berdirinya suatu organisasi yang dapat membahayakan keselamatan negara. | asli | 1 sampul |
| 1783 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 1952 - 1957 tentang HUT PTIK, AURI. | asli | 1 sampul |
| 1784 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10 Januari 1952-5 Desember 1953 tentang gerakan subversif di Jateng. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1785 | Kejaksanaan Agung: surat-surat tanggal 17 Januari-9 September 1952 tentang tembusan artikel-artikel dalam berbagai surat kabar yang dianggap dapat mempengaruhi keamanan. | | 1 sampul |
| 1786 | M. Kasim Rsjdy, Kepala Negeri Kota Makmur: surat tanggal 18 Januari 1952 asli tentang razia Agustus yang disebabkan oleh adanya SOB. | | 1 lembar |
| 1787 | Gubernur dan Ormas di Sulawesi: surat-surat tanggal 21 Januari 1952 - 29 November 1957 tentang situasi politik dan keamanan di Sulawesi. | tembusan | 2 sampul |
| 1788 | Kepala staf AP kepada Menteri Pertahanan RI: surat tanggal 23 Januari 1952 tentang kepergian Letkol Dahlan Djambeh. | tembusan | 1 lembar |
| 1789 | Kabinet PM kepada Mendagri: surat tanggal 28 Januari 1952 Tentang pengibaran Bendera Tiongkok Siang Tien Pak Nik Man Thie Hongkie, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 1790 | DPRDS-DPRDS & organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 28 Januari 1952 - 16 Pebruari 1956 tentang tuntutan pembubaran Uni Indonesia Belanda. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1791 | Personil ex militer : surat-surat tanggal 28 Januari 1952 - 14 Juni 1958 tentang permohonan penetapan status dan hak pensiun. | tembusan | 1 sampul |
| 1792 | Kepala Jawatan Reserse Pusat kepada Dewan Menteri: surat tanggal 6 Pebruari 1952 tentang pembentukan intelligence dan security, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1793 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Pebruari 1952 - 5 Maret 1958 tentang permohonan pemeriksaan/penyelidikan atas beberapa peristiwa kejahatan. | asli | 1 sampul |
| 1794 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri dan PMRI: surat-surat tanggal 9 Pebruari, 29 April 1952 tentang penutupan terhadap Surat Kabar Harian Tiongkok 'Seng Hwo Pao' dan larangan terhadap buku 'De Scheuring van het Rijk, Het Drama van de Indonesische Crisis, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1795 | Ir. Soekarno (Palsu) kepada Kepala-kepala Jawatan: Surat Perintah tanggal 9 Pebruari 1952 tentang penggeledahan jawatan-jawatan. NB: tulis tangan. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|---------------|----------|
| 1796 | Mendagri kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 16 Pebruari 1952 tentang menyerahnya Presiden RMS Manuhuttu dan kawan-kawannya, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1797 | Kepala Daerah Bali kepada Presiden RI: surat tanggal 19 Pebruari 1952 tentang hasil pertemuan singkat 13 ex pejuang Bali mengenai sekitar keamanan, dengan lampiran. | salinan | 5 lembar |
| 1798 | Kementerian Pertahanan: Surat Keputusan No. H/M.P/139/52 tanggal 20 Pebruari 1952 tentang perkara-perkara yang dijalankan oleh dan dibawah bekas Gubernur Militer Jawa Timur diserahkan pada Kejaksaan Agung, disertai pengantar. | salinan | 2 lembar |
| 1799 | Gabungan Buruh Pelabuhan Semarang kepada Menteri Perburuhan: surat tanggal 22 Pebruari 1952 tentang permohonan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pegawai kantor Pengawasan Perburuhan Semarang yang merugikan buruh. | turunan | 1 lembar |
| 1800 | Mendagri: surat tanggal 25 Pebruari 1952 tentang pemogokan 500 orang guru sekolah di Kab. Madiun, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1801 | Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepolisian: surat-surat tanggal 27 Pebruari 1952 - 17 Agustus 1957 tentang pembebasan tawanan. | asli, salinan | 1 sampul |
| 1802 | Kepala Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 28 Pebruari 1952 tentang Peraturan Pemerintah 1952 mengenai staf keamanan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1803 | Kempen: surat tanggal 17 Maret 1952 tentang komentar radio Moskow mengenai persetujuan antara Subardjo dan Amerika Serikat melenyapkan kemerdekaan Indonesia, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1804 | Kementerian Dalam Negeri: laporan politik 23 Maret 1952 tentang situasi politik di daerah Kabupaten Majalengka, tanggal 23 Maret 1952, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |
| 1805 | Menteri PP & K: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 24 Maret 1952-28 Pebruari 1957 tentang larangan terhadap penggunaan terbitan-terbitan berbahasa Cina dan mengajar di sekolah-sekolah Cina, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 1806 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 26 Maret 1952, 1953 tentang kegiatan orang-orang Cina di Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1807 | Sekjen Kementerian Pertahanan kepada Menteri Pertahanan: Nota Dinas tanggal 29 Maret 1952 tentang kesulitan dalam pengiriman Delegasi Konferens Hydrografie. | tembusan | 1 lembar |
| 1808 | Kabinet Presiden RI: proses verbal tanggal 31 Maret, 25 Nopember 1952 tentang timbang terima komando tentara TT II dan timbang terima Kepala Staf Angkatan Laut. | asli | 2 lembar |
| 1809 | Kepala kepolisian Negara : surat tanggal 2 April 1952 tentang permohonan jaminan dan bantuan bekas Inspektur Polisi Kelas I, R. Saleh Natadikusumah, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1810 | Kejaksanaan Agung kepada Kepala Jawatan Imigrasi: Surat tanggal 16 April 1952 tentang konperensi perdamaian untuk Asia Pasifik. | tembusan | 1 lembar |
| 1811 | Kabinet Presiden kepada Ketua Dewan Keuangan di Bogor: surat tanggal 19 April 1952 tentang pencurian tablet-tablet Sulfadiazine dari gudang Pharmasi Jawatan Kesehatan Surabaya, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 1812 | Ormas, Orpol: resolusi-resolusi tanggal 7 Mei 1952-7 Oktober 1957 tentang masalah Angkatan Perang RI. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1813 | Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 27 Mei 1952 tentang kepergian Kepala Staf Angkatan Darat ke Luar Negeri. | tembusan | 1 lembar |
| 1814 | Partai Politik: pernyataan-pernyataan tanggal 28 ei 1952 - 20 Maret 1953 tentang kepergian Kepala Staf Angkatan Darat ke Luar Negeri | asli, tembusan | 4 lembar |
| 1815 | Menteri Pertahanan kepada Panitia Pusat Penerimaan Presiden Philipina: surat tanggal 12 Juni 1952 tentang penunjukan LK. A. Latief dan kapten PM Soedarto sebagai ajudan dan pengawal pribadi. | asli | 1 lembar |
| 1816 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 14 Juni 1952- 11 April 1954 tentang tuntutan agar buku sejarah karangan Frater Amater dan A. Silean dicabut dari peredarannya. | asli, tembusan | 8 lembar |
| 1817 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 8 Juli 1952 - 10 Agustus 1959 tentang tuntutan pembasmian teror DI/TII | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1818 | Tanggal 10 Juli 1952 tentang siaran kantor berita APB mengenai diri Mr. R. Tirtawinata yang dianggap sebagai propaganda, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1819 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 13 Juli 1952 - 8 Maret 1958 tentang protes hukuman mati terhadap Tikam bin Sulaiman dan Djamilah Cs, disertai pengantar. | asli, tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1820 | Organisasi massa, politik : resolusi-resolusi tanggal 20 Juli 1952 - 20 Februari 1954 tentang tuntutan segera mengambil tindakan tegas terhadap demonstran 17 Oktober 1952 (perebutan kekuasaan/coup d'etat) | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1821 | Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri: surat tanggal 12 Agustus 1952 tentang telegram yang berisi desakan penyelesaian perkara Kolonel B. Supeno, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1822 | Pimpinan Rapat Rakyat Parakan Lima sukabumi: resolusi tanggal 14 Agustus 1952 tentang desakan supaya diusahakan terbentuknya suatu badan koordinasi keamanan yang terdiri dari pamong desa, kepolisian, ketentaraan dan organisasi-organisasi rakyat, disertai pengantar. | asli | 1 lembar |
| 1823 | PNI Lampung Tengah kepada Presiden RI: mosi tanggal 17 Agustus 1952 tentang desakan kepada dewan partai PNI untuk memprotes pemerintah Belanda yang tidak tegas terhadap kejadian percobaan membunuh Overste Haryono, atase militer Indonesia di Nederland. | asli | 1 lembar |
| 1824 | Kementerian Pertahanan kepada Jaksa Agung: surat tanggal 29 Agustus 1952 tentang penyelesaian perkara Kolonel Soengkono. | tembusan | 1 lembar |
| 1825 | Menteri Luar Negeri kepada Jaksa Agung: surat tanggal 2 September 1952 tentang penghinaan Kepala Negara bersahabat. | tembusan | 1 lembar |
| 1826 | Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 12 September - 15 Nopember 1952 tentang berita paksaan agama, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1827 | DPRDS Karawang: resolusi-resolusi tanggal 23 Agustus, 23 September 1952 tentang protes terhadap isi diktat " Perjoangan Partai Organisasi Massa legal dan ilegal' yang bersifat memecah belah dan mengacaukan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1828 | Jaksa Agung pada MAI: surat tanggal 19 September 1952 tentang konperensi Commision Internationale de Police Criminele, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1829 | Kejaksanaan Agung pada Mahkamah Agung: surat tanggal 25 September 1952 tentang penahanan atas diri Prawirahardjo al Slamet , dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1830 | Staf Umum Angkatan Darat: Pengumuman No. 029/F.11.b/Kasa/SU.T/52 tanggal 25 September 1952 tentang penggantian cap/stempel Kamar Sandi Angkatan Darat, dengan lampiran. | stensilan | 1 lembar |
| 1831 | RH Koesdhiya: surat tanggal 26 September 1952 tentang tuntutan penyelesaian pertikaian antara Sultan Hamengku Buwono dan Bambang Supeno, dengan lampiran. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 1832 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia: Surat Edaran tanggal 30 Oktober 1952 tentang usaha mempercepat penyelesaian perkara kriminal. | salinan | 1 lembar |
| 1833 | Mentari PP & K: Surat Keputusan No.40439/Kab tanggal 3 Nopember 1952 tentang instruksi kepada Panitia Pengawas Film untuk lebih mencegah adanya pertunjukan film yang mendatangkan pengaruh buruk bagi keamanan di dalam negara. | salinan | 1 lembar |
| 1834 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 November 1952 - 16 Desember 1957 tentang masalah politik di Indonesia. NB: Bahasa Inggris dan Belanda. | asli | 1 sampul |
| 1835 | Kepala Staf Angkatan Darat : Surat Edaran tanggal 24 Nopember 1952 tentang sekitar peristiwa 17 Oktober 1952 yang terjadi dalam Angkatan Darat, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 1836 | KSTT 7 kepada Presiden RI: berita tanggal 24 Nopember 1952 tentang siaran pemerintah mengenai persengketaan Angkatan Perang. | asli | 1 lembar |
| 1837 | Rakyat Fatuleu kepada Mahkaman Agung Tinggi RI: surat tanggal 25 Nopember 1952 tentang propaganda H. Nisnoni, Raja Fatuleu Cs untuk merubuhkan Negara RI dan memperkaya diri dengan tekanan adat untuk memperbudak rakyat. | tembusan | 1 lembar |
| 1838 | Sardjono Suryadjaya: Ketua Barisan Pengintip Masyarakat kepada Presiden RI: Keputusan tanggal 27 Nopember 1952 tentang tuntutan pemecatan TB Simatupang, Gatot Subroto, Ali Budiarjo dan Sadikin dari Angkatan Perang. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1839 | Organisasi-organisasi Islam kepada Presiden RI: Surat-surat pernyataan tanggal 30 November 1952 - 17 Agustus 1956 tentang tuntutan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap PKI karena membuat berita yang menghasut dan menghina agama Islam. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1840 | KSTT 7 Letkol JF Warrow kepada Presiden : berita tanggal 1 Desember 1952 tentang pengoperan pimpinan TT II. | asli | 1 lembar |
| 1841 | Ketua panitia pengawas film: surat tanggal 5 Desember 1951 tentang pengawasan terhadap film-film Amerika, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1842 | Ormas: surat-surat pernyataan tanggal 11 Desember 1952, 2....Mei 1957 tentang penetapan Panglima Territorium VI Wirabuwana. | asli | 2 lembar |
| 1843 | Perorangan: surat tanggal 11 Desember 1952 tentang usul agar Komodor Udara R. Suryadarma dipilih menjadi KSAD. | asli | 1 lembar |
| 1844 | Perorangan: surat tanggal 15 Desember 1952 tentang usul agar Bung Tomp, Bung Tardjo dan Supriyadi duduk dalam Angkatan Perang. | asli | 1 lembar |
| 1845 | Organisasi massa: pernyataan tanggal 16 Desember 1952 - 5 April 1954 tentang desakan pada pemerintah untuk mengadakan pembalasan terhadap pemerintah Belanda yang telah mengusir Aidit dan Nyoto serta penangkapan Go bin Tjwin. | tembusan | 1 sampul |
| 1846 | Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada PMRI: surat tanggal 20 Desember 1952 tentang tuntutan sikap tegas terhadap kegiatan politik yang dilakukan bangsa asing. | asli | 1 lembar |
| 1847 | Menteri Pertahanan kepada Pj/p.d KSAD: surat tanggal 22 Desember 1952 tentang tugas istimewa p.d KSAD untuk mengembalikan keutuhan Angkatan Darat, disertai lembar pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 1848 | Kabinet PM kepada Presiden RI: memorandum tanggal 30 Desember 1952 tentang kemungkinan penggantian misi militer Belanda disertai surat. | salinan | 2 lembar |
| 1849 | Persatuan Guru Kristen Indonesia Pematang Siantar kepada Parkindo: kawat, tanpa tanggal 1953 tentang pengungsian orang Kristen di Sulawesi Selatan. | rekaman | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1850 | Kementerian Pertahanan: surat tanggal Januari 1953 tentang pemberian kuasa kepada pengacara negara Mr. Ishaq Tjokrosuryo untuk menyelesaikan perkara dengan Jap Tjoei Nio, Cs. Dengan surat pengantar | salinan | 2 lembar |
| 1851 | Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 3 januari 1953 tentang permohonan pertolongan mencarikan Oemar Djoni, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1852 | Kejaksaan Agung kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 6 Januari, Juli 1953 tentang China Demokratie League dan Perkumpulan Shaw Nien Erh T'ung Tui, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1853 | Musyawahar Besar Alim Ulama se-Sumut : Keputusan-Keputusan tanggal 15 - 18 Januari 1953 tentang rencana pembangunan Islam, organisasi ulama, pembela Islam terhadap atheisme dan uchuwah Islamiyah. | asli | 2 lembar |
| 1854 | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 24 Januari 1953 tentang pernyataan DPP PERBUM Wonokromo terhadap pemboikotan kelasi-kelasi kapal tangker 'M. S Nassau, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1855 | Kabinet Perdana Menteri kepada RI: surat tanggal 26 Januari 1953 tentang Misi Militer Belanda, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1856 | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Keuangan: surat tanggal 26 Januari 1953 tentang pemberitahuan bahwa tidak ada pegawai negeri sipil yang meninggal akibat gerombolan pengacau, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1857 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 31 Januari - 5 Oktober 1953 tentang perusakan tempat-tempat ibadah, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1858 | Organisasi massa kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan, tanggal 13 Pebruari 1953 - 4 Mei 1958 tentang tuntutan pengesahan dan pelaksanaan UU Veteran. | asli | 1 sampul |
| 1859 | Organisasi massa kepada Kedubes Amerika di Jakarta: pernyataan-pernyataan tanggal 15 Pebruari - 17 Juli 1953 tentang protes terhadap pemerintah Amerika melalui presiden RI atas dilakukannya hukuman mati terhadap ahli atom Rosenberg dan istri. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1860 | Kejaksaan Agung kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 18 Pebruari 1953 tentang keributan dan serangan yang dilakukan oleh petani-petani Cina Tionghoa di Bindjei, dengan lampiran. | tembusan | 6 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1861 | Organisasi-organisasi pelajar dan wartawan: resolusi-resolusi tanggal 24 Pebruari - 24 Juli 1953 tentang kebocoran bahan-bahan ujian. | asli | 4 lembar |
| 1862 | Ormas. Perorangan: surat-surat pernyataan tanggal Pebruari 1953 - 22 Desember 1956 tentang penolakan kasasi terhadap beberapa tokoh masyarakat. | asli | 1 sampul |
| 1863 | KDH Prop. Sumteng: nota, tanggal 12 Maret 1953 tentang Peristiwa 17 Oktober di Pagaruyung, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 1864 | Organisasi massa politik: resolusi-resolusi tanggal 2 Maret 1953 - 14 Maret 1959 tentang tuntutan pembasmian NICA dan penghianat bangsa yang anti RI, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1865 | R. Moch. Oemargatab, Pembantu Komisaris Besar Polisi: surat tanggal 25 April 1953 tentang sekitar kekacauan amanuhan/amanatun, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1866 | R. Soeprapto, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada kepala polisi Prop. Sumsel: surat tanggal 5 Mei 1953 tentang usul pengeluaran dari Indonesia agitator-agitator dan redaktur-redaktur Harian Buruh Tionghoa ' <i>Kung Sheng</i> ' di Biliton. | tembusan | 1 lembar |
| 1867 | M.F. J Pieters: surat tanggal 25 Mei 1953 tentang barang-barangnya yang hilang di kapal, sewaktu dalam perjalanan ke Manokwari, dengan lampiran. NB: dalam bahasa Belanda. | salinan | 2 lembar |
| 1868 | Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung: berita acara, tanggal 11 Juni 1953 tentang kesaksian Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dalam peristiwa 17 Oktober 1952. | konsep | 1 sampul |
| 1869 | Organisasi-organisasi Islam: resolusi-resolusi tanggal 17 Juni - 27 September 1953 tentang protes terhadap SE Jaksa Agung no. 9/PKL/C4/1632 mengenai larangan berpidato dan membicarakan politik di dalam mesjid dan gereja , dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1870 | Pemuda Rakyat Sumut kepada Kepala DPKN: surat tanggal 19 Juni 1953 tentang protes atas tindakan peringatan tegoran Pihak DPKN, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1871 | DPC Pemuda Rakyat Balikpapan kepada NV de BPM: surat tanggal 2 Juli 1953 tentang protes terhadap pemungutan sokongan dengan collecte-bus di gedung bioscop Balikpapan. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1872 | Pengurus Masyarakat Mahasiswa Bogor kepada Brenawan Roesnipoetro: surat tanggal 8 Juli 1953 tentang adanya artikel yang tidak benar yang menyangkut Widowati Roesnipoetro dalam harian pedoman, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1873 | Jaksa Agung pada MA: surat tanggal 24 Juli 1953 tentang perkara Slamet Ginting sebagai pelaku kejahatan, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1874 | Soekirno-Bendan, Pembantu Keamanan Pekalongan: laporan istimewa tanggal 31 Juli 1953 tentang batalyon sukarela. | asli | 1 lembar |
| 1875 | Organisasi-organisasi mahasiswa dan pelajar: resolusi-resolusi tanggal 5 Agustus 1953-8 Pebruari 1954 tentang tuntutan pembebasan 42 orang mahasiswa yang tersangkut dalam peristiwa ' <i>de vri je pers</i> ', dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 1876 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 11 Agustus 1953-7 Pebruari 1954 tentang pernyataan tidak setuju dibentuknya batalyon sukarela. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 1877 | DPC PERBUM Langkat: surat tanggal 19 Agustus 1953 tentang protes terhadap larangan membawa slogan anti DI-TII. | asli | 1 lembar |
| 1878 | Pemuda Demokrat Indonesia Cab. Pasuruan: mosi tanggal 6 September 1953 tentang tuntutan supaya diadakan pencabutan terhadap pidato tertulis yang dimuat dalam majalah 'penyuluh' Jawatan Penerangan RI Kab. Pasuruan tanggal 15 Agustus 1953 No. 9 tahun IV, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 1879 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 10 September 1953 tentang protes terhadap alat-alat Pemerintah yang dapat diperalat untuk kepentingan pribadi. | asli | 1 lembar |
| 1880 | Organisasi massa: pernyataan-pernyataan tanggal 17 September 1953-6 Januari 1955 tentang tuntutan penyelesaian Peristiwa Madiun 1948 (pemberontakan PKI). | asli | 1 sampul |
| 1881 | Komandan Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia: Statement Pemerintah NII No. VI/7 B September 1953 tentang sambutan atas permakluman perang resmi dari RI (komunis) kepada NII, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 1882 | KPRI kepada Kepala Direktorat Penerangan Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 26 September 1953 tentang kebenaran berita yang dimuat dalam majalah 'Paris Match' tanggal 15 Agustus mengenai interview Presiden dengan wartawan Perancis, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 1883 | Organisasi massa: pernyataan-pernyataan tanggal 2 Oktober 1953-5 Oktober 1957 tentang ucapan selamat ulang tahun APRI. | asli | 1 sampul |
| 1884 | Pemuda Rakyat Jatim: surat-surat pernyataan tanggal 3 Oktober - 15 November 1953 tentang desakan kepada pemerintah untuk segera mengembalikan gedung Menteng 31 Jakarta ke tangan pemuda. | asli | 5 lembar |
| 1885 | Kepala-kepala polisi propinsi seluruh Indonesia dan Kepala Bagian Jawatan Kepolisian Negara: surat pernyataan tanggal 31 Oktober 1953 tentang desakan untuk mempertahankan status Kepolisian Negara langsung di bawah Perdana Menteri sampai terciptanya UU Pokok Kepolisian Negara. | tembusan | 1 lembar |
| 1886 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 12 Nopember 1953-29 Agustus 1959 tentang tuntutan dicabutnya larangan rapat dan politik. | asli | 1 sampul |
| 1887 | SOBSI Cab. Langkat Hilir/Teluk Haru kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pura: surat pernyataan tanggal 13 Nopember 1953 tentang protes terhadap tindakan Ass. Wedana Secanggih, Murad Al Fuad Masyumi yang menjalankan tindakan beleid gab. Hakim yang sudah dibekukan. | salinan | 1 lembar |
| 1888 | Mendagri, Jaksa Agung: surat-surat tanggal 22 Mei, 14 Nopember 1953 tentang rencana pembunuhan terhadap kepala negara. | tembusan | 1 lembar |
| 1889 | Keluarga Pelajar Sumatera Utara Yogyakarta: statement tanggal 15 Nopember 1953 tentang desakan kepada pemerintah agar menjalankan tindakan-tindakan yang lebih bijaksana terhadap daerah Sumatera Utara. | asli | 1 lembar |
| 1890 | Pimpinan Redaksi Harian "Pedoman Rakyat" kepada Panglima TT VII Makassar: surat tanggal 1 Desember 1953 tentang tekanan ko TT VII terhadap pers. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|---------------|----------|
| 1891 | Para demonstran di Soe Prop. Sunda Kecil: statement tanggal 8 Desember 1953 tentang sokongan terhadap statement tanggal 26 Nopember 1953 di Kupang yang sesungguhnya tidak menyimpang dari suatu tindakan secara yuridis. | asli | 1 lembar |
| 1892 | Tentara kemerdekaan Rakyat/Paeyat Kompas Latimodjong: Pengumuman tanggal 17 Desember 1953 tentang pembatalan perundingan antara TKR dengan Overste Chandra Hasan. | salinan, asli | 2 lembar |
| 1893 | Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung Indonesia: surat tanggal 4 Januari 1954, tentang tuntutan terhadap S. Parera, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 1894 | Menteri Keuangan: Surat Edaran tanggal 9 Januari 1954 tentang kerugian yang diderita negara karena penggelapan atau perbuatan lain, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 1895 | DKP kepada Kem.DN: surat tanggal 11 Januari 1954 tentang permohonan pelaksanaan putusan Pemerintah mengenai nasib prajurit Keraton Surakarta, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1896 | Kepala Rumah Tanggal Presiden RI: kepada Perdana Menteri RI: surat tanggal 12 Januari 1954 tentang konsep keputusan PM dan Menteri Pertahanan mengenai penjagaan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Polisi Militer dan Polisi Negara, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1897 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 15 Januari -16 Agustus 1954 tentang protes atas tindakan teror kaum demonstran BKOI (Badan Koordinasi Organisasi Islam) yang telah membunuh Mayor Supartawijaya. | asli | 1 sampul |
| 1898 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Januari 1954 - 6 November 1956 tentang Peristiwa AURI. | tembusan | 1 sampul |
| 1899 | PNI Cabang Surabaya: surat pernyataan tanggal 22 Januari 1954 tentang desakan kepada pemerintah supaya mengambil tindakan yang tegas terhadap orang-orang asing yang berbahaya dengan pasal 5, UU Darurat No.9/1953 mengenai pengawasan orang asing. | stensilan | 1 lembar |
| 1900 | Kepala Staf Angkatan Udara kepada semua menteri: surat terbuka tanggal 27 Januari 1954 tentang pemberitahuan agar surat menyurat AURI hanya dilakukan oleh KSAU RI. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1901 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 2 Pebruari 1954 - 28 Maret 1955 tentang tuntutan pembebasan DN Aidit. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 1902 | DPRDS Jawa Timur: mosi tanggal 16, 27 Pebruari 1954 tentang sokongan terhadap mosi DPRDS Kabupaten Bekasi mengenai peraturan penahanan. | asli | 2 lembar |
| 1903 | Mr. Soedarmo kepada pengurus U.P.I Gandaatmaja: surat 17 Maret 1954 tentang pelanggaran hak pengarang, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 1904 | Menteri Pertahanan: surat tanggal 20 Maret 1954 tentang permohonan untuk membentuk "Pasukan Pembela Keadilan" berstatus tentara. | asli | 1 lembar |
| 1905 | Organisasi politik: resolusi-resolusi tanggal 30 Maret - 16 Oktober 1954 tentang tuntutan pemberantasan segala macam judi. | asli, tembusan | 8 lembar |
| 1906 | Kementerian Pertahanan: surat tanggal 10 April 1954 tentang simbol bendera jabatan AD dan pemberian bintang kemerdekaan tertinggi dari luar negeri kepada Presiden RI, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1907 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 17 April 1954 - 27 April 1959 tentang tuntutan hukuman mati terhadap H.C.J.G. Schmidt bekas kapten KNIL. | asi, tembusan | 1 sampul |
| 1908 | Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 25 April 1954 tentang tuntutan Beder Cs. Terhadap SVPM berhubung dengan kerusuhan padi, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1909 | Ajudan Presiden: nota tanggal 29 Mei 1954 tentang telegram, warta dan laporan mengenai Prof. Mr. RH Kasman Singodimedjo sewaktu mengadakan pidato dalam Rapat Raksasa pada tanggal 20 Mei 1954 di Ambon (Maluku), dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1910 | Perwakilan RMS di Rotterdam kepada Soekarno: surat tanggal 31 Mei 1954 tentang telegram Manusama sebagai Menteri Pertahanan RMS kepada Mr. Casey Menteri Luar Negeri Australia mengenai bahaya Komunis. NB: B. Inggris. | asli | 1 lembar |
| 1911 | DKP kepada Mendagri: surat tanggal 9 Juni 1954 tentang keadaan Pemerintah di Maumere, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 1912 | Menlu: surat tanggal 9 Juni 1954 tentang kegiatan politik Ir. Manusama, dengan lampiran. NB: lampiran dalam B. Belanda | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 1913 | Koesno kepada Mahkamah Agung: surat tanggal 19 Juni 1954 tentang permohonan penyitaan kembali barang-barang milik Kabupaten Pasuruan, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1914 | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 20 Juli 1954 - 11 September 1955 tentang pemulihan keamanan dalam menghadapi pemilu. | asli | 1 sampul |
| 1915 | DPRDS Maluku Tengah: resolusi tanggal 31 Juli 1954 tentang penyesalan terhadap keterangan gubernur Maluku di luar negeri yang dapat merugikan pemerintah. | stensilan | 1 lembar |
| 1916 | Federasi of Malaya kepada Sekretaris Keuangan Pemerintah RI: surat tanggal 1 Agustus 1954 tentang kegiatan penghianatan yang bermaksud mengalirkan uang Republik dengan memindahkan secara rahasia kekayaan dari Indoneisa. NB: B. Inggris. | tembusan | 1 lembar |
| 1917 | Ormas: pernyataan-pernyataan tanggal 15 Agustus 1954 - 2 September 1956 tentang kongres keamanan rakyat. | asli | 4 lembar |
| 1918 | Organisasi massa Cab. Kendal kepada Menteri Pertanian resolusi tanggal 12 September 1954 tentang desakan kepada pemerintah supaya mengadakan perundingan untuk menjaga keretakan antara kaum tani dengan pegawai-pegawai kehutanan. | tembusan | 1 lembar |
| 1919 | Ormas, perorangan: statement-statement tanggal 1 September, 18 Oktober 1954 tentang pengusiran Tjong Hoe Nji, pemimpin Kuomintang, dengan lampiran. NB: lampiran kurang baik keadaannya. | asli | 4 lembar |
| 1920 | Delegasi Indonesia di New York kepada Presiden RI telegram tanggal 24 September - 11 Desember 1954 tentang masalah Irian Barat. NB: ada B. Inggris | asli | 5 lembar |
| 1921 | Kepala Staf Angkatan Darat kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 24 September 1954 tentang pengosongan Wilhelmina Park. NB: lampiran hilang | tembusan | 1 lembar |
| 1922 | Persatuan Bangsa Indonesia di New York: surat tanggal 1 Oktober 1954 tentang sikap kecewa atas tindakan Hasan Moh. Tiro, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1923 | Organisasi massa di Sulut kepada Presiden RI: telegram tanggal 8 Oktober 1954 - 21 Agustus 1956 tentang dukungan terhadap putusan Panglima TT VI J. E Warouw. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1924 | R.B.R. Heru CH Kusumowardono kepada Direktur Kehakiman MBAD: surat tanggal 11 Oktober 1954 tentang permohonan peninjauan kembali status kepangkatannya dalam AD, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1925 | Wedana/Kepala Bagian Pemerintah Umum Kota Padang kepada DPRDS Kota Padang: surat pernyataan tanggal 15 Oktober 1954 tentang pengusiran kaum tani dan rakyat di Alai. | tembusan | 1 sampul |
| 1926 | R. S. Prawirosaputro kepada PMRI: surat tanggal 19 Oktober 1954 tentang pernyataan sanggup membawa Kartosuwiryo Panglima Tertinggi Di/TII dihadapan PMRI. | tembusan | 1 lembar |
| 1927 | Staf Umum Angkatan Darat kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 4 Nopember 1954 tentang pembaharuan kartu legalisasi tanda tangan, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1928 | Corps Cadangan Tentara Nasional Terr II/SS Lampung kepada Ketua Dewan Menteri: surat tanggal 12 Nopember 1954 tentang masalah pengembalian CTN Terr II/SS Lampung - Selatan ke dalam masyarakat. | tembusan | 2 lembar |
| 1929 | Kabinet PM kepada Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 25 Nopember 1954 - 24 Oktober 1956 tentang gerakan RMS. | asli | 1 sampul |
| 1930 | Michel Gonero kepada Presiden RI: telegram tanggal 29 Nopember 1954 tentang masalah justise extraordinary. | asli | 1 lembar |
| 1931 | Masyumi Cab. Sumbawa: surat pernyataan tanggal 4 Desember 1954 tentang penyelesaian tuntutan sawah adat di daerah swapraja Sumbawa. | asli | 1 lembar |
| 1932 | Tentara India/Pakistan di Indonesia : surat tanggal 7 Desember 1954 tentang kesediaan bergabung dengan Bangsa/Orang Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, dengan lampiran. NB: B. Inggris. | asli | 1 sampul |
| 1933 | Seseorang di Bombay: surat kaleng tanggal 15 Desember 1954 tentang kabar adanya penyuapan dalam pengurusan visum ke Indonesia. | asli | 1 lembar |
| 1934 | DPRDS Kabupaten Cianjur: mosi tanggal 22 Desember 1954 tentang desakan kepada Pemerintah supaya segera mengganti peraturan penahanan. | asli | 1 lembar |
| 1935 | Konperensi Gerakan PII Cab. Banyuwangi: surat pernyataan tanggal 25 Desember 1954 tentang tuntutan terhadap oknum penghina Agama Islam, Kabinet Ali Sastroamidjojo, Pemerintah Gamal Abd. Naser. | asli | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 1936 | Dewan Keamanan Nasional: surat tanggal 28 Desember 1954 tentang konferensi keamanan seluruh Indonesia, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1937 | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 3 Januari 1955 - 1 Mei 1958 tentang sikap terhadap latihan perang-perangan SEATO. | asli | 5 lembar |
| 1938 | Persatuan-persatuan Pegawai Polisi RI: surat-surat pernyataan tanggal 4 Januari - 12 Maret 1955 tentang akibat pernyataan Gubernur Sumut, Mr. S.M. Amin yang dimuat dalam 'Patriot' tanggal 17, 31 Desember 1954 yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, dengan lampiran. | asli | 5 lembar |
| 1939 | Menteri Kesejahteraan Negara: Surat Keputusan No. U.P.3/5 tanggal 12 Januari 1955 tentang pembentukan suatu panitia yang bertugas mempelajari masalah korupsi dan mengusahakan suatu konsepsi mengenai RUU untuk memberantas korupsi. | salinan | 1 lembar |
| 1940 | Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Jatibarang: statement tanggal 15 Januari 1955 tentang karikatur yang dimuat dalam Surat Kabar 'Indonesia Raya' tanggal 31 Desember 1954 tahun VI. | asli | 1 lembar |
| 1941 | gerakan Pemuda Ansor anak cabang Jatibarang: statement tanggal 15 Januari 1955 tentang karikatur yang dimuat dalam Surat Kabar 'Indonesia Raya' tanggal 31 Desember 1954 tahun VI. | tembusan | 2 lembar |
| 1942 | Perorangan: surat-surat tanggal 20 Januari 1955-23 Oktober 1957 tentang saran-saran dan usul untuk memperbaiki situasi Pemerintahan. | asli | 1 sampul |
| 1943 | DPRDS Kabupaten Lampung Selatan: Pengumuman No. 2/1955 tanggal 25 Januari 1955 tentang ketegangan & pertentangan antara Bupati dengan Residen Lampung. | stensilan | 1 lembar |
| 1944 | Panitia Perumus Definisi " Angkatan 45" kepada Presiden: selebaran tanggal 27 Januari 1955 tentang definisi " Angkatan 45". | stensilan | 2 lembar |
| 1945 | A.S. Hasan: surat tanggal 6 Pebruari 1955 tentang perselisihan Onderneming Kebun Kopi Padang Karit. | asli | 1 lembar |
| 1946 | Panitia Rapat Umum Masyumi anak cabang Malingping : resolusi tanggal 9 Pebruari 1955 tentang desakan kepada pemerintah supaya UUD Sementara NRI pasal 18 segera diberi tafsiran dan perumusan yang jelas dan mengambil tindakan tegas terhadap pengacau-pengacau agama. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1947 | BTI Tegal: resolusi tanggal 13 Pebruari 1955 tentang peristiwa terbongkarnya senjata dan mesiu gelap dalam Kapal Amerika 'Steel Vendor' di Pelabuhan Tanjung Priok. | asli | 1 lembar |
| 1948 | Sidang Pleno Majelis Syuro Wal Fatwa Se-Sumatera Tengah: surat pernyataan, tanggal 23 Pebruari 1955 tentang beredarnya Al Qur'an palsu atau salah cetak, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1949 | Kabinet Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 5 Maret 1955-31 Maret 1958 tentang ajakan kepada negara-negara lain untuk melaksanakan perdamaian dunia. | asli, tembusan | 6 lembar |
| 1950 | Tjiong Lio Kae: surat tanggal 8 Maret 1955 tentang permohonan penutupan tempat bermain di Distrik Waleri Kendal. | asli | 1 lembar |
| 1951 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 8 Maret 1955 tentang ramalan/proyeksi perang dunia ke-III, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1952 | SPA Kare: surat tanggal 13 Maret 1955 tentang penahanan surat-surat keluhannya kepada Presiden RI oleh pembantu Inspeksi Polisi wilayah TTS (SA Manafe). | asli | 1 lembar |
| 1953 | DPDS Kabupaten Solok kepada Presiden RI: laporan tanggal 19 Maret 1955 tentang peninjauan bahaya banjir, dengan surat pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 1954 | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 5 -7 April 1955 tentang kekejaman tentara Belanda. | asli | 3 lembar |
| 1955 | Perorangan kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 5 April 1955, 26 November 1956 tentang tuntutan pembasmian imperialisme. | asli | 3 lembar |
| 1956 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 25 April 1955-1 Mei 1957 tentang permohonan perbaikan nama baik. | asli | 5 lembar |
| 1957 | Kabinet Presiden kepada Menteri Luar Negeri: surat tanggal 27 April 1955 tentang kawat sdr. Saiful Islam Mohamad bin Amrul Mukminin mengenai adanya pemberontakan di Hedjah, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 1958 | DPP Corps Demobilisan Lambung Mangkurat kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 4 Mei 1955 tentang ketentuan status formeel "C.D. Lambung Mangkurat", dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1959 | Ormas : surat-surat pernyataan tanggal 16 Mei, 19 Juni 1955 tentang peristiwa Hospitality Committee di Bandung selama Konferensi Asia Afrika. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 1960 | B. Hutauruk: Surat tanggal 17 Mei 1955 tentang permohonan penjelasan PP 32/49 terhadap bekas pejuang yang dimobiliseer dari kesatuan masing-masing, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 1961 | Konperensi Besar Ke-I Ex. Corps Pelajar: resolusi tanggal 28 Mei 1955 tentang desakan kepada pemerintah agar segera mengadakan UU yang memberi jaminan hukum bagi para demobilisan dalam pertahanan negara. | asli | 1 lembar |
| 1962 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Juni, 24 November 1955 tentang rakyat Maluku Selatan yang berada di Netherland. | tembusan | 2 lembar |
| 1963 | Mabes Angkatan Darat: surat tanggal 13 Juni 1955 tentang pameran Jawatan Topografi Angkatan Darat. | asli | 1 lembar |
| 1964 | Habib Muda Seunagan Djeuran Aceh Barat: surat tanggal 14 Juni 1955 tentang permohonan peminjaman senjata api guna membasmi gerombolan di Aceh Barat. | asli | 1 lembar |
| 1965 | Kepala Kepolisian Negara: Surat Keputusan tanggal 30 Juni 1955 tentang penggunaan dan pemeliharaan panji-panji Kepolisian Negara serta upacaranya. | salinan | 2 lembar |
| 1966 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 1 Juli 1955-3 Juli 1958 tentang dukungan terhadap program Panca Karya Kabinet Juanda dalam menumpas pemberontakan. | asli, tembusan | 2 sampul |
| 1967 | Komandan Batalyon Inf. 513 kepada Presiden RI: surat tanggal 10 Juli 1955 tentang daftar nama-nama anggota Bn. 513 yang memenuhi syarat untuk menerima "Medali sewindu", dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1968 | Perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 14 - 18 Juli 1955 tentang dukungan terhadap pengangkatan terhadap Majoor Jendral Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. | asli | 1 lembar |
| 1969 | Himpunan Abiturian Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan Cab. Makassar kepada Menteri Sosial: surat tanggal 15 Juli 1955 tentang pelanggaran kehormatan oleh R. Z. Fanani, Kepala Jawatan Bimbingan/Perbaikan Sosial kepada mona Soedhijanti, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1970 | Sekretaris Dewan Menteri: Pengumuman tanggal 22 Juli 1955 tentang masalah Angkatan Darat. | stensilan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 1971 | Persatuan Rakyat Cendrawasih Ternate Maluku Utara: mosi tanggal 4 Agustus 1955 tentang sikap atas sengketa alam Papua oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 1972 | Ikatan Penderita Cacat Indonesia: surat tanggal 29 Agustus 1955 tentang keputusan-keputusan sidang 'Council World Veterans Federation' di Kopenhagen tanggal 7-8 Juli 1955, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1973 | Kepala polisi Prop. Jatim kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta: surat-surat tanggal 29 Agustus - 1 November 1955 tentang penangkapan Soemadji, agen polisi kelas I dari Kepolisian Karesidenan Madiun karena sakit jiwa, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 1974 | Ikatan Perwira RI kepada wakil KSAD: nota tanggal 17 September 1955 tentang advise dalam persoalan AD umumnya, dengan lampiran. | tindakan | 3 lembar |
| 1975 | Masyumi Sumatera Tengah kepada PMRI: surat pernyataan tanggal 21 September 1955 tentang sikap konsul jenderal RI di Singapura Mr. Herman Kartawisastra yang bertentangan dengan kesopanan timur dan agama. | tembusan | 1 lembar |
| 1976 | Wakil KSAD: Surat Keputusan No. 1 tanggal 27 September 1955 tentang usaha pemulihan keamanan berhubung dengan adanya pemilu, disertai surat pengantar dan penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 1977 | Residen Lampung kepada Gubernur Propinsi Sumatera Selatan: surat tanggal 1 Oktober 1955 tentang penampungan eks anggota pejuang lokal Kabupaten Lampung Selatan yang tergabung dalam organisasi, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1978 | Kabinet Presiden: surat pemberitahuan tanggal 4 Oktober 1955 tentang larangan beredar majalah-majalah/koran luar negeri. | pertinggal | 1 lembar |
| 1979 | Kongres Rakyat Seluruh Indonesia: laporan, tanggal 5 Oktober 1955 tentang Peristiwa 25 September 1955 yaitu mengenai larangan rapat raksasa. | stensilan | 1 sampul |
| 1980 | Mas Poeradiredja: surat tanggal 10 November 1955 tentang situasi keamanan di Purwakarta. | asli | 1 lembar |
| 1981 | DKP kepada Gubernur Jawa Tengah: telegram, tanggal 21 November 1955 tentang kabar keadaan badan Dr. Muwardi, dengan lampiran, NB: arsip robek. | konsep | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 1982 | Menteri Dalam Negeri kepada semua gubernur KDH: surat Pemberitahuan, tembusan tanggal 25 Nopember 1955 tentang tulisan-tulisan yang tidak benar dalam surat kabar mengenai Kementerian Dalam Negeri. | | 1 lembar |
| 1983 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 November 1955, 1 Januari 1957 tentang permohonan agar Presiden Soekarno mengambil tindakan yang tegas terhadap pemberontak negara, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 1984 | M.A. Soetarno. Comm. Indonesia Students Asscociation Surabaya: surat tanggal 29 November 1955 tentang adanya diskriminasi dalam pembentukan kader-kader bangsa. | asli | 1 lembar |
| 1985 | Pimpinan Rapat Kerja Sama SB Pemerintah di Jogjakarta: surat tanggal 5 Desember 1955 tentang peristiwa di Kementerian Penerangan, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 1986 | Rakyat Desa Sidamukti kepada kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Serang: surat tanggal 6 Desember 1955 tentang sikap terhadap putusan hakim terhadap Kepala Desa Aswira Al. Arot bin Kusen yang menyimpan senjata api FN. | | 1 lembar |
| 1987 | Partai/ormas/SB di Poso: surat pernyataan tanggal 28 Desember 1955 tentang sikap terhadap penyelesaian peristiwa Wuysang dengan Pemda Poso (pengeluaran dari rumah secara paksa), dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1988 | Persatuan Pegawai Polisi RI daerah Banyumas kepada Kepala Polisi Karesidenan Banyumas: surat pernyataan tanggal 30 Desember 1955 tentang sikap terhadap status sementara bagi warga kepolisian Karesidenan Banyumas khususnya. | tembusan | 1 lembar |
| 1989 | M. Ng. Soedarmadi: laporan tanpa tanggl 1956 tentang perilaku Pak Sadrina pada masa pendudukan Belanda terhadap gerakan bawah tanah di daerah sekitar Situbondo yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI dan para republiken, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1990 | Personil Ex Tentara kepada Menteri Pertahanan: surat-surat tanggal 2 Januari-28 Nopember 1956 tentang permohonan diaktifkan kembali menjadi tentara, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 1991 | Ormas kepada Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 13 Januari 1956- 24 Juni 1957 tentang dukungan dan penolakan terhadap pengangkatan dan mutasi pejabat militer. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 1992 | A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat: surat tanggal 25 Januari 1956 tentang ere-appel (sebelum upacara) dan rapat-rapat di Jogjakarta, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 1993 | E. Marantika kepada jaksa Agung: surat tanggal 26 Januari 1956 tentang sangkalan dari Kemlu Belanda yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan Pemerintah Belanda dengan Westerling, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 1994 | Kepala Staf Angkatan Udara kepada Kementerian Pertahanan: surat tanggal 1 Pebruari 1956 tentang perbaikan Kapal Udara HT-2, dengan lampiran. NB: sebagian lampiran dalam B. Inggris. | tembusan | 4 lembar |
| 1995 | Rakyat kepada Presiden RI: surat tanggal 3 Pebruari 1956 tentang tanggapan mengenai unie-statement. | asli | 1 lembar |
| 1996 | Kabinet Presiden: surat-surat pernyataan tanggal 7 Pebruari-10 Maret 1956 tentang protes atas sikap Pemerintah Austria yang melarang WFTY bermarkas di Austria Wiena. | asli, tembusan | 4 lembar |
| 1997 | PMRI: Pengumuman Pemerintah tanggal 18 Pebruari 1956 tentang pengibaran bendera kebangsaan sehubungan dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pembubaran persetujuan KMB. | stensilan | 1 lembar |
| 1998 | Sekretaris Ex. Cie. CTN 411 (Corps Tentara Nasional): surat tanggal 18 Pebruari 1956 tentang perkembangan dan kemerosotan usaha CTN. | asli | 1 lembar |
| 1999 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 2 Maret 1956-7 Maret 1957 tentang pencalonan Letkol Djamin Ginting menjadi Panglima Territorium I. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2000 | Mayor Infantri R. Sukandar kepada KSAD: surat tanggal 25 Maret 1956 tentang permohonan rehabilitasi/pengakuan ke dalam anggota APRI, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 2001 | KSAU kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 5 April 1956 tentang hal penyerahan perkara (verwijzingsrecht), dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2002 | SARBUPRI Cab. Purwokerto: surat tanggal 9 April 1956 tentang laporan tertembaknya Tamiredja, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2003 | Konperensi Dewan Cabang PERBEPBSI Ke-I Kab. Ciamis: resolusi tanggal 21 April 1956 tentang sikap terhadap UU Pertahanan Negara RI No. 29/1954. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2004 | R. Samsuri Djajadiredja: surat tanggal 5 Mei 1956 tentang permohonan ijin untuk memadamkan kekacauan DI di seluruh lapangan Islam, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2005 | Kemlu: surat tanggal 7 Juni 1956 tentang tata cara pengiriman kawat rahasia, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2006 | SOBSI Kalimantan Selatan kepada Kepala Kepolisian Banjarmasin: surat pernyataan tanggal 7 Juni 1956 tentang sikap terhadap status penjelasan sekitar organisasi UPM (Urusan Penjaga Malam). | tembusan | 1 lembar |
| 2007 | DPD Pemuda Nasional: surat tanggal 14 Juni 1956 tentang dukungan pengangkatan Overste Andi Mattalatta mejadi Panglima TT VII Wirabuana. | asli | 1 lembar |
| 2008 | Beberapa organisasi politik dan massa: resolusi-resolusi tanggal 24 Juni 1956-1 April 1958 tentang organisasi penjaga desa. | asli, tembusan | 9 lembar |
| 2009 | SARBUPRI Cab. Medan /Belawan: resolusi tanggal 2 Juli 1956 tentang desakan kepada Kabinet Ali untuk segera melaksanakan hasil-hasil KAA dan agar melaksanakan programnya secara kongkrit dan tegas, disertai surat pengantar. | asli | 2 lembar |
| 2010 | Konperensi Regional BAPERKI Jatim Ke-VI: resolusi tanggal 8 Juli 1956 tentang sikap terhadap adanya diskriminasi, disertai surat pengantar. | asli | 2 lembar |
| 2011 | Organisasi-organisasi ex pejuang: resolusi-resolusi tanggal 15 Juli 1956-23 Maret 1957 tentang dukungan proklamasi panglima territorium VII Wirabuana tanggal 2 Maret 1957. | asli | 5 lembar |
| 2012 | Perorangan kepada Presiden: surat tanggal 25 Juli 1956 tentang protes atas ijin judi. | asli | 1 lembar |
| 2013 | Kabinet Presiden RI: surat kawat tanggal 25 Agustus 1956 tentang pemberontakan komunis Madiun 1948. | asli | 1 lembar |
| 2014 | Organisasi-organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 26 Agustus 1956-25 Februari 1957 tentang peristiwa 13 Agustus mengenai penangkapan Menteri Luar Negeri R. Abdoelgani. | asli | 1 sampul |
| 2015 | Sosial Demokrat Internasional kepada Presiden RI: surat tanggal 6 September 1956 tentang masalah KMB. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 2016 | BTI Desa Bojong Bogor: surat tanggal 10 Oktober 1956 tentang tuntutan ganti kerugian kaum tani yang tanamannya dirusak oleh onderneming, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2017 | PNI Cab. Ambon: surat pernyataan tanggal 16 Oktober 1956 tentang permohonan perubahan status resimen Inf. 25 menjadi suatu tentara territorium tersendiri sesuai dengan tugas pekerjaan dan luas daerahnya. | asli | 1 lembar |
| 2018 | Komando Tentara Islam Indonesia Momoc Imam Bonjol Div. V Tengku Cik Ditiro: pernyataan tanggal 4 Nopember 1956 tentang daerah operasi Tentara Islam Indonesia di Sumteng, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2019 | Persatuan Pelajar Demobilisan Komisariat Ambarawa kepada ketua parlemen: surat tanggal 6 November 1956 tentang permohonan persetujuan Barisan Sukarela membantu perjuangan Mesir. | tembusan | 1 lembar |
| 2020 | Headquarters of the Serawak Liberation Commad: surat tanggal 9 November 1956 tentang demonstrasi terhadap British, dengan lampiran. NB: B. Inggris | asli | 2 lembar |
| 2021 | DPRDP Magelang: surat pernyataan adhaesi tanggal 19 Nopember 1956 tentang pemberitaan dalam majalah 'Pantja' mengenai penjualan gadis dan budak belian. | asli | 1 lembar |
| 2022 | KPRI kepada KSAL: surat tanggal Desember 1956 tentang upacara penyerahan panji kepada Corps kadet AL serta penggantian nama Institut AL, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2023 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 5 Desember 1956 tentang keterangan pembentukan pemerintahan kecil periode 31 Juli 1935 di suatu sekolah <i>Inlandschool</i> Asahan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2024 | BATNI CP Consulat Sulawesi/Maluku/Nusa Tenggara kepada Pusat BATNI se-Indonesia: surat tanggal 21 Desember 1956 tentang laporan dan permohonan pengiriman Angkatan Darat untuk S. Pendin di Palopo dengan memakai cap pusat. | tembusan | 1 lembar |
| 2025 | Organisasi massa, politik: resolusi-resolusi tanggal 22 Desember 1956-25 Nopember 1957 tentang protes terhadap keputusan muktamar alim ulama di Palembang yang berusaha memecah belah persatuan. | asli, tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2026 | Panglima Territorium I kepada Presiden RI: telegram tanggal 24 Desember 1956 tentang pernyataan melepaskan hubungan sementara dengan Pemerintah Pusat dan tidak mengakui lagi Kabinet. | asli | 1 lembar |
| 2027 | Kabinet Presiden RI: surat-surat kawat tanggal 1957 - 1958 tentang teror Peristiwa Cikini. | asli | 5 lembar |
| 2028 | KRI Tiga May, Samosir kepada Presiden RI: telegram tanggal 2 Januari 1957 tentang suasana di Sumatra Timur. | asli | 1 lembar |
| 2029 | PKI dan PSSI: surat-surat tanggal 2 Januari - 24 Maret 1957 tentang penghinaan terhadap Wakil Presiden Moh. Hatta, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 2030 | DPC Gerakan Patriot Negara Banyumas kepada RRI Bag. Siaran Pemerintah: surat tanggal 11 Januari 1957 tentang seruan untuk bersatu. | tembusan | 1 lembar |
| 2031 | Kementerian Pertahanan: surat-surat tanggal 12 Januari-13 Mei 1957 tentang rancangan PP mengenai pangkat-pangkat militer dalam AP, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |
| 2032 | Organisasi-organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 25 Januari 1957 - 10 Maret 1959 tentang pemberontakan PRRI di Padang Sumatera Tengah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2033 | DPRDP Pekalongan: surat pernyataan tanggal 29 Januari 1957 tentang desakan untuk mengadakan razia terhadap perjudian dan supaya melarang perjudian dengan UU atau peraturan. | asli | 1 lembar |
| 2034 | Sekretaris Dewan Menteri: laporan tanggal 5 Pebruari 1957 tentang jawaban pemerintah atas pemandangan Umum Babak DPR mengenai keterangan pemerintah atas kejadian-kejadian di Sumatra dalam bulan Desember 1957, diucapkan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dalam rapat pleno terbuka DPR. | salinan | 1 sampul |
| 2035 | J. Jacob kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 11 Pebruari 1957 tentang sikap terhadap tulisan Mayor Dabnja KMKBDR di harian 'Merdeka' tanggal 8 Februari 1957 no. 334 "renunganku sebagai prajurit TNI" | asli | 1 lembar |
| 2036 | Kepala Kepolisian Negara: surat tanggal 13 Pebruari 1957 tentang penyelesaian mengenai masalah-masalah kupluk putih. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 2037 | Daeng Tuanku Sang Hiang Soekirman Alsaiddi Hassan-Hussein Islaalal Raja Koening Pagar Roejoeng de XVII: surat tanggal 14 Pebruari 1957 tentang permohonan untuk mengangkat Letkol Djamin Ginting menjadi Kol. Inf. TT SU I., dengan lampiran | asli | 2 lembar |
| 2038 | Ormas: surat-surat tanggal 16 Pebruari, 1 Oktober 1957 tentang kekuasaan Dewan Banteng/Dewan-dewan Partikelir. | tembusan | 2 lembar |
| 2039 | Mr. Dan Mrs. WR Freeberg: surat tanggal 22 Pebruari 1957 tentang keselamatan anaknya Bobby Freeberg, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2040 | Penerangan Angkatan Darat Kementerian Pertahanan kepada Presiden RI: laporan tanggal 26 Pebruari 1957 tentang perjalanan KSAD ke Sumatera. | stensilan | 1 sampul |
| 2041 | Residen Bogor: surat tanggal 28 Pebruari 1957 tentang tidak adanya disiplin pemerintah tentang tidak adanya disiplin pemerintah terhadap kasus harta peninggalan Mr. Charles Antonio Granpre Moliere, dengan lampiran. NB: lampiran sebagian dalam bahasa Inggris. | asli | 6 lembar |
| 2042 | KSAU kepada PMRI: surat tanggal 28 Pebruari 1957 tentang protes areal survey dari udara dan bantuan luar negeri, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2043 | Rakyat kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 3 Maret - 28 Nopember 1958 tentang saran, pendapat dan usul mengenai pertahanan nasional, pelayaran dan kepemimpinan. | asli | 1 sampul |
| 2044 | Pengurus Pusat Gerakan Wanita Sosialis kepada Presiden : surat tanggal 11 Maret 1957 tentang pernyataan GWS terhadap penculikan Mr. Maria Ulfah Santoso. | asli | 2 lembar |
| 2045 | Masyarakat Bagdad kepada Presiden Soekarno: telegram tanggal 12 Maret 1957 tentang keputusan hukuman mati pengadilan militer di Damascus terhadap 12 politisi nasionalist. | asli | 1 lembar |
| 2046 | Presiden kepada Perdana Menteri: surat tanggal 14 Maret 1957 tentang pernyataan Negara dalam keadaan darurat perang, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 2047 | Kementerian Pertahanan kepada Kabinet Presiden ri: surat-surat tanggal 19 Maret - 18 Nopember 1957 tentang masalah personil Kementerian Pertahanan, dengan lampiran. NB: lampiran tidak lengkap. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 2048 | Kepala Staf Angkatan Udara kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 20 Maret 1957 tentang peraturan-peraturan yang perlu dikeluarkan , dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 2049 | Menteri Perekonomian: Surat Keputusan Presiden No. 19 tanggal 21 Maret 1957 tentang penetapan waktu larangan bagi Karesidenan Lampung untuk mempunyai persediaan padi/beras lebih dari 1.000 kg kecuali dapat ijin. | salinan | 1 lembar |
| 2050 | DPC Biro Bekas Angkatan Perang RI Sumatera Utara kepada Panglima Tertinggi: surat pernyataan tanggal 21 Maret 1957 tentang sikap terhadap pengangkatan Majoor Sukardi sebagai Komandan CPM Bat. I Ko. TT-I Bukitbarisan. | asli | 1 lembar |
| 2051 | PLM KDPSST kepada KSAD: formulir berita tanggal 31 Maret 1957 tentang pernyataan atas akibat revolusi yang terjadi di wilayah KDPSST. | tembusan | 1 lembar |
| 2052 | Panglima TT II (Sumatera Selatan) kepada KSAD: surat rahasia tanggal 4 April 1957 tentang tanggapan terhadap SK. KSAD mengenai perbuatan insubordinasi. | tembusan | 1 lembar |
| 2053 | Kabag Personalia Militer Kementerian Pertahanan kepada S. Haryanto: surat tanggal 13 April 1957 tentang pelaksanaan UU No. 14/1953. | asli | 1 lembar |
| 2054 | B. Mirah kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 21 April 1957 tentang tuntutan pemindahan kubur anaknya, Jatmo anggota TNI yang ditangkap oleh pihak Belanda karena membawa dokumen, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2055 | Corps Demobilisan Seluruh Indonesia: surat pernyataan tanggal 25 April 1957 tentang sikap terhadap artikel di harian 'Merdeka' tanggal 23 April 1957 mengenai 23 orang terkemuka tersangkut Lie Hok Thay, tenaga musuh subversif. | asli | 1 lembar |
| 2056 | Kepala Staf Angkatan Darat: Instruksi tanggal 25, 29 April 1957 tentang peraturan-peraturan, putusan lain yang dikeluarkan oleh penguasa militer supaya ditandatangani oleh penguasa militer sendiri, dengan lampiran. | salinan | 5 lembar |
| 2057 | Kepala Staf Angkatan Darat: seruan tanggal 6 Mei 1957 tentang tindakan keras terhadap pelaku tindak pidana ekonomi berhubung dengan keadaan darurat perang, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 2058 | Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Darat: surat-surat tanggal 11, 14 Mei 1957 tentang putusan Seks Otonomi dalam Konferensi Penguasa Militer, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 2059 | PERBATNI (Persatuan Bekas Anggota TNI) Manado: surat pernyataan tanggal 12 Mei 1957 tentang sikap terhadap proklamasi 2 Maret/piagam perjuangan semesta. | asli | 1 lembar |
| 2060 | KSAU kepada sekretaris gabungan kepala-kepala staf: surat tanggal 15 Mei 1957 tentang persoalan-persoalan GKS dari tahun-tahun yang lalu. | tembusan | 1 lembar |
| 2061 | KSAU kepada Presiden RI: surat tanggal 16 Mei 1957 tentang pengamanan terbang bagi pesawat rombongan Presiden USSR. | asli | 1 lembar |
| 2062 | Anggota veteran kemerdekaan RI di Sumtim Labuan Batu kepada TT I Bukit tindasan Barisan: surat tanggal 18 Mei 1957 tentang perkembangan OPD (Organisasi Pengaman Desa) di Sumatera Timur. | | 1 lembar |
| 2063 | Kepala Staf Angkatan Darat: Peraturan No. Prt/pm/08/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang penilikan harta benda bagi penguasa militer dan pejabat tertentu, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 2064 | Kementerian Pertahanan: surat pemberitahuan tanggal 4 Juni 1957 tentang penetapan peraturan oleh penguasa Militer Pusat. | tembusan | 1 lembar |
| 2065 | Sub Secom PKI Kediri: surat pernyataan tanggal 16 Juni 1957 tentang protes terhadap larangan penggunaan pengeras suara. | tembusan | 1 lembar |
| 2066 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan No. Kpts/PM/013/1957 tanggal 26, 29 Juni 1957 tentang keputusan peralihan militer untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. | salinan | 2 lembar |
| 2067 | Serikat Buruh Film & Seni Drama (SARBUFIS) Makassar kepada ketua PN Makassar: surat pernyataan tanggal 1 Juli 1957 tentang penyelesaian perkara para aktivis Serikat Buruh Lindeteves (SERBULIN) dan pengeluaran F. V. J. M. Feumis dari Indonesia. | tembusan | 1 lembar |
| 2068 | Ormas-ormas: surat-surat tanggal 6 Juni - 21 November 1957 tentang tuntutan dilaksanakan musyawarah nasional untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan RI. | asli | 1 sampul |
| 2069 | Mendagri: surat tanggal 10 Juli 1957 tentang Rapat Merah Putih di Madiun, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 2070 | Kamar Sandi Angkatan Darat kepada Kabinet Presiden: kawat tanggal 11 Juli 1957 tentang pemberitahuan penahanan Mr. Iwakusuma Sumantri. | asli | 1 lembar |
| 2071 | Markas Besar Angkatan Udara: Surat Perintah Operasi No. 13, tanggal 13 Juli 1957 tentang acara penerbangan operasi guntur, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 2072 | Komisaris Daerah GPN Semarang kepada Jaksa Agung: surat 17 Juli 1957 tentang pertikaian dalam Kementerian Perburuhan Jakarta, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2073 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 18 Juli, 21 Agustus 1957 tentang pengawasan orang asing. | salinan | 1 lembar |
| 2074 | Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer: Surat Keputusan No. Kpts/ pm/019/1957, tanggal 19 Juli 1957 tentang pencabutan kembali berlakunya Surat Perintah KSAD selaku penguasa militer No. Sp/pm/09/1957, tanggal 14 Juni 1957 mengenai penunjukan Letkol A. Nasuhu NRP. 11312 mewakili Kolonel Sadikin dalam jabatannya. | tembusan | 1 lembar |
| 2075 | Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII), Cab. Bagansiapi-api: surat tanggal 20 Juli 1957 tentang sikap terhadap pernyataan yang dikirim Sofjan Ismail Cs. | asli | 1 lembar |
| 2076 | Kepala Staf Angkatan Darat: Instruksi-instruksi tanggal 5 Juli - 6 Nopember 1957 tentang usaha penjelmaan persatuan dan kerja sama antara militer dan rakyat, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 2077 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Keputusan No. KPTS/PM/021/1957 tentang 1 Agustus 1958 tentang pembentukan Team Intelligence pada Koordinator Bagian Keamanan Staf Harian Penguasaan Militer Staf Angkatan Darat. | salinan | 1 lembar |
| 2078 | Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer: Surat Keputusan No. Kpts/ PM/022/1957 tanggal 1 Agustus 1957 tentang pembentukan Panitia Tetap Anti-Subverdif. | salinan | 1 lembar |
| 2079 | Kementerian Pertahanan Staf AD: SE tanggal 1 Agustus 1957 tentang pelaksanaan peraturan penguasaan militer. | salinan | 2 lembar |
| 2080 | Konperensi Kerja Pimpinan Wil. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Sumut : keputusan Kongres tanggal 1 Agustus 1957. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2081 | Rapat Umum Pembentukan Organisasi Veteran di Lirung Talaud: surat pernyataan tanggal 2 Agustus 1957 tentang permohonan penarikan kembali keputusan pembebasan tugas H.N.V. Sumwal, Panglima TT VII Wirabuana. | asli | 1 lembar |
| 2082 | Organisasi Massa: surat-surat pernyataan tanggal 4 Agustus - 10 Oktober 1957 tentang pembentukan Badan Kerja Sama Pemuda-Militer. | asli, tembusan | 5 lembar |
| 2083 | Kepala Kepolisian Negara kepada Kepala Staf Angkatan Udara: surat tanggal 6 Agustus 1957 tentang pelanggaran penerbangan. | tindakan | 1 lembar |
| 2084 | Kepala Direktorat Pemerintahan Umum kepada Gubernur Sumut: surat tanggal 7 Agustus 1957 tentang klaim oleh W. Hutagalung atas nama pamong desa terhadap negara, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2085 | Konperensi Pembatil Ponorogo: surat tanggal 14 Agustus 1957 tentang gerakan koperasi dan hari koperasi yang disalahgunakan oleh Bapak Koperasi Dr. Moh. Hatta, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2086 | Menteri Pertahanan: Peraturan No. 755/PMT/1957 tanggal 14 Agustus 1957 tentang pencegahan pemogokan dan penutupan (lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital, disertai penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 2087 | Partai Rakyat Indonesia dan Partai Murba Tapanuli Utara: surat-surat tanggal 15, 21 Agustus 1957 tentang Peristiwa Simbolon tanggal 22 Desember 1956, dengan lampiran. | asli | 8 lembar |
| 2088 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Edaran No. SE/PM/0 tanggal 22 Agustus 1957 tentang pembatasan diri dalam berbicara memberikan keterangan-keterangan resmi, tidak resmi dan/atau pendapat pribadi. | salinan | 1 lembar |
| 2089 | Soetardjo kepada Resimen Komandan Infanteri 11 selaku Penguasa Militer Tasikmalaya: surat tanggal 24 Agustus 1957 tentang pendaftaran tenaga ahli. | tembusan | 1 lembar |
| 2090 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 29 Agustus, 23 September 1957 tentang penawaran peralatan dan perlengkapan tunick bros staf AU. | tembusan | 3 lembar |
| 2091 | Perhubungan Angkatan Darat kepada Presiden RI: tanggal 1 September 1957 tentang panggilan menghadap KSAD di Jakarta. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 2092 | Persatuan Pamong Praja: Surat Edaran tanggal 1 September 1957 tentang usul memperlengkap Munas untuk harmonisasi suasana Pemerintah Negara. | tembusan | 1 lembar |
| 2093 | Laporan rahasia tanggal 14 September 1957 tentang sikap Bupati Indramayu yang acuh tak acuh terhadap wilayahnya. | asli | 1 lembar |
| 2094 | Dewan Pimpinan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia cabang Jambi kepada Penguasa Militer Pusat/KSAD: surat pernyataan tanggal 17 September 1957 tentang permohonan pengangkatan R.A. Rahman Majoor Inf.menjadi Panglima Komandan Induk Pasukan Tentara di Jambi. | tembusan | 1 lembar |
| 2095 | SBKB daerah Sumut kepada semua anggota: surat tanggal 25 September 1957 tentang penundaan aksi pemogokan. | tembusan | 1 lembar |
| 2096 | Soebandi kepada Bupati Pasuruan: surat tanggal 26 September 1957 tentang permohonan pengusutan <i>senyampang</i> peraturan tentara yang masih berlaku, dengan lampiran. | tindakan | 1 sampul |
| 2097 | Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer kepada Mentari Pertahanan: surat tanggal 26 September 1957 tentang penyitaan barang-barang emas, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 2098 | KSAU kepada Direktur GIA: surat tanggal 29 September 1957 tentang ijin penerbangan langsung Makassar-Manado. | tembusan | 1 lembar |
| 2099 | Persatuan Pelajar Demobilisasi kepada Menteri Veteran: surat tanggal 12 Oktober tentang sikap atas perundingan antara Kementerian Veteran dengan DKA Bandung mengenai pengambilan besi tua yang merugikan organisasi lain. | tembusan | 1 lembar |
| 2100 | Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer: Surat Keputusan No. Kpts/PM/074/1957 tanpa tanggal Oktober 1957 tentang penetapan Pelabuhan Pantai Sibolga menjadi Pelabuhan Laut (Zeehaven). | salinan | 1 lembar |
| 2101 | Perorangan kepada Presiden RI: surat tanggal 6 Nopember 1957 tentang keterangan mengenai keamanan dan permusyawaratan TII NRI, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2102 | Gerakan Kemerdekaan Ekonomi BI (gerakan Assaat): pernyataan tanggal 12 Nopember 1957 tentang sikap terhadap pemberitaan di harian 'Sin Po' mengenai gerakan Assaat. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 2103 | Kementerian Urusan Veteran RI: paper kerja tanggal 15 Nopember 1957 tentang masalah veteran dalam hubungan pembangunan, disertai nota pengantar. | stensilan | 1 lembar |
| 2104 | Dewan Revolusi Garuda kepada Presiden RI: telegram tanggal 18 Nopember 1957 tentang protes duduknya KSAD dalam Panitia 7. | asli | 1 lembar |
| 2105 | Ormas: surat pernyataan-pernyataan tanggal 22 Nopember 1957, 28 Januari 1958 tentang dukungan terhadap peremajaan alat-alat negara. | salinan | 2 lembar |
| 2106 | Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer: Instruksi No. Instr/PM/1957 tanggal 23 Nopember 1957 tentang kebijaksanaan umum Penguasa Militer dalam menghadapi pers. | stensilan | 1 lembar |
| 2107 | Kementerian Urusan Veteran RI: teks tanggal 25 Nopember 1957 tentang pengundangan UU Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. | stensilan | 1 lembar |
| 2108 | Anggota APRI tahanan/hukuman rumah penjara tentara Cimahi: surat tanggal 25 Nopember 1957 tentang permohonan menjadi sukarelawan dalam menyerbu Irian Barat. | asli | 1 lembar |
| 2109 | Menteri Kesehatan RI: surat tanggal 3 Desember 1957 tentang korban peristiwa pelemparan granat di Cikini, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2110 | Ny. Djohariah: surat tanggal 9 Desember 1957 tentang permohonan untuk ikut berjuang, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2111 | PKI Wonosobo: surat tanggal 11 Desember 1957 tentang politik isolasi yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan daerah. | asli | 1 lembar |
| 2112 | BPP Legiun Veteran RI kepada Presiden Naser, PM Nehru, Worlvet Paris: telegram tanggal 13 Desember 1957 tentang permohonan untuk menutup wilayah yang dilalui Belanda dalam usaha menjajah dan agresi ke Indonesia. | salinan | 3 lembar |
| 2113 | Serikat Buruh Pekerjaan Umum Tanggul: surat pernyataan tanggal 16 Desember 1957 tentang peremajaan alat-alat negara. | asli | 3 lembar |
| 2114 | Sekretaris Dewan Menteri: Pengumuman No. 68/1957 tanggal 1 Desember 1957 tentang masalah yang bertalian dengan aks pembebasan Irian Barat, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2115 | Organisasi massa/politik: surat-surat tanggal 18 Desember 1957 - 1 Oktober 1959 tentang Peradilan bagi para peku dan dalang-dalangnya Peristiwa Cikini Raya. | asli | 1 lembar |
| 2116 | Lembaga Tinggi Daerah, Ormas, perorangan kepada Presiden RI: telegram-telegram tanggal 20-31 Desember 1957 tentang mencegah presiden untuk beristirahat di luar negeri sehubungan dengan suasana di dalam negeri. | asli | 4 lembar |
| 2117 | KSAU: surat tanggal 21 Desember 1957 tentang kondisi Pesawat Iljushin - 14, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2118 | Kabinet Presiden: surat tanpa tanggal 1957 tentang jawaban Presiden kepada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengenai Irian Barat, dengan lampiran. NB: dalam bahasa Inggris. | draft | |
| 2119 | KSAD kepada panglima TT-II, Komandan RI 5, Komandan RI 6: formulir berita tanpa tanggal 1957 tentang usaha mencegah pertempuran. | salinan | 1 lembar |
| 2120 | DPRD Magelang dan Ponorogo: surat-surat pernyataan tanggal 1 Februari, 18 Maret 1958 tentang protes terhadap peristiwa Cikini Raya. | asli | 2 lembar |
| 2121 | Organisasi massa: statement-statement tanggal 16 Februari - 15 Maret 1958 tentang dukungan terhadap statement Panglima TT II Sriwijaya tanggal 11 Februari 1958 mengenai penentangan terhadap kekerasan. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2122 | Gerakan Pemuda Pancasila Revolusioner Surabaya: penjelasan surat pernyataan tanggal 18 Pebruari 1958 tentang GPPR. | asli | 1 lembar |
| 2123 | M. Zain Busrie kepada Presiden RI: laporan tanggal 19 Pebruari 1958 tentang rencana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kep. Riau Tanjung Pinang. | asli | 1 lembar |
| 2124 | DPRD Pekalongan, Sukabumi, Salatiga, Ciamis, Langkat: resolusi tanggal 20 Pebruari-13 Maret 1958 untuk merebut Kabupaten Kep. Riau Tanjung Pinang. | asli | 1 lembar |
| 2125 | DPRD Kab. Surabaya: surat pernyataan tanggal 22 Pebruari 1958 tentang desakan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Dubes Perancis yang menghina 2 orang wanita delegasi DPRD Jabar. | asli | 1 lembar |
| 2126 | Partai Murba Ranting Padang Bulan Kec. Medan Baru: resolusi tanggal 23 Februari 1958 tentang sikap terhadap peristiwa kematian Tan Malaka di Kali Brantas Kediri tanggal 19 Februari 1949, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 2127 | DPRD Kabupaten Langkat: resolusi tanggal 6 Maret 1951 tentang dukungan terhadap seruan penguasa perang, DPRD Sumatera Utara No. 12/K/DPRD/PSU/1958 dan pidato Pembantu Utama Pelaksana .Kuasa Perang Langkat. | stensilan | 1 lembar |
| 2128 | DPRDP Kab. Hulu S. Utara: resolusi tanggal 19 Maret 1958 tentang desakan pembentukan dinas kepolisian tingkat kabupaten yang berdiri sendiri terlepas dari kepolisian kabupaten di Kandangan/Kab. Hulu S. Utara. | asli | 1 lembar |
| 2129 | Serikat Buruh Gula Jatiwangi: surat pernyataan tanggal 2 Maret 1958 tentang gugurnya Letna I Udara K. Suwondo. | asli | 1 lembar |
| 2130 | Gerwani Cab. Mojokerto: resolusi tanggal 8 April 1958 tentang protes terhadap para pengacau ekonomi khususnya penimbun beras, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2131 | Kabinet Presiden RI: surat-surat pernyataan tanggal 15, 25 April 1958 tentang desakan untuk memperpanjang masa tugas pasukan Brawijaya di Sulsel. | asli | 2 lembar |
| 2132 | BTI Ranting Desa Manis P. Rakyat: surat pernyataan tanggal 20 April 1958 tentang ucapan terima kasih kepada APRI yang telah menumpas pemberontakan Nainggolan Cs. | asli | 1 lembar |
| 2133 | Achmad B. Muhammad kepada PMRI, Ir. Djuanda: laporan tanggal 23 April 1958 tentang peninjauan suasana pemberontakan PRRI di Padang. | tembusan | 1 lembar |
| 2134 | Gerakan Pejuang RI (GERPKINDO), Cab. Kota dan Pekalongan kepada DPRD Pekalongan: surat pernyataan tanggal 10 Juni 1958 tentang desas-desus yang menyatakan bahwa warga DPRD ingin menjatuhkan DPD /KDH. | tembusan | 1 lembar |
| 2135 | Pemuda Katolik Indonesia Cab. Singaraja: surat pernyataan tanggal 16 Juni 1958 tentang sikap terhadap adanya droping senjata di Timor. | asli | 1 lembar |
| 2136 | SBKA Cab. Tasikmalaya: surat pernyataan tanggal 3 Juli 1958 tentang dukungan KSAD terhadap seruan berdasarkan UU darurat NO. 26/1957 dan peraturan penguasa perang No. 022/1958. | asli | 1 lembar |
| 2137 | Kementerian Pertahanan, Staf Ajudan Presiden RI kepada Sekretaris Presiden, Mr. Ratmoko: surat tanggal 3 Juli 1958 tentang rencana latihan bahaya udara fase ke-2, di sertai pengantar. | turunan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|---------|----------|
| 2138 | Rakyat kepada Presiden RI: surat-surat tanggal 1 Maret - 15 April 1959 tentang semangat persatuan bangsa. | asli | 1 sampul |
| 2139 | SBPPK: surat pernyataan tanggal 13 Maret 1959 tentang larangan Hulla Hoop karena permainan tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. | asli | 1 lembar |
| 2140 | Sukardjo: surat pernyataan tanggal 25 Agustus 1959 tentang dukungan terhadap tindakan tegas pemerintah dalam menghadapi imperialis/kapitalis ekonomi. | asli | 1 lembar |
| 2141 | Kabinet Perdana Menteri : surat tanggal 13 September 1958 tentang pembebasan R. Soemantri Soerjodiprodjo dari kewajiban membayar kerugian kepada negara sebesar Rp. 30.218.45,00, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2142 | Ilijas Dt. Majo Indo, Pegawai Biro Politik Kementerian Dalam Negeri: surat tanggal 20 September 1959 tentang larangan berpartai bagi pegawai negeri. | asli | 1 lembar |
| 2143 | Mantoro Tirtonegoro: surat tanggal 21 Nopember 1959, tentang koreksi terhadap aparat sipil & militer dalam "Bedrijfs - Organisatie & Politis - Organisatie", dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2144 | Perorangan: surat-surat tanggal 27 September 1950 - 16 Mei 1957 tentang pendapat dan saran terhadap pertanian/perkebunan. | asli | 6 lembar |
| 2145 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tahun 1951 - 1957 tentang masalah perkebunan karet di daerah-daerah. | asli | 1 sampul |
| 2146 | Kementerian Pertanian: Ichtisar bantuan E. C. A yang diterima kementerian Pertanian selama <i>fiscal-year</i> 1951 dan 1952, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |
| 2147 | Kabinet PM kepada Presiden RI: surat tanggal 16 Pebruari 1951 tentang masalah kehutanan oleh menteri pertanian, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2148 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan tanggal 12 Maret 1951 tentang perubahn SK Secretaria van Staat voor Landbouwen Visserij No. 366/HAD/LV tanggal 12 April 1948 mengenai lada pasar (paper nigrum) dari Teluk Betung. | salinan | 1 lembar |
| 2149 | Kabinet PMRI kepada Presiden RI: nota tanggal 27 April 1951 tentang kesukaran-kesukaran di perkebunan Jawa, disertai pengantar. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 2150 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1951 tentang cara pembubaran crisis cultuur centrales. | salinan | 1 lembar |
| 2151 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan tanggal 18 Juni 1951 tentang mulai berlakunya ' <i>Rijst Ordonnantie (L.N. 1948 no. 253)</i> ' untuk daerah Jawa dan Madura guna kepentingan persediaan beras untuk rakyat. | salinan | 1 lembar |
| 2152 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan tanggal 7 Juli 1951 tentang penyerahan semua kebun-kebun percobaan dan pembibitan karet beserta tanah kosong dan bangunannya di beberapa daerah kepada kantor karet rakyat, dengan ralat. | salinan | 2 lembar |
| 2153 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 21 September 1951 - 28 Desember 1956 tentang penentuan daerah di beberapa daerah di Jawa, Maluku, Sulawesi, Sum-Sel, Sunda Kecil, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 2154 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 100/UM/51 tanggal 31 Oktober 1951 tentang perubahan SK Sekretaris Negara mengenai pertanian dan perikanan. | salinan | 1 lembar |
| 2155 | Kementerian Pertanian kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 20 Nopember 1951 tentang penyampaian laporan tahun 1950 dan semester pertama tahun 1951 ditujukan kepada FAO, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2156 | Menteri Pertanian: Instruksi No. 739/Instr./51 tt 1951 tentang penyelesaian segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian ijin guna menangkap, memiliki, mengeluarkan binatang yang dilindungi kepada kepala Jawatan Penyelidikan Alam Kebun Raya Indonesia. | salinan | 1 lembar |
| 2157 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 14 Januari, 10 Maret 1952 tentang larangan dan penutupan tempat pengeluran dan pemasukan hewan ternak. | salinan | 3 lembar |
| 2158 | Menteri Pertanian kepada Ketuan Dewan Ekonomi dan Keuangan: surat tanggal 25 April 1952 tentang permintaan prioritas utama/pertama guna proyek-proyek dari Panitia Menambah Hasil Bumi, dengan lampiran. | tembusan | 1 lembar |
| 2159 | Pusat Jawatan Pertanian Rakyat kepada Soeratmin: surat tanggal 7 Juli 1952 tentang permohonan tugas dan ijin menggerakkan pertanian secara kilat. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 2160 | Ir. G.F. Van Der Meulen kepada Moh. Hatta: surat tanggal 30 Oktober 1952 tentang metode baru untuk pengembangan pertanian di Indonesia dari G.F. Van Der Meulen, dengan lampiran. NB: Bahasa Belanda. | tembusan | 1 sampul |
| 2161 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 9422/S.D tanggal 19 Nopember 1952 tentang perintah kepada pusat Negara untuk segera memulai pekerjaan rehabilitasi. | salinan | 1 lembar |
| 2162 | DPRD Jawa Tengah kepada Presiden: Surat Keputusan - Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1952, 9 Desember 1954 tentang perkebunan-perkebunan asing di Indonesia, dengan lampiran. | turunan | 3 lembar |
| 2163 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 13/UM/53 tanggal 26 Pebruari 1953 tentang perubahan pembagian daerah-daerah perikanan darat dalam wilayah Propinsi Kalimantan dan bekas Indonesia Timur, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 2164 | PPTI Pasaman Sumatera Tengah: resolusi tanggal 27 Maret 1953 tentang politik pembangunan pertanian di Sumteng, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2165 | J. Schweizer, ahli pertanian Swiss: ceramah untuk Akademi Pertanian Bogor, tanggal 1 dan 25 Juli 1953 mengnai balai-balai penyelidikan dan perkebunan di Indonesia. | stensilan | 1 lembar |
| 2166 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 November 1953 - 12 Agustus 1957 tentang permohonan ijin pembukaan ladang, dengan lampiran. | asli, tembusan | 6 lembar |
| 2167 | BTI Banyumas: resolusi tanggal 30 November 1953 tentang tuntutan agar pemerintah memberi tanah garapan kepada petani yang dekat dari rumah. | asli | 1 lembar |
| 2168 | Menteri Pertanian: Surat Keputusan No. 11/UM/54 tanggal 1 Pebruari 1954 tentang perubahan-perubahan piagam Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia. | salinan | 1 lembar |
| 2169 | Kementerian Pertanian: surat tanggal 20 Pebruari 1954 tentang pemberitahuan diadakannya pekan pertanian. | stensilan | 1 lembar |
| 2170 | Menteri Pertanian: surat tanggal 1 April 1954 tentang tambahan laporan tahun 1951, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2171 | DPC Persatuan Tenaga Perjuangan Bondowoso kepada Kepala Jawatan Kehutanan Kabupaten Bondowoso: surat tanggal 15 Mei 1954 tentang penanaman kayu atas ladang rakyat di desa Lanas/Klabang Prajokan. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2172 | E.J. Adan kepada Perdana Menteri RI: telegram tanggal 4 September 1954 tentang permohonan perhatian Tistimewa atas pohon kelapa Talise Bangka Menado. | salinan | 1 lembar |
| 2173 | Masyumi Cab. Perbaungan dan Wangon Purwojati: mosi tanggal 26 September , 17 Oktober 1954 tentang desakan untuk melaksanakan pengairan. | asli | 1 lembar |
| 2174 | Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian: Surat Keputusan Bersama tanggal 19 Oktober 1954 - 31 Maret 1955 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tembakau 'krosok', dengan lampiran. | salinan | 7 lembar |
| 2175 | BTI kepada Bupati Kab. Kapuas: mosi tanggal 4 Desember 1954 tentang Sokongan terhadap mosi Parindra Cab. Kuala Kapuas mengenai kebijaksanaan bupati dalam lapangan pertanian. | tembusan | 1 lembar |
| 2176 | Menteri Pertanian :Surat Keputusan No. 138/UM/54 tanggal 21 Desember 1954 tentang penerbitan 'almanak tani'. | salinan | 1 lembar |
| 2177 | Aditomo Tirtodipuro: laporan tanggal 17 April 1955 tentang rencana pengeringan rawa Gesikan dan rawa Bening di Tulung Agung. | asli | 1 lembar |
| 2178 | KPRI kepada Kementerian Pertanian: surat tanggal 15 September 1955 tentang permohonan Bahjin bin Rodi Cs untuk berkebun kopi, dengan lampiran. NB: lampiran tidak ada. | pertinggal | 2 lembar |
| 2179 | Muslim Pakistan kepada Presiden RI, sebagai anggota Konperensi Pertanian: surat tanggal 10 Desember 1955 tentang sistem perladangan modern dan bantuan UNO, dengan lampiran. NB: dalam B. Inggris | salinan | 3 lembar |
| 2180 | Jawatan Perairan: laporan tanggal 20 Desember 1955 tentang kesan-kesan dari perjalanan ke India dan Birma. | tembusan | 1 sampul |
| 2181 | Persatuan Perkebunan Getah Rakyat : surat tanggal 18 Januari 1956 tentang pengiriman bahan-bahan guna pengujudan Finec nasional, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2182 | Organisasi massa: resolusi-resolusi tanggal 9 Maret 1956 - 18 Maret 1957 tentang tuntutan pembangunan irigasi. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2183 | Corps Veteran Daerah Terr. V kepada Gubernur Sumatra Utara: surat tanggal 6 September 1956 tentang permohonan ijin membuka kembali Perkebunan Lubuk Raya, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 2184 | DPRD Kabupaten Ciamis: mosi tanggal 12 Januari 1957 tentang desakan untuk mengadakan Jawatan Perikanan Laut di Kabupaten Ciamis. | asli | 1 lembar |
| 2185 | DPP PETANI: statement tanggal 15 Maret 1957 tentang perkembangan pembangunan pertanian, pembangunan industri-industri dan perkreditan, disertai surat pengantar. | asli | 1 lembar |
| 2186 | Organisasi massa: surat-surat pernyataan tanggal 11 April - 1 Juli 1957 tentang sikap terhadap rencana penghapusan Jawatan Pembangunan Usaha Tani. NB: sebagian tulisan tangan. | asli | 1 sampul |
| 2187 | C.V. Ratna Trading Company kepada PMRI: surat tanggal 12 April 1957 tentang penanaman Tembakau Deli sebagai sumber penghasilan devisa negara dan lapangan bekerja bagi rakyat. | tembusan | 1 lembar |
| 2188 | BTI Ranting Desa Manis Pulo Rakyat kepada Menteri Pertanian: surat tanggal 7 Mei 1957 tentang permohonan rakyat untuk mengadakan pembangunan di bidang pertanian guna membuka lahan (pembelian taktor) | tembusan | 1 lembar |
| 2189 | Notosoekotjo: surat tanggal 13 Mei 1957 tentang gerakan penghijauan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2190 | Kementerian Pertanian kepada Mr. Paul L. Nellans: surat tanggal 11 November 1957 tentang pengiriman bibit tanaman, dengan lampiran. | tembusan | 4 lembar |
| 2191 | Firma Gotong Royong : surat tanggal 31 Desember 1957 tentang permohonan petunjuk Presiden dalam usahanya menambah produksi bahan mentah kapas dan bahan makan, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2192 | Dewan Karet Rakyat Sementara Karesidenan Sumtim kepada Gubernur Sumut: surat tanggal 17 Pebruari 1958 tentang keputusan-keputusan Kongres ke-I Petani Karet Rakyat Karesidenan Sumtim, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2193 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 6 September 1950 - 20 Agustus 1959 tentang permohonan ijin trayek otobis. | tembusan | 1 sampul |
| 2194 | RRI kepada studio Jakarta: surat tanggal 20 Nopember 1950 - 5 Nopember 1952 tentang acara siaran 'Ibu Kota Hari Ini'. | salinan | 4 lembar |

| | | | |
|------|--|-----------|----------|
| 2195 | Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap kepada Presiden RI: peraturan telegrap No. 16, tanggal 27 Nopember 1950 tentang ikhtisar singkatan kata-kata, istilah dan peribahasa yang dapat digunakan untuk meringkaskan isi telegram pemerintah dalam negeri, dengan lampiran dan surat pengantar. | stensilan | 3 lembar |
| 2196 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 23 Pebruari 1951 - 14 Desember 1955 tentang penetapan peraturan-peraturan, syarat-syarat dan tarif-tarif telepon dari Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 2197 | Beberapa DPRDS di Jawa, Sumatera, Sulawesi: resolusi-resolusi tanggal 25 Pebruari 1951 - 19 Mei 1958 tentang tuntutan dilaksanakannya pembangunan jalan-jalan , jembatan, di daerah-daerah. | tembusan | 1 sampul |
| 2198 | Menteri Perhubungan: Surat Edaran tanggal Nopember 1951 tentang perijinan otobis. | stensilan | 1 lembar |
| 2199 | Panglima TT Jatim : Surat Keputusan No. 12 BS/DI.1-51/Kpt tanggal 8 Desember 1951 tentang pengambilan kendaraan untuk dipakai oleh Staf Divisi I, disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 2200 | Kementerian Pertahanan kepada NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij : tindasan surat tanggal 8 Februari 1952 tentang pengangkutan bahan peledak, dengan lampiran. | | 3 lembar |
| 2201 | Menteri Penerangan: Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1952 tentang persetujuan mendirikan pemancar-pemancar dan studio-studio lokal/relay. | stensilan | 1 lembar |
| 2202 | Gubernur Sulawesi: Surat Keputusan tanggal 25 Maret 1952 tentang penunjukan sebagai hotel-hotel dan pensiun-pensiun di Kotapraja Makassar. | salinan | 1 lembar |
| 2203 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan tanggal 10 April 1952 tentang perubahan biaya pengangkutan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan no. 3535/LI tanggal 27 Oktober 1951, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 2204 | Gubernur Maluku kepada Kabinet Presiden: surat-surat tanggal 5 Mei 1952- asli,tindasan 20 September 1956 tentang permohonan kapal. | | 9 lembar |
| 2205 | N.V. UDATIN: surat tanggal 7 Mei 1952 tentang perusahaan tersebut telah berhasil memotorisasi becak, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 2206 | Menteri Agama: Maklumat Bersama tanggal 8 Mei 1952, 7 Desember 1954 tentang pelabuhan kapal haji. | stensilan | 7 lembar |
| 2207 | Kementerian Perhubungan: Surat Edaran tanggal 20 Juni 1952 tentang waktu penerimaan tamu. | stensilan | 1 lembar |
| 2208 | Menteri Perhubungan kepada PM RI: surat tanggal 23 Agustus 1952 tentang membuat peta udara Indonesia. | stensilan | 2 lembar |
| 2209 | Kepala Jawatan Perjalanan: Surat Edaran tanggal 16 Oktober 1952 tentang Surat Keputusan PMRI No. 269, tanggal 18 September 1952 mengenai penetapan Menteri Perhubungan berhak menguasai segenap kendaraan bermotor milik pemerintah dari tahun pembikinan 1947 dan lebih dahulu, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |
| 2210 | Kepala Bagian Hubungan Internasional: laporan-laporan tanggal 23 Oktober 1952, 1 September 1954 tentang perjalanan ke berbagai negara asing, disertai surat pengantar. | tembusan | 3 lembar |
| 2211 | Menteri Perhubungan : Surat Keputusan tanggal 24 Nopember 1952 tentang perubahan SK tanggal 15 September 1952 tentang peraturan kendaraan bermotor sipil, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 2212 | Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Dewan Menteri RI: surat tanggal 10 Desember 1952 tentang kesulitan transportasi di Kebayoran Baru. NB: arsip rusak. | salinan | 2 lembar |
| 2213 | Kabinet Perdana Menteri : surat tanggal 21 Januari 1953 tentang penghentian pemakaian mobil untuk pengangkutan pegawai, dengan lampiran. | stensilan | 6 lembar |
| 2214 | Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: surat tanggal 5 Pebruari 1953 tentang ralat kenaikan tarif-tarif pos dalam negeri yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2215 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No.X5/1/12 tanggal 31 Maret 1953 tentang pembentukan panitia untuk memulai pengadaan perundingan-perundingan dengan pihak Bataviasche Vervoer Matschappij (P.V.M) | salinan | 1 lembar |
| 2216 | Perorangan: surat-surat tanggal 5 Juni 1953-14 Desember 1954 tentang permohonan ijin perjalanan, keliling dunia, ke daerah-daerah dengan kendaraan bermotor dan sepeda. | asli | 5 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 2217 | Kabinet Presiden kepada Kepala Jawatan Pelayaran: surat, tanggal 6 Agustus 1953 tentang overschrijving Kapal 'Menpawa', dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 2218 | Pioneer Aviation Corporation kepada Presiden RI: surat tanggal 0 Oktober 1953 tentang surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung mengenai masalah jasa penerbangan di Indonesia, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2219 | Ikatan Pedagang Indonesia Tionghoa Arab kepada Menteri Perhubungan: surat tanggal 10 Desember 1953 tentang permohonan route pesawat terbang ke Bima, dengan lampiran. | tembusan | 5 lembar |
| 2220 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 01/2/11 tanggal 16 Desember 1953 tentang pemben pembentukan panitia pengembalian penataran pangkalan (panitia 3P), disertai surat pengantar. | salinan | 1 lembar |
| 2221 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. G.5a/2/1, tanggal 22 Desember 1953 tentang pemberian ijin mendaratkan dan mengeksploitasi kepada 'Cable and Wireless Limited' di London. | salinan | 1 lembar |
| 2222 | Menteri Perhubungan: Surat Edaran No. U.19/2/12 tanggal 29 Januari 1954 tentang penghematan kiriman surat yang dilakukan oleh berbagai kementerian/jawatan, dengan lampiran. | stensilan | 3 lembar |
| 2223 | Kementerian Perekonomian: Surat Edaran No.1/54 tanggal 29 Januari 1954 tentang pengiriman ke luar negeri dari barang-barang pindahan, pakaian si penumpang , paket pos dan paket laut, dengan ralat-ralat. | stensilan | 3 lembar |
| 2224 | Ketua Panitia Pemilihan Indonesia: Surat Edaran tanggal 8 April 1954 - 11 Mei 1955 tentang tanda kendaraan bermotor milik pemerintah, dengan lampiran. | stensilan | 1 sampul |
| 2225 | DPRDS Maluku Tenggara kepada Gubernur Propinsi Maluku: surat tanggal 8 Mei 1954 tentang perjalanan Kapal Kasembar ke Kesar dan kecelakaan perahu-perahu antara Roma/Kesar, dengan lampiran. | tembusan | 2 lembar |
| 2226 | Pemda Maluku, Jawatan Pelayaran: resolusi-resolusi tanggal 12 Juli 1954, 3 Nopembe 1956, 6 Maret 1957, 12 Februari 1958 tentang tuntutan pembukaan pelabuhan-pelabuhan. | asli, tembusan | 5 lembar |

| | | | |
|------|--|------------------|----------|
| 2227 | Direktur Kabinet Presiden kepada Mr. Peter Ratcliffe, head of Serawak Broadcasting Service: surat-surat tanggal 15 Juli - 3 Agustus 1954 tentang balasan perkenalan dari Mr. Petter Ratcliffe dengan kepala jawatan RRI, berkenaan dengan jangkauan pemancar RRI sampai ke Kuching, dengan lampiran. NB: B. Inggris dan Indonesia. | asli, pertinggal | 5 lembar |
| 2228 | Kepala Bagian Pelabuhan: laporan tanggal 16 Juli 1954 tentang pembangunan Pelabuhan Samudera Bitung. | stensilan | 1 lembar |
| 2229 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. U.5/47/19 tanggal 10 Nopember 1954 tentang pemberian suatu tanda yang menyatakan kebebasan dari pengawasan perundang-undangan "Gecontoleerde Goederen 1948" untuk kendaraan bermotor. | salinan | 1 lembar |
| 2230 | R. Soemartono, ex Kepala Muda Jawatan Kepolisian Negara kepada Menteri Keuangan: surat tanggal 29 Nopember 1954 tentang permohonan mobil dinas, dengan lampiran dan pengantar. | asli | 3 lembar |
| 2231 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. P22/1/13 tanggal 26 Pebruari 1955 tentang pembebasan bagian lalu lintas jalan dan sungai dari Kementerian Perhubungan. | salinan | 1 lembar |
| 2232 | Kementerian Perhubungan: laporan tanggal 1 Agustus 1955 tentang konperensi tahunan komisi penyelenggara dan penghubung dari Uni Pos sedunia di Lugano (Swiss). | cetak | 1 lembar |
| 2233 | Pusat Biro Pejuang Pembangunan RI: surat-surat tanggal 5 Nopember - 1 Desember 1955 tentang perjalanan Mohamad Arsyad Tuahunse keliling negara-negara Afro- Asia dengan jalan kaki, dengan lampiran. | asli, pertinggal | 3 lembar |
| 2234 | Kementerian Perburuhan kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 15 Nopember 1955 tentang berdirinya DAMRI (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia). | asli | 1 lembar |
| 2235 | Kepala Jawatan Perjalanan: Surat Edaran tanggal 29 Desember 1955 tentang pengujian kendaraan bermotor dari tahun pembikinan 1948 dan tahun sebelumnya, dengan lampiran dan surat pengantar. | stensilan | 6 lembar |
| 2236 | Kementerian Keuangan: surat pemberitahuan tanggal 26 Januari 1956 tentang keharusan pemakaian pesawat GIA dari Jakarta ke Bangkok. | stensilan | 1 lembar |
| 2237 | Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 22 Mei 1956 tentang kelebihan bagasi penumpang kapal udara tanggungan negara. | tembusan | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2238 | Dirjen Biro Perancang Negara: laporan tanggal 10 Nopember 1956 tentang perkembangan turis asing di Indonesia, disertai surat. NB: dalam B. Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 2239 | DPRDP Kabupaten Purworejo kepada Menteri Perhubungan : resolusi tanggal 8 Maret 1957 tentang desakan agar kereta api kilat Surabaya Jakarta PP dapat berhenti di Stasiun Kutoarjo. | tindakan | 1 lembar |
| 2240 | Kementerian Perhubungan: laporan sidang 'Commission Excecutive et de Liaison' dari Union Postale Universelle di Lausawne Swis, tanggal 1 - 12 April 1957. | stensilan | 2 sampul |
| 2241 | Pengusaha-pengusaha pelayaran: surat-surat tanggal 14 April - 10 Desember 1957 tentang urusan pelayaran, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2242 | Kepala Negeri, Kampung dan instansi-instansi pemerintah sipil se-kecamatan P. Batu Nias: resolusi tanggal 15 April 1957 tentang desakan kepada pemerintah untuk menempatkan motor boat di P. Tello sesuai dengan janji. | asli | 1 lembar |
| 2243 | Kepal Daerah/ketua DPDP Daerah Swapraja Gianjar kepada ketu DPDP Daerah Bali: surat tanggal 7 Juni 1957 tentang penyerahan kolam renang pesanggarahan Tampak Siring kepada negara. | tembusan | 1 lembar |
| 2244 | KSAD: Surat Keputusan No. Prt/PM/013/1957 tanggal 19 Juli 1957 tentang larangan menaikkan tarif-tarif jasa, dengan penjelasan. | salinan | 2 lembar |
| 2245 | DPDPD Bali: surat tanggal Juli 1957 tentang permohonan sumbangan untuk usaha-usaha perkembangan tourisme di Bali, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 2246 | Menteri Perhubungan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 12 Agustus. 26 September 1957 tentang tukar menukar paket pos antara RI dan koloni Hongkong serta pengeluaran prangko amal, dengan lampiran. | salinan | 3 lembar |
| 2247 | Dewan Tourisme Indonesia kepada Menteri Antar Daerah: surat tanggal 15 Agustus 1957 tentang rencana perkampungan 'Bhineka Tunggal Ika', dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 2248 | DPRDP Kab. Pemalang: Surat Keputusan No. 60/9/Dprdp/57 tanggal 21 September 1957 tentang penyerahan kembali jalan negara di ibukota Kab. Pemalang kepada pemerintah pusat dan Prop. Jateng. | salinan | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 2249 | Menteri Sosial: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 2 Februari 1951, 6 Maret 1953 tentang transmigrasi. | stensilan | 2 lembar |
| 2250 | Peroranga kepada Presiden: surat-surat tanggal 28 Nopember 1951 - 16 Juli 1953 tentang masalah transmigrasi, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2251 | DPRDS Kabupaten Bogor dan Lampung , Ormas dan Perorangan: surat-surat pernyataan tanggal 24 Desember 1951 - 1 Pebruari 1958 tentang tuntutan pengadaan transmigrasi. | asli, tembusan | 3 lembar |
| 2252 | Rapat Panitia Penyelenggaraan Resolusi di Ambon: resolusi tanggal 30 Oktober 1952 tentang sikap politik terhadap pelaksanaan transmigrasi di Maluku. | asli | 2 lembar |
| 2253 | Perorangan: surat-surat tanggal 12 Januari - 8 Desember 1959 tentang permohonan untuk menjadi transmigasi. | asli | 1 sampul |
| 2254 | Usaha Bersama Rombongan Transmigrasi BAPRI Kedondong Lampung Selatan kepada BRN: surat tt Februari 1953 tentang permohonan perhatian terhadap nasib transmigran, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 2255 | Ketua Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi kepada Presiden: surat tanggal 6 Juli 1953 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Yapeta, dengan lampiran. NB: sebagian dalam B. Belanda | asli | 1 sampul |
| 2256 | DPRDS Maluku Tengah: Surat Keputusan No.7/PUT/DPRDS tanggal 10 Desember 1953 tentang transmigrasi dari Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. | salinan | 1 lembar |
| 2257 | Organisasi/partai politik, DPRDS Kab. Lampung Selatan: surat-surat pernyataan dukungan tanggal 18 Desember 1953 - 5 Maret 1954 tentang penolakan tambahan transmigran untuk masa yang akan datang di daerah Lampung Selatan, disertai pengantar. | asli | 1 sampul |

II. BAGIAN DINAS KHUSUS

A. PROTOKOLER

| | | | |
|------|--|------------------|----------|
| 2258 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 20 September 1950-5 Oktober 1959 tentang ucapan selamat dan terima kasih untuk dan dari Presiden. | asli, pertinggal | 8 sampul |
| 2259 | KPRI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri: surat tanggal 2 Juni 1951 tentang ketentuan pengiriman surat-surat kepada/untuk presiden. | pertinggal | 1 lemb |

| | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------|
| | 2260 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Perintah-Surat Perintah tanggal 13 Oktober 1951 - 28 Nopember 1957 tentang penunjukan beberapa orang perwira untuk menjalankan tugas keprotokolern. | tembusan | 1 sampul |
| | 2261 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Perdana Menteri RI: surat-surat tanggal 25 Oktober - 10 Desember 1952 tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Protokol, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| '- Kunjungan | 2262 | Kementerian, perorangan: surat-surat tanggal 1 Juni 1950 - 22 Agustus 1959 tentang permohonan menghadap/mengunjungi Presiden RI (audensi) | asli | 2 sampul |
| | 2263 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Oktober 1950-19 Desember 1958 tentang kunjungan Presiden RI ke Luar negeri, dengan lampiran. | asli , pertinggal | 1 sampul |
| | 2264 | Perorangan: surat-surat tanggal 25 Oktober 1950-28 Nopember 1957 tentang permohonan ikut rombongan Presiden ke daerah-daerah. | asli, tembusan | 1 sampul |
| | 2265 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal 1951 -1952 tentang kunjungan Presiden Philipina ke Indonesia. | asli | 1 sampul |
| | 2266 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanpa tanggal Januari 1951 tentang kunjungan Perdana Menteri Pakistan ke Indonesia. | asli | 1 sampul |
| | 2267 | Ajudan Presiden: Daftar acara tanpa tanggal Januari 1951 - 13 Agustus 1959 tentang tamu yang menghadap Presiden RI. | asli | 1 sampul |
| | 2268 | Kabinet Presiden RI:surat-surat tanggal 14 Pebruari 1951 -25 September 1957 tentang permohonan meninjau/mengunjungi Istana Negara di Bogor dan Cipanas. | asli | 1 sampul |
| | 2269 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Pebruari - 9 Juli 1958 tentang kunjungan Presiden RI ke daerah-daerah. | asli, tembusan | 5 sampul |
| | 2270 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 12 April 1951, 14 Juli 1952 tentang kunjungan Dubes Perancis dan Inggris ke Indonesia. | asli | 2 lembar |
| | 2271 | Kabinet Presiden RI: Daftar acara kunjungan Presiden RI ke daerah tanggal 15 September 1951 - 25 Mei 1959. | stensilan | 1 sampul |
| | 2272 | Sekretaris Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Nopember 1951 - 23 September 1952 tentang perjalanan/kunjungan Wakil Presiden RI ke daerah-daerah. | asli | 6 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 2273 | Warga Negara Asing: surat-surat tanggal 17 Januari 1952 - 9 Nopember 1956 tentang kesan atas kunjungannya ke Indonesia. N.B: dalam B. Inggris & terjemahan | asli | 5 lembar |
| 2274 | Secom PKI Banyumas: surat tanggal 16 September 1952 tentang sambutan dan pernyataan atas kedatangan Presiden. | asli | 1 lembar |
| 2275 | Komandan CPM, R. Moch Sabur kepada Komandan Batalion 315 Inf: surat tanggal 20 Oktober 1953 tentang penjagaan keamanan kunjungan Wapres Amerika Serikat ke daerah Bogor, dengan lampiran. | tindakan | 1 sampul |
| 2276 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1954 tentang kunjungan PM India, Pandit Nehru ke Indonesia. NB: Bahasa Inggris. | asli | 1 sampul |
| 2277 | Kabinet Presiden RI kepada Djamin: surat-surat tanggal 28 September, 4 Oktober 1955 tentang permohonan paspor untuk berkunjung ke India dan daftar riwayat hidup. | pertinggal | 2 lembar |
| 2278 | Direktur Kabinet Presiden RI: surat pemberitahuan tanggal 28 Maret 1956 tentang perubahan acara perjalanan Presiden RI. | stensilan | 1 lembar |
| 2279 | Kementerian Pertahanan, Staf Angkatan Darat: Surat Perintah No. SP/159/b/1956, tanggal 15 Juni 1956 kepada beberapa perwira menjabat Ajudan Wakil Presiden dan Kepala Protokol selama Presiden berada dalam perjalanan ke Luar Negeri. | tembusan | 1 lembar |
| 2280 | Menteri PP & K: surat tanggal 21 November 1956 tentang kunjungan rombongan Menteri Pengajaran dari Guatemala. | asli | 1 lembar |
| 2281 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1957 tentang kunjungan tamu agung dari Yugoslavia, Arab Saudi, Rusia, Gracia dan Amerika ke Indonesia. | asli | 1 sampul |
| 2282 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 10, 19 Pebruari, 30 Oktober 1957 tentang pemutaran film kunjungan Presiden ke Luar Negeri, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 2283 | Komando Pembela Negara Kesatuan PI dan Poklamasi 17 Agustus 1945 daerah Karesidenan Malang: surat tanggal 5 Desember 1957 tentang keadaan dan usul-usul dalam pengamanan Presiden. | asli | 2 lembar |
| 2284 | Kepala Tata Usaha: telegram tanggal 26 Juli - 20 Oktober 1958 tentang pemberitahuan kesediaan menerima tamu. | pertinggal | 1 sampul |

- Pidato

| | | | |
|------|---|--------------------|----------|
| 2285 | Kabinet Presiden RI: Pidato-pidato Presiden selaku Panglima Tertinggi tanggal 5 Oktober 1950 - 9 Oktober 1958 pada hari Angkatan Perang dan hari ulang tahun Divisi Siliwangi. | konsep | 1 sampul |
| 2286 | Kementerian, Ormas, perorangan: surat-surat tanggal 7 Oktober 1950 - 18 September 1959 tentang permohonan kata sambutan dan amanat dari Presiden Soekarno. | asli | 1 sampul |
| 2287 | Perorangan, Ormas, Orpol: surat-surat tanggal 26 Juni 1951 - 18 Agustus 1959 tentang reaksi dan dukungan terhadap pidato, amanat dan sambutan Presiden Soekarno. | tembusan | 1 sampul |
| 2288 | Sekretaris Dewan Menteri kepada Kabinet Presiden : naskah-naskah tanggal 25 Juli 1951 - 26 Juli 1954 untuk sumbangan pidato pada perayaan tanggal 17 Agustus. | asli | 1 sampul |
| 2289 | Kepala Penerangan Luar Negeri: surat tanggal 16 September 1952 tentang turunan tulisan-tulisan pidato Presiden RI tanggal 17 Agustus 1952 dalam "The Rome Daily American", tanggal 18 Agustus 1952 dari Roma dan tajuk rencana dalam "Sind Observer" dari Karachi, dengan lampiran. | asli, salinan | 6 lembar |
| 2290 | Kabinet Presiden RI: sambutan dan amanat Presiden RI pada acara-acara pembukaan konferensi, pelantikan Kabinet Baru, dan perayaan-perayaan. | konsep, pertinggal | 1 sampul |
| 2291 | DKP kepada Menlu: surat tanggal 6 April 1954 tentang pengiriman salinan telegram Subandrio, Dubes RI di Moskow mengenai wawancara Presiden dengan radio, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 2292 | Perorangan: surat-surat tanggal 28 Juli 1954 - 3 Januari 1957 tentang permohonan untuk menerbitkan kumpulan pidato Presiden. | asli, pertinggal | 6 lembar |
| 2293 | Kabinet Presiden RI: Pidato-pidato Presiden tanggal 16 Mei -1 Juni 1956 pada waktu kunjungannya di Amerika. | pertinggal | 1 sampul |
| 2294 | Perorangan kepada Presiden: surat tanggal 24 Agustus 1956 tentang usul agar Presiden Soekarno mengadakan pidato yang ditujukan kepada pemuda-pemuda Suku Sunda. | asli | 1 lembar |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|----------|
| 2295 | Kabinet Presiden RI: jawaban Presiden dan Wakil Presiden RI terhadap pidato Dubes Luar Biasa dan berkuasa penuh dari Kerajaan Afganistan dan Kerajaan Thailand untuk Indonesia dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, tanggal 7 Oktober 1954 - 16 Juli 1956. | konsep | 4 lembar |
| 2296 | Kabinet Presiden RI: Pidato Presiden tanggal 10 Nopember 1956 pada acara pembukaan Sidang Konstituante. | pertinggal | 1 lembar |
| 2297 | Kabinet Presiden RI: Pidato Wakil Presiden RI di depan para Mahasiswa Universitas Sun Yat Sen di Kanton dan Pidato Roeslan Abdulgani dalam Sidang Konstituante di Bandung tentang "Negara dan Dasar Negara", tanggal 11 Oktober, 3 Desember 1957. | salinan | 2 lembar |
| 2298 | Direktur Kabinet Presiden: artikel tanggal 17 Oktober 1957 <i>The Okt Revolution and The Appreaded People</i> oleh Presiden Soekarno. NB: B. Inggris | pertinggal | 4 lembar |
| - Upacara | | | |
| 2299 | Perdana Menteri RI: Surat Keputusan tt September 1950 tentang pembentukan sebuah panitia penyelenggara upacara-upacara penyumpahan Presiden. | konsep | 1 lembar |
| 2300 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 13 Desember 1950 - 2 April 1959 tentang undangan diplomatik, konperensi, sidang dan berbagai acara. a. 1950 -1953 (1 sampul) b. 1954-1959 (1 sampul) | asli | 2 sampul |
| 2301 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 28 Desember 1950, 6 November 1954, 2 November 1956, tentang penyumpahan dan pelantikan Jaksa Agung, Menteri Perekonomian, Menteri Kesejahteraan Negara, anggota Konstituante. | asli | 3 lembar |
| 2302 | Kabinet Presiden RI: laporan-laporan tanggal 7 Agustus 1951-17 Agustus 1958 tentang persiapan pelaksanaan Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2303 | Kabinet Presiden RI: Daftar acara perayaan hari-hari besar nasional di Istana Negara, tanggal 5 Oktober 1951-20 Mei 1958. | konsep, stensilan | 1 sampul |
| 2304 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 4 Pebruari - 22 Desember 1952 tentang upacara pengangkatan TB. Simatupang/KSAD RI menjadi Jendral Mayor. | pertinggal | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------------------|----------|
| 2305 | Perorangan kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 7 Juni 1952 tentang permohonan untuk mengadakan sembahyang tarawih di Istana. | asli | 1 lembar |
| 2306 | Sekretaris I Presiden kepada Panitera MA: surat tanggal 27 Oktober 1952 tentang surat keterangan pengangkatan sumpah ketua dan wakil ketua MA. | pertinggal | 1 lembar |
| 2307 | Direktur Kabinet Presiden kepada pimpinan kantor Berita Antara: surat tanggal 4 Juni 1953 tentang teks pengumuman hari ulang tahun Presiden , dengan lampiran. | konsep, pertinggal | 2 lembar |
| 2308 | Sekretaris Dewan Menteri kepada Menlu: surat-surat tanggal 10 Januari 1954 - 26 September 1957 tentang pengangkatan duta besar-duta besar asing di Indonesia. | tembusan | 5 lembar |
| 2309 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 24 Agustus 1954 - 29 April 1957 tentang acara pemberian penghargaan, ijazah dan bintang kesatrian. | asli | 1 sampul |
| 2310 | Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat Perwakilan Semarang: surat tanggal 30 Nopember 1954 tentang permohonan kepada Ibu Fatmawati untuk membuka bazar. | tembusan | 2 lembar |
| 2311 | Kabinet Presiden RI: Daftar acara pertunjukan kesenian di Istana Negara tanggal 11 Desember 1954 - 15 Nopember 1957, dengan lampiran. | salinan | 1 sampul |
| 2312 | Kabinet Presiden RI: Pengumuman tanggal 23 Juni 1955 tentang pelantikan kolonel Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Merdeka. | stensilan | 1 lembar |
| 2313 | Perdana Menteri Republik Indonesia kepada Ketua Panitia Negara Urusan Protokol: surat tanggal 8 Juli 1955 tentang penghormatan terhadap para pembesar RI, dengan lampiran. | tembusan | 7 lembar |
| 2314 | Kabinet Presiden RI: acara penyempahan para menteri baru dan pelantikan Anggota DPR yang baru, tanggal 24 - 26 Maret 1956, dengan lampiran. | stensilan | 5 lembar |
| 2315 | Menteri Perburuhan kepada Presiden RI: surat tanggal 11 April 1957 tentang serah terima jabatan menteri lama kepada menteri baru, dengan lampiran. | asli | 1 lembar |

B. PERMINTAAN
HADIAH

| | | | |
|------|---|----------------|----------|
| 2316 | KSAD: Surat Perintah No. 809/9/1957, tanggal 19 September 1957 kepada Komandan Kompi Markas SUAD untuk menyiapkan upacara pelantikan Perwira-perwira Geni Baru pada tanggal 5 Oktober 1957 di depan Istana Merdeka. | tembusan | 1 lembar |
| 2317 | Kabinet Presiden RI: daftar rencana acara penutupan Pekan Aksi Gerakan Tani, tanggal 2 Juni 1958. | stensilan | 1 lembar |
| 2318 | Perorangan: surat-surat tanggal 12 Pebruari 1950-21 Maret 1959 tentang permohonan pinjaman dan permintaan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dengan lampiran. | asli | 2 sampul |
| 2319 | Perorangan: surat-surat tanggal 4 September 1950 - 21 Maret 1959 tentang permohonan hadiah berupa pakaian, alat tulis, piala, piagam dan tanda jasa. NB: Bahasa Arab dan daerah. | asli | 1 sampul |
| 2320 | Kementerian, perorangan: surat-surat tanggal 7 September 1950 - 26 Nopember 1957 tentang permohonan foto dan tanda tangan serta perangko. | asli | 2 sampul |
| 2321 | Perorangan: surat-surat tanggal 8 September 1950 - 7 Agustus 1957 tentang permohonan pemberian nama bayi yang lahir tanggal 17 Agustus. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2322 | Perorangan kepada Presiden: surat-surat tanggal 10 Desembr 1950 - 10 Agustus 1959 tentang pengiriman karangan, cerita, puisi/syair dan nyanyian/tembang. | asli | 3 sampul |
| 2323 | Perorangan: surat-surat tanggal 1 Januari 1951 - 15 Pebruari 1956 tentang permohonan pembelian kendaraan untuk dinas dan umum, dengan lampiran. | asli, tembusan | 1 sampul |
| 2324 | Perorangan: surat-surat tanggal 7 April 1951 - 5 Juli 1958 tentang permohonan sepeda. | asli | 1 sampul |
| 2325 | Perorangan : surat-surat tanggal 9 April 1951 - 19 September 1959 tentang permohonan doa restu. | asli | 1 sampul |
| 2326 | Perorangan: surat-surat tanggal 30 April 1951 - 11 September 1959 tentang permohonan dana untuk peralatan pendidikan dan pembangunan tempat ibadah. | asli | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 2327 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 Mei 1951- 1955 tentang pemberian kado/hadiah kepada pejabat-pejabat dari negara-negara yang berkunjung dan yang akan dikunjungi. | pertinggal | 1 sampul |
| 2328 | Badan-badan usaha, perorangan: surat-surat tanggal 24 Mei 1951 - 10 September 1959 tentang permohonan modal untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja. | asli | 1 sampul |
| 2329 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 5 Oktober 1951 - 24 September 1957 tentang permohonan sumbangan untuk kepentingan organisasi-organisasi. | asli | 1 sampul |
| 2330 | Perorangan: surat-surat tanggal 30 April 1951 - 19 Desember 1957 tentang permohonan dan pengiriman nasehat Presiden. | asli | 1 sampul |
| 2331 | Hira T. Punjabi: surat tanggal 17 September 1953 tentang permohonan pemberian tanda jasa/tanda ikut berjuang, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2332 | Nurwilis: surat tanggal 16 Desember 1953 tentang permohonan untuk menjadi bintang film, disertai foto. NB: tulisan tangan. | asli | 1 lembar |
| 2333 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Januari 1954, 27 Mei 1955 tentang pengiriman piagam dan penghargaan bagi Presiden Soekarno. | pertinggal | 5 lembar |
| 2334 | Eddy Sadali: surat tanggal 1 Juni 1955 tentang permohonan ijin untuk menyumbangkan tarian pada hari kemerdekaan RI di Istana. | asli | 1 lembar |
| 2335 | Pinisepuh Djowo-Dipo Pusat Malang: surat tanggal 28 Juni 1956 tentang permohonan membunyikan sirine. | asli | 1 lembar |
| 2336 | Hector S. Bernardini Republic Argentina: surat tanggal 12 Oktober 1956 tentang permohonan mata uang Republik Indonesia, dengan lampiran. NB: Bahasa Argentina. | asli | 5 lembar |
| 2337 | Wagiyo Cs kepada Dewan Nasional melalui Presiden: surat tanggal 8 Oktober 1957 tentang permohonan jawaban atas permohonannya yang lalu yaitu mengenai cita-citanya yang ingin mempunyai sawah, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2338 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 1 Nopember 1950 - 12 Desember 1954 tentang daftar riwayat hidup Soekarno dan Moh. Hatta yang akan dimuat dalam " <i>International Year-Book & Statemen's Who's Who</i> ". NB: B. Inggris. | pertinggal | 1 lembar |

C. Keluarga

| | | | |
|------|---|------------------|----------|
| 2339 | Perorangan: surat-surat tanggal 20 Desember 1950-14 Agustus 1959 tentang makna mimpi (secara gaib). | asli | 1 sampul |
| 2340 | Raiturrachman: surat tanggal 29 Januari 1951 tentang rencana STOLP yaitu rencana mengenai suluh dari almarhum R.A. Kartini. | asli | 1 lembar |
| 2341 | Perorangan: surat-surat tanggal 17 Maret 1951, 21 Oktober 1952, 2 Mei 1956 tentang permohonan maaf atas kekeliruan, kekhilafan/ kesalahpahaman. | asli | 1 sampul |
| 2342 | Kabinet Presiden RI kepada Kementerian Penerangan: surat tanggal 16 April 1951 tentang biografi Presiden dan Ny. Soekarno, dengan lampiran. NB: sebagian B. Inggris. | pertinggal | 5 lembar |
| 2343 | Redaksi pers/pewartaan Kementerian Penerangan kepada Presiden: surat tanggal 26 April 1951 tentang kutipan Surat Kabar Pikiran Rakyat tanggal 24 April 1951 mengenai ibu Inggit, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2344 | Direktur Kabinet Presiden kepada Mr. Ali Sastroamidjojo surat-surat tanggal 9 Mei 1951 tentang keberatan menggunakan nama Presiden untuk kapal laut yang baru. | asli, pertinggal | 5 lembar |
| 2345 | Perorangan: surat-surat tanggal 30 Desember 1952 - 25 Agustus 1957 tentang permohonan ikut tinggal/menjadi keluarga/anak angkat Presiden. | asli | 1 sampul |
| 2346 | Perorangan: surat-surat tanggal 25 Juni - 30 Juli 1953 Tentang kabar bohong/berita mengenai adanya hubungan antara pelajar dengan Presiden. | asli | 2 lembar |
| 2347 | Organisasi massa: surat-surat tanggal 25 September 1954 - 1 Nopember 1955 tentang protes atas perkawinan Soekarno dengan Ny. Hartini ditinjau dari segi keamanan, politik, dan keuangan negara. | asli | 1 sampul |
| 2348 | Kepala Penerangan Luar Negeri Kementerian Penerangan: surat tanggal 10 April 1956 tentang permintaan keterangan mengenai pribadi Bung Karno. | asli | 2 lembar |
| 2349 | Kabinet Presiden kepada A. Tisnaamidjaja: surat tanggal 20 Maret 1957 tentang pertanyaan kapan Presiden akan menyunati putranya, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2350 | I. Gusti Ngurah Mantera: surat tanggl 27 Juli 1957 tentang peristiwa masuknya roh Gajah Mada dalam diri tamunya. | asli | 1 lembar |

III. BAGIAN ADMINISTRASI

A. ORGANISASI DAN TATA

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2351 | August Sihombing: surat tanggal 6 Oktober 1959 tentang permohonan berkenalan dengan Guntur dan Megawati. | asli | 1 lembar |
| 2352 | Berkas tahun 1950-1954 tentang ruang lingkup, tugas dan kewajiban organisasi Kabinet Presiden Republik Indonesia. | stensilan | 1 sampul |
| 2353 | Kabinet Presiden RI: Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1950 - 6 Desember 1957. | salinan | 1 sampul |
| 2354 | Kabinet Presiden RI: Instruksi tanggal 28 Oktober 1950 - Juli 1952. | asli | 1 sampul |
| 2355 | Kabinet Presiden RI: Laporan singkat rapat hari Sabtu I dan II, tanggal 8 Nopember 1952 tentang pembagian kerja dan pelaksanaannya, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 2356 | Kabinet Presiden RI: Notulen rapat hari Sabtu III, tanggal 10 Januari 1953 tentang tugas rumah tanggal Kabinet Presiden. | pertinggal | 1 lembar |
| 2357 | Menteri Urusan Pegawai: surat tanggal 13 Januari 1953 tentang usul mengatur kedudukan Direktur Kabinet Presiden, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2358 | Kabinet Presiden RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian: surat tanggal 2 September 1953 tentang penjelasan akan adanya surat-surat yang diteruskan oleh Kabinet Presiden RI kepada Kementerian-Kementerian. | pertinggal | 3 lembar |
| 2359 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 3 Desember 1953-21 Nopember 1957 tentang singkatan titel jabatan dan pejabat yang berhak mengirim telegram. | pertinggal | 1 sampul |
| 2360 | Ajudan Presiden RI: catatan tanggal 20 April 1955 tentang pedoman tugas sewaktu ada tamu agung di Istana Negara, dengan lampiran. | stensilan | 2 lembar |
| 2361 | Presiden RI: Surat Perintah No.1/Pres/1956 tanggal 22 Agustus 1956 tentang tugas Winoto Danuasmoro dan Prihatin sebagai Kepala Rumah Tanggal Presiden dan Wakil. NB: Arsip rusak. | salinan | 1 lembar |
| 2362 | Ajudan Presiden RI: pengumuman tanggal 1 Pebruari 1957 tentang penggantian stempel Rumah Tangga Militer Presiden. | stensilan | 1 lembar |

B.

| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 2363 | Comandan Polisi Pengawal Presiden Yogyakarta: surat tanggal 13 Oktober 1950 tentang permohonan untuk memperkerjakan kembali Paimin sebagai kenek mobil. | asli | 1 lembar |
| 2364 | Perorangan: surat-surat tanggal 1 Nopember 1950-12 Desember 1955 tentang pekerjaan di lingkungan Sekretariat Kabinet Presiden RI. | asli | 1 sampul |
| 2365 | Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta surat tanggal 13 Desember 1950 tentang status pegawai gedung bekas kepresidenan, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2366 | Kabinet Presiden RI: surat kuasa tanggal 6 Januari 1951 tentang pemberian kuasa kepada S.P. Paku Alam VIII untuk menandatangani daftar gaji dan uang tunggu pegawai Istana Yogyakarta. | pertinggal | 1 lembar |
| 2367 | Darmosanto kepada Presiden RI: surat tanggal 4 Pebruari 1951 tentang pengisian lowongan kepala Rumah Tanggal Presiden. | asli | 1 lembar |
| 2368 | Daftar nama pegawai dan pejabat tinggi Kabinet Presien, tanggal 8 Pebruari 1951 - 26 Desember 1957. | stensilan | 1 sampul |
| 2369 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 8 Pebruari - 27 Desember 1955 tentang mutasi pegawai. | asli, tembusan | 6 lembar |
| 2370 | Menteri Kesehatan: Surat Keputusan tanggal 28 Maret 1951 tentang pengangkatan Djatini sebagai tenaga pembantu dokter gigi di Instansi Kabinet Presiden, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 2371 | Kabinet Presiden: surat tanggal 16 Mei 1951 tentang mutasi sopir Kabinet Presiden. | pertinggal | 2 lembar |
| 2372 | Sekretaris Presiden kepada Menteri Perhubungan: surat tanggal 29 Mei 1951 tentang permohonan penambahan tenaga, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2373 | Kabinet Presiden kepada Menteri Urusan Pegawai: surat tanggal 30 Mei 1951 tentang susunan pegawai dari instansi Kabinet Presiden, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2374 | Kantor Dana Pensiun RI Jogjakarta kepada KPRI: surat tanggal 8 Oktober 1951 tentang daftar gaji pegawai KPRI yang diperbantukan, dari bulan Pebruari - Oktober 1951, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2375 | Kepala Urusan Pegawai Kabinet Presiden kepada Kementerian Urusan Pegawai: Daftar nama-nama pegawai Setneg dan Rumah Tangga Presiden Jogjakarta yang meninggal pada waktu clash ke-II. | pertinggal | 1 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2376 | Daftar riwayat hidup pegawai Kabinet Presiden RI tanggal Januari 1952, 20 Desember 1955. | asli | 2 lembar |
| 2377 | Kabinet Presiden kepada Menteri Urusan Pegawai: surat tanggal 10 Januari 1952 tentang permohonan/usul kenaikan pangkat pejabat Kabinet Presiden. | pertinggal | 1 lembar |
| 2378 | Komandan CPM: nota rahasia tanggal 20 Mei 1952 tentang kelakuan kepala rumah tangga istana presiden. | asli | 1 lembar |
| 2379 | Corps Polisi Militer: surat pemberitahuan tanggal 26 September 1952 tentang pelimpahan wewenang dari pimpinan kompi IV pengawal istana, selama mengawal Presiden ke Jateng dan Jatim. | asli | 1 lembar |
| 2380 | Kepala Urusan Keuangan Kabinet Presiden: surat tanggal 8 Oktober 1952 tentang keterangan R.Pitojo benar-benar pegawai Kabinet Presiden, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 2381 | Surat Keterangan tanggal 13 Oktober 1952 tentang tugas-tugas pegawai Kabinet Presiden golongan 6/d keatas. | pertinggal | 1 lembar |
| 2382 | Intoyo kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 13 Desember 1952 tentang permohonan cuti tahunan. | asli | 1 lembar |
| 2383 | Lurah Desa Cipanas: surat-surat keterangan tanggal 28 Maret 1953 tentang keluarga dan pegawai Istana Cipanas. | salinan | 1 sampul |
| 2384 | Kabinet Presiden : surat tanggal 18 Mei 1953 tentang memperpanjang ikatan dinas terbatas dari Burcher, sebagai <i>hofmeester</i> istana presiden. | pertinggal | 2 lembar |
| 2385 | Hasyim Alang kepada Haji Alang Saleh: surat tanggal 11 Agustus 1953 tentang permohonan untuk menjadi penasehat Presiden. | asli | 1 lembar |
| 2386 | KPRI kepada Kepala Kantor Pensiun dan Tunjangan : surat tanggal 14 September 1953 - 24 Maret 1955 tentang pengangkatan pegawai tetap, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 2387 | Kepala Tata Usaha kepada Machjudin: surat tanggal 23 Maret 1954 tentang permohonan pengaturan cara kerja staf Rumah Tangga Presiden RI. | asli | 1 lembar |
| 2388 | KPRI kepada Sekretaris Wakil Presiden : surat tanggal 30 Juli 1954 tentang penangguhan pengangkatan Pudjiarti menjadi juru tulis pembantu, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2389 | DKP kepada Menteri Pertahanan: surat tanggal 16 Agustus 1954 tentang usul kenaikan pangkat Major Soegandhi, ajudan Presiden, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2390 | Administratur , Winarto D.A kepada Kepala Kendaraan Istana Presiden, Ibnu: surat tanggal 11 September 1954 tentang tindakan dinas kepada sopir yang tidak menjalankan perintah. | pertinggal | 1 lembar |
| 2391 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Polisi Bagian Lalu Lintas: surat tanggal 30 Nopember 1954 tentang permohonan maaf atas kesalahan sopir pegawai Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 1 lembar |
| 2392 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Januari - 3 September 1955 tentang permohonan pengujian kesehatan pegawai Kabinet Presiden RI yang akan diangkat menjadi pegawai. | pertinggal | 1 sampul |
| 2393 | Kabinet Presiden RI kepada Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia: surat tanggal 29 Maret 1955 tentang pengurusan pensiun Kerry, pegawai Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 1 lembar |
| 2394 | Rumah Tangga Militer Presiden: surat tanggal 11 Mei 1955 tentang penempatan tenaga bantuan Kopral Sajid Hoessin, dengan lampiran. | asli | 1 sampul |
| 2395 | Mualliff Nasution, pegawai Penata Usaha Kabinet Presiden RI kepada Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 31 Mei 1955 tentang permohonan kenaikan pangkat, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2396 | Kabinet Presiden RI kepada Kabinet Perdana Menteri RI: surat tanggal 24 Nopember 1955 tentang riwayat kerja dari Tieleman, bekas hoofdambtenaar Algemene Secretarie, dengan lampiran. NB: lampiran tidak lengkap. | pertinggal | 2 lembar |
| 2397 | Kementerian Pertahanan kepada Kabinet Presiden RI: kartu legalisasi tanda tangan beberapa pejabat Kabinet Presiden RI, tahun 1955. | asli | 5 lembar |
| 2398 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 2 Januari- 19 Oktober 1956 tentang penarikan kembali surat keterangan pengesahan kekuasaan pekerjaan bendahara pada Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 1 lembar |
| 2399 | Kabinet Presiden RI: surat pemberitahuan tanggal 9 Januari 1956 tentang mutasi pegawai Kementerian Penerangan ke staf Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 3 lembar |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2400 | Kabinet Presiden kepada Kepala Arsip Negara: surat tanggal 11 Januari 1956 tentang pengesahan daftar riwayat kerja untuk penetapan pensiun pasti Mr. T. J. Kramer, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 2401 | Presiden RI: Surat Perintah tanggal 22 Agustus 1956 tentang penugasan Winoto Danuasmoro dan Prihatin sebagai kepala RT Presiden selama S. Hardjowardojo dan Sumantri bepergian keluar negeri, disertai instruksi Kep. RT. | salinan | 2 lembar |
| 2402 | Polisi Negara Mobile Brigade Peleton Pengawal Pribadi Presiden: Berita Acara tanggal 7 September 1956 tentang pengakuan sopir RT Presiden yang berbuat jinah dengan istri orang lain. | salinan | 1 sampul |
| 2403 | Kepala KUP kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 12 Nopember 1956 tentang formasi pegawai tahun 1956, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2404 | CPM, Pengawal Istana: Pengumuman No. Peng.01/Istn/2-1957 tentang penggantian Komandan pengawal Kompi pengawal CPM Istana Presiden Jakarta. | stensilan | 1 lembar |
| 2405 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Bagian Urusan Pegawai CPM Detasemen Garnisoen III/6: surat tanggal 12 Januari 1957 tentang penerimaan lamaran Arsad menjadi pesuruh. | pertinggal | 1 lembar |
| 2406 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kepala Jawatan Perjalanan: surat tanggal 23 Januari 1957 tentang penunjukan sebagai bendaharawan atas fonds S. Hardjowardojo, Kepala Rumah Tangga Presiden, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2407 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Jawatan Kesehatan Kotapraja : surat tanggal 29 April 1957 tentang penempatan Dr. Lauw Ing Tjhiong di Bogor sebagai dokter keluarga presiden, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2408 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada I. Wangsa Widjaja dan Hutabarat: surat tanggal 29 Juni 1957 tentang pernyataan tidak keberatan jika mereka diperbantukan kepada Bung Hatta, setelah tidak menjabat direktur. | pertinggal | 2 lembar |
| 2409 | Kabinet Presiden RI: surat pemberitahuan tanggal 29 Juli - 3 Mei 1957 tentang perubahan jam kerja bagi Staf RT Presiden dan Kantor USDM (United States of America Operations Missions to Indonesia)/ICA | pertinggal | 3 lembar |

| | | | |
|------|--|------------|----------|
| 2410 | Kepala Staf Angkatan Darat: Surat Perintah tanggal 5 Agustus 1957 tentang penunjukan Majoor Soetopo, NRP. 13677 sebagai A.D.C. Pada Wakil Presiden dari Yugoslavia. | tembusan | 1 lembar |
| 2411 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Dewan Pengawas Keuangan : surat tanggal 26 Agustus 1957 tentang riwayat pekerjaan dan daftar penunjukan istri/anak, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2412 | Kabinet Presiden RI kepada Abdul Salam: surat tanggal 7 September 1957 tentang pemberitahuan pengangkatan pekerjaannya. | pertinggal | 1 lembar |
| 2413 | Kementerian PP & K kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 23 September 1957 tentang rancangan SK Presiden mengenai pengangkatan dan pemberian tunjangan jabatan kepada Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo, sebagai pegawai bulanan. | asli | 1 lembar |
| 2414 | Direktur Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 27 September 1957 tentang wakil Kabinet Presiden dalam Panitia Peninjau Kembali PGPN 1955, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2415 | Ajudan Presiden RI: Instruksi No. 1143/AP/5/1158 tanggal 18 Nopember 1958 tentang penggantian tugas selaku Ajudan Presiden di Jakarta, Bogor dan Cipanas, selama pendidikan di luar negeri. | asli | 1 lembar |

C.

C. PERBENDAHARA/ PERBENDAHARA

| | | | |
|------|---|------------------|----------|
| 2416 | Kabinet Presiden RI: daftar-daftar tahun 1950-1959 tentang pembayaran gaji dan uang lembur pegawai. | pertinggal | 1 sampul |
| 2417 | Kabinet Presiden RI: tanda-tanda bukti pengeluaran anggaran bulan Juni 1950-Desember 1958. | asli, pertinggal | 3 sampul |
| 2418 | Kabinet Presiden RI: daftar pemeriksaan kas Kabinet Presiden beserta surat untuk sekretaris Presiden I, tanggal 14 Nopember 1950. | pertinggal | 4 lembar |
| 2419 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Desember 1950 - 10 Maret 1952 tentang tagihan tunggakan rekening yang belum di bayar, dengan lampiran. | asli | 6 lembar |
| 2420 | Pimpinan Jawatan Gedung-gedung Negeri Jakarta-Tanggerang kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat dari Kementerian PU & T: surat tanggal 13 Januari 1951 tentang perincian biaya perbaikan garasi mobil dan paviliun Istana Wakil Presiden, dengan lampiran. | tembusan | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2421 | KPRI kepada Wakil Presiden: nota tanggal 19 Mei 1951 tentang tunjangan pensiun untuk bekas presiden, wakil Presiden, menteri dan anggota badan pekerja. | salinan | 3 lembar |
| 2422 | Kabinet Presiden RI: catatan Panitia Perayaan 17 Agustus 1951 tentang dana untuk perayaan 17 Agustus. | stensilan | 1 sampul |
| 2423 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kepala Rumah Tangga Presiden: surat tanggal 8 Oktober 1951 tentang pemberian tambahan upah untuk para pekerja upah bulanan, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2424 | Kantor Dana Pensiun kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 1 Desember 1951 tentang permohonan penggantian uang pembelian kacamata Karsodiwirjo, pegawai Kabinet Presiden RI, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2425 | Kabinet Presiden RI: nota tanggal 22, 29 Januari 1952 tentang sistem pemberian tunjangan dan penetapan gaji terendah. | pertinggal | 1 sampul |
| 2426 | K.R.T. Mr. S. Brotodiningrat: kwitansi tanggal 28 April 1952 tentang pembayaran 3 buah wayang kulit. | asli | 1 lembar |
| 2427 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kepala Rumah Tangga Presiden: surat tanggal 17 Mei 1952 tentang pemegangan keuangan istana harus dirubah sesuai dengan aturan yang berlaku. | asli | 1 lembar |
| 2428 | Kepala Tata Usaha kepada Kepala Jawatan Perjalanan: nota tanggal 28 Mei 1952 tentang penerimaan uang sewa mobil pemerintah, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |
| 2429 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Inspeksi Keuangan: surat 16 Juni 1952 - 3 Oktober 1955 tentang perincian gaji Sdr. R.S. Hardjowardojo/Kepala Rumah Tangga Kabinet Presiden RI, dengan lampiran. | pertinggal | 4 lembar |
| 2430 | Pemimpin Jawatan Gedung-gedung Bogor: surat-surat tanggal 18 Juni - 9 September 1952 tentang rencana biaya perbaikan istana Presiden. | asli | 1 sampul |
| 2431 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Sekretariat Uni-Indonesia Belanda: surat tanggal 24 Oktober 1952 tentang penagihan uang sewa ruangan kantor Kabinet Presiden yang dipakai oleh Sekretariat Uni Indonesia Belanda. | pertinggal | 1 lembar |
| 2432 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Sekretaris Wakil Presiden I, Wangsawidjaja: surat tanggal 8 Nopember 1952 tentang penjelasan cara pertanggungjawaban keuangan Rumah Tangga Presiden. | konsep | 1 lembar |

| | | | |
|------|--|------------------|----------|
| 2433 | Kabinet Presiden RI: nota tanggal 11 Desember 1952 tentang rencana anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kabinet Presiden, dengan lampiran. | konsep | 2 lembar |
| 2434 | Kepala Tata Usaha Kabinet Presiden RI kepada Toko Bunga " Sritaman" Gondolayu di Yogyakarta: surat tanggal 18 Desember 1952 - 2 Pebruari 1953 tentang tagihan sisa uang istana, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2435 | Kepala Jawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara kepada Kabinet Presiden RI: Surat (kawat) tanggal 18 Desember 1952 tentang pinjaman T. Sjammaoen Latief Rp. 500,00 pada Kantor Kabinet Presiden RI, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2436 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 24 Desember 1952 -14 Agustus 1957 tentang penyelesaian biaya perjalanan Presiden dan Wakil Presiden. | asli | 1 sampul |
| 2437 | Kabinet Presiden RI: laporan tahun 1951 - 1958 tentang anggaran belanja Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 1 sampul |
| 2438 | Gubernur Jawa Tengah kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 11 Pebruari 1953 tentang pertanggungjawaban uang Rp. 7000,00 untuk penerimaan Presiden Quirino pada kunjungannya ke daerah Surakarta, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2439 | Kabinet Presiden RI kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan: surat tanggal 4 Juli 1953 tentang pengiriman berita acara penyerahan ongkos perjalanan dan penginapan Wakil Presiden RI ke Saudi Arabia, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2440 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 24 Juli - 18 Desember 1953 tentang biaya pertunjukan perayaan 17 Agustus di Istana, dengan lampiran. | asli, pertinggal | 2 lembar |
| 2441 | Kantor Urusan Pegawai kepada kabinet Presiden RI: surat tanggal 15 Pebruari 1953 tentang pembayaran gaji pegawai lepas istana-istana Presiden, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2442 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 5 April 1954 - Oktober 1955 tentang kenaikan gaji beberapa pejabat Kabinet Presiden RI, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |

| | | | |
|------|---|------------|----------|
| 2443 | Menteri Keuangan: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 21 April 1954 - salinan 28 Juni 1956 tentang pemberian kredit kepada Kabinet Preside RI, dengan lampiran. | | 1 sampul |
| 2444 | Kabinet Presiden RI kepada Perwakilan GIA N.V. Yogyakarta : surat tanggal 4 Mei 1955 tentang penyampaian garantie verklaring guna pembayaran ongkos kepergian Hasan dan Moh. Supardi, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2445 | Kementerian Keuangan bagian perbendaharaan kepada Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 Mei - 15 Oktober 1955 tentang biaya perjalanan pegawai dan SK pemberian kredit kepada Rumah Tanggal Kepresidenan. | asli | 3 lembar |
| 2446 | I. C. Pandij, Art Gallerij Pandij kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 1 Juni 1955 tentang kekurangan uang pembelian lukisan. | asli | 1 lembar |
| 2447 | Duta Besar Mesir: Mr. Tamzil Sutan Naraya kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 3 Juli 1955 tentang pengeluaran uang untuk kunjungan presiden RI ke Mesir tanggal 19-24 Juli 1955, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2448 | Kepala Tata Usaha kepada Inspeksi Keuangan: surat tanggal 3 Oktober 1955 tentang gaji R. S. Hardjowardojo. | pertinggal | 1 lembar |
| 2449 | Ketua Panitia Penyambutan Presiden di Bali kepada Kabinet Presiden: surat tanggal 15 November 1955 tentang pengiriman/penerimaan tambahan biaya penyambutan Perdana Menteri Nehru di Bali dalam bulan Juli 1950, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2450 | Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 20 Januari 1956 tentang uang penggantian biaya perjalanan dan pembelian tiket GIA Surabaya-Jakarta bagi Ny. Sadikin. | asli | 2 lembar |
| 2451 | Bagian Tata Usaha Kabinet Presiden RI kepada Kabinet Presiden RI: daftar tanggal 1 Maret 1956 tentang perhitungan infasing PGP 1948 untuk Sujak, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2452 | Komandan CPM Pelt. Peng. Istana Cipanas kepada Kepala RT Presiden RI: laporan tanggal 20 Agustus 1956 tentang penjualan banteng Istana, disertai pengantar. | asli | 2 lembar |

| | | | |
|------|---|------------------|-----------|
| 2453 | Direktur Kabinet Presiden RI kepada Kepala Jawatan Perjalanan Negeri u.p. konsep Bagian Deklarasi: surat tanggal 15 September 1956 tentang penyelesaian daftar ongkos perjalanan, disertai lampiran. | | 2 lembar |
| 2454 | DKP kepada Bank Indonesia: surat tanggal 11 April 1957 tentang pembayaran kaarslampen, dengan lampiran. | konsep | 3 lembar |
| 2455 | Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 3 Oktober 1957 tentang uang honorarium para ajudan Presiden, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2456 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Pebruari, 13 Juni 1951 tentang pembelian bahan-bahan kebutuhan pokok (beras, gula, terigu) untuk pegawai Kabinet Presiden. | pertinggal | 2 lembar |
| 2457 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 15 Pebruari 1951 - 19 Pebruari 1954 tentang rumah-rumah pegawai Kabinet Presiden RI. | asli, pertinggal | 5 lembar |
| 2458 | Balai Pengobatan Istana Merdeka: laporan bulanan bulan Pebruari - Desember 1951. | stensilan | 11 lembar |
| 2459 | Direktur Kabinet Presiden: surat tanggal 5 April 1952 tentang kesempatan bagi para menteri untuk mengadakan week end di Pavilliun Istana Cipanas, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2460 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 4 September 1952 - 19 Januari 1954 tentang permohonan pengobatan pegawai dan keluarganya Kabinet Presiden RI. | pertinggal | 5 lembar |
| 2461 | Kementerian Perhubungan kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 13 Januari 1953 tentang penjemputan pegawai dengan bis, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2462 | Dinas Pemindahan Darah PMI: surat tanggal 16 Juli 1954 tentang pengiriman kartu bagi karyawan yang menyumbangkan darah. | asli | 1 lembar |
| 2463 | Pimpinan Jawatan Gedung-gedung Bogor kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 26 Juli 1954 tentang pendirian rumah pengawal dan perbaikan tempat istirahat Wakil Presiden di Megamendung Bogor. | asli | 1 lembar |
| 2464 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 13 April, 24 September 1955 tentang permohonan bahan pakaian untuk pegawai Kabinet Presiden RI dan keluarganya. | pertinggal | 2 lembar |

E. PERLENGKAPAN

| | | | |
|------|---|----------------------|----------|
| 2465 | Dr. R. H. Soeharto kepada Kabinet Presiden RI : surat tanggal 15 Nopember 1957 tentang permohonan obat untuk persediaan perjalanan Presiden dan rombongan. | asli | 1 lembar |
| 2466 | KPRI kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri Kementerian Pekerjaan Umum: surat tanggal 23 Nopember 1950 tentang permintaan garasi untuk mobil dinas. | pertinggal | 1 lembar |
| 2467 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 5 Pebruari 1951 - 16 Desember 1953 tentang usul pembelian barang-barang keperluan istana. | tembusan, pertinggal | 1 sampul |
| 2468 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 7 Pebruari 1951 - 19 Agustus 1952 tentang penawaran barang kepada presiden dan wakil Presiden. NB: sebagian dalam bahasa Inggris | asli | 4 lembar |
| 2469 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 22 Pebruari 1951 - 19 Juli 1954 tentang fasilitas telepon kantor. | asli, pertinggal | 1 sampul |
| 2470 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 2 April 1951 - 28 Oktober 1957 tentang kendaraan-kendaraan dinas di lingkungan kabinet Presiden RI. | asli, pertinggal | 2 sampul |
| 2471 | Kabinet Presiden RI: daftar surat tanggal 22 Mei 1951 - 1954 tentang pengadaan sepeda untuk pegawai. | asli | 1 sampul |
| 2472 | Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan-Surat Keputusan tanggal 30 Mei 1951 - 20 Oktober 1955 tentang perbaikan-perbaikan gedung istana Presiden, dengan lampiran. | salinan | 2 sampul |
| 2473 | KPRI kepada Kepala Kantor Telepon Jakarta: surat tanggal 3 Nopember 1951 tentang perubahan buku petunjuk telepon, dengan lampiran. | konsep | 5 lembar |
| 2474 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 14 Pebruari, 7 Agustus 1952 tentang pendirian rumah/gedung asrama di Istana Bogor, dengan lampiran. | asli | 4 lembar |
| 2475 | Kabinet Presiden RI: telegram tanggal 7 Maret 1952 - 14 Nopember 1958 tentang urusan pesanan dan pengiriman barang-barang souvenir. | asli, pertinggal | 6 sampul |
| 2476 | Kabag Administrasi kepada Sekretaris Kabinet Perdana Menteri : nota, tanggal 24 Mei 1952 tentang kebakaran di kamar arsip bekas Algemene Secretarie, dengan lampiran. | tembusan | 3 lembar |
| 2477 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 11 Agustus 1951 - 19 September 1955 tentang permohonan kemudahan mendapatkan boordpass/ticket. | pertinggal | 5 lembar |

| | | | |
|------|---|------------------|----------|
| 2478 | Menteri Keuangan kepada Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 19 September 1952, 3 Maret 1955 tentang Penghentian untuk sementara pembelian alat-alat kantor, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2479 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 23 Maret, 30 April 1953 tentang pemindahan 2 arca dari gedung Agung Yogyakarta ke Istana Merdeka, dengan lampiran. | pertinggal | 1 sampul |
| 2480 | Affandi kepada Kabinet Presiden RI: surat tanggal 7 April 1953 tentang permohonan ijin untuk mengirim 60 lukisan agar disimpan di Istana Merdeka, dengan lampiran. NB: tulisan tangan. | asli | 2 lembar |
| 2481 | Kabinet Presiden RI: ikhtisar laporan mingguan tanggal 22 Maret 1954 - 22 Maret 1955 tentang keadaan Istana Presiden. | tembusan | 1 sampul |
| 2482 | DKP kepada Pemimpin Jawatan Gedung-gedung Bogor: surat tanggal 10 Agustus 1954 tentang rencana pembangunan gedung peristirahatan Wapres dan perluasan Istana Cipanas, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2483 | Trans World Traders Coy kepada Presiden RI: surat tanggal 30 September 1954 tentang perawatan rompi tahan tembus peluru, dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2484 | Sekretaris Jenderal DPR: surat tanggal 12 Maret 1955 tentang permohonan penjelasan mengenai pengiriman buku perundangan yang dibutuhkan oleh Kabinet Presiden. | asli | 1 lembar |
| 2485 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 30 Maret 1955 - 25 September 1957 tentang permohonan izin untuk menggunakan fasilitas Istana Presiden. | asli | 1 sampul |
| 2486 | Kabinet Presiden Republik Indonesia kepada Pengurus Taman Hewan Bandung : surat tanggal 30 Maret 1955 tentang permohonan uncal rusa totol dari Istana Bogor, dengan lampiran. | pertinggal | 2 lembar |
| 2487 | Konperensi Pemuda Demokrat Cabang Sukohardjo: surat pernyataan tanggal 29 Mei 1955 tentang pemasangan gambar Presiden Soekarno yang tidak sesuai antara ukuran dengan tempat/kebutuhan. | asli | 1 lembar |
| 2488 | Kabinet Presiden RI: surat-surat tanggal 5 September 1955 - 7 April 1956 tentang peminjaman permadani istana, dengan lampiran. | asli, pertinggal | 7 lembar |

| | | | |
|------|--|------------------|----------|
| 2489 | Kabinet Presiden kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri Pusat: surat-surat tanggal 21 Januari-19 Maret 1956 tentang penambahan fasilitas-fasilitas di Istana Bogor, dengan lampiran. | pertinggal | 6 lembar |
| 2490 | Menteri PU & T: Surat Keputusan No. G. K. 10/17/5/2 tanggal 4 April 1956 tentang penambahan ruangan istana presiden Bogor, dengan lampiran. | salinan | 2 lembar |
| 2491 | Menteri Perhubungan kepada PMRI: surat tanggal 11 Mei 1956 tentang cartu plane untuk presiden. | tembusan | 1 lembar |
| 2492 | Kabinet Presiden RI: Daftar Inventaris Barang-barang istana presiden Cipanas dan Bogor, Oktober - September 1956. | stensilan | 1 sampul |
| 2493 | Kabinet Presiden RI kepada Percetakan, Kebayoran N. V: surat-surat tanggal 14 Desember 1956, 12 Januari 1957 tentang posisi/peletakan potret Wakil Presiden RI yang sudah mengundurkan diri dari jabatannya tanggal 1 Desember 1957. | asli, pertinggal | 2 lembar |
| 2494 | DKP kepada Dewan Pengawas Keuangan: laporan tanggal 4 November 1957 tentang pertanggungjawaban dari pemimpin Jawatan Gedung-gedung Pusat seksi istimewa Istana-istana Presiden, disertai surat pengantar. | pertinggal | 1 sampul |

IV. BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

| | | | |
|------|---|-----------|-------------|
| 2495 | Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional: Buku kecil Anggaran Dasar BMKN, disertai surat tanggal 27 Maret 1956. | cetak | 1 eksemplar |
| 2496 | Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional: laporan untuk rapat umum BMKN tahun 1854 di Surakarta. | cetak | 1 eksemplar |
| 2497 | Badan Pekerja Dewan Pertimbangan Pusat Pemerintah Militer TT VII Wirabuana: Piagam Liga Bhineka Tunggal Ika, tanggal 2 Juli 1957. | stensilan | 1 lembar |
| 2498 | Badan Penerbit Majalah dan Risalah FA 'Penyebarkan Semangat': Proefdruk Pancasila Kawedar, disertai surat tanggal 7 Desember 1953. | cetak | 1 eksemplar |
| 2499 | Bank Indonesia: Berita No. 2 Triwulan ke-4 tahun 1953, Berita No. 3 Triwulan I dan II tahun 1954, Berita No. 9 Triwulan ke-1 dan ke-2 tahun 1956. | cetak | 3 eksemplar |
| 2500 | Bank Rakyat Indonesia: Berita Bulanan 'Warta Bank Rakyat Indonesia', Maret 1955 | cetak | 2 eksemplar |

| | | | |
|------|---|------------|-------------|
| 2501 | Bank Industri Negara: Prospektus obligasi Bank Industri Negara, 1 September 1955. | stensilan | 1 lembar |
| 2502 | Delegasi Indonesia: Laporan tentang perundingan-perundingan antara utusan RI dan Kerajaan Netherland mengenai misi militer Netherland di Indonesia, tanggal 26 Maret - 21 April 1953. | stensilan | 1 jilid |
| 2503 | Direktur KPRI: Berita-berita tanggal 13 Pebruari , 8, 31 Maret 1952, 1953 tentang Kementerian Perekonomian dan ekonomi luar negeri, disertai surat. | stensilan | 4 eksemplar |
| 2504 | Direktur Kabinet Presiden RI: surat tanggal 28 Januari 1952 tentang pengiriman salinan keputusan-keputusan Presiden untuk keperluan dokumentasi, dengan lampiran. | pertinggal | 3 lembar |
| 2505 | DPP Barisan Pembangunan: Artikel menyambut rapat besar perwira di Jogjakarta oleh B. H. Nur, Pebruari 1955. | asli | 1 lembar |
| 2506 | Gubernur KDH Propinsi Jawa Barat: Daftar Surat Keputusan-Surat Keputusan yang dimuat dalam Berita Propinsi Jawa Barat tahun 1951, disertai surat pengantar. | cetak | 1 berkas |
| 2507 | Ikatan Penderita Cacat Indonesia: Brosur Daya Beli dan Jumlah Perhari, Brosur Bahan Penentuan Pensiun dan Rehabilitasi, Daftar Angka-angka Perbandingan Nilai Pensiun dan Tunjangan lain, 1 Desember 1954. | cetak | 3 eksemplar |
| 2508 | Ikatan Perwira RI: Majalah Bulanan No. 1 Tahun I, 17 Mei 1952. | cetak | 1 eksemplar |
| 2509 | Jajasan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan: Brosur tentang Sumatera Selatan, 10 Nopember 1952, disertai peta. | cetak | 1 eksemplar |
| 2510 | Jawatan Penerangan Daerah Minahasa: Minahasa dari sudut Ekonomi, tanggal 27 Juli 1954. | stensilan | 1 jilid |
| 2511 | Jawatan Pengawas Keselamatan Kerja: Lembaran memuat Undang-Undang tentang aturan-aturan ketetapan guna menuju keamanan di tempat. | cetak | 1 eksemplar |
| 2512 | Jawatan Perumahan Rakyat: Buku ' Pemecahan Masalah Perumahan Rakyat di Indonesia' yang dibawakan dalam pidato pengukuhan Ir. Kusudianto Hadinoto menjadi guru besar di Universitas Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 1955. | cetak | 1 eksemplar |
| 2513 | Jawatan Pendidikan Masyarakat: Brosur No. 15, tanggal 7 Juni 1952 berjudul ' Pendidikan Masyarakat dan Program Kabinet Wilopo'. | cetak | 1 eksemplar |

| | | | |
|------|--|-----------|-------------|
| 2514 | Jepang: Buku ' Daftar Macam Penghargaan Medali' dalam Bahasa Inggris dan Jepang. | cetak | 1 eksemplar |
| 2515 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: artikel 'Perang atau Damai', tanggal 27 Maret 1956. | stensilan | 1 naskah |
| 2516 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Asia Newsletter No. 47 tahun 1947 tentang Bung Karno. NB: Bahasa Inggris | stensilan | 1 lembar |
| 2519 | Kabinet Presiden Republik Indonesia : Berita APB tanggal 18 Nopember 1953. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2518 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita Buku-Buku terbitan partai-partai. | stensilan | 1 sampul |
| 2519 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita Gerakan Assaat tanggal 1 September 1957. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2520 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita Kementerian Penerangan Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1951. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2521 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita Penerangan Rakyat tanggal 17 Nopember 1952. | cetak | 1 eksemplar |
| 2522 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita sekitar perkunjungan Presiden Soekarno ke Sovyet Uni masing-masing dari Malay Mail, Nanyang Siang Pau dan utusan Melayu, 28, 29, 31 Agustus 1956. NB: Bahasa Inggris, Tionghoa, Melayu | asli | 4 jilid |
| 2523 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Berita 'The Associated Press World Service' tanggal 1 - 15 Januari 1959. | stensilan | 1 sampul |
| 2524 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Brosur-brosur keagamaan tanggal 22 Pebruari 1952. NB: Bahasa Inggris. | cetak | 7 lembar |
| 2525 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Brosur 'Jiwa Sosial dan Hidup Gotong Royong' yang disiarkan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam daerah Karesidenan Cirebon, tanggal 5 Agustus 1952. | asli | 3 lembar |
| 2526 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku 'Agama Budha', disertai surat tanggal 8 Juni 1953. NB: Bahasa India | cetak | 2 eksemplar |
| 2527 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku-buku tentang Agama Kristen, tanggal 17 Agustus 1955. | cetak | 2 eksemplar |
| 2528 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku Peringatan Ulang Tahun ke-5 Khong Kauw Hwee Cirebon, 8 April 1950-1956. | cetak | 2 eksemplar |

| | | | |
|------|--|-----------|-------------|
| 2529 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku 'Pidato Ketua Fakultas IPA pada hari Dies Natalis yang ke-IV;'. NB: Bahasa Belanda. | cetak | 1 jilid |
| 2530 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku 'Rencana Piagam Pendirian Bank Koperasi Pers Nasional', 1955. | stensilan | 1 jilid |
| 2531 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buletin 'Malaya Berjuang'. Oktober - Desember 1954. | cetak | 1 eksemplar |
| 2532 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buletin Mingguan 'News Letter September 25 Tahun 1959'. NB: Bahasa Inggris | stensilan | 1 eksemplar |
| 2533 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Daftar Ikhtisar tentang Kabinet-kabinet Republik Indonesia Periode 1945-1952, tanggal 22 Juni 1953. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2534 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku Dasar Pendirian Negara RI (Ideologi Negara untuk anggota Angkatan Perang), tanggal 21 November 1955. | salinan | 1 sampul |
| 2535 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Daftar Peraturan Pemerintah Tahun 1954. | stensilan | 1 sampul |
| 2536 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Daftar Susunan Kabinet-kabinet Lama, tanggal 10 April 1951. | stensilan | 2 eksemplar |
| 2537 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Daftar terbitan-terbitan berkala dari beberapa kementerian, tanggal 7 Oktober 1952. | ketikan | 4 lembar |
| 2538 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Daftar Undang-Undang, UU Darurat, Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan, tahun 1956. | tembusan | 1 lembar |
| 2539 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Diktat ' Bahasa Indonesia Dalam Pengamatan Sehari-hari' oleh J. E. Talengkong. | stensilan | 1 naskah |
| 2540 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Diktat ' Vijf Jaren Nederlands Ekonomisch Herstel, 5 Mei 1950. | stensilan | 1 naskah |
| 2541 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Formasi Kabinet Drees, tanpa tanggal 1952. NB: Bahasa Belanda. | konsep | 1 lembar |
| 2542 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Foto-foto alat untuk membuat loud speaker produksi sendiri (dalam negeri). | - | 5 lembar |
| 2543 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Foto-foto Lustrum Akademi Angkatan Laut di Surabaya. | - | 2 lembar |
| 2544 | Kabinet Presiden Republik Indonesia:Foto-foto Perjuangan Rakyat. | - | 1 sampul |

| | | | |
|------|--|-----------|-------------|
| 2545 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Grafik tentang Indonesia, 1954. NB: gambar tangan. | asli | 1 lembar |
| 2546 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Guntingn Koran 'Die Zeit' tentang Berita mengenai Indonesia, tanggal 16, 20 dan 27 Maret 1952. NB: Bahasa Jerman | copy | 3 lembar |
| 2547 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Ichtisar tentang Negara Philipina Jakarta 1951, tanggal 23 Januari 1951. | stensilan | 2 naskah |
| 2548 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Ichtisar mengenai telegram-telegram dan surat yang diterima di Kabinet Presiden berhubung dengan pembentukan kabinet baru menurut keadaan 10 Juni-15 Juli 1953. | stensilan | 2 jilid |
| 2549 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Indian Daily News, tanggal 19 Pebruary - 27 April 1953. NB: Bahasa Inggris | stensilan | 4 lembar |
| 2550 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Klipping tentang Irian dan New Guenea, disertai surat pengantar tanggal 29 Januari 1951. NB: Bahasa Inggris. | asli | 2 lembar |
| 2551 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Konsep Buku 'The Universal Republik of The Creation and its Lows'. NB: Bahasa Inggris | stensilan | 81 halaman |
| 2552 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Kutipan dari Buku Nederland en de Islam oleh DR. C. Snouch Hungronje. | stensilan | 1 lembar |
| 2553 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Laporan peninjauan di Indonesia (Jawa Tengah dan Sumatera Selatan), Desember 1951 - Maret 1952. | stensilan | 3 jilid |
| 2554 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Leaflet 'Rule of Gold', disertai surat pengantar tanggal 7 Desember 1954. NB: Bahasa Inggris | cetak | 1 eksemplar |
| 2555 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No. 1 Tahun 1957, disertai surat pengantar, tanggal 19 September 1957. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2556 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Majalah 'Huisvrouw No. 4 Agustus 1951'. | cetak | 1 eksemplar |
| 2557 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Majalah tentang nature rubber (karet alam) tahun 1953. NB: Bahasa Inggris dan Perancis. | cetak | 1 eksemplar |
| 2558 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Majalah 'Djojo Bojo', tanggal 27 Maret 1955. NB: Bahasa Jawa. | cetak | 1 eksemplar |
| 2559 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Majalah 'Kota Besar', tanggal 1 Desember 1952. | cetak | 1 eksemplar |

| | | | |
|------|---|-----------|-------------|
| 2560 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Buku <i>Overall Political Agreement Submitted by The Australia & The United States Delegations</i> 1950. | stensilan | 1 jilid |
| 2561 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Pemandangan Umum tentang perjanjian kerja kolektif yang diajukan oleh PWI. | stensilan | 3 lembar |
| 2562 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Pidato Ibu Fatmawati Sukarno pada kongres ke-4 di Jogjakarta, tanggal 18 Juli 1955, disertai surat. | stensilan | 1 lembar |
| 2563 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: <i>Nederlands Nieuwe</i> , tanggal 23 April 1955. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2564 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Naskah Tiga Undang-Undang Dasar, diterbitkan oleh Mr. A. K. Pringgodigdo. | stensilan | 1 sampul |
| 2565 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: <i>Reports of Committees General Assembly VIIIth United Nations New York</i> 1953. | stensilan | 1 jilid |
| 2566 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Ringkasan Susunan Kabinet-kabinet Republik Indonesia, tanggal 25 Maret 1955. | stensilan | 1 berkas |
| 2567 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: RRI - Monitoring Service; siaran dalam dan luar negeri, Tanggal 9 September 1950. | stensilan | 1 sampul |
| 2568 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Siaran Kilat No. 2 - 5 Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Pebruari dan 1 Maret 1955, disertai pengantar. | asli | 5 lembar |
| 2569 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Surat Kabar 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 10 dan 11 April, 15 Mei 1951. | cetak | 2 eksemplar |
| 2570 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Sejarah Pemerintahan RI sampai 1953 tentang pembentukan kabinet. | stensilan | 1 sampul |
| 2571 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Teks Pidato beberapa pejabat RI di PBB Oktober 1957. N.B. Dalam Bahasa Inggris | stensilan | 3 lembar |
| 2572 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: <i>Trade Agreement Dagang Indonesia-Norwegia</i> , tanggal 22 Mei 1951. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 1 naskah |
| 2573 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: <i>United States Information Service</i> , 14 Juni 1954. | cetak | 1 eksemplar |
| 2574 | Kabinet Presiden Republik Indonesia: Warta berita pers Biro Indonesia Bulan Maret, April, Juli 1956, 24 dan 25 Pebruari 1957. | stensilan | 5 eksemplar |
| 2575 | Kantor Pusat Statistik: Berita Ringkas No. 1 dan 3 Bulan April 1951 tentang ekspor hasil yang terpenting dari Indonesia. | cetak | 2 berkas |

| | | | |
|------|---|-----------|--------------|
| 2576 | Kantor Pusat Statistik: Ichtisar Bulanan, Maret 1951 tentang harga beras. | cetak | 2 eksemplar |
| 2577 | Kedutaan Amerika Serikat: Berita pers dan Radio Rusia mengenai Indonesia, dengan lampiran. NB: Bahasa Inggris. | asli | 1 sampul |
| 2578 | Kedutaan Republik Indonesia di New Delhi: berita khusus Indonesia, tanggal 18 April 1956. | cetak | 1 eksemplar |
| 2579 | Kedutaan Republik Indonesia di Roma: Ikhtisar pers 2 x sebulan, tanggal 1 Desember 1953-Mei 1954. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 5 eksemplar |
| 2580 | Kedutaan Besar RI di Washington DC: Laporan Mingguan tentang Ekonomi Amerika Serikat, tanggal 26 Juni - 2 Juli 1956 dan 3 Juli - 9 Juli 1956. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2581 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Buku Pendidikan Masyarakat dan Program Kabinet Wilopo, tanggal 7 Juni 1952. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2582 | Kem. PP & K : Diktat Pelajaran Bahasa Indonesia. | cetak | 2 eksemplar |
| 2583 | Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Majalah Bulanan ' Suara Pendidikan Masyarakat' Bulan Juni - Juli 1955. | cetak | 1 eksemplar |
| 2584 | Kementerian Pertahanan RI: Berita, tanggal 6 Pebruari, 25 Maret 1952 tentang tinjauan dalam dan luar negeri, suara pers dan masyarakat, berita dan catatan militer. | stensilan | 1 berkas |
| 2585 | Kementerian Kesehatan RI: Berita Hygiene Bulan Nopember 1950 - Maret 1952. | cetak | 5 eksemplar |
| 2586 | Kementerian Kesehatan RI: Buku Berita Tuber Culosea Indonesiensis, disertai surat pengantar tanggal 15 April 1954. | cetak | 1 eksemplar |
| 2587 | Kementerian Kesehatan RI: Buku-buku dari WHO tentang hasil study kesehatan di Indonesia, disertai surat. | stensilan | 2 eksemplar |
| 2588 | Kementerian Luar Negeri RI: Berita 'Asia Di mata Dunia', tanggal 15 Agustus 1954. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2589 | Kementerian Luar Negeri : Berita 'Indonesia Di Mata Dunia' Bulan Januari - Nopember 1952, Januari, Desember 1954. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 16 eksemplar |
| 2590 | Kementerian Luar Negeri: Kutipan Surat Kabar New York 'Herald Tribune' tanggal 15 Januari 1955 tentang Indonesia, disertai surat pengantar. NB: Bahasa Inggris | salinan | 2 lembar |
| 2591 | Kementerian Penerangan RI: Dokumena Informasia No. 190 Th/ IV. 1953. | cetak | 1 jilid |

| | | | |
|------|---|-----------|-------------|
| 2592 | Kementerian Penerangan RI: Berita 'Detik dan Peristiwa Nasional' No. 46 Tahun 1959. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2593 | Kementerian Penerangan : Berita Ichtisar Parlemen, tanggal 12 April 1951. NB: Bahasa Belanda | cetak | 1 eksemplar |
| 2594 | Kementerian Penerangan : Berita Pers No. 1/OPP/1955, No.6, No. 22 Bulan Mei, September 1955 dan Pebruari 1957. | stensilan | 3 eksemplar |
| 2595 | Kementerian Penerangan: Buku ' <i>The Only War We Seek</i> ', dengan lampiran. | asli | 3 lembar |
| 2596 | Kementerian Penerangan: Kumpulan berita tentang peristiwa 17 Oktober 1952. | stensilan | 1 jilid |
| 2597 | Kementerian Penerangan: Kumpulan berita 'Dokumenta Informasia' No. 221 dan 222 tahun 1959. | stensilan | 2 eksemplar |
| 2598 | Kementerian Penerangan: Kutipan dari berita Antara tanggal 5 Juni 1951 tentang New York Times cela politik Sukirman, disertai surat pengantar. | cetak | 2 lembar |
| 2599 | Kementerian Penerangan: Siaran Radio Moskow, tanggal 15 dan 16 Maret 1953. | kutipan | 1 sampul |
| 2600 | Kementerian Penerangan: Laporan Dinas Harian No. 511, tanggal 6 Oktober 1951. | stensilan | 1 sampul |
| 2601 | Kementerian Penerangan: laporan Dinas Harian No.866, tanggal 12 Desember 1952. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2602 | Kementerian Penerangan: Majalah Dokumen Informasi No. 224 Tahun 1958. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2603 | Kementerian Penerangan: Makalah tentang 'Pemerintah dan Pers' dalam rangka <i>Peringatan De Cenurium I PWI</i> tanggal 10 Pebruari 1956 oleh Harjoto Joedoaatmodjo. | stensilan | 1 naskah |
| 2604 | Kementerian Penerangan: Pidato Moh. Natsir, Ketua Masyumi pada hari <i>Iqbal</i> tanggal 21 April 1953. | stensilan | 1 sampul |
| 2605 | Kementerian Penerangan: Surat Kabar 'Pedoman', tanggal 11 Januari 1952 tentang soal Soekarno dan Irian. | kutipan | 1 lembar |
| 2606 | Kementerian Perburuhan RI: Kumpulan Peraturan-peraturan perburuhan, tanggal 1 Pebruari 1957. | stensilan | 1 lembar |
| 2607 | Kementerian Perburuhan RI: Majalah Tinjauan Masalah Perburuhan, September 1957. | cetak | 1 eksemplar |

| | | | |
|------|--|-----------|--------------|
| 2608 | Kementerian Perburuhan RI: Sambutan Menteri Perburuhan menjelang 1 Mei 1957. | stensilan | 1 lembar |
| 2609 | Kementerian Pertanian: Berita Kantor Karet Rakyat Pusat No. 1 Januari 1952, disertai surat. | stensilan | 1 berkas |
| 2610 | Kepala Jawatan Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor: Laporan, tanggal 14 Pebruari 1952 tentang margasatwa P. Pamaitan (Prensenseland), disertai surat pengantar. NB: Bahasa Belanda. | stensilan | 1 naskah |
| 2611 | Kepala Kantor Karet Rakyat: Berita Kantor Rakyat Pusat No. 1 Januari 1952 tentang 'Tinjauan Singkat Kedudukan Getah Karet Rakyat'. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2612 | Komando Kesatuan Aksi SBIM Tegal I dan II: Siaran Harian No. 8/KKA/T/52 tentang 'Siapa Bilang Pemogokan SBIM Tidak Sah?', dengan lampiran. | asli | 2 lembar |
| 2613 | Komisaris Tinggi Nederland: Berita 'Nederlands Nieuws', tanggal 14 Juli 1952, 30 Juli 1955. NB: Bahasa Belanda. | cetak | 1 eksemplar |
| 2614 | Konstituante RI: Ihktisar Bulanan Desember 1957 tentang harapan masyarakat sekitar pembentukan UUD. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2615 | Kuasa Usaha a.i URSS di Indonesia: Majalah 'Hoeboe Bpemr', tanggal 1 Nopember 1957. NB: Bahasa Rusia. | cetak | 1 eksemplar |
| 2616 | Lembaga Penyelidikan Masyarakat dan Ekonomi: Teks ceramah Dr. N. Keyfitz berjudul 'Population: The Dynamics Factor in Indonesian Development', tanggal 26 Nopember 1953. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 2 lembar |
| 2617 | Majelis Penerangan Negara Islam Indonesia: Naskah Manifesto politik Negara Islam Indonesia karangan I. Huda mengenai Indonesia Kini dan Kelak. | asli | 1 sampul |
| 2618 | Menteri Keuangan: Laporan devisem tentang perkembangan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri, tanggal 1 Nopember 1952. | cetak | 1 jilid |
| 2619 | Ministerie van Buitenlandse Zaken: Berita <i>Nieuwsbrief</i> tanggal 12 Oktober - 27 Nopember 1953. NB: Bahasa Belanda | cetak | 16 eksemplar |
| 2620 | Organisasi pemuda/pelajar Hindu Bali: Buku Programa Konperensi Angkatan Muda Hindu Bali, tanggal 28 - 31 Juli 1957. | cetak | 1 eksemplar |
| 2621 | Benedicto Padillah, Free Enterprise Society of the Phillippines: Naskah tanggal 30 Mei 1955 berjudul 'The Road to Communism', disertai surat pengantar. | salinan | 1 naskah |

| | | | |
|------|--|-----------|-------------|
| 2622 | Penerbit AB. Siti Syamsiah: Brosur 4 Januari 1955 tentang pemberitahuan penerbitan buku-buku penting. | stensilan | 1 lembar |
| 2623 | Percetakan Negara: Buku Sepintas Lalu Percetakan Negara Jakarta 1 Desember 1952. | cetak | 1 eksemplar |
| 2624 | Perkumpulan Bank-bank Nasional: Laporan sidang tertutup Konperensi Pendahuluan Bank-bank Nasional Indonesia. Tanggal 27 Mei 1952. | cetak | 1 eksemplar |
| 2625 | Perpustakaan Kantor Pusat Statistik: Daftar tambahan buku-buku dan tahunan bulan Desember 1951. | stensilan | 1 berkas |
| 2626 | Perusahaan Ahli Aliran Listrik: Buku Rencana Pembangunan Pusat-pusat Aliran Listrik. | stensilan | 1 eksemplar |
| 2627 | Portuguese Legation: Berita-berita tahun 1957 tentang laporan dari luar negeri. NB: Bahasa Inggris. | stensilan | 3 lembar |
| 2628 | Sekretariat Permanen Konperensi Walikota-walikota I : Berita-berita no. 3 tanggal Januari, Pebruari 1957. | cetak | 2 eksemplar |
| 2629 | A. Soenarjo: Peta Ikhtisar Daerah Transmigrasi Sukadana (Res. Lampung), 1952. | - | 1 lembar |
| 2630 | Sunarto, Pekerjaan Umum Propinsi Jateng: Artikel, tanggal Usaha Menjaga Prestasinya, disertai surat pengantar. | tembusan | 2 lembar |
| 2631 | Trengkas Melayu Institut : Buku Stenografi, disertai surat tanggal 17 Agustus 1953. | stensilan | 1 berkas |
| 2632 | Unilever van den Bergh's en Jurgen's Fabrieken N.V. : Buku-buku laporan tahunan 1951. NB: Bahasa Inggris. | cetak | 2 eksemplar |
| 2633 | White Island Organisation: Prospektus, tanggal: 28 Desember 1954 tentang usaha wanita dan anak-anak dari akibat perang, dengan lampiran. NB: Bahasa Inggris, Jerman, Perancis. | cetak | 2 eksemplar |
| 2634 | Yayasan Kebaktian Pejuang: Warta lukis tentang Yayasan Pejuang. | cetak | 2 lembar |
| 2635 | Yayasan Cinta Tanah Air: Diktat tentang 'Pandangan Umum dalam Musyawara Nasional Pelayaran. | stensilan | 2 naskah |

k

